



**Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 12 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas
Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 8 Tahun 2016
Tentang RPJMD Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016 - 2021**



Terwujudnya Masyarakat Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera



BUPATI REJANG LEBONG

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan organisasi perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, serta penyesuaian dengan perubahan kebijakan nasional, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 perlu diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam hal terjadi perubahan yang mendasar maka rencana pembangunan daerah dapat diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021.
- Meningat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 58 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 117);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 117), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

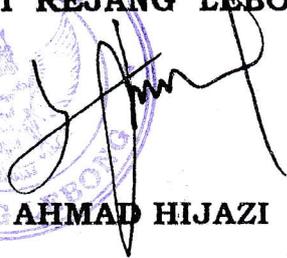
- BAB I Pendahuluan;
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis;
BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
BAB VIII Indikasi Program Prioritas Beserta Kerangka Pendanaan;
BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
- (2) RPJMD beserta isi dan matriknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 25 Oktober 2017


BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 25 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 130
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI
BENGKULU : (12/83/2017).

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	7
1.3.1. Konsistensi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dengan RPJPD Kab. Rejang Lebong	8
1.3.2. Konsistensi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dengan RPJMD Provinsi	10
1.3.3. Konsistensi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dengan RPJMN	11
1.3.4. Konsistensi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dengan RTRW Kabupaten Rejang Lebong	12
1.4. Sistematika	14
1.5. Maksud dan Tujuan	16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	17
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	19
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	25
2.1.4. Demografi	27
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	28
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	35
2.2.3. Fokus Seni dan Budaya	43
2.2.4. Fokus Bidang Pengelolaan Keuangan	43
2.3. Aspek Pelayanan Umum	
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	43
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan	46
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah	50
2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	52
2.4.3. Iklim Berinvestasi	52
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	54
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	57
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	58
3.1.2. Neraca Daerah	68
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	78
3.2.1. Proporsi Pengguna Anggaran	78
3.2.2. Analisa Pembiayaan	79
3.3. Kerangka Pendanaan	82

	3.3.1. Analisis Pengeluaran Priodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama.....	82
	3.3.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2016-2021	83
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	
	4.1. Indentifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	91
	4.1.1. Permasalahan Bidang Infrastruktur	91
	4.1.2. Permasalahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	96
	4.1.3. Permasalahan Bidang Kualitas Sumber Daya Manusia	99
	4.1.4. Permasalahan Bidang Pengelolaan Pemerintah	104
	4.1.5. Bidang Sumber Daya Alam	106
	4.1.6. Bidang Lingkungan Hidup	107
	4.2. Isu-Isu Strategis Kabupaten Rejang Lebong	107
	4.2.1. Isu Strategis Bidang Infrastruktur	108
	4.2.2. Isu Strategis Bidang Kesejahteraan Masyarakat	108
	4.2.3. Isu Strategis Bidang Kualitas Sumber Daya Manusia.....	109
	4.2.4. Isu Strategis Bidang Pengelolaan Pemerintah	109
	4.2.5. Isu Strategis Bidang SDA Dan Lingkungan Hidup	109
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
	5.1. Visi	120
	5.2. Misi	123
	5.3. Tujuan dan Sasaran	124
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	6.1. Strategi	162
	6.2. Arah Kebijakan	162
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	208
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS	253
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	325
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	
	10.1. Pedoman Transisi.....	334
	10.2. Kaidah Pelaksanaan	335
	10.3. Penutup.....	336

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal
1.1	Sinkronisasi antara Misi RPJPD dan Misi RPJMD	9
1.2	Konsistensi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dengan RPJMD Provinsi Bengkulu	10
1.3	Konsistensi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dengan RPJMN	11
2.1	Luas Wilayah & Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016	19
2.2	Obyek Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016	24
2.3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, & Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016	27
2.4	Rasio Jumlah Penduduk yang Memiliki Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 - 2015	28
2.5	PDRB, Jumlah Penduduk, PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011–2015	28
2.6	Perbandingan PDRB Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu Tahun 2011 – 2015	29
2.7	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 - 2015	30
2.8	Profil Kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 - 2016	31
2.9	Inflasi Tahunan Provinsi Bengkulu Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2012 - 2016	32
2.10	Indeks Gini di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 - 2015	34
2.11	Angka Kriminalitas Yang Tertangani Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016	35
2.12	Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 – 2016	36
2.13	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Menurut Kabupaten / Kota Se Provinsi Bengkulu Tahun 2010–2016	37
2.14	Angka Partisipasi Kasar (APK) & Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 - 2016	39
2.15	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015	42
2.16	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Untuk Pendidikan dasar & Menengah di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 - 2015	44
2.17	Rasio Guru/Murid menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015 s.d 2016 Kabupaten Rejang Lebong	45
2.18	Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 - 2015	46
2.19	Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 - 2015	46
2.20	Data Luas Panen Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan dan Palawija Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015	47
2.21	Data Luas Panen Produksi dan Produktifitas Tanaman Hortikultura Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015	48
2.22	Data Luas Tanam Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015	48

2.23	Data Populasi Ternak di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2015	49
2.24	Luas Usaha Perikanan Darat di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2013-2015	50
2.25	Pengeluaran Rata – rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Rejang Lebong (Rupiah) Tahun 2014 - 2016	51
2.26	Pengeluaran Rata – rata Perkapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong (Rupiah) Tahun 2014 - 2016	51
2.27	Panjang Jalan Menurut Tingkat Pemerintah Yang Berwenang di Kabupaten Rejang Lebong, 2014 dan 2015 (km)	52
2.28	Iklim Berinvestasi Tahun 2013 s/d 2016	53
2.29	Profil Angkatan Kerja di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012-2015	54
2.30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015	55
3.1	Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011-2015	59
3.2	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 – 2016	61
3.3	Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 - 2016	62
3.4	Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	63
3.5	Target Dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	64
3.6	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	64
3.7	Target Dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	65
3.8	Target Dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	66
3.9	Target Dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	66
3.10	Target Dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	67
3.11	Target Dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	67
3.12	Target Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	68
3.13	Target Dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Hibah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	68
3.14	Neraca Tahun 2011 s.d 2016	69
3.15	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	70
3.16	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	71
3.17	Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	71
3.18	Target dan Realisasi Belanja Subsidi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	72
3.19	Target dan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	72

3.20	Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	73
3.21	Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	73
3.22	Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	74
3.23	Target dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	74
3.24	Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	75
3.25	Target dan Realisasi Belanja Pegawai Pada Langsung Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	75
3.26	Target dan Realisasi Belanja Barang Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	76
3.27	Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	76
3.28	Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	77
3.29	Rincian Target dan Realisasi SiLPA Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	78
3.30	Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	78
3.31	Deposit Riil Anggaran Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	80
3.32	Komposisi Penutup Deposit Rill Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	80
3.33	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	81
3.34	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Meningkatkan Serta Prioritas Utama Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 – 2016	82
3.35	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021	88
3.36	Proyeksi Belanja Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021	89
3.37	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021	90
4.1	Kondisi Jalan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015	92
4.2	Panjang Jalan Menurut Tingkat Pemerintah yang berwenang di Kabupaten Rejang Lebong 2014 dan 2015 (Km)	93
4.3	Kesenjangan Klasifikasi Desa berdasarkan IPD Tahun 2014 di Provinsi Bengkulu	95
4.4	APS dan APts Kabupaten Rejang Lebong	100
4.5	APM dan APK Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016	100
4.6	IDG di Provinsi Bengkulu Tahun 2014	102
4.7	Luas Lahan Persawahan di Provinsi Bengkulu tahun 2010-2015	107
4.8	Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah	110
5.1	Rumusan Sasaran Dan Indikator Kinerja Sasaran	126
5.2	Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	143
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan	169
6.2	Keselarasan Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	177
7.1	Sasaran Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021	216
7.2	Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah	239

8.1	Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RPJMD 2016-2021 Kabupaten Rejang Lebong	255
8.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan	257
8.3	Keselarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah	323
9.1	Penetapan Indikator Kinerja	326

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Hal
1.1	Diagram Alir Penyusunan RPJMD	3
1.2	Diagram Hubungan Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan	8
2.1	Peta Administrasi Kabupaten Rejang Lebong	17
2.2	Luas Panen Pada Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 - 2015	21
2.3	Perkebunan	23
2.4	Tingkat Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2012 – 2016 (%)	32
4.1	Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2015	94
4.2	Perbandingan Kendaraan Di Kabupaten Rejang Lebong	94
4.3	Disparitas Kemiskinan di Provinsi Bengkulu Tahun 2014	96
4.4	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 (%)	97
4.5	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu	98
4.6	Perbandingan Angka Rata Rata Lama Sekolah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong	99
4.7	Usia Harapan Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2014	101
4.8	AKB di Provinsi Bengkulu	102
4.9	IPM Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu	104



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Kepada Pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2006 - 2025 yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyiapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, selanjutnya pada Pasal 15 menjelaskan bahwa Rancangan Awal RPJMD 2016-2021 yang telah disusun oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD).

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perlu diselenggarakan Musrenbang Perubahan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Awal RPJMD 2016-2021 sebagai bahan pembahasan pokok. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD bertujuan untuk (1) Mendukung koordinasi lintas pelaku pembangunan; (2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi; (3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam kurun waktu jangka menengah selama lima tahun ke depan.

Dengan perhatian pada semangat partisipatif yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan dokumen Perubahan RPJMD 2016-2021 perlu dilakukan secara partisipatif dengan memastikan kesepahaman dan komitmen bersama dari para pengambil

keputusan dan pelaksana kebijakan publik terutama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dengan melibatkan peran serta dan kontribusi lintas pelaku lainnya seperti kalangan dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat yang mewakili aspirasi masyarakat madani (*civil society*) di tingkat Povinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 50 menyatakan bahwa :

(1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. Merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berkaitan dengan hal di atas, maka yang menjadi landasan Perubahan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 dikarenakan terjadi perubahan yang mendasar yaitu :

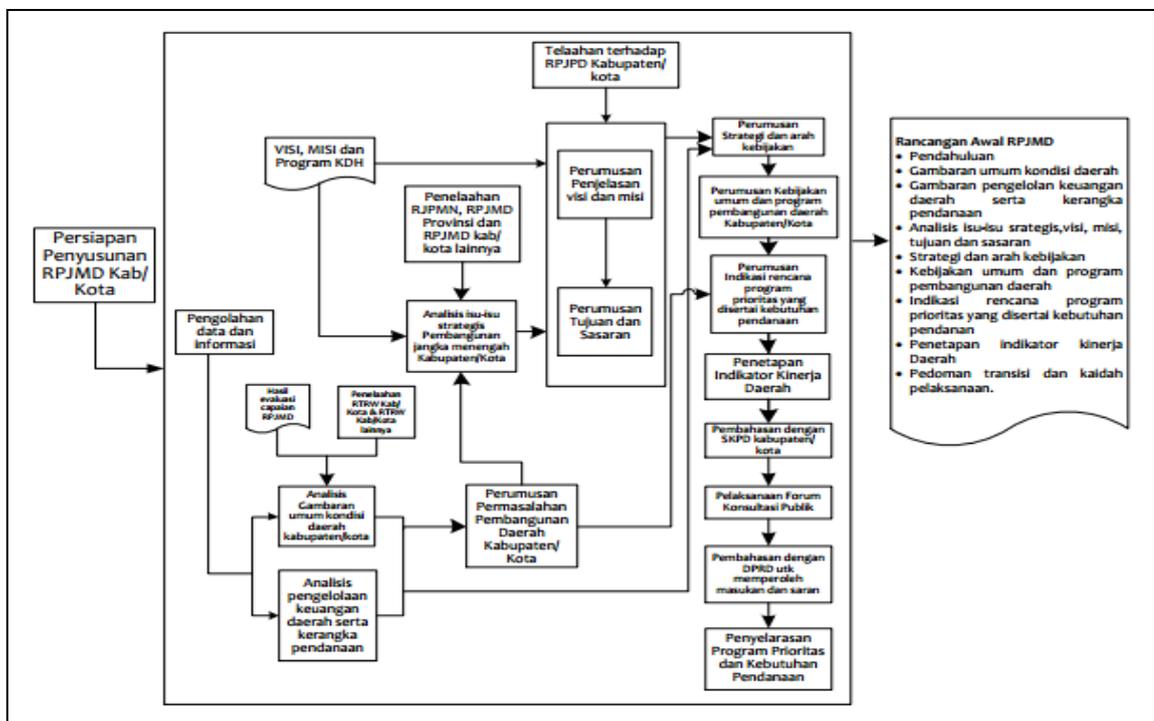
1. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2016 yang masih menggunakan nomenklatur perangkat daerah yang lama.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan Pemerintah daerah untuk melakukan pembentukan perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 17 Desember 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
4. Terbitnya Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019.
5. Penyesuaian substansi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 terhadap 5 (lima) Program Prioritas Gubernur Bengkulu.

6. Penyesuaian komitmen Pemerintah dalam melaksanakan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Keenam hal tersebut menjadi dasar untuk dilakukannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021.

Selain RPJPD, RPJMD yang disusun juga memperhatikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012-2032. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program pemanfaatan ruang.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan analisis setiap urusan pembangunan, penjangkaran aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Diagram Alir Penyusunan RPJMD

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Kajian RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang –Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
30. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019;

31. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 – 2032.

1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

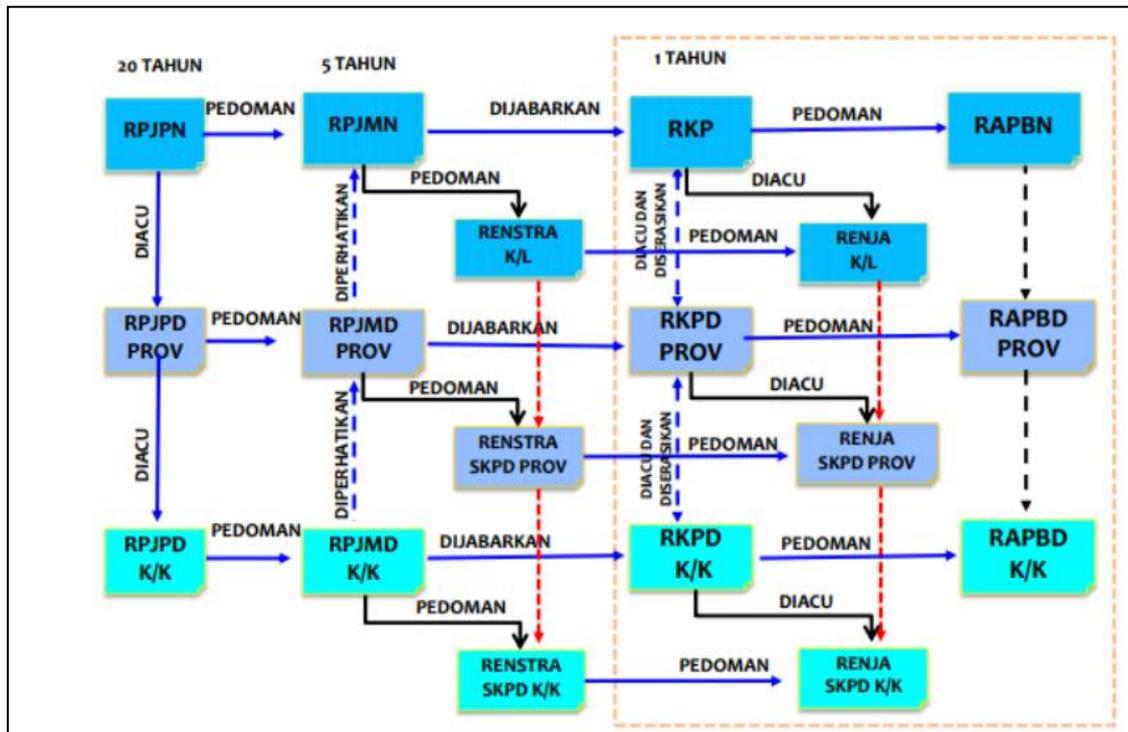
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang terarah, sinergis dan berkesinambungan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran, yaitu: RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya perpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Bengkulu. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yakni RKPD sekaligus menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra PD. Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. RKPD dan RKA PD inilah yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan APBD.

Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkhis, artinya dokumen yang memuat jangka waktunya lebih panjang menjadi acuan bagi dokumen yang memuat jangka waktunya lebih pendek. Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tingkatnya lebih tinggi menjadi rujukan bagi pemerintah dibawahnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RPJMD merupakan satu sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, RPJMD Tahun 2016–2021 disusun mengacu pada RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Propinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 serta RTRW Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032.

Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana Gambar berikut:



Gambar 1.2 Diagram Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.3.1 Konsistensi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dengan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025. Konsistensi antara RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dengan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat dengan menyandingkan antara, visi dan misi dalam RPJMD dengan visi dan misi dalam RPJPD.

Visi RPJPD	Terwujudnya masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Damai
Visi RPJMD	Terwujudnya masyarakat Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera

Sekilas ada sedikit perbedaan, namun sebenarnya ada kesamaan semangat. Visi dalam RPJMD sifatnya melengkapi dan memperkuat visi dalam RPJPD. Makna kata Maju dan Damai dalam RPJPD sudah tersirat dalam makna sejahtera dan Taqwa dalam visi RPJMD, yaitu kemampuan mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang ditandai

dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama, dapat beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing, hidup secara harmonis dan saling toleransi. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra sejahtera, pemenuhan kebutuhan pokok, masyarakat tentang pangan, sandang dan papan.

Tabel 1.1
Sinkronisasi antara Misi RPJPD dan Misi RPJMD

NO	MISI RPJPD	MISI RPJMD
1.	Mewujudkan masyarakat Maju dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas Pendidikan yang merata dan berkeadilan. - Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas adil dan merata
2	Mewujudkan masyarakat Sejahtera melalui optimalisasi sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang berdaya saing. - Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Bersinergi yang berberwawasan lingkungan
3	Mewujudkan masyarakat yang damai, nilai-nilai luhur budaya lokal yang berkembang dan tata pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan pelestarian nilai-nilai agama dan budaya dalam melandasi pelaksanaan pembangunan - Mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
4	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan berdaya saing. - Mewujudkan pembangunan yang Merata dan Bersinergi yang berwawasan lingkungan

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa antara RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dengan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong sangat erat kaitannya, bahkan

secara eksplisit misi pada RPJMD merupakan turunan (*break down*) dari misi yang ada pada RPJPD.

1.3.2 Konsistensi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Dengan RPJMD Provinsi

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 juga memperhatikan keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021. Konsistensi ini dapat dilihat dari keselarasan antara enam tujuan dalam RPJMD dengan lima agenda prioritas dalam RPJMD Provinsi, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.2

Konsistensi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dengan RPJMD Provinsi Bengkulu

NO	TUJUAN DALAM RPJMD	AGENDA PRIORITAS DALAM RPJMD PROVINSI
1	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan masyarakat	1. Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
2	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bidang pendidikan masyarakat	2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim & Hilirisasi
3	Mewujudkan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam meningkatkan pendapatan daerah	3. Pengembangan Infrastruktur Strategis & Industrialisasi
4	Mewujudkan masyarakat beriman dan berbudaya	4. Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
5	Melaksanakan revormasi birokrasi untuk mewujudkan <i>clean government</i> dan <i>good governance</i>	5. <i>Visit 2020 Wonderful</i> Bengkulu
6	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan perhubungan yang terintegrasi serta informasi yang berkualitas guna peningkatan produktifitas ekonomi dan pelayanan dasar	

Tabel diatas memperlihatkan keterkaitan antaran tujuan dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 dengan agenda prioritas Propinsi Bengkulu yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.

1.3.3 Konsistensi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Dengan RPJMN

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 juga memperhatikan sembilan agenda prioritas dalam RPJMN. Konsistensi ini dapat dilihat dari keterkaitan antara enam tujuan dalam RPJMD dengan Sembilan agenda prioritas dalam RPJMN, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.3

Konsistensi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dengan RPJMN

NO	TUJUAN DALAM RPJMD	AGENDA PRIORITAS DALAM RPJMN
1	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan masyarakat	Butir kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia
2	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bidang pendidikan masyarakat	Butir kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia
3	Mewujudkan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam meningkatkan pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Butir keenam: Menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian dalam pengelolaan sumber daya alam. - Butir ketujuh : Mewujudkan kemandiri ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik.
4	Mewujudkan masyarakat beriman dan berbudaya	<ul style="list-style-type: none"> - Butir kelima : Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia - Butir kedelapan : Melakukan revolusi karakter bangsa
5	Melaksanakan revormasi birokrasi untuk mewujudkan clean goverment dan <i>good governance</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Butir kedua : Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelolah pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis. - Butir keempat : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan revormasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

6	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan perhubungan yang terintegrasi serta informasi yang berkualitas guna peningkatan produktifitas ekonomi dan pelayanan dasar.	<ul style="list-style-type: none"> - Butir ketiga : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. - Butir keenam : meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asialainnya.
---	--	---

1.3.4 Konsistensi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Dengan RTRW Kabupaten Rejang Lebong

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai struktur dan pola tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 - 2032.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong dimaksudkan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha serta swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral dan daerah.

Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menciptakan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi wilayah yang berbasis pengembangan agro dan pariwisata.

1.3.4.1 Struktur Ruang Wilayah

- a) Pusat Kegiatan Kota Curup dengan fungsi wilayah sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa serta permukiman.
- b) Pusat Kegiatan Lokal yang berada di Kota Padang sebagai kawasan industri *manufacturing* dengan komoditas unggulan berupa kopi dan aren serta Air Duku (Selupu Rejang) sebagai pusat Kota Terpadu Mandiri (KTM) Agropolitan.
- c) Sistem Jaringan Transportasi utama berupa jalan arteri primer yang menghubungkan wilayah dengan wilayah luas (Jalan dari Kota Curup melalui

Air Duku (Kec. Selupu Rejang), Beringin Tiga (Kec. Sindang Kelingi), Kec. Padang Ulak Tanding menuju Ke Lubuk Linggau). Diikuti dengan jaringan rel Kereta Api dengan simpul kereta api berada di Kecamatan Kota Padang.

- d) Sistem Jaringan Prasarana umumnya berada sepanjang jalan utama yang didistribusikan ke masing-masing bagian wilayah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.
- e) Keberadaan fasilitas umum dan sosial tersedia, baik dalam skala pelayanan wilayah maupun lingkungan. Fasilitas umum yang berskala Kabupaten atau melayani beberapa Kecamatan seperti RSUD, Telkom, PLN (Cabang), PDAM, perbankan terdapat di Kota Curup dan Selupu Rejang.

1.3.4.2 Pola Ruang Wilayah

Pola ruang eksisting wilayah pada umumnya terdiri dari :

- a) Kawasan Hutan Lindung yang terdiri dari Hutan Lindung Bukit Daun, Bukit Basa dan Bukit Balai Rejang yang terdapat di bagian Selatan wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- b) Kawasan Konservasi yang sebagian besar merupakan kawasan pelestarian alam seperti Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam.
- c) Kawasan Perkebunan dan Pertanian dengan dominasi pemanfaatan ruang untuk perkebunan aren, kopi, kelapa sawit dan karet, pertanian hortikultura (sayuran) dan sebagian kecil tanaman pangan.
- d) Kawasan Pariwisata dengan dominasi wisata alam dan wisata agro.

1.3.4.3 Kawasan Rawan Bencana

Resiko bencana sesuai kondisi geologi dan resiko bencana akibat perubahan lingkungan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong antara lain adalah berupa gempa bumi, letusan gunung api dan gerakan tanah.

- a) Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, khususnya wilayah bagian barat, yang berada pada jalur Sistem Sesar Sumatera (Sesar Ketaun dan Sesar Musikeruh yang merupakan jalur patahan utama).
- b) Keberadaan gunung api Bukit Daun (2467 m.dpl), Bukit Lalang (1306 m.dpl), Bukit Kelang (1959 m.dpl), Bukit Kaba (1938 m.dpl), Bukit Besar (1853 m.dpl) dan Bukit Balai (1683 m.dpl). Wilayah yang termasuk dalam Daerah Bahaya dan Daerah Waspada untuk gunung Bukit Daun adalah wilayah

bagian barat dari kecamatan Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya, sedangkan untuk gunung Bukit Kaba adalah wilayah bagian selatan dari kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi, dan Sindang Dataran. Selanjutnya, lokasi Daerah Bahaya dan Daerah Waspada untuk gunung Bukit Besar berada di bagian selatan dari wilayah kecamatan Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Iir dan Kota Padang serta bagian timur dari Kecamatan Sindang Dataran.

- c) Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan maka gerakan tanah pada umumnya terjadi pada sempadan sungai atau tebing-tebing dengan kemiringan lereng yang relatif terjal dan disusun oleh masa batuan atau tanah hasil lapukan batuan breksi, lava andesit-basalt, tuf dan breksi gunung api yang bersifat lepas-lepas sehingga mudah longsor. Daerah yang berpotensi untuk terjadinya gerakan tanah adalah di sepanjang aliran sungai atau tebing-tebing yang relatif terjal di wilayah bagian utara Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Iir, dan Kota Padang, serta pada tebing-tebing sepanjang jalan negara di wilayah Kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi dan Binduriang.

1.3.4.4 Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang sedang dihadapi oleh wilayah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

Rendahnya pengelolaan kawasan lindung yang ada terutama di Kawasan Rejang Lebong Utara dan Rejang Lebong Selatan, serta kawasan sempadan sungai. Hal ini mengakibatkan penurunan luas kawasan resapan air, dan sedimentasi yang tinggi.

1.4. Sistematika

Sistematika penyusunan Perubahan RPJMD meliputi:

1. BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong.

2. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Rejang Lebong secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas di antaranya (i) geografi dan

demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

3. BAB III. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu serta Kerangka Pendanaan (proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 tahun).

4. BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Menjelaskan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis berdasarkan analisis kondisi lingkungan eksternal dan internal.

5. BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 serta menjelaskan juga tentang tujuan dan sasaran pembangunan untuk lima tahun yang akan datang.

6. BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan Rumusan Konvrensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD dengan efektif dan efisien.

7. BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang pilihan program prioritas dimasing-masing Strategi, Target, dan Inheren serta kumpulan program prioritas yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran yang didalamnya termasuk program Pembanguna Bupati dan Waki Bupati terpilih periode 2016-2021.

8. BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Menjelaskan tentang hubungan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

9. BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Menjelaskan tentang keberhasilan pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan layanan dan daya saing.

10. BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Menjelaskan tentang Perubahan RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD 5 (Lima) Tahun dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) pada periode 2016-2021.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong adalah menyediakan data pembangunan daerah 5 tahun yang lalu dan menetapkan gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan dari Kegiatan Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data dan analisis kinerja pembangunan daerah 5 tahun yang lalu dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021.
2. Memberikan gambaran permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2016-2021.
3. Menyajikan perencanaan pembangunan 5 tahun kedepan periode 2016 – 2021.

Selanjutnya dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021 ini akan menjadi acuan untuk penyusunan :

- a. Rencana Strategis (RENSTRA) PD;
- b. Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong; serta
- c. Sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rejang Lebong.



2.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah 151.576 hektar tersebar ke dalam 15 wilayah Kecamatan, wilayah terluas adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 21.796 hektar sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Curup Tengah dengan luas wilayah sebesar 342 hektar.

Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan. Secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak diantara dua buah bukit yakni sebelah barat diapit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur diapit oleh Bukit Kaba dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Lebong

Sebelah Selatan : Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang

Sebelah Timur : Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas

Sebelah Barat : Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah

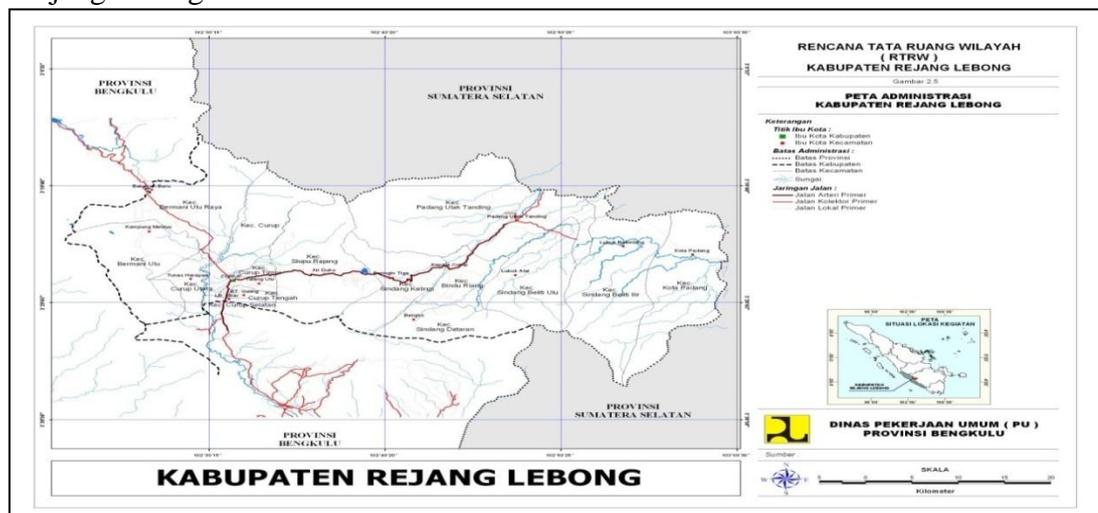
Ibukota Kabupaten Rejang Lebong terletak di Kota Curup. Jarak Kota Curup dari beberapa kota di sekitar antara lain:

Bengkulu : 85 km

Lubuk Linggau : 55 km

Palembang : 484 km

Tanjung Karang : 774 km



Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Rejang Lebong

Secara geologis tekstur tanah di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari: tekstur tanah halus seluas 65.317 Ha, tanah sedang 74.806 Ha dan tanah kasar 11.453 Ha. Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 - > 1.000 meter dari atas permukaan laut dimana untuk ketinggian sampai dengan 100 meter diatas permukaan laut seluas 2.250 ha, 100-500 m diatas permukaan laut seluas 48.324 ha, ketinggian 500-1.000 m seluas 57.172 dan pada ketinggian 1.000 m keatas seluas 43.830 ha.

Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol (81.111 ha), Aluvial (7.626 ha), Regosol (4.926 ha), Latosol (10.621 ha), Podsolik Merah Kuning/Latosol Andosol (13.241 ha), Komplek Podsolik Merah Kuning Litosol Latosol (14.216 ha) dan Komplek Podsolik Coklat Podsol Latosol (19.835 ha). Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 –7,5 , Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %.

Musim yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal 2 musim, yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April-September). Sementara pada bulan Februari-Maret dan Agustus-September merupakan masa peralihan/pancaroba dengan curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata-rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73^o C - 30,940^o C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %.

Dilihat dari pemanfaatan lahan, pada tahun 2014 sebagian besar berupa Perkampungan/Pemukiman/Sawah seluas 53.125 ha (35.05 %), Tegalan/Perkebunan seluas 34.205 ha (22.57 %), Kebun Campuran/Semak/Alang-alang seluas 9.725 ha (6.41 %), Hutan/Waduk/Rawa/Danau seluas 21.250 ha (14.02 %), Kolam/Tambak/Tanah Tandus seluas 9.630 ha (6.35 %) dan Lain-lain seluas 23.641 ha (15.60 %).

Luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong menurut kecamatan, dari yang terluas sampai yang terkecil dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas		Jumlah		Ibukota Kecamatan
		Ha	%	Kel.	Desa	
1.	Padang Ulak Tanding	21.796	14,38	1	14	Kel. Pasar PUT
2.	Sindang Beliti Ilir	19.254	12,70	-	10	Ds. Lubuk Belimbing I
3.	Kota Padang	17.229	11,37	3	7	Kel. Kota Padang
4.	Selupu Rejang	15.792	10,42	3	13	Kel. Air Duku
5.	Bermani Ulu Raya	14.636	9,66	-	10	Ds. Tebat Tenong Luar
6.	Sindang Kelingi	12.713	8,39	1	9	Kel. Beringin Tiga
7.	Sindang Beliti Ulu	12.515	8,26	-	9	Ds. Lubuk Alai
8.	Bermani Ulu	9.876	6,52	-	12	Ds. Kampung Melayu
9.	Binduriang	8.846	5,84	-	5	Ds. Simpang Beliti
10.	Sindang Dataran	6.647	4,39	-	6	Ds. Bengko
11.	Curup	5.918	3,90	9	-	Kel. Pasar Baru
12.	Curup Selatan	4.796	3,16	2	9	Ds. Lubuk Ubar
13.	Curup Timur	821	0,54	4	5	Kel. Talang Ulu
14.	Curup Utara	395	0,26	2	12	Kel. Tunas Harapan
15.	Curup Tengah	342	0,23	9	1	Kel. Air Bang
	Jumlah	151.576	100	34	122	

Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2016

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Rejang Lebong merupakan arahan yang ditetapkan dalam skala makro sesuai dengan potensi pengembangan wilayah yang dimiliki. Kebijakan pengembangan wilayah harus bersinergi dengan Kebijakan Provinsi dan Kebijakan Nasional guna mewujudkan pembangunan berkualitas dan berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan wilayah sangat erat kaitannya dengan struktur ruang dan pola ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Rejang Lebong yang mendefinisikan fungsi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Terkait fungsi kawasan lindung yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan antara lain: (1) Penetapan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai kawasan lindung; (2) Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba sebagai kawasan lindung; dan (3) Ditetapkan sebagai kawasan andalan di Propinsi Bengkulu dengan potensi pada sektor pertanian, industri, perkebunan, perikanan dan pariwisata.

Melalui RTRW Propinsi Bengkulu tahun 2012-2032, wilayah Kabupaten Rejang Lebong memiliki arahan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis sebagai berikut :

1. Struktur Ruang

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), tepatnya di Kota Curup sebagai ibu kota Kabupaten dengan fungsi Kota Curup sebagai:
 - Pusat pemerintahan Kabupaten;
 - Pusat perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan beberapa Kabupaten tetangga;
 - Pusat industri;
 - Simpul transportasi utama penghubung ke jaringan Lintas Tengah Sumatera (PKN : Palembang);
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Padang yang dapat melayani beberapa Kecamatan dan berfungsi sebagai sentra pelayanan kegiatan lokal serta fungsi lainnya sebagai berikut:
 - Pusat Pemerintahan Kecamatan;
 - Simpul transportasi jalan rel kereta api dan jalan raya (Musi Rawas ke Bengkulu);
 - Pusat perdagangan dan jasa skala lokal;

2. Pola Ruang

Berdasarkan arahan pola ruang Propinsi Bengkulu, maka Kabupaten Rejang Lebong memiliki fungsi lahan antara lain:

- a. Kawasan Lindung, suaka alam, kawasan lindung yang meliputi, hutan lindung Bukit Basa ;
 - (1) Kawasan Hutan Lindung
 - Hutan Lindung Bukit Basa seluas 128,89 Ha.
 - Hutan Lindung Bukit Daun seluas 90.805,07 Ha (bersama Lebong, Kepahiang, dan Bengkulu Utara).
 - Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba seluas 13.490 Ha (bersamaan Kepahiang).
 - Hutan Lindung Bukit Balai Rejang seluas 18.069 Ha (bersamaan Kepahiang).
 - (2) Kawasan Suaka Alam
 - Suaka Alam dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
 - Cagar Alam (CA) yang meliputi CA Talang Ulu 1 seluas 0,51 Ha dan CA Talang Ulu 2 seluas 0,06 Ha.

- (3) Kawasan Rawan Bencana.
- (4) Kawasan Perlindungan Setempat.

b. Kawasan Budidaya

- (1) Kawasan Perkebunan dengan komoditas kopi, lada, karet, kakao dan kelapa seluas 52.993,11 Ha.
- (2) Kawasan Hutan Rakyat seluas 5.727,29 Ha.
- (3) Kawasan Permukiman seluas 16.968,93 Ha.
- (4) Kawasan Pariwisata (wisata alam).

3. Kawasan Strategis

Kabupaten Rejang Lebong merupakan kawasan strategis bagi Provinsi Bengkulu dan sekitarnya sebagai kawasan strategis bidang ekonomi untuk mendukung sektor produksi wilayah sekitarnya seperti pertanian, perkebunan, agro industri, peternakan dan perikanan.

A. Sektor Pertanian

Pada tahun 2010 lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 36,17 persen dan menurun hingga tahun 2015 hanya berkontribusi sebesar 33.61 persen dari PDRB.

Pada tahun 2015, produksi padi Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan data dari Dinas Pertanian secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 0.84% dibandingkan dengan produksi tahun 2014 dari 105.302 ton gabah kering giling menjadi 106.194 ton gabah kering giling.

Gambar 2.2

Luas Panen Pada Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011-2015



Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2016

Berdasarkan Gambar 2.2 terlihat bahwa luas panen padi di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 masih didominasi oleh padi sawah. Luas panen padi sawah sebesar 20.861 hektar (96.40 persen) dan padi ladang seluas 779 hektar (3.60 persen).

Potensi komoditi pertanian unggulan Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan (ternak besar). Potensi tanaman pangan dan palawija tertinggi di Kecamatan Bermani Ulu dan Curup Utara. Potensi hortikultura tertinggi terdapat di Kecamatan Selupu Rejang diikuti oleh Kecamatan Curup dan Sindang Kelingi. Potensi perkebunan di Kecamatan Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Sindang Kelingi, Kota Padang, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu dan Binduriang.

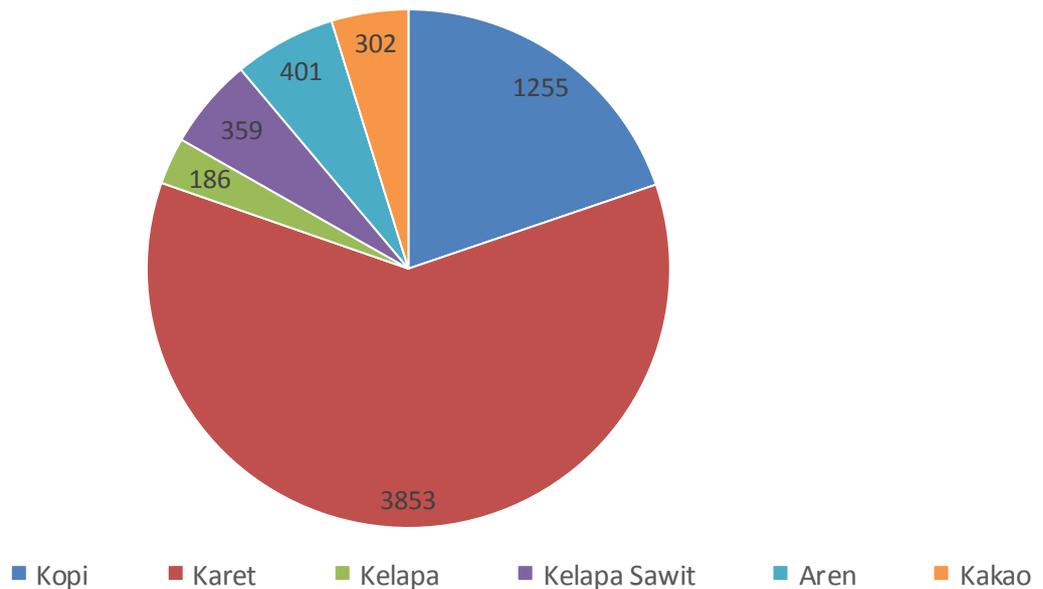
Potensi perikanan di Kecamatan Curup, Bermani Ulu, Padang Ulak Tanding dan Kota Padang. Sedangkan potensi peternakan terdapat di Kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi dan Bermani Ulu.

Produksi palawija pada tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2014. Ada 6 jenis komoditi palawija yang dijadikan sebagai standar pengukuran dalam penentuan Angka Tetap, baik yang dikeluarkan oleh BPS maupun dari Dinas Pertanian. Diantara komoditi yang dimaksud adalah: jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Selama tahun 2015, komoditi yang mengalami penurunan adalah jenis komoditi jagung yakni turun sebesar 20,03% (39.225 ton pada tahun 2014 menjadi 31.368 ton pada tahun 2015), ubi kayu turun sebesar 36,68% (28.353 ton pada tahun 2014 menjadi 17.953 ton pada tahun 2015), ubi jalar turun 29,35% (19.688 ton pada tahun 2014 menjadi 13.910 ton pada tahun 2015), kacang tanah turun sebesar 22,55% (2.239 ton pada tahun 2014 menjadi 1.734 ton pada tahun 2015), kacang hijau turun sebesar 19,09% (241 ton pada tahun 2014 menjadi 195 ton pada tahun 2015), dan kedelai turun sebesar 1,49% (1.342 ton pada tahun 2014 menjadi 1.322 ton pada tahun 2015)

B. Perkebunan

Kabupaten Rejang Lebong dengan topografi yang berbukit-bukit dan kondisi tanah yang subur sangat potensial untuk dikembangkan jenis tanaman perkebunan baik untuk skala kecil maupun skala besar. Dari 16 jenis tanaman perkebunan yang diusahakan di Kabupaten Rejang Lebong, terdapat 5 jenis tanaman yang paling mendominasi, diantaranya: kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, aren, dan kakao.

Gambar 2.3



Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2016

C. Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Rejang Lebong seperti tahun-tahun sebelumnya dibagi menjadi 3 kelompok : kelompok pertama adalah ternak besar yang meliputi: sapi potong, sapi perah, dan kerbau. Kelompok kedua disebut ternak kecil meliputi: kambing, domba, dan kelinci. Sedangkan kelompok ke-3 meliputi: ayam buras, ayam petelur, ayam potong, dan itik. Secara umum dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 jenis ternak yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat adalah jenis ayam pedaging yaitu sebanyak 276.500 ekor, diikuti dengan ayam buras 158.182 ekor, dan posisi ketiga ditempati oleh jenis ternak kambing sebanyak 27.885 ekor.

D. Sektor Pariwisata dan Budaya

Kabupaten Rejang Lebong memiliki berbagai potensi dan daya tarik wisata yang dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan dan menikmati kekayaan alam dan budaya Kabupaten Rejang Lebong. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong diketahui bahwa dari sekian banyak potensi dan daya tarik yang dimiliki masih banyak yang belum diolah dan dimanfaatkan sebagai potensi wisata dan sebagian potensi yang telah dimanfaatkan cenderung belum dikelola dengan baik. Belum diolah dan dikelolanya potensi dan daya tarik pariwisata secara baik dan menyeluruh tersebut membuat Kabupaten Rejang Lebong dalam

konteks Daerah Tujuan Wisata dapat dikatakan masih jauh dari memadai untuk siap menerima wisatawan serta masih belum mampu untuk memberikan nuansa pariwisata tersendiri yang dapat memuaskan wisatawannya.

Pada Tabel 2.2 berikut ini merupakan beberapa potensi objek wisata yang dimiliki Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 2.2

Obyek Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016

Kecamatan	Obyek Wisata
▪ Kecamatan Curup	1). Rumah Adat Rejang Lebong 2). Masjid Agung Curup
▪ Kecamatan Curup Tengah	1). Air Terjun Talang Rimbo
▪ Kecamatan Curup Timur	1). Suban Air Panas 2). Kolam Renang Muna Tirta 3). Obyek Wisata Alam “DIOBAGITE”
▪ Kecamatan Curup Utara	1). Danau Bermanei Talang Kering 2). Monumen Perjuangan Desa Tabarena 3). Wisata Tirta Ulu Musi
▪ Kecamatan Curup Selatan	1). Sumber Air Panas Tempel Rejo
▪ Kecamatan Selupu Rejang	1). Bendungan Musi Kejalo 2). Air Terjun Bertingkat 3). Bukit Kaba 4). Danau Mas Harun Bastari 5). Obyek Wisata Agropolitan 6). Sumber Air Panas Gerojokan Sewu
▪ Kecamatan Sindang Kelingi	1). Air Terjun Desa Beringin Tiga 2). Air Terjun Sekudun 3). Air Terjun tri Muara Karang (Desa Belitar Seberang)
▪ Kecamatan Binduriang	1). Air Terjun Desa Cahaya Negeri 2). Air terjun Tangga seribu
▪ Padang Ulak Tanding	1). Cek Dam (Danau Buatan)
▪ Kecamatan Sindang Beliti Ulu	1). Air terjun Gua beraput (Desa Apur) 2). Air terjun Napal 3). Peninggalan Benda Sejarah Desa Apur
▪ Kecamatan Sindang Beliti Ilir	1). Air Terjun dan Gua La Desa Suka Merindu
▪ Kota Padang	1). Air Terjun Curup Embun Desa UPT Trans 2). Air Terjun Angin Desa Lubuk Mumpo 3). Makam Pahlawan Kota Padang
▪ Kecamatan Bermani Ulu	1). Kebun Teh “Agro Teh”
▪ Kecamatan Bermani Ulu Raya	1). Air Terjun Batu Betiang

Sumber : RIPPDA, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2015 dan eksisting 2016

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas/instansi terkait. Masih minimnya infrastruktur pendukung mengakibatkan walaupun potensi objek wisatanya cukup banyak dan sangat menarik tetapi belum tergali secara optimal. Hal ini berimbas kepada masih rendahnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke objek-objek wisata yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Secara geomorfologi Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari dataran alluvial dan zona vulkanik yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan dengan karakter pegunungan yang dikenal dengan Patahan Semangko. Dari hasil studi yang pernah dilakukan pada kegiatan "Inventarisasi Keprospekan Kawasan Pertambangan Kabupaten Rejang Lebong" diperoleh informasi bahwa di wilayah ini terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi rawan bencana alam, khususnya untuk terjadinya gempa bumi, tanah longsor atau gerakan tanah dan letusan gunung api.

A. Gempa Bumi

Sesuai hasil pengamatan stasiun BMKG Kepahiang selama kurun waktu 2015 dan 2016, getaran gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan daerah sekitarnya pada tahun 2015 terjadi 1 kali gempa dengan kekuatan 6,1 SR, sedangkan tahun 2016 terjadi 2 kali gempa yang berkekuatan masing – masing 3,7 SR dan 4,4 SR.

B. Letusan Gunung Berapi

Wilayah Kabupaten Rejang Lebong berada diantara beberapa gunung berapi yang terdapat di sekelilingnya, diantaranya gunung-gunung: Bukit Daun (2.467 m.dpl) dan Bukit Kaba (1.938 m.dpl). Daerah rawan letusan gunung berapi antara lain: (1) Bukit Daun (bagian barat Kec. Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya) dan Bukit Kaba (bagian selatan Kec. Selupu Rejang, Sindang Kelingi dan Sindang Dataran);

C. Gerakan Tanah

Daerah yang berpotensi untuk terjadinya bencana gerakan tanah atau tanah longsor adalah di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) atau tebing-tebing di bagian utara Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Kota Padang, serta sepanjang jalan negara di wilayah Kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi dan Binduriang.

Disamping itu, potensi terjadinya gerakan tanah juga terdapat di wilayah Kecamatan Curup Selatan, Curup Utara, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya. Kegiatan penambangan bahan galian (pasir dan batu) di Kecamatan Curup Selatan dan Curup Utara juga beresiko tinggi terhadap terjadinya tanah longsor jika tidak dilakukan pengawasan dan pengendalian secara intensif.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi risiko atas bencana yang akan terjadi, dan dalam upaya menjalankan mandat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB), Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah memiliki sejumlah kebijakan dan regulasi terkait Penanggulangan Bencana untuk penanganan pasca bencana terutama untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab/rekon).

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2010 telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai badan yang bertugas memetakan potensi bencana dan merencanakan strategi dan arah kebijakan penanggulangan bencana baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional. Prioritas program telah ditetapkan yaitu mengurangi dampak bencana dengan mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana, mengurangi kerentanan bencana dan meningkatkan kapasitas untuk menanggapi bencana alam, yang didukung oleh Bappenas dan UNDP melalui program kerjasama SCDRR (*Safer Communities through Disaster Risk Reduction*). Dalam rangka program BDRM (*Bengkulu Disaster Risk Mapping*), Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah membentuk tim kerja *multi-stakeholder* sebagai ‘pemain’ utama, yang dibantu oleh tim ahli dari *Swiss contact* sebagai ‘pelatih’. Tim kerja *multi-stakeholder* ini terdiri atas perwakilan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPRD, Masyarakat, Sektor Swasta, Lembaga Perguruan Tinggi dan Media Massa.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong telah disiapkan peta detail tentang wilayah rawan bencana dan tingkat risiko bencana yang tergambar dalam peta rawan bencana. Peta risiko bencana ini berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi untuk menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis mitigasi bencana seperti dimandatkan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004.

2.1.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 mencapai 256.094 jiwa dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu 2014-2015 mencapai antara 0,6 persen per tahun serta kepadatan rata-rata 169 jiwa/km² dengan proporsi penduduk laki-laki dan perempuan seimbang.

Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016

Kecamatan	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk	Penduduk/km²
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Padang	172.29	12 351	71.69
Sindang Beliti Ilir	192.54	9 113	47.33
Padang Ulak Tanding	217.96	17 862	81.95
Sindang Kelingi	127.12	14 601	114.86
Binduriang	88.46	8 093	91.49
Sindang Beliti Ulu	125.15	12 419	99.23
Sindang Dataran	66.49	10 367	155.92
Curup	3.59	28 864	8 040.11
Bermani Ulu	98.76	11 986	121.36
Selupu Rejang	157.96	28 815	182.42
Curup Selatan	47.96	19 852	413.93
Curup Tengah	8.52	35 091	4 118.66
Bermani Ulu Raya	146.36	10 294	70.33
Curup Utara	59.18	15 047	254.26
Curup Timur	3.42	21 339	6 239.34
Jumlah	1 515.76	256 094.00	168.95

Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2016

Pada tabel 2.3 diatas tergambar proporsi jumlah penduduk yang terbesar dan terpadat adalah di Kecamatan Curup Tengah sebanyak 35.091 jiwa (13,7 %) dengan kepadatan 4.118 jiwa/Km², sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Binduriang sebanyak 8.093 jiwa (3,16 %) dan yang terkecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sindang Beliti Ilir yakni 47 jiwa/Km².

Tabel 2.4
Rasio Jumlah Penduduk yang Memiliki Kartu Penduduk,
Kartu Keluarga dan Akte Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011-2015

Data Kependudukan	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk (%)	-	29,07	28,08	60,75	78,86
Rasio KK per Kepala Keluarga (%)	-	28,02	24,37	73,25	75,81
Kepemilikan KTP (Orang)	-	66.879	69.003	118.295	147.369
Rasio Perekaman KTP Elektronik (%)	-	57,82	60,55	78,18	83,70
Kepemilikan KK (Orang)	-	25.057	23.652	11.167	1.085
Penerbitan Akte Kelahiran (lembar)	9.181	5.163	16.552	7.825	7.066
Penerbitan Akte Kematian (lembar)	4	3	10	24	71
Penerbitan Akte Perkawinan (lembar)	27	29	34	26	35

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. RL Tahun 2016

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Indikator Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan perekonomian suatu daerah. Sejak tahun 2011-2015 pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan harga konstan mengalami perlambatan sebesar rata-rata 0,44 persen per tahun, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,99% per tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2011–2015 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
PDRB, Jumlah Penduduk, PDRB per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	4.262,62	4.788,52	5.344,37	5.951,12	6.621,26
PDRB ADHK 2010 (Milyar Rupiah)	3.998,38	4.261,23	4.515,85	4.754,89	5.000,46
Jumlah Penduduk (Orang)	249.411	251.201	253.020	254.583	256.094
PDRB perkapita (Rupiah)	17.090.099	19.078.832	21.122.316	23.375.957	25.854.784
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,94	6,57	5,98	5,29	5,16

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : BPS, Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka dan PDRB (2011-2015)

Perekonomian Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2015 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,16%. Pertumbuhan ekonomi tersebut tercatat lebih rendah bila dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,29% pada tahun 2014; 5,98% pada tahun 2013; 6,57% di tahun 2012 dan 6,94% di tahun 2011. Perekonomian Kabupaten Rejang Lebong selama 2011-2015 mencatatkan rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu secara keseluruhan. Besaran PDRB Kabupaten Rejang Lebong atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 mencapai Rp 6,621 triliun.

Tabel 2.6
Perbandingan PDRB Kabupaten Rejang Lebong dan
Provinsi Bengkulu Tahun 2011 – 2015

(dalam Milyar Rp)

Tahun	PDRB Rejang Lebong			PDRB Provinsi Bengkulu		
	Harga berlaku	Harga Konstan 2010	Pertumbuhan (%)	Harga berlaku	Harga Konstan 2010	Pertumbuhan (%)
2011	4.262,62	3.998,38	6,94	32.199,7	30.295,1	6,85
2012	4.788,52	4.261,23	6,57	36.207,7	32.363,0	6,83
2013	5.344,37	4.515,85	5,98	40.565,5	34.326,4	6,07
2014*	5.951,12	4.754,89	5,29	45.392,8	36.206,7	5,48
2015**	6.621,26	5.000,46	5,16	50.392,8	38.067,5	5,14

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten dan Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Pada Tahun 2015, Sektor-sektor yang paling dominan mendukung perekonomian Kabupaten Rejang Lebong adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat dominan, yaitu dengan kontribusi sebesar 33,61% terhadap perekonomian. Sementara itu sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang 16,64 %. Sektor dengan kontribusi terendah adalah sektor pengadaan listrik dan gas yang hanya memberikan sumbangan sebesar 0,06% terhadap perekonomian Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 2.7
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2014-2015

No	Sektor	2014	2015	Distribusi PDRB 2015
		(Milyar Rp)		(%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2 046.05	2 225.12	33.61
2	Pertambangan dan Penggalian	93.56	101.01	1.53
3	Industri Pengolahan	258.28	285.17	4.31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.11	3.87	0.06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	10.03	11.08	0.17
6	Konstruksi	244.91	272.00	4.11
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	896.19	987.35	14.91
8	Transportasi dan Pergudangan	298.06	343.71	5.19
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99.65	114.73	1.73
10	Informasi dan Komunikasi	148.78	166.13	2.51
11	Jasa Keuangan dan asuransi	207.34	227.16	3.43
12	Real Estate	230.43	256.84	3.88
13	Jasa Perusahaan	8.56	10.23	0.15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	590.31	689.51	10.41
15	Jasa Pendidikan	610.09	691.09	10.44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139.30	161.14	2.43
17	Jasa Lainnya	66.46	75.13	1.13
	PDRB	5.951,1212	6.621,2551	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015

B. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Kabupaten Rejang Lebong lebih dari 70% penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, yang didominasi (65%) penduduk berpenghasilan rendah dengan kepemilikan lahan pertanian yang sangat kecil (kurang dari 1 ha). Hal ini berakibat semakin kecilnya persentase penghasilan yang diterima petani, diperparah lagi dengan sering kali terjadi fluktuasi harga komoditi pertanian khususnya tanaman hortikultura yang berdampak langsung terhadap menurunnya tingkat pendapatan dan daya beli petani.

Pada rentang waktu tahun 2011-2016, persentase penduduk miskin fluktuatif yakni dari 17,99 % pada tahun 2014 naik menjadi 18,03 % pada tahun 2015 dan turun menjadi 17,81 % pada tahun 2016, hal tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan Angka Kemiskinan Propinsi Bengkulu yakni 16,45 % dan tingkat Nasional sebesar 10,70 %. Walaupun demikian, baik tingkat propinsi dan nasional dari tahun 2011 sampai dengan 2016 mengalami trend peningkatan angka kemiskinan. Hal ini dipengaruhi kondisi ekonomi global yang mengalami trend penguatan nilai tukar Dollar Amerika terhadap sebagian besar mata uang negara-negara se-dunia termasuk nilai tukar Rupiah. Hal tersebut berimbas pada meningkatnya harga barang dan jasa, BBM, TDL sehingga menurunkan daya beli masyarakat dan berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Tabel 2.8

Profil Kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011-2016

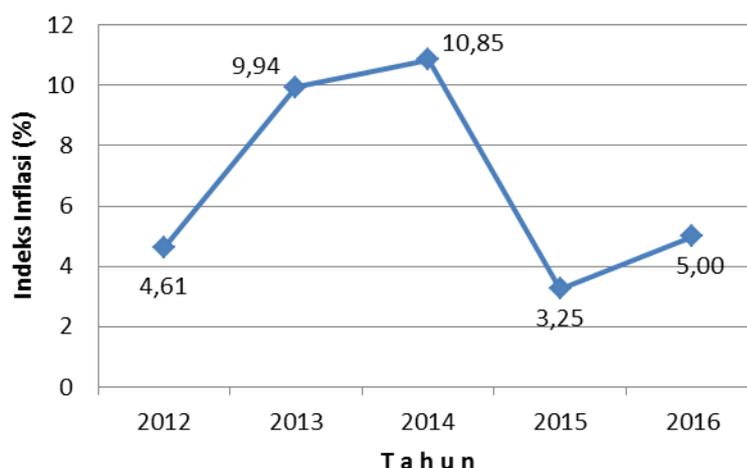
Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	42,2	43,5	46,8	45,8	46,04	45,79
Garis Kemiskinan(Rp)	284.729	299.903	320.366	334.247	346.981	382.027
Angka Kemiskinan Kab. Rejang Lebong (%)	16,79	17,30	18,48	17,99	18,03	17,81
Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu (%)	17,36	17,51	17,75	17,09	17,88	16,45

Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka Tahun 2016

C. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Gambar 2.4
Tingkat Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2016 (%)



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu 2012 s/d 2016

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 10,85 % sedangkan nilai inflasi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 3,25 %. Tahun 2012 inflasi Provinsi Bengkulu sebesar 4,61 % dan terjadi peningkatan yang cukup tajam sampai dengan tahun 2013 yaitu sebesar 9,94 %.

Kenaikan inflasi yang terjadi pada tahun 2014 menurut kelompok pengeluaran inflasi dipengaruhi oleh tingginya harga bahan makanan yaitu sebesar 17,76 % dan kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi yaitu sebesar 13,96 %. Sedangkan nilai inflasi tahunan yang terendah terjadi pada tahun 2015, hal ini disebabkan terjadinya deflasi pada kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi yaitu sebesar -0,05 % dan inflasi terendah berikutnya terjadi pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar 0,51 %. Peningkatan inflasi makanan jadi dapat diinterpretasikan sebagai kenaikan harga bahan-bahan makanan, yang termasuk didalamnya adalah beras, daging ayam ras, telur ayam, daging sapi dan bawang merah yang mendorong peningkatan harga makanan jadi. Secara rinci tingkat inflasi tahunan Provinsi Bengkulu menurut Kelompok Pengeluaran dapat dilihat pada tabel **Tabel 2.9**.

Tabel 2.9
Inflasi Tahunan Provinsi Bengkulu menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2012-2016

Kelompok/Sub Kelompok	Laju Inflasi				
	2012	2013	2014	2015	2016
U M U M/GENERAL	4,61	9,94	10,85	3,25	5,00
Bahan Makanan/Foodstuff	3,35	15,04	17,76	0,51	3,85
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	7,31	6,36	6,64	6,02	6,45

Kelompok/Sub Kelompok	Laju Inflasi				
	2012	2013	2014	2015	2016
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	1,54	6,54	8,23	3,36	2,6
Sandang	4,80	2,09	3,82	4,33	3,93
Kesehatan	5,67	6,92	6,53	7,54	3,57
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	12,32	3,11	5,62	11,38	6,69
Transportasi dan Komunikasi	4,10	16,37	13,96	-0,05	7,85

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu 2012 s/d 2016

D. Indeks Gini

Berdasarkan data Indeks Gini di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011-2015, memperlihatkan pergerakan yang fluktuatif dan relatif menurun. Meskipun demikian, diperkirakan penurunan ini akan melambat di masa depan. Mereka yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu keluar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan.

Pada tahun 2011 indeks Gini Kabupaten Rejang Lebong sebesar 0.34201 dan menurun menjadi 0.33618 pada tahun 2012, dan pemerataan kesejahteraan fluktuatif sampai dengan tahun 2015 menjadi 0.32989. Tingkat kesenjangan yang menurun di Kabupaten Rejang Lebong dipengaruhi beberapa faktor antara lain; stabilitas harga makanan (khususnya beras) yang merupakan hal penting sekali bagi penduduk yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk membeli beras (dan bahan makanan pokok lainnya). Oleh karena itu, tekanan inflasi pada harga beras (misalnya karena gagal panen) dapat memiliki konsekuensi serius bagi mereka yang miskin atau hampir miskin. Bahkan sebagian dari mereka yang hidup sedikit saja di atas garis kesmiskinan bisa jatuh dalam kemiskinan penuh karena inflasi yang tinggi.

Dalam konteks kesenjangan pendapatan, stabilitas harga jual hasil bumi juga menjadi faktor penentu bagi besaran pendapatan penduduk Kabupaten Rejang Lebong yang mayoritas bergerak dibidang pertanian, belum lagi faktor cuaca yang tidak menentu menjadi penentu keberhasilan hasil panen. Namun

demikian, tingkat pemerataan kesenjangan di Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam kategori kelompok sedang (moderat).

Tabel 2.10

Indeks Gini di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Bengkulu Selatan	0.35748	0.38071	0.36224	0.39454	0.38662
Rejang Lebong	0.34201	0.33618	0.34300	0.30913	0.32989
Bengkulu Utara	0.47498	0.34518	0.35770	0.31117	0.34570
Kaur	0.35934	0.35058	0.34373	0.37134	0.38024
Seluma	0.34759	0.33172	0.31321	0.29325	0.35168
Mukomuko	0.33123	0.32702	0.35963	0.33905	0.31860
Lebong	0.32720	0.34256	0.31947	0.30460	0.31539
Kepahiang	0.34151	0.32576	0.30895	0.29872	0.33572
Bengkulu Tengah	0.33994	0.30993	0.36731	0.35031	0.36758
Kota Bengkulu	0.37454	0.38003	0.41265	0.35174	0.39595
Provinsi Bengkulu	0.372	0.354	0.360	0.386	0.372

Sumber : BPS, Berita Resmi BPS Tahun 2017

E. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan Daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.

Tabel 2.11
Angka Kriminalitas Yang Tertangani
Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2016

Jenis Kejahatan	2016		
	JTP	JTPP	%
(1)	(2)	(3)	(4)
Pencurian Pemberatan	129	54	41.86%
Pencurian dgn Kekerasan	61	24	39.34%
Penganiayaan Berat	57	25	43.86%
Pembunuhan	3	2	66.67%
Curanmor	53	6	11.32%
Ke / Pembakaran	-	-	-
Perkosaan	5	2	40.00%
Bunuh Diri	3	3	100.00%
KDRT	28	20	71.43%
Senpi / Handak	-	2	-
Illegal Logging	-	2	-
Narkotika	39	39	100.00%
Lain-lain Kejahatan	-	-	-

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Indeks pembangunan daerah yang berfokus pada kesejahteraan sosial tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indikator Kesehatan, Indikator Pendidikan/Pengetahuan dan Indikator Pengeluaran. Indikator kesehatan tercermin dalam Angka Harapan Hidup, Indikator Pendidikan/Pengetahuan tercermin dalam Angka Pendidikan dan Indikator Pengeluaran tercermin dalam Tingkat Daya Beli. Ketiga indikator dasar tersebut dianggap dapat mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah.

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2016 menempatkan Kabupaten Rejang Lebong sebagai daerah yang nilai indeks pembangunan manusianya berada pada level menengah atas dengan skor diatas 66. Pada rentang waktu tahun 2010-2016, IPM Kabupaten Rejang Lebong selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, skor IPM Kabupaten Rejang Lebong

berada pada kisaran 64,19. Tetapi pada Tahun 2016 meningkat sebanyak 4,15 poin menjadi 68,34. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong. Lebih lanjut komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2010-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12
Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010-2016

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Harapan Hidup (Tahun)	67,20	67,28	67,34	67,39	67,42	67,52	67,58
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,46	11,76	12,09	12,42	12,76	13,11	13,23
Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,38	7,54	7,57	7,59	7,60	7,90	8,03
Tingkat Daya Beli Per Kapita (000 rupiah)	8.320	8.469	8.631	8.813	8.869	9.050	9.520
IPM Kab. Rejang Lebong	64,19	64,92	65,51	66,11	66,55	67,51	68,34
IPM Propinsi Bengkulu	65,35	65,96	66,61	67,50	68,06	68,59	69,33
Rangkin IPM Se-Propinsi Bengkulu	3	2	2	3	3	2	2

Sumber : BPS Kab. Rejang Lebong Tahun 2015 dan 2016

Pada tabel 2.12 di atas tergambar perkembangan komponen penyusun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Tingkat Daya Beli. Terlihat dari tahun 2010 sampai dengan 2016 setiap komponen penyusun IPM mengalami trend peningkatan, tetapi dari sisi persentase pertumbuhannya mengalami perlambatan. Sedangkan ranking IPM Kabupaten Rejang Lebong di level Propinsi Bengkulu pada tahun 2010 di posisi ke-tiga, pada tahun 2015 masih tetap berada pada posisi ke-dua. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dibandingkan Kabupaten/Kota Se-Propinsi Bengkulu ada yang lebih rendah persentase pertumbuhannya atau dengan kata lain kinerja pemerintahannya menurun.

Pada Tabel 2.13 dapat dilihat urutan/rangking IPM Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu dari Tahun 2010-2016 berikut ini.

Tabel 2.13
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)
Menurut Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu Tahun 2010–2016

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bengkulu Selatan	65,84	66,50	66,77	67,61	68,28	68,57	68,71
Rejang Lebong	64,19	64,92	65,51	66,11	66,55	67,51	68,34
Bengkulu Utara	63,50	64,61	65,47	66,67	67,27	67,46	67,63
Kaur	61,39	61,85	62,32	63,17	63,75	64,47	64,95
Seluma	60,27	61,01	61,55	62,10	62,94	63,41	64,04
Mukomuko	62,95	63,71	64,16	64,79	65,31	65,77	66,52
Lebong	61,87	62,43	62,84	63,15	63,90	64,72	65,58
Kepahiang	62,60	63,44	63,86	64,44	65,22	65,45	66,35
Bengkulu Tengah	61,70	62,54	63,12	63,71	64,10	64,68	65,44
Kota Bengkulu	74,92	75,31	75,71	76,16	76,49	77,16	77,94
Provinsi Bengkulu	65,35	65,96	66,61	67,5	68,06	68,59	69,33

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2016

B. Angka Harapan Hidup (AHH)

Salah satu komponen penghitungan IPM untuk mengukur usia hidup menggunakan indikator angka harapan hidup waktu lahir (*life-expectancy at birth*) sebagai. Angka Harapan Hidup dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu daerah. Semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan hidup lebih lama akan semakin tinggi dan semakin buruk kesehatan maka kematian akan semakin dekat. Angka harapan hidup dihitung dari hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 (SP2010).

Pada tahun 2016 angka harapan hidup sejak lahir di Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar 68,34 tahun dengan Indeks Harapan Hidup (AHH) sebesar 67,58. Hal ini berarti rata-rata umur penduduk di Kabupaten Rejang Lebong yang lahir pada tahun 2016 sampai dengan meninggal adalah 68,34 tahun. Angka ini lebih rendah daripada Angka Harapan Hidup penduduk Provinsi Bengkulu yang berada dikisaran 69,33 tahun. Namun demikian, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 67,58 tahun. Angka harapan hidup ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong telah memberi dampak positif pada perbaikan umur hipotesis yang semakin panjang.

C. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Tingkat perkembangan pendidikan suatu daerah dapat dievaluasi dengan melihat besarnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Selama kurun waktu 2013-2016, Harapan Lama Sekolah (*expected years of schooling*) penduduk Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan adanya peningkatan, yaitu dari 11,46 tahun pada 2010 menjadi 13,23 tahun pada 2016. Hal ini menunjukkan bahwa dari seluruh pendidikan yang harus dijalani, pemerintah diharapkan menggalakkan program yang mampu menumbuhkan kesadaran penduduk akan peran penting pendidikan formal sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

D. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2010-2016 cenderung meningkat, dimana waktu yang dilalui untuk menempuh pendidikan dasar (SD dan SLTP) adalah 7,38 tahun pada tahun 2010 hanya meningkat sedikit menjadi 8,03 tahun pada tahun 2016. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata masyarakat Kabupaten Rejang Lebong bersekolah antara 7 sampai 8 tahun. Dengan demikian berarti sumber daya manusia di Kabupaten Rejang Lebong masih tergolong rendah.

E. Tingkat Daya Beli

Komponen paritas daya beli yang dikenal dengan komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil perkapita yang disesuaikan. Besaran nilai Tingkat Daya Beli menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilai Indeks Daya Beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk yang semakin baik.

Daya beli penduduk Kabupaten Rejang Lebong yang dicerminkan oleh besaran pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan sebesar 8.320.000 rupiah pada 2010 meningkat menjadi 9.520.000 rupiah di 2016. Besaran tersebut menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong. Bila dibandingkan rata-rata penduduk Provinsi Bengkulu yang mempunyai besaran pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan pada angka 9.492.000 rupiah maka kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Rejang Lebong berada di atas rata-rata provinsi. Jika dilihat klasifikasi komponen Indeks Daya Beli, maka indeks Kabupaten Rejang Lebong pada 2010-2016 berada pada kategori sedang.

F. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

APK dan APM adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7-18 tahun. Nilai tersebut menunjukkan tingkat partisipasi penduduk di suatu tingkat pendidikan dan ukuran daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Pada Tabel 2.14 berikut ini ditampilkan APK dan APM di Kabupaten Rejang Lebong pada kurun waktu tahun 2011-2016.

Tabel 2.14
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011-2016

Uraian		Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
APK	SD	104,82	99,36	112,99	116,99	120,11	116,21
	SLTP	83,95	107,68	76,70	82,92	85,71	79,26
	SLTA	74,60	51,14	68,77	73,63	76,50	84,76
APM	SD	94,38	96,77	97,89	98,60	100	98,78
	SLTP	66,33	62,24	69,38	73,58	77,00	71,19
	SLTA	52,51	43,91	58,03	61,33	61,24	62,93

Sumber : BPS, Berita Resmi BPS Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk tingkat SD, APK masih melebihi 100 %. Ini artinya masih banyak siswa yang berumur di bawah tujuh tahun (*underage*) dan di atas 12 tahun (*overage*) yang masih mengikuti pendidikan di tingkat SD. APK pada tingkat SD mengalami penurunan dari 120,11 % pada tahun 2015 menjadi 116,21 % pada tahun 2016. APK pada tingkat SLTP mengalami peningkatan dari 85,71 % pada tahun 2015 menjadi 79,26 % pada tahun 2016.

Sedangkan APK pada tingkat SLTA mengalami kenaikan dari 76,50 % pada tahun 2015 menjadi 84,67 % pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran partisipasi siswa dari tingkat SLTP ke tingkat SLTA.

Angka Partisipasi Murni (APM) per jenjang pendidikan mengalami peningkatan selama tahun 2011-2016. APM pada tingkat SD menurun dari 100 % pada tahun 2015 menjadi 98,78 % pada tahun 2016. APM pada tingkat SLTP menurun dari 77,00 % pada tahun 2015 menjadi 71,19 % pada tahun 2016. Dan APM tingkat SLTA meningkat dari 61,24 % pada tahun 2015 menjadi 62,93 % pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada semua tingkat pendidikan SLTA terdapat siswa yang putus sekolah atau tidak menamatkan jenjang pendidikan semestinya.

APM menurut jenjang pendidikan adalah untuk mengukur banyaknya usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah, yaitu SD 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun dan SLTA 16-18 tahun. Dari gambaran di atas juga dapat dilihat, semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat partisipasi sekolah semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas sehingga mempersulit akses, keterbatasan ekonomi sehingga terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan intelektual.

G. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan proporsi bayi meninggal setelah dilahirkan dan belum cukup mencapai umur satu tahun per 1.000 kelahiran. Sedangkan Angka Kematian Balita (AKAB) menggambarkan proporsi balita meninggal antara satu sampai lima tahun per 1.000 kelahiran. Estimasi AKB berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2004-2007 menunjukkan penurunan yaitu dari 74 *per* 1000 kelahiran menjadi 46 *per* 1000 kelahiran atau turun sebesar 37,92 %. Sedangkan AKAB periode 2010-2014 menurun sebesar 63,10 %.

AKB di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2015 adalah 11,27/1.000 kelahiran hidup atau terjadi sebanyak 54 kasus dari 4.790 kelahiran hidup. Sedangkan AKBA di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2015 adalah 12,1/1.000 kelahiran hidup atau terjadi sebanyak 58 kasus dari 4.790 kelahiran hidup.

H. Persentase Balita Gizi Buruk

Indikator kesejahteraan rakyat yang lainnya adalah persentase jumlah penderita gizi buruk. Sejak tahun 2010-2014 persentase balita gizi buruk di Kabupaten Rejang Lebong menurun drastis, dari 0,17 % pada tahun 2010 menjadi 0,026 % pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan dalam program pemenuhan gizi masyarakat untuk mewujudkan Rejang Lebong Sehat 2015.

I. Rasio Penduduk yang Bekerja

Dari jumlah 256.094 orang penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 tercatat sebanyak 208 jiwa merupakan pencari kerja yang terdaftar di dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Jumlah pencari kerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2014 (1.756 orang) mengalami penurunan sebanyak 1548 orang atau sebesar 88,15%. Secara rinci, jumlah pencari kerja terdiri dari 138 orang (66,35 %) laki-laki dan 70 (33,65%) perempuan. Dilihat dari sisi tingkat pendidikan penduduk maka untuk tamatan Sarjana merupakan jumlah pencari kerja terbanyak yaitu 67 orang (33,21%) kemudian diikuti oleh pencari kerja berijazah SMK sebanyak 57 orang (27,40%) dan lulusan SLTA sebanyak 44 orang (21,15%). Dimana dari 1.765 pencari kerja yang dapat disalurkan hanya sebanyak 97 orang. Artinya hanya sebesar 46,63% pelamar pekerja yang dapat disalurkan menjadi tenaga kerja.

Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk usia kurang dari 15 tahun meski telah bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya tidak termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja sebagai bagian dari aspek demografi memiliki kecenderungan meningkat atau menurun sesuai perubahan yang dialami oleh penduduk. Hal ini disebabkan faktor-faktor alamiah, yakni kelahiran dan kematian serta perpindahan yang menyebabkan pergeseran jumlah penduduk. Sementara angka pengangguran didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Perkembangan ekonomi suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Beberapa permasalahan dalam ketenagakerjaan yang ditemui masyarakat antara lain terkait dengan tingginya

tingkat pengangguran, penyediaan lapangan kerja yang terbatas, serta produktivitas tenaga kerja yang rendah. Penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu barometer keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang.

Tabel 2.15
Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja/Economically Active	80 166	61 182	141 348
Bekerja/Working	77 003	58 124	135 127
Pengangguran Terbuka/Unemployment	3 163	3 058	6 221
Bukan Angkatan Kerja Economically Inactive	13 380	30 491	43 871
Sekolah/Attending School	8 027	10 718	18 745
Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping	889	17 240	18 129
Lainnya/Others	4 464	2 533	6 997
Jumlah/Total			
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Economically Active Participation Rate	85.7 %	66.74%	76.31%
Tingkat Pengangguran/Unemployment Rate	3.95%	5%	4.4%

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2015

Dari data diatas terlihat bahwa Pada Tahun 2015 Angkatan Kerja di Kabupaten Rejang Lebong cukup tinggi dengan proporsi angkatan kerja yang bekerja 95,60% atau 135.127 orang dengan tingkat pengangguran sebesar 4,4% yang masih dibawah rata-rata tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu yang sebesar 4,9%.

2.2.3. Fokus Seni dan Budaya

Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan bidang seni dan budaya dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian. Jumlah grup kesenian dari waktu ke waktu semakin menurun, dimana pada tahun 2010 ada 252 grup kesenian, sedangkan pada tahun 2015 hanya ada 53 grup kesenian. Hal ini disebabkan kurangnya dukungan anggaran pembinaan dari pemerintah serta kurangnya sarana prasarana pendukung.

2.2.4. Fokus Bidang Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Rejang Lebong, pada tahun 2014 Kabupaten Rejang Lebong memperoleh Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kabupaten Rejang Lebong semenjak tahun 2010 hingga 2015 selalu memperoleh Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap pemeriksaan LKPD, hal ini disebabkan belum tersedianya sistem aplikasi keuangan dan belum terinventarisir data aset dengan baik. Kedepan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diharapkan mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik agar dapat memperoleh Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Bidang Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan bangsa. Partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan sangat diharapkan, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan tentunya harus di ikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai. Lebih rinci Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk

Pendidikan Dasar (SD dan SLTP) dan pendidikan menengah (SLTA) pada kurun waktu 2010-2014 disajikan pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010-2015

Uraian		Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
APS	Pendidikan Dasar						
	7-12 Tahun (SD)	98,58	98,94	98,65	99,00	98,94	100,00
	13-15 Tahun (SLTP)	83,63	89,02	89,00	90,86	95,83	95,59
	Pendidikan Menengah						
	16-18 Tahun (SLTA)	62,11	59,84	57,94	69,16	74,33	72,57

(Sumber : BPS, Berita Resmi BPS Tahun 2016)

Dari tabel diatas, dapat kita lihat jika semakin tinggi jenjang pendidikan, maka APS akan semakin menurun. Ini menunjukan jika penduduk usia sekolah hanya mampu bersekolah pada jenjang pendidikan dasar saja. Hal ini dapat diakibatkan oleh berbagai hal, seperti minimnya sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pengajar, belum ada akses pendidikan yang merata bahkan dapat disebabkan oleh kemiskinan.

2. Rasio guru/murid serta fasilitas pendidikan

Seperti diketahui pertambahan penduduk dari tahun ke tahun biasanya berkaitan dengan jumlah penduduk usia sekolah. Sehubungan dengan itu sudah tentu harus diimbangi dengan meningkatnya jumlah sarana fisik pendidikan maupun tenaga pendidik/guru.

Bila dilihat dari data pada Tabel 2.16, ada peningkatan yang signifikan antara jumlah pendidik dan siswa serta fasilitas pendidikan khususnya pada tingkat SMP/Mts dan SMA/MA/SMK. Pada tahun 2015 pada tingkat SMP/MTs sebanyak 61 sekolah dengan jumlah guru 970 orang dan murid 13.842 siswa dan di tahun 2016 jumlah sekolah sebanyak 62 bangunan dengan jumlah guru 1.056 orang dan murid 14.137 siswa. Sedangkan pada tingkat SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebanyak 34 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 899 orang dan 10.528 siswa dan di tahun 2016 sebanyak 35 bangunan dengan jumlah guru sebanyak 930 orang dan murid 11.344 siswa. Sedangkan pada tingkat SD/MI relatif menurun dengan

rincian sebanyak 196 sekolah dengan jumlah guru 2.156 orang dan murid 32.487 siswa pada tahun 2016 sedangkan di tahun 2015 jumlah sekolah sebanyak 194 bangunan dengan jumlah guru 2.169 orang dan murid 33.113 siswa.

Tabel 2.17
Rasio Guru/Murid Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015 s.d 2016
Kabupaten Rejang Lebong

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016
1	SD/MI		
1.1.	Fasilitas Pendidikan	194	196
1.2.	Jumlah Guru	2.169	2.156
1.3.	Jumlah Murid	33.113	32.487
1.4.	Rasio	25	25
2	SMP/MTs		
2.1.	Fasilitas Pendidikan	61	62
2.2.	Jumlah Guru	970	1.056
2.3.	Jumlah Murid	13.842	14.137
2.4.	Rasio	23,26	22
3	SMA/MA/SMK		
3.1.	Fasilitas Pendidikan	34	35
3.2.	Jumlah Guru	899	930
3.3.	Jumlah Murid	10.528	11.344
3.4.	Rasio	34,98	35

(Sumber : BPS, RLDA Tahun 2015 dan 2016)

B. Bidang Kesehatan

Upaya yang dilakukan pemerintah sebagai penjabaran dari arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di setiap kecamatan terutama di kecamatan pemekaran. Hingga tahun 2015 jumlah Puskesmas yang telah dibangun di Kabupaten Rejang Lebong telah mencapai 21 buah. Tapi, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong, jumlah Puskesmas yang ada masih jauh dari cukup. Hal ini terlihat dari kecilnya rasio puskesmas terhadap penduduk.

Pada tahun 2015, jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Rejang Lebong masing-masing sebanyak 21 buah dan 54 buah. Banyaknya fasilitas kesehatan menurut jenisnya dari tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.18

Tabel 2.18**Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010-2015**

Fasilitas Kesehatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rumah Sakit Umum	1	1	1	1	1	1
RS TNI/POLRI	1	1	1	1	1	1
Puskesmas	9	14	19	21	21	21
Puskesmas Pembantu	54	54	54	54	54	54
Puskesmas Keliling	17	19	21	21	21	21
Klinik/KIA	3	18	18	18	18	18
Balai Pengobatan	4	5	5	5	5	5
Posyandu	188	193	199	199	203	188
Rumah Bersalin	1	1	1	1	1	1
Apotik	9	11	11	11	11	11
Toko Obat Berizin	20	15	10	10	10	10

Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2011-2016

Adapun banyaknya tenaga kesehatan menurut jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong kurun waktu 2010–2015 dapat dilihat pada Tabel 2.19

Tabel 2.19**Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010 - 2015**

Jenis Tenaga Kesehatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dokter Umum	30	25	19	44	44	39
Dokter Gigi	7	7	6	6	6	6
Dokter Spesialis	3	3	3	3	3	6
Perawat dan Bidan	538	409	280	470	537	688
Tenaga Farmasi	20	19	18	30	23	23
Sarjana Farmasi dan Apoteker	4	4	4	4	4	12
Tenaga Sanitarian	41	53	66	28	29	38
Kesehatan Masyarakat	25	31	38	68	110	78
Tenaga Gizi	24	20	15	29	29	38
Tenaga Terapi Fisik	3	3	3	9	9	9
Tenaga Keteknisian Medik	31	23	16	27	27	27
Lainnya	29	28	26	20	20	122
Jumlah	755	625	494	738	841	1086

Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka (2011-2016)

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan**A. Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Palawija**

Pada tahun 2015, produksi padi Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan data dari Dinas Pertanian secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 0.84% dibandingkan dengan produksi tahun 2014 dari 105.302 ton gabah kering giling menjadi 106.194 ton gabah kering giling. luas panen padi di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 masih didominasi oleh padi sawah. Luas panen

padi sawah sebesar 20.861 hektar (96.40 persen) dan padi ladang seluas 779 hektar (3.60 persen).

Produksi palawija pada tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2014. Ada 6 jenis komoditi palawija yang dijadikan sebagai standar pengukuran dalam penentuan Angka Tetap baik yang dikeluarkan oleh BPS maupun dari Dinas Pertanian. Diantara komoditi yang dimaksud adalah: jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Selama tahun 2015, komoditi yang mengalami penurunan adalah jenis komoditi jagung yakni turun sebesar 20,03% (39.225 ton pada tahun 2014 menjadi 31.368 ton pada tahun 2015), ubi kayu turun sebesar 36,68% (28.353 ton pada tahun 2014 menjadi 17.953 ton pada tahun 2015), ubi jalar turun 29,35% (19.688 ton pada tahun 2014 menjadi 13.910 ton pada tahun 2015), kacang tanah turun sebesar 22,55% (2.239 ton pada tahun 2014 menjadi 1.734 ton pada tahun 2015), kacang hijau turun sebesar 19.09% (241 ton pada tahun 2014 menjadi 195 ton pada tahun 2015), dan kedelai turun sebesar 1.49% (1.342 ton pada tahun 2014 menjadi 1.322 ton pada tahun 2015) Data luas panen, produksi dan produktifitas tanaman pangan dan palawija di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel 2.20.

Berdasarkan Tabel 2.21 komoditi sayuran yang diproduksi di Kabupaten Rejang Lebong ada 5 komoditi yang mengalami peningkatan terbesar dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya adalah: kubis, cabe, terung, dan wortel dan sawi Lebih lanjut data luas panen, produksi dan produktifitas tanaman hortikultura di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.20
Data Luas Panen, Produksi dan Produktifitas
Tanaman Pangan dan Palawija Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015

No	Komoditi Utama	Luas Lahan Panen (ha)	Produksi	Produktifitas (Ton/ha)
			(Ton)	
1	Padi sawah	20861	104480.2	5.0
2	Padi Ladang	779	1714	2.2
3	Jagung	6127	30581	5.0
4	Ubi Kayu	1450	17953	12.4
5	Ubi Jalar	1400	13910	9.9
6	Kacang Tanah	1656	1734	1.0
7	Kedelai	1322	1368	1.0
8	Kacang Hijau	203	195	1.0

Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2016

Tabel 2.21
Data Luas Panen, Produksi dan Produktifitas
Tanaman Hortikultura Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015

No	Komoditi Utama	Luas Lahan Panen (ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton/Ha)
1	Bawang Merah	7.00	43.19	6.17
2	Bawang Daun	2,341.00	21,483.00	9.18
3	Kentang	595.00	8,187.23	13.76
4	Kubis	2,209.00	80,271.06	36.34
5	Kembang Kol	729.00	10,772.82	14.78
6	Petsai/Sawi	1,854.00	27,583.11	14.88
7	Wortel	1,574.00	39,380.02	25.02
8	Kacang Merah	215.00	645.72	3.00
9	Kacang Panjang	665.00	1,837.61	2.76
10	Cabe Besar	4,886.00	27,302.75	5.59
11	Cabe Rawit	946.00	3,402.98	3.60
12	Tomat	1,773.00	11,504.45	6.49
13	Terung	1,389.00	36,882.50	26.55
14	Buncis	1,073.00	18,368.24	17.12
15	Ketimun	680.00	6,436.20	9.47
16	Labu Siam	502.00	12,379.60	24.66
17	Kangkung	173.00	2,396.03	13.85
18	Bayam	91.00	228.18	2.51

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Rejang Lebong Tahun 2015

Kabupaten Rejang Lebong dengan topografi yang berbukit-bukit dan kondisi tanah yang subur sangat potensial untuk dikembangkan jenis tanaman perkebunan baik untuk skala kecil maupun skala besar. Dari sejumlah tanaman perkebunan yang diusahakan di Kabupaten Rejang Lebong, lebih lanjut luas tanam, produksi dan produktifitas tanaman perkebunan di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Data Luas Tanam, Produksi dan Produktifitas
Tanaman Perkebunan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015

No	Komoditi Utama	Luas Lahan Tanam (ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton/ha)
1	Karet	9210	7500	0.81
2	Kelapa	373.5	13000	34.81
3	Kelapa Sawit	497	1.6	0.00
4	Kopi	20177.55	10250	0.51
3	Lada	145.7	5450	37.41
4	Kakao	543	10900	20.07

Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2016, Dinas kehutanan dan perkebunan

Populasi ternak di Kabupaten Rejang Lebong seperti tahun-tahun sebelumnya dibagi menjadi 3 kelompok : kelompok pertama adalah ternak besar yang meliputi: sapi potong, sapi perah, kerbau, babi dan kuda. Kelompok kedua disebut ternak kecil meliputi: kambing, domba, dan kelinci. Sedangkan kelompok ke-3 meliputi: ayam buras, ayam petelur, ayam potong, itik, dan ayam duren. Secara umum dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 jenis ternak yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat adalah jenis ayam pedaging 312.317 ekor, diikuti dengan ayam buras 236.413 ekor, dan posisi ketiga ditempati oleh jenis kambing sebanyak 47.726 ekor.

Usaha di subsektor Perikanan di Kabupaten Rejang Lebong dibedakan menjadi 3 jenis usaha, yakni budidaya, penangkapan dan pembenihan. Jenis budidaya perikanan darat dibedakan menjadi 5 jenis budidaya. Diantaranya adalah kolam air deras, kolam air tenang, sawah/mina padi, siring/keramba dan jaring apung. Untuk jenis penangkapan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu penangkapan di sungai dan penangkapan di danau/tebat, sedangkan usaha budidaya jenis pembenihan dilakukan menjadi 2 jenis yakni BBI dinas dan UPR.

Selanjutnya data populasi ternak di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012-2015 dapat di lihat pada Tabel 2.23. Sedangkan luas usaha perikanan darat di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2013-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.23
Data Populasi Ternak di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2015

No	Jenis Ternak	Jumlah Populasi (Ekor)			
		2012	2013	2014	2015
1	Sapi Potong	8.113	5.759	5.759	5358
2	Sapi Perah	93	143	317	156
3	Kerbau	550	442	169	486
4	Kambing	16.324	79.681	47.726	27885
5	Domba	420	299	418	485
6	Ayam Buras	97.944	295.867	236.413	158182
7	Ayam Petelur	12	33	30.067	29363
8	Ayam Pedaging	-	442.317	312.317	276500
9	Itik	19.877	11.12	10.385	22771
10	Kelinci	580	3 034	665	-
11	Ayam Duren/Sirama	-	-	970	-

Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2015

Tabel 2.24
Luas Usaha Perikanan Darat di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2013-2015

Jenis Usaha	2013	2014	2015
I. Budidaya			
1. Kolam air deras (KAD)/Petak	144	144	144
2. Kolam air tenang (KAT)/Ha	65,35	65,35	65,35
3. Sawah/Mina padi/Ha	-	-	-
4. Siring/Keramba/Ha	-	-	5,5
5. Jaring apung/petak	110	115	144
II. Penangkapan			
1. Sungai/Kuala	139	140	144
2. Danau/Tebat	8,5	8,5	8,5
III. Pembenihan			
1. BBI Dinas (unit)	4	4	4
2. UPR/Ha	-	-	3,8

Sumber : Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Rejang Lebong, 2016

Pada tahun 2013, produksi hasil hutan di Kabupaten Rejang Lebong yang dilaporkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan hanya mencakup 6 jenis tanaman diantaranya adalah kemiri, meranti, rimba campuran, rasamala, kayu olahan dan kayu sengon.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga merupakan gambaran kesejahteraan suatu masyarakat. Namun banyak faktor yang menjadi penghalang dalam mengumpulkan data pendapatan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, digunakan pendekatan pengeluaran untuk mendapatkan perkiraan pendapatan. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan, menggambarkan pengalokasian pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Pada tahun 2014, rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya menurut kelompok makanan adalah sebesar Rp 350.431 per kapita per bulan sedangkan menurut kelompok bukan makanan adalah sebesar Rp 251.794 per kapita per bulan. Pada tahun 2015 rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya menurut kelompok makanan adalah sebesar Rp 380.274,04 per kapita per bulan sedangkan menurut kelompok bukan makanan adalah sebesar Rp 605.792,66 per kapita per bulan. Sedangkan pada tahun 2016 rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya menurut kelompok makanan adalah sebesar Rp 395.503 per kapita per bulan sedangkan menurut kelompok bukan makanan adalah sebesar Rp 395.928 per kapita per bulan.

Tabel 2.25
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan
di Kabupaten Rejang Lebong (Rupiah) Tahun 2014 - 2016

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan		
	2014	2015	2016
Padi-padian	70.226	76.757,05	72.164
Umbi-umbian	3.742	4.791,49	3.329
Ikan	27.299	28.625,71	26.110
Daging	10.780	14.569,32	14.271
Telur dan susu	18.622	19.547,04	21.724
Sayur-sayuran	37.654	32.752,94	43.237
Kacang-kacangan	7.714	8.977,85	8.043
Buah-buahan	17.220	16.039,90	17.647
Minyak dan lemak	11.429	13.059,40	13.549
Bahan minuman	14.995	17.924,91	17.276
Bumbu-bumbuan	6.265	7.629,78	6.576
Konsumsi lainnya	7.148	9.340,55	8.836
Makanan dan minuman jadi	61.913	73.678,24	73.562
Tembakau dan sirih	55.933	56.579,86	69.179
Jumlah	350.939	380.274,04	395.503

Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2016

Dari tahun 2014 sampai dengan 2016 di Kabupaten Rejang Lebong, pengeluaran rumah tangga tertinggi menurut kelompok makanan terjadi pada tahun 2016 digunakan untuk makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 73.562, sedangkan menurut kelompok bukan makanan terjadi pada tahun 2015 khususnya digunakan untuk aneka barang dan jasa sebesar Rp. 234.651,97.

Tabel 2.26
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan
di Kabupaten Rejang Lebong (Rupiah) Tahun 2014 - 2016

Kelompok Bukan Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan		
	2014	2015	2016
Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	92.157	169.714,52	184.149
Aneka barang dan jasa	108.354	234.651,97	81.090
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	17.585	96.727,49	28.234
Barang yang tahan lama	13.230	50.296,44	80.643
Pajak pemakaian dan premi asuransi	8.986	50.820,99	12.465
Keperluan pesta dan upacara	11.483	3.581,25	9.346
Jumlah	251.794	605.792,66	395.928

Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2016

2.4.2. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Sebagai gambaran umum, dari keseluruhan panjang jalan yang telah dibangun di Kabupaten Rejang Lebong mencapai 916,925 km berdasarkan hasil musrenbang propinsi : (1) Jalan Nasional sepanjang 53,25 km (5,81%); (2) Jalan Popinsi sepanjang 135 km (14,72%) dan Jalan Kabupaten sepanjang 728,675 km (79,47%).

Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dibandingkan panjang jalan keseluruhan meningkat dari tahun 2010-2015. Pada tahun 2010 hanya 49,59% yang berkondisi baik, sedangkan pada tahun 2015 menjadi 51,53%.

Kondisi jalan sedang, rusak dan rusak berat di Kabupaten Rejang Lebong mencapai porsi 48,47% yang diakibatkan masih banyak truk angkutan barang yang melebihi tonase memasuki jalan kota sehingga berakibat terjadi percepatan kerusakan jalan. Hal ini diperparah dengan dukungan alokasi pendanaan yang minim.

Tabel.2.27
Panjang Jalan Menurut Tingkat Pemerintahan Yang Berwenang di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 dan 2015 (km)

Uraian	Tingkat Pemerintahan Yang Berwenang						Jumlah	
	Negara		Provinsi		Kab		2014	2015
	2014	2015	2014	2015	2014	2015		
Jenis Permukaan								
Aspal	53.25	53.25	135	135	487.56	538	675.81	725.764
Penetrasi.Kerikil	0	0	0	0	111	86	111	85.553
Tanah	0	0	0	0	123.8	106	123.8	105.608
Tidak Dirinci	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	53.25	53.25	135	135	722.36	728.675	910.61	916.925
Kondisi Jalan								
Baik	-	-	-	-	509.34	426,412	509.34	426,412
Sedang	-	-	-	-	93.82	53,975	93.82	53,975
Rusak	-	-	-	-	60.58	49,478	60.58	49,478
Rusak Berat	-	-	-	-	58.63	198,81	58.63	198,81
Tidak Dirinci	53.25	53.25	135	135	-	-	188.25	188,25
Total	53.25	53.25	135	135	722.37	728,675	910.62	916,925

Sumber: Rejang Lebong Dalam Angka 2016

Dari data panjang jalan menurut tingkat pemerintahan yang berwenang di Kabupaten Rejang Lebong terlihat bahwa pada Tahun 2015 panjang jalan mengalami peningkatan sepanjang 6,315 km.

2.4.3. Iklim Berinvestasi

Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Dalam kaitan tersebut peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman

modal, bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Salah satu indikator yang berpengaruh adalah masalah keamanan suatu daerah, keamanan suatu daerah dapat dilihat dari angka laporan kejahatan yang terjadi setiap tahun. Angka kriminalitas yang dilaporkan dan diselesaikan di Kabupaten Rejang Lebong cukup fluktuatif, tahun 2013 sebesar 1093 kasus, tahun 2014 sebanyak 730 kasus, tahun 2015 sebesar 874 kasus, dan tahun 2016 sebanyak 557 kasus. Faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya, oleh karena itu penting bagi Kabupaten Rejang Lebong diharapkan memiliki berbagai strategi dalam menjaga kestabilan penurunan angka kriminalitas.

Cerminan iklim investasi yang baik dapat dilihat dari angka pendapatan daerah melalui pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah, realisasi pajak daerah Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan tren yang positif meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2013 realisasi pajak daerah sebesar 6,61 milyar rupiah, tahun 2014 sebesar 8,04 milyar rupiah, tahun 2015 sebesar 8,44 milyar rupiah dan tahun 2016 sebesar 9,81 milyar rupiah. Pendapatan pajak daerah berasal dari 9 macam pajak daerah dan dari 57 macam retribusi daerah, yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk penerimaan retribusi daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2013 sebesar 6,98 milyar rupiah, meningkat menjadi 7,19 milyar rupiah tahun 2014, sebanyak 4,60 milyar rupiah tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 5,66 milyar rupiah.

Tabel.2.28
Iklim Berinvestasi Tahun 2013 s/d 2016

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Laporan Kejahatan Yang Masuk dan Diselesaikan	1093	730	874	557
2.	Pajak Daerah (Ribu rupiah)	6.612.192	8.043.705	8.448.004	9.816.828
3.	Retribusi Daerah (Ribu rupiah)	6.981.783	7.194.718	4.608.108	5.668.207
4.	Jumlah Penerbitan Perizinan Baru dan Perpanjangan	421	333	336	417
5.	Macam Pajak Daerah	9	9	9	9
6.	Macam retribusi Daerah	57	57	57	57
7.	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha	1	1	1	1

Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka dan BPKAD Kab Rejang Lebong

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Bila dibandingkan pada tahun 2010, maka proporsi yang terserap di sektor pertanian dan industri terjadi penurunan. Pekerja yang terserap di sektor perdagangan sedikit meningkat dan begitu juga halnya pada sektor konstruksi, Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran penyerapan tenaga kerja dimana angka penambahan tertinggi adalah ke sektor konstruksi. Ini artinya, selain sektor pertanian, sektor konstruksi juga merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam penyerapan tenaga kerja.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian dapat menyerap angkatan kerja.

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Selama rentang tahun 2012-2015 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan trend yang fluktuatif yakni 74,82% pada tahun 2012 menurun menjadi 72,57% pada tahun 2013, 71, 48 pada tahun 2014 dan meningkat sebesar 76,31% pada tahun 2015 Lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2. 29
Profil Angkatan Kerja di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2015

No	Jenis Kegiatan Utama	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
I.	Angkatan Kerja	133.568	127.631	131.070	141.348
	1. Bekerja	130.871	122.293	129.342	135.127
	2. Mencari Pekerjaan	2.697	5.338	1.728	6.221
II.	Bukan Angkatan Kerja	44.963	48.239	52.293	43.871
	1. Sekolah	19.314	17.567	19.853	18.745
	2. Mengurus Rumah Tangga	19.569	23.278	26.621	18.129
	3. Lainnya	6.080	7.394	5.819	6.997
	Jumlah	178.531	175.870	183.363	185.219
	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74,82	72,57	71,48	76,31%

Sumber : *BPS, Rejang Lebong Dalam Angka Tahun 2016*

Tabel 2.30
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan
Tingkat Kesempatan Kerja menurut Kab/Kota
di Propinsi Bengkulu Tahun 2015

Kab/Kota	TPAK	TPT	TKK
Bengkulu Selatan	70,44	4,14	95.86
Rejang Lebong	76,31	4,40	95.60
Bengkulu Utara	69,76	4,05	95.95
Kaur	78,23	4,73	95.27
Seluma	72,99	2,14	97.86
Muko – Muko	64,63	3,33	96.67
Lebong	72,68	6,81	93.19
Kepahiang	73,80	4,92	95.08
Bengkulu Tengah	66,87	5,97	94.03
Kota Bengkulu	66,02	7,81	92.19
Provinsi Bengkulu	70,67	4,91	95.09

Sumber : BPS, Sakernas 2015

Dari tabel statistik di atas, dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2015 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi terdapat di Kabupaten Kaur. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terendah terdapat di Kabupaten Muko-muko.



Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah tahun-tahun sebelumnya (2011-2015), serta kerangka pendanaan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang.

Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab VI Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa daerah mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Kemudian hal ini di *follow up* dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditujukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang lebih luas kepada daerah dalam wujud desentralisasi untuk mengurus daerahnya. Melalui kebijakan otonomi daerah dapat berdampak positif terhadap :

- (1) Perkembangan pembangunan ekonomi daerah yang efektif, efisien dan tangguh dengan memberdayakan *stakeholder* dan potensi ekonomi daerah;
- (2) Kemajuan pembangunan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat;
- dan (3) Meningkatkan kualitas hidup melalui sumber daya manusia di daerah yang handal yang mampu mengelola potensi dan kepentingan daerah. Hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk merealisasikannya diperlukan dukungan *resources financing* (sumber daya pendanaan) dalam membangun daerah sejalan dengan implementasi desentralisasi. Oleh sebab itu harus disertai juga dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik oleh pemerintah daerah (*good governance*). Di dalam pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada prinsip-prinsip :

1. *Transparance* (Transparansi), yaitu adanya keterbukaan dari pemerintah daerah dalam proses pembuatan kebijakan mengenai keuangan daerah, dan memberikan kebebasan memperoleh informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan keuangan dalam pembangunan daerah.
2. *Efficient* (Efisien), yaitu setiap pengeluaran anggaran daerah berdasarkan proporsi kebutuhan program dan kegiatan daerah guna menghasilkan *output* atau *income* tanpa mengurangi pelayanan yang optimal kepada publik.

3. *Effective* (Efektif), yaitu dalam implementasi kebijakan keuangan harus tepat guna dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, serta realisasi anggaran sesuai dengan rencana pembangunan dan habis terpakai.
4. *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu kepercayaan dalam pengelolaan keuangan daerah wajib dipertanggungjawabkan kepada semua elemen masyarakat. Secara institusional pertanggungjawaban dilakukan kepada Legislatif (DPRD) sebagai representatif dari masyarakat yang dapat menilai kinerja Eksekutif (PEMDA) dengan menggunakan kriteria dan tolok ukur yang bersifat komprehensif yang mencakup aspek kebijakan dan penggunaan anggaran.
5. *Participative* (Partisipatif), yaitu adanya peran serta langsung atau tidak langsung dari publik dalam memberikan kajian, koreksi/kritikan, dan masukan yang konstruktif terhadap system pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel. Di samping itu, kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah mengakomodasi aspirasi masyarakat serta memberi peran yang besar kepada masyarakat dalam wujud pemberdayaan masyarakat dalam membangun daerah melalui proyek-proyek pembangunan.

Dalam kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di masa otonomi daerah membawa konsekuensi berbagai fluktuasi dalam keuangan daerah yang didalamnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). adapun struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi : (a) Pendapatan daerah; (b) Belanja Daerah; dan (c) Pembiayaan.

Dalam setiap penyusunan APBD, ketiga unsur itu harus ada. Keadaan suatu APBD tergantung pada kapasitas pendapatan yang daerah miliki.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki unsur pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tersebut. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asil daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung, sedangkan pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kondisi keuangan Kabupaten Rejang Lebong selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami fluktuasi seiring dengan perkembangan perekonomiannya. Indikatornya pada fluktuasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini yang komposisinya meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis pendapatan daerah berikut ini memberikan gambaran kondisi pendapatan daerah yang tercermin dalam APBD. Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah. PAD mencakup: 1) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Kinerja pendapatan daerah dapat diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar local taxing power suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Rejang Lebong dalam kurun waktu tahun 2011-2015 tergolong masih rendah, terlihat dari proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 4,42%-7,52%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Rejang Lebong terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bengkulu sangat tinggi.

Tabel 3.1

Kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011-2015

Jenis Pendapatan Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
A. Pendapatan Asli Daerah	30.923.582.372	25.886.241.431	32.813.120.472	50.217.203.425	63.981.100.965	25,76
1. Pajak Daerah	4.487.000.000	4.006.681.400	5.209.101.276	7.255.878.956	6.979.294.745	15,78
2. Retribusi daerah	20.046.933.307	4.420.291.600	7.110.593.765	9.096.359.283	6.516.124.655	6,69
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.538.221.690	1.595.768.431	1.295.004.993	2.242.181.565	2.222.181.565	6,04
4. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah	3.851.427.375	15.863.500.000	19.198.420.438	31.622.783.621	48.263.500.000	30,38
B. Dana Perimbangan	441.769.087.616	520.663.424.469	572.869.412.490	613.636.037.560	655.894.044.000	7,40
1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak	26.975.083.616	23.240.769.469	26.028.664.490	24.862.046.060	28.793.414.000	6,56
2. Dana Alokasi Umum	374.729.904.000	448.469.185.000	498.073.138.000	541.429.561.500	566.446.460.000	7,46
3. Dana Alokasi Khusus	40.064.100.000	48.953.470.000	48.767.610.000	47.344.430.000	60.654.170.000	6,19
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	90.434.556.595	38.902.622.722	77.848.672.442	117.196.767.042	130.918.303.208	31,36
1. Pendapatan hibah	-	-	-	-	-	-
2. Dana darurat	-	-	-	-	-	-
3. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemda lainnya	10.088.572.395	10.543.743.562	10.543.743.562	12.217.456.042	16.000.000.000	12,45
4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	80.345.984.200	28.358.879.160	65.309.278.880	104.979.311.000	114.918.303.208	34,34
5. Bantuan keuangan dari propinsi/pemda lainnya	-	-	1.995.650.000	-	-	-
PENDAPATAN DAERAH	563.127.226.583	585.452.288.622	683.531.205.404	781.050.008.027	850.793.448.173	11,7

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Data diolah)

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang sentosa. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan pencermatan terhadap proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong selama Tahun Anggaran 2011-2016 ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap
Total Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran 2011 - 2016

No	Jenis Penerimaan	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Realisasi 2014	Realisasi 2013	Realisasi 2012	Realisasi 2011
1	Pendapatan Asli Daerah	71.294.600.225,14	58.706.435.941,60	64.936.983.995,77	40.457.341.346,80	47.171.759.045,92	19.851.004.770,20
2	Dana Perimbangan	743.057.291.113,00	665.203.694.156,00	611.892.330.400,00	571.106.867.672,00	524.063.886.149,00	439.972.091.228,00
3	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	7.380.952.719,00	970.000.000,00	0,00	1.995.650.000,00	0,00	0,00
	Total	821.732.844.057,14	724.880.130.097,60	676.829.314.395,77	613.559.859.018,80	571.235.645.194,92	459.823.095.998,20
<i>Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016</i>							

secara terperinci, target dan realisasi pendapatan daerah selama periode Tahun Anggaran 2011-2016, tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) **Pendapatan Asli Daerah**

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan PAD di masa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
4. Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
8. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Untuk Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rejang Lebong dapat dijelaskan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3				
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	27.129.370.797,00	19.851.004.770,20	73,17	-7.278.366.026,80
2012	30.126.525.431,00	47.171.759.045,92	156,58	17.045.233.614,92
2013	33.613.120.471,80	40.457.341.346,80	120,36	6.844.220.875,00
2014	50.706.435.941,60	64.936.983.995,77	128,06	14.230.548.054,17
2015	66.187.723.381,04	58.706.435.941,60	88,70	-7.481.287.439,44
2016	75.271.697.319,14	71.294.600.225,14	94,72	-3.977.097.094,00
Jumlah	283.034.873.341,58	302.418.125.325,43	110,27	19.383.251.983,85
<i>Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016</i>				

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2016 target dan realisasi Pajak Daerah terlampaui, total target Pajak Daerah sebesar Rp. 36.230.405.916,- dan total realisasinya sebesar Rp. 42.357.274.200,50,- atau 102,84 % disajikan pada Tabel 3.4.

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	4.102.000.000,00	4.186.628.583,00	102,06	84.628.583,00
2012	4.106.681.400,00	5.282.365.933,00	128,63	1.175.684.533,00
2013	5.148.179.000,00	6.612.191.340,00	128,44	1.464.012.340,00
2014	7.255.878.956,00	8.043.705.722,00	110,86	787.826.766,00
2015	7.062.623.964,00	8.415.554.237,50	119,16	1.352.930.273,50
2016	8.555.042.596,00	9.816.828.385,00	114,75	1.261.785.789,00
Jumlah	36.230.405.916,00	42.357.274.200,50	117,32	6.126.868.284,50

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Target dan realisasi Retribusi Daerah selama periode 2011-2016 hanya Tahun 2012 dan 2016 yang tercapai, yaitu sebesar 100,56 % pada tahun 2012, dan sebesar 118,28 % pada tahun 2016. Selama periode Tahun Anggaran 2011-2016, target Retribusi Daerah secara akumulasi sebesar Rp. 50.657.849.715,00,- dan realisasinya belum melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 42.947.264.823,20,- atau 89,83 %, disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5				
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	16.617.721.732,00	11.864.327.770,20	71,40	-4.753.393.961,80
2012	6.560.575.600,00	6.597.491.239,00	100,56	36.915.639,00
2013	7.171.516.041,00	6.981.963.747,00	97,36	-189.552.294,00
2014	9.096.359.283,00	7.194.718.118,00	79,09	-1.901.641.165,00
2015	6.419.651.102,00	4.640.557.334,00	72,29	-1.779.093.768,00
2016	4.792.025.957,00	5.668.206.615,00	118,28	876.180.658,00
Jumlah	50.657.849.715,00	42.947.264.823,20	89,83	-7.710.584.891,80

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2016, target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah secara akumulasi sebesar Rp. 13.503.750.805,59 dengan realisasinya sebesar Rp. 14.379.409.936,88 atau 110,62 %, disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6				
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	2.558.221.690,00	1.662.848.239,49	65,00	-895.373.450,51
2012	1.595.768.431,00	1.310.004.992,80	82,09	-285.763.438,20
2013	1.295.004.992,80	2.042.148.608,04	157,69	747.143.615,24
2014	2.242.181.565,04	2.741.565.845,47	122,27	499.384.280,43
2015	2.222.181.565,04	3.042.449.689,37	136,91	820.268.124,33
2016	3.590.392.561,71	3.580.392.561,71	99,72	-10.000.000,00
Jumlah	13.503.750.805,59	14.379.409.936,88	110,62	875.659.131,29

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2016, target Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 9.376.603.000,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 10.346.602.719,00 atau sebesar 33,33 %, disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Lain - Lain PAD yang Sah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun Anggaran 2011 - 2016

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1.995.650.000,00	1.995.650.000,00	100,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	970.000.000,00	0,00	970.000.000,00
2016	7.380.953.000,00	7.380.952.719,00	100,00	-281,00
Jumlah	9.376.603.000,00	10.346.602.719,00	33,33	969.999.719,00

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus transparan, demokratis dan adil.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus. Secara keseluruhan, target pendapatan daerah

yang bersumber dari Dana Perimbangan selama periode Tahun Anggaran 2011-2016 sebesar Rp. 3.567.065.132.551,22 dengan realisasi sebesar Rp. 3.555.296.160.718,00 atau sebesar 99,71 %.

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	442.056.428.032,22	439.972.091.228,00	99,53	-2.084.336.804,22
2012	520.663.424.469,00	524.063.886.149,00	100,65	3.400.461.680,00
2013	572.781.861.490,00	571.106.867.672,00	99,71	-1.674.993.818,00
2014	613.636.037.560,00	611.892.330.400,00	99,72	-1.743.707.160,00
2015	668.894.044.000,00	665.203.694.156,00	99,45	-3.690.349.844,00
2016	749.033.337.000,00	743.057.291.113,00	99,20	-5.976.045.887,00
Jumlah	3.567.065.132.551,22	3.555.296.160.718,00	99,71	-11.768.971.833,22

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Secara keseluruhan, target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama periode Tahun Anggaran 2011-2016 adalah sebesar Rp. 147.975.491.051,22 sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. 143.721.712.121,- atau 98,25 % dari target, disajikan pada Tabel 3.9.

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	27.506.922.032,22	25.422.585.228,00	92,42	-2.084.336.804,22
2012	23.240.769.469,00	26.641.231.149,00	114,63	3.400.461.680,00
2013	25.941.113.490,00	24.266.120.172,00	93,54	-1.674.993.318,00
2014	24.862.046.060,00	23.118.338.900,00	92,99	-1.743.707.160,00
2015	28.793.414.000,00	25.100.854.156,00	87,18	-3.692.559.844,00
2016	17.631.226.000,00	19.172.582.516,00	108,74	1.541.356.516,00
Jumlah	147.975.491.051,22	143.721.712.121,00	98,25	-4.253.778.930,22

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama periode Tahun Anggaran 2011-2016 adalah sebesar Rp. 3.033.233.272.500,00

sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp. 3.033.233.272.500,00 atau 100 % pas dari target, disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10				
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	374.496.506.000,00	374.496.506.000,00	100,00	0,00
2012	448.469.185.000,00	448.469.185.000,00	100,00	0,00
2013	498.073.138.000,00	498.073.138.000,00	100,00	0,00
2014	541.429.561.500,00	541.429.561.500,00	100,00	0,00
2015	566.446.460.000,00	566.446.460.000,00	100,00	0,00
2016	604.318.422.000,00	604.318.422.000,00	100,00	0,00
Jumlah	3.033.233.272.500,00	3.033.233.272.500,00	100,00	0,00

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus selama periode tahun 2011-2016 dengan target sebesar Rp. 385.856.369.000,00 dan realisasi penerimaan selama periode Tahun Anggaran 2011-2016 adalah sebesar Rp. 378.041.176.097,00 atau 98,98 % dari target, disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11				
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	40.053.000.000,00	40.053.000.000,00	100,00	0,00
2012	48.953.470.000,00	48.953.470.000,00	100,00	0,00
2013	48.767.610.000,00	48.767.609.500,00	99,99999897	-500,00
2014	47.344.430.000,00	47.344.430.000,00	100,00	0,00
2015	73.654.170.000,00	73.656.380.000,00	100,00300051	2.210.000,00
2016	127.083.689.000,00	119.266.286.597,00	93,85	-7.817.402.403,00
Jumlah	385.856.369.000,00	378.041.176.097,00	98,98	-7.815.192.903,00

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2016, ditargetkan sebesar Rp. 9.376.603.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.346.602.719,00 atau sebesar 33,33 % dari target, disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12				
Target dan Realisasi Lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah				
Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1.995.650.000,00	1.995.650.000,00	100,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	970.000.000,00	0,00	970.000.000,00
2016	7.380.953.000,00	7.380.952.719,00	100,00	-281,00
Jumlah	9.376.603.000,00	10.346.602.719,00	33,33	969.999.719,00
<i>Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016</i>				

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2016, target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp. 7.380.953.000,00 sedangkan realisasinya Rp. 8.350.952.719,00 atau sebesar 16,67 % dari target, disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13				
Target dan Realisasi Lain -lain Pendapatan Hibah Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	970.000.000,00	0,00	970.000.000,00
2016	7.380.953.000,00	7.380.952.719,00	99,999996	-281,00
Jumlah	7.380.953.000,00	8.350.952.719,00	16,67	969.999.719,00
<i>Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016</i>				

3.1.2. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah, berikut digambarkan perkembangan neraca daerah:

Tabel 3.14
NERACA
TAHUN 2011 S.D 2016
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (Audited)	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2014 (Audited)	31 Desember 2013 (Audited)	31 Desember 2012 (Audited)	31 Desember 2011 (Audited)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	113.669.733.900,30	136.044.174.523,84	116.187.111.424,92	86.763.101.093,67	49.774.087.319,11	39.216.521.093,99
Deposito	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	1.415.081.879,00	2.742.343.581,00	7.271.366.927,00	2.610.750,00	1.817.684.086,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	473.516,00	71.296.721,00	329.535.180,00	73.733.975,00	532.045.183,00	832.646.831,00
Kas di Bendahara Penerimaan	96.104.041,00	2.902.415,00	8.057.000,00	867.525.193,00	0,00	740.306.770,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak	5.742.468.807,00	5.202.531.531,00	4.661.049.255,00	4.365.584.430,00	392.744.864,00	1.100.010.799,30
Piutang Retribusi	482.673.720,00	829.371.120,00	87.999.302,00	45.017.600,00	103.145.204,00	64.912.940,00
Beban Dibayar Dimuka	184.368.921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	11.567.036.181,46	8.981.748.781,39	10.037.858.981,92	4.635.011.994,52	4.801.815.136,32	3.439.840.431,88
Penyisihan Piutang	(3.265.369.404,60)	(2.784.980.079,62)	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	6.546.525.505,55	5.119.331.958,36	5.218.366.015,00	3.963.528.428,50	5.003.043.652,78	7.046.375.402,00
JUMLAH ASET LANCAR	161.439.097.066,88	156.208.720.551,97	143.801.344.085,84	100.716.113.464,69	62.424.565.445,21	52.440.614.268,17
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Nonpermanen Lainnya	3.555.500.000,00	3.555.500.000,00	3.555.500.000,00	2.120.303.670,16	2.297.336.487,66	1.832.000.000,00
Akumulasi Penyisihan	(1.482.558.777,00)	(1.174.012.474,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Investasi Non Permanen	2.072.941.223,00	2.381.487.526,00	3.555.500.000,00	2.120.303.670,16	2.297.336.487,66	1.832.000.000,00
Investasi Permanen						
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	32.751.215.267,59	15.399.613.199,33	15.339.962.925,15	14.558.570.655,84	10.398.345.331,00	10.479.062.019,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen	32.751.215.267,59	15.399.613.199,33	15.339.962.925,15	14.558.570.655,84	10.398.345.331,00	10.479.062.019,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	34.824.156.490,59	17.781.100.725,33	18.895.462.925,15	16.678.874.326,00	12.695.681.818,66	12.311.062.019,00
ASET TETAP						
Tanah	241.233.985.222,40	238.989.778.456,42	237.744.028.420,42	194.537.478.990,00	198.007.931.497,00	191.735.944.797,00
Peralatan dan Mesin	284.482.470.338,66	226.968.302.352,90	216.353.501.770,00	204.328.361.848,00	197.206.646.736,00	176.516.085.430,00
Gedung dan Bangunan	584.764.061.171,08	544.489.965.772,08	465.501.500.033,12	437.895.807.947,12	388.975.210.831,23	365.663.953.410,23
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	901.563.859.778,12	779.008.183.769,62	716.261.428.798,50	635.101.341.672,50	539.889.030.854,99	509.872.797.798,99
Aset Tetap Lainnya	28.392.163.667,35	25.837.816.297,35	25.764.335.611,00	26.271.312.595,00	24.044.429.298,00	18.206.124.638,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.712.059.730,00	27.397.365.208,00	26.805.509.722,00	2.604.500.000,00	22.773.119.431,00	3.420.852.000,00
Akumulasi Penyusutan	(801.804.648.795,26)	(650.442.397.703,95)	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	1.251.343.951.112,35	1.192.249.014.152,42	1.688.430.304.355,04	1.500.738.803.052,62	1.370.896.368.648,22	1.265.415.758.074,22
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA						
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	187.071.550,00	211.923.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.628.635.500,00	2.377.960.500,00	2.090.385.500,00	1.352.633.000,00	1.027.440.500,00	0,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.978.361.600,00)	(1.453.614.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	25.022.722.960,93	37.783.753.794,23	12.359.226.535,01	46.256.000,00	680.600.000,00	680.600.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	25.860.068.410,93	38.920.023.644,23	14.449.612.035,01	1.398.889.000,00	1.708.040.500,00	680.600.000,00
JUMLAH ASET	1.473.467.273.080,75	1.405.158.859.073,95	1.865.576.723.401,04	1.619.532.679.843,31	1.447.724.656.412,09	1.330.848.034.361,39
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	89.900.840,00	0,00	21.482.629,00	0,00	0,00	0,00
Utang Bunga	6.181.072.711,10	6.181.072.711,10	6.181.072.711,09	6.181.072.711,09	6.505.068.853,99	6.047.681.641,24
Utang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.182.214,22
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	81.509.029,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	8.052.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.225.845.261,00	6.314.392.686,00	7.672.410.721,00	3.254.111.072,55	3.172.862.090,18	139.885.605,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12.578.327.841,76	12.503.517.738,10	13.874.966.061,09	9.435.183.783,64	9.677.930.944,17	6.935.749.460,46
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.884.621,55
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.884.621,55
JUMLAH KEWAJIBAN	14.578.327.841,76	12.503.517.738,10	13.874.966.061,09	9.435.183.783,64	9.677.930.944,17	8.464.634.082,01
EKUITAS DANA						
Ekuitas	1.458.888.945.238,99	1.392.655.341.335,85	1.851.701.757.339,95	1.610.097.496.059,67	1.438.046.725.467,92	1.322.383.400.279,38
JUMLAH EKUITAS DANA	1.458.888.945.238,99	1.392.655.341.335,85	1.851.701.757.339,95	1.610.097.496.059,67	1.438.046.725.467,92	1.322.383.400.279,38
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.473.467.273.080,75	1.405.158.859.073,95	1.865.576.723.401,04	1.619.532.679.843,31	1.447.724.656.412,09	1.330.848.034.361,39

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2017

Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai kewajiban daerah, yang diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2016, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selama periode Tahun Anggaran 2011-2016, dari akumulasi target Belanja Daerah sebesar Rp. 4.971.315.867.342,77 terealisasi sebesar Rp. 4.410.477.596.421,38 atau 89,80 %, disajikan pada Tabel 3.15.

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	589.731.583.763,72	549.491.742.575,35	93,18	-40.239.841.188,37
2012	643.094.548.521,49	619.437.289.544,37	96,32	-23.657.258.977,12
2013	700.692.174.532,82	650.613.632.939,26	92,85	-50.078.541.593,56
2014	864.311.843.095,80	760.653.379.293,00	88,01	-103.658.463.802,80
2015	1.011.140.503.283,96	851.591.747.483,14	84,22	-159.548.755.800,82
2016	1.162.345.214.144,98	978.689.804.586,26	84,20	-183.655.409.558,72
Jumlah	4.971.315.867.342,77	4.410.477.596.421,38	89,80	-560.838.270.921,39

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Belanja Daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja yaitu: 1) Belanja Tidak Langsung dan 2) Belanja Langsung.

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, (g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan (h) Belanja Tidak Terduga. Selama periode Tahun Anggaran 2011-2016 dari target sebesar Rp. 2.990.233.982.451,97 dan realisasi sebesar Rp. 2.703.733.064.014 atau 91,58 % sebagaimana disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16				
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	351.639.727.228,42	344.894.948.904,03	98,08	(6.744.778.324)
2012	401.992.386.799,99	388.177.648.236,37	96,56	(13.814.738.564)
2013	429.763.754.568,82	406.363.102.537,26	94,55	(23.400.652.032)
2014	500.500.260.088,80	448.011.043.784,00	89,51	(52.489.216.305)
2015	623.873.408.456,96	522.680.597.104,68	83,78	(101.192.811.352)
2016	682.464.445.308,98	593.605.723.447,26	86,98	(88.858.721.862)
Jumlah	2.990.233.982.451,97	2.703.733.064.014	91,58	(286.500.918.438)

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Target Belanja Pegawai Kabupaten Rejang Lebong selama periode Tahun Anggaran 2011-2016 sebesar Rp. 2.701.847.026.629,17 dengan realisasi sebesar Rp. 2.493.687.584.530,70 atau 93,06 %, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17				
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	322.221.474.212,42	317.487.508.567,95	98,53	-4.733.965.644,47
2012	373.520.656.961,99	359.195.350.520,00	96,16	-14.325.306.441,99
2013	414.023.975.326,05	390.771.982.286,00	94,38	-23.251.993.040,05
2014	484.620.672.671,63	444.099.342.248,00	91,64	-40.521.330.423,63
2015	522.154.775.981,88	475.037.911.597,45	90,98	-47.116.864.384,43
2016	585.305.471.475,20	507.095.489.311,30	86,64	-78.209.982.163,90
Jumlah	2.701.847.026.629,17	2.493.687.584.530,70	93,06	-208.159.442.098,47

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Target Belanja Subsidi, selama periode Tahun Anggaran 2011 -2016 terealisasi Rp 0 atau 0 % , seperti disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18				
Target dan Realisasi Belanja Subsidi Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Target Belanja Hibah selama periode Tahun Anggaran 2011 – 2016 adalah sebesar Rp. 102.787.899.273,00 dengan realisasi sebesar Rp. 98.273.665.963,00 atau 89,53 %, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19				
Target dan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	7.872.178.812,00	7.438.143.750,00	94,49	-434.035.062,00
2012	27.596.598.600,00	26.744.499.520,00	96,91	-852.099.080,00
2013	16.790.182.361,00	16.304.949.080,00	97,11	-485.233.281,00
2014	14.953.350.000,00	13.783.200.000,00	92,17	-1.170.150.000,00
2015	32.611.589.500,00	32.299.073.613,00	99,04	-312.515.887,00
2016	2.964.000.000,00	1.703.800.000,00	57,48	-1.260.200.000,00
Jumlah	102.787.899.273,00	98.273.665.963,00	89,53	-4.514.233.310,00

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Selama periode Tahun Anggaran 2011 - 2016, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 23.317.287.619,00 atau 73,65 % dari target sebesar Rp. 25.767.242.370,00, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.20.

Tabel 3.20				
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	15.598.000.000	14.821.758.619	95,02	(776.241.381)
2012	2.654.129.000	2.576.979.000	97,09	(77.150.000)
2013	3.812.613.370	3.218.300.000	84,41	(594.313.370)
2014	3.382.500.000	2.585.500.000	76,44	(797.000.000)
2015	120.000.000	94.750.000	78,96	(25.250.000)
2016	200.000.000	20.000.000	10,00	(180.000.000)
Jumlah	25.767.242.370,00	23.317.287.619,00	73,65	(2.449.954.751)

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Target Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota selama periode Tahun Anggaran 2011-2016 Rp. 0 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21				
Target dan Realisasi Belanja bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota				
Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Target Belanja Tidak Terduga (BTT) selama periode Tahun Anggaran 2011–2016 sebesar Rp. 97.965.002.945,26 dengan realisasi sebesar Rp. 4.559.804.280,37 atau 40,84 %. Kecilnya realisasi BTT disebabkan pencairan dana tersebut mensyaratkan kriteria yang setiap tahun diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22				
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	2.500.000.000,00	2.420.746.909,00	96,83	(79.253.091)
2012	1.000.000.000,00	879.685.052,37	87,97	(120.314.948)
2013	1.500.000.000,00	889.965.000,00	59,33	(610.035.000)
2014	8.894.157.628,17	0,00	0,00	(8.894.157.628)
2015	50.701.681.295,08	180.451.840,00	0,36	(50.521.229.455)
2016	33.369.164.022,01	188.955.479,00	0,57	(33.180.208.543)
Jumlah	97.965.002.945,26	4.559.804.280,37	40,84	-93.405.198.664,89

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Target Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota selama periode Tahun Anggaran 2011–2016 sebesar Rp. 0 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %, sebagaimana pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23				
Target dan Realisasi Belanja bagi Hasil Kepada Kabupaten rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011				-
2012				-
2013				-
2014				-
2015				-
2016				-
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Selama periode Tahun Anggaran 2011-2016, rata-rata realisasi Belanja Langsung secara akumulatif tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp. 1.706.744.532.407,78 dari target Rp. 1.981.091.884.890,80 atau 87,19 %, disajikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24				
Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	238.091.856.535,30	204.596.793.671,32	85,93	(33.495.062.864)
2012	241.112.161.721,50	231.259.641.308,00	95,91	(9.852.520.414)
2013	270.928.419.964,00	244.250.530.402,00	90,15	(26.677.889.562)
2014	363.811.583.007,00	312.642.335.509,00	85,94	(51.169.247.498)
2015	387.267.094.827,00	328.911.150.378,46	84,93	(58.355.944.449)
2016	479.880.768.836,00	385.084.081.139,00	80,25	(94.796.687.697)
Jumlah	1.981.091.884.890,80	1.706.744.532.407,78	87,19	(274.347.352.483)

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Target Belanja Pegawai pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2011 - 2016 sebesar Rp. 231.366.038.981,00 dengan realisasi sebesar Rp. 205.731.315.955,00 atau 90,35 %, disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25				
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Pada Belanja Langsung Kabupaten Rejang lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	24.764.649.530,00	23.578.163.217,00	95,21	(1.186.486.313)
2012	29.682.910.077,00	26.753.588.171,00	90,13	(2.929.321.906)
2013	33.260.754.374,00	31.111.377.601,00	93,54	(2.149.376.773)
2014	38.580.907.000,00	37.728.607.517,00	97,79	(852.299.483)
2015	48.289.271.000,00	41.870.796.539,00	86,71	(6.418.474.461)
2016	56.787.547.000,00	44.688.782.910,00	78,69	(12.098.764.090)
Jumlah	231.366.038.981,00	205.731.315.955,00	90,35	(25.634.723.026)

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Target Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung selama periode Tahun Anggaran 2011-2016 sebesar Rp. 703.775.659.589,80 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 630.121.577.415,32 atau 91,77 %, disajikan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26				
Target dan Realisasi Belanja Barang Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	90.032.388.211,30	85.079.282.762,32	94,50	(4.953.105.449)
2012	85.928.337.819,50	97.867.456.397,00	113,89	11.939.118.578
2013	96.347.414.455,00	86.822.795.455,00	90,11	(9.524.619.000)
2014	117.880.704.505,00	105.327.676.102,00	89,35	(12.553.028.403)
2015	126.246.214.722,00	103.012.535.720,00	81,60	(23.233.679.002)
2016	187.340.599.877,00	152.011.830.979,00	81,14	(35.328.768.898)
Jumlah	703.775.659.589,80	630.121.577.415,32	91,77	(73.654.082.174)
<i>Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016</i>				

Belanja Modal pada Belanja Langsung, selama periode Tahun Anggaran 2011 - 2016 terealisasi Rp. 885.037.646.797,46 atau 84,40 % dari target sebesar Rp. 1.045.940.186.320,00 disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27				
Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	123.294.818.794,00	95.939.347.692,00	77,81	(27.355.471.102)
2012	125.490.913.825,00	106.638.596.740,00	84,98	(18.852.317.085)
2013	141.320.251.135,00	126.316.357.346,00	89,38	(15.003.893.789)
2014	207.349.971.502,00	169.586.051.890,00	81,79	(37.763.919.612)
2015	212.731.609.105,00	184.027.818.119,46	86,51	(28.703.790.986)
2016	235.752.621.959,00	202.529.475.010,00	85,91	(33.223.146.949)
Jumlah	1.045.940.186.320,00	885.037.646.797,46	84,40	(160.902.539.523)
<i>Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016</i>				

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) Koreksi (contra post), (c) Pencairan Dana Cadangan, (d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (e) Penerimaan Pinjaman Daerah, (f) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, (g) penerimaan piutang daerah.

Target penerimaan Pembiayaan selama periode Tahun Anggaran 2011 – 2016 sebesar Rp. 432.405.180.992,42 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 471.910.616.348,42 atau 125,62 %, seperti disajikan dalam Tabel 3.28.

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	24.453.868.071,99	31.702.459.937,89	129,64	7.248.591.866
2012	34.220.105.000,00	39.775.667.656,99	116,23	5.555.562.657
2013	24.270.027.123,00	50.306.132.502,11	207,28	26.036.105.379
2014	86.836.835.068,67	86.836.835.068,67	100,00	-
2015	123.766.530.902,92	124.431.706.356,92	100,54	665.175.454
2016	138.857.814.825,84	138.857.814.825,84	100,00	-
Jumlah	432.405.180.992,42	471.910.616.348,42	125,62	39.505.435.356

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Realisasi SiLPA, selama periode Tahun Anggaran 2011 – 2016 Rp. 471.910.616.348,42 atau 125,62 % dari target sebesar Rp. 432.405.180.992,42 disajikan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29				
Rincian Target dan Realisasi SILPA Kabupaten Rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Lebih / Kurang
2011	24.453.868.071,99	31.702.459.937,89	129,64	7.248.591.866
2012	34.220.105.000,00	39.775.667.656,99	116,23	5.555.562.657
2013	24.270.027.123,00	50.306.132.502,11	207,28	26.036.105.379
2014	86.836.835.068,67	86.836.835.068,67	100,00	-
2015	123.766.530.902,92	124.431.706.356,92	100,54	665.175.454
2016	138.857.814.825,84	138.857.814.825,84	100,00	-
Jumlah	432.405.180.992,42	471.910.616.348,42	125,62	39.505.435.356
<i>Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016</i>				

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur selama 6 (enam) tahun terakhir, dapat dilihat rincian proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.30				
Analisa proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten rejang Lebong				
Tahun Anggaran 2011 - 2016				
No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan) (Rp)	Persentase
1	TAHUN ANGGARAN 2011	322.221.474.212,42	612.256.127.143,71	190,01
2	TAHUN ANGGARAN 2012	373.520.656.961,99	675.843.971.307,27	180,94
3	TAHUN ANGGARAN 2013	414.023.975.326,05	718.394.139.541,59	173,52
4	TAHUN ANGGARAN 2014	484.620.672.671,63	947.573.678.164,47	195,53
5	TAHUN ANGGARAN 2015	522.154.775.981,88	1.132.407.034.186,88	216,87
6	TAHUN ANGGARAN 2016	585.305.471.475,20	1.292.852.075.970,82	220,89
Jumlah		2.701.847.026.629,17	5.379.327.026.314,74	196,29
<i>Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016</i>				

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih kecil proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD, meskipun jumlah aparatur terus meningkat.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada Penerimaan Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Untuk melihat perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.31

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rejang Lebong

Tahun Anggaran 2011 - 2016

No	Uraian	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan daerah	558.241.358.035,27	630.815.936.603,71	692.441.581.294,00	801.158.075.127,25	868.517.855.952,06	988.178.330.934,72
2	Realisasi Belanja Daerah	549.491.742.575,35	619.437.289.544,37	650.613.632.939,26	760.653.379.293,00	851.591.747.483,14	978.689.804.586,26
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	402.907.472,82	848.182.214,22	5.297.245.788,18	3.575.000.000,00	2.500.000.000,00	8.350.952.719,00
Jumlah		8.346.707.987,10	10.530.464.845,12	36.530.702.566,56	36.929.695.834,25	14.426.108.468,92	1.137.573.629,46

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Tabel 3.32

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rejang Lebong

Tahun Anggaran 2011 - 2016

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil					
		Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya	40.049.167.924,99	50.306.132.502,11	86.836.835.068,67	123.766.530.902,92	138.857.814.825,84	139.995.388.455,30
Jumlah		40.049.167.924,99	50.306.132.502,11	86.836.835.068,67	123.766.530.902,92	138.857.814.825,84	139.995.388.455,30

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

2. Analisis SILPA

Analisa SILPA diperlukan untuk melihat darimana sumber peroleh SILPA dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaran peroleh SILPA selama Tahun 2011- 2016 di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 3.33
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Rejang lebong
Tahun Anggaran 2011 - 2016

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil											
		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Jumlah SILPA	40.049.167.924,99		50.306.132.502,11		86.836.835.068,67		123.766.530.902,92		138.857.814.825,84		139.995.388.455,30	
2	Pelampauan Penerimaan PAD												
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan												
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah												
5	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya												
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Akhir Tahun Belum Selesai												
7	Kehiatan Lanjutan												
Jumlah		40.049.167.924,99		50.306.132.502,11		86.836.835.068,67		123.766.530.902,92		138.857.814.825,84		139.995.388.455,30	

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun mendatang.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.34					
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Meningkatkan Serta Prioritas Utama Kabupaten Rejang Lebong					
Tahun Anggaran 2015 - 2016					
No	Uraian	2015	2016	Pertumbuhan	%
1	Belanja Tidak Langsung	522.680.597.104,68	593.605.723.447,26	70.925.126.343	11,95
	Belanja Pegawai	433.167.115.058,45	476.552.714.161,30	43.385.599.103	9,10
	Belanja Bunga	0,00	0,00	-	
	Belanja Hibah	32.299.073.613,00	1.703.800.000,00	(30.595.273.613)	(1.795,71)
	Belanja Bantuan Sosial	94.750.000,00	20.000.000,00	(74.750.000)	(373,75)
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai	56.939.206.593,23	115.140.253.806,96	58.201.047.214	50,55
	Belanja Tak Terduga	180.451.840,00	188.955.479,00	8.503.639	4,50
2	Belanja Langsung	328.911.150.378,46	385.084.081.139,00	56.172.930.760,54	14,59
	Belanja Pegawai	41.870.796.539,00	44.688.782.910,00	2.817.986.371	6,31
	Belanja Barang dan Jasa	103.012.535.720,00	137.865.823.219,00	34.853.287.499	25,28
	Belanja Modal	184.027.818.119,46	202.529.475.010,00	18.501.656.891	9,14
3	Pembiayaan Pengeluaran	2.500.000.000,00	8.350.952.719,00	5.850.952.719,00	70,06
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	2.500.000.000,00	8.350.952.719,00	5.850.952.719,00	70,06
	Pembayaran Pokok Utang Lainnya	0,00	0,00	0,00	-

Sumber : Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 s.d 2016

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.3.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2016-2021

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Dalam rangka mempertimbangkan alokasi belanja, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok bagi pengelola keuangan yang baik di daerah, untuk itu ada beberapa yang di lakukan, yaitu:

1. Struktur anggaran harus secara eksplisit memisahkan pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari utang misalnya, tidak bisa diklaim sebagai pendapatan karena suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan. Demikian pula penerimaan yang berasal dari kinerja anggaran tahun-tahun sebelumnya (seperti dana cadangan dan SiLPA) ataupun dana dana yang bersifat temporer (seperti hasil penjualan aset daerah) perlu dipertimbangkan jika akan dimasukkan ke dalam komponen pendapatan daerah.
2. Struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi syarat kecukupan (*sufficient*

condition) bagi pengelola keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada, prioritas-prioritas pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di Kabuapten Rejang Lebong.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*).

Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun masa transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Belanja Daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah (pemerintah daerah), di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan, belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (propinsi ataupun kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juga telah menentukan, struktur belanja terdiri dari belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Arah kebijakan belanja tidak langsung sampai dengan tahun 2016-2021 diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar. Proporsi pengeluaran belanja tidak langsung terbesar kedua adalah pada belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota. Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali gaji PNS, sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap. Kenaikan gaji PNS tersebut dibiayai oleh sumber pendapatan dari DAU. Dengan demikian kenaikan gaji pegawai diharapkan dapat diikuti oleh kenaikan DAU. Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan hibah. Alokasi belanja hibah diarahkan kepada berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja hibah merupakan manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana Strategis SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan belanja kursus.

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun Kabupaten Rejang Lebong, antara lain untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, eksplorasi potensi pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan

meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran belanja modal pada Lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
2. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan program kepala/wakil kepala daerah.
3. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan.
4. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan .
5. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.
6. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.
7. Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain dapat bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain dilakukan

secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

Proyeksi pendapatan dan alokasi belanja Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong selama 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.35.

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN	1.031.838.352.319,14	1.065.913.936.464,00	1.303.798.030.999,68	1.404.158.453.322,15	1.492.477.592.311,56	1.610.811.109.235,52
PENDAPATAN ASLI DAERAH	75.271.697.319,14	121.096.253.480,00	132.610.878.374,08	145.871.966.211,49	160.459.162.832,64	176.505.079.115,90
Pendapatan Pajak Daerah	8.555.042.596,00	10.073.042.596,00	11.080.346.855,60	12.188.381.541,16	13.407.219.695,28	14.747.941.664,80
Hasil Retribusi Daerah	4.792.025.957,00	4.927.788.600,00	5.174.178.030,00	5.691.595.833,00	6.260.755.416,30	6.886.830.957,93
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.590.392.561,71	3.590.392.561,71	3.698.104.338,56	4.067.914.772,42	4.474.706.249,66	4.922.176.874,63
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	58.334.236.204,43	102.416.590.136,29	112.658.249.149,92	123.924.074.064,91	136.316.481.471,40	149.948.129.618,54
DANA PERIMBANGAN	749.033.337.000,00	817.321.748.984,00	1.032.201.625.225,60	1.104.252.406.970,66	1.160.510.941.324,92	1.242.197.793.150,22
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.631.226.000,00	18.462.736.200,00	19.016.618.286,00	20.918.280.114,60	23.010.108.126,06	25.311.118.938,67
Dana Alokasi Umum	604.318.422.000,00	593.702.491.000,00	623.387.615.550,00	654.556.996.327,50	687.284.846.143,88	721.649.088.451,07
Dana Alokasi Khusus	127.083.689.000,00	205.156.521.784,00	389.797.391.389,60	428.777.130.528,56	450.215.987.054,99	495.237.585.760,49
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	207.533.318.000,00	127.495.934.000,00	138.985.527.400,00	154.034.080.140,00	171.507.488.154,00	192.108.236.969,40
Pendapatan Hibah	7.380.953.000,00	10.000.000.000,00	11.500.000.000,00	13.800.000.000,00	17.250.000.000,00	22.425.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	16.000.000.000,00	22.000.000.000,00	22.440.000.000,00	24.684.000.000,00	27.152.400.000,00	29.867.640.000,00
Dana Penyesuaian dan Otsus	184.152.365.000,00	95.495.934.000,00	105.045.527.400,00	115.550.080.140,00	127.105.088.154,00	139.815.596.969,40

Sumber :Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2017

Tabel 3.36.

Proyeksi Belanja Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

URAIAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA		1.162.345.214.144,98	1.200.299.225.759,30	1.415.486.220.652,56	1.480.055.922.358,26	1.536.491.839.218,00	1.625.780.662.846,72
BELANJA TIDAK LANGSUNG		682.464.445.308,98	654.135.917.698,30	704.907.039.100,56	738.430.013.901,26	774.489.066.558,82	809.283.164.190,89
	Belanja Pegawai	528.517.924.475,20	452.089.530.357,65	480.270.321.427,63	499.815.713.157,86	520.176.378.444,61	536.253.983.640,51
	Belanja Bunga	-	262.884.735,17	-	-	-	-
	Belanja Hibah	2.964.000.000,00	11.388.197.000,00	11.957.606.850,00	13.751.247.877,50	16.501.497.453,00	21.451.946.688,90
	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00	399.300.000,00	439.230.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	117.413.356.811,77	162.213.732.845,00	181.679.380.786,40	190.763.349.825,72	200.301.517.317,01	210.316.593.182,86
	Belanja Tidak Terduga	33.369.164.022,01	27.881.572.760,48	30.669.730.036,53	33.736.703.040,18	37.110.373.344,20	40.821.410.678,62
BELANJA LANGSUNG		479.880.768.836,00	546.163.308.061,00	710.579.181.552,00	741.625.908.457,00	762.002.772.659,49	816.497.498.655,83

Sumber :Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2017

Tabel 3.37.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PEMBIAYAAN DAERAH	130.506.861.825,84	134.385.289.295,30	111.688.189.652,88	75.897.469.036,11	44.014.246.906,74	14.969.553.611,19
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	138.857.814.825,84	140.085.289.295,30	118.528.189.652,88	95.397.469.036,11	63.514.246.906,74	39.469.553.611,19
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	138.857.814.825,84	140.085.289.295,30	118.528.189.652,88	95.397.469.036,11	63.514.246.906,74	39.469.553.611,19
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.350.953.000,00	5.700.000.000,00	6.840.000.000,00	19.500.000.000,00	19.500.000.000,00	24.500.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.350.953.000,00	5.700.000.000,00	6.840.000.000,00	19.500.000.000,00	19.500.000.000,00	24.500.000.000,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 2017



4.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akan datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Identifikasi permasalahan pembangunan yang menjadi tantangan dalam pembangunan Kabupaten Rejang Lebong selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

4.1.1. Permasalahan Bidang Infrastruktur.

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan merupakan aspek utama di dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah.

Salah satu prasarana yang amat menunjang kelancaran roda perekonomian suatu negara maupun daerah adalah jalan, semakin meningkat kegiatan pembangunan suatu wilayah, peningkatan pembangunan pra-sarana jalan perlu diprioritaskan guna lebih memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus perdagangan antar daerah. Di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2014 tercatat jumlah panjang jalan 916,925 km. Jumlah panjang jalan tersebut dirinci sebagai berikut: jalan negara 53,25 km (5,81%), jalan propinsi 135,00 km (14,72%) dan jalan Kabupaten 722,36 (79,47%).

Dari jumlah panjang jalan, sepanjang 916,925 km tersebut, yang berkondisi baik sepanjang 426,412 km, berkondisi sedang 53,975 km kemudian panjang jalan berkondisi rusak sepanjang 49,478 km. Sedangkan jalan yang berkondisi rusak berat mencapai 198,81 km dan yang tidak dirinci sepanjang 188,25 km. Diharapkan untuk tahun mendatang, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas kondisi jalan (berkondisi baik) untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan memperlancar perekonomian masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Secara rinci, kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Kondisi Jalan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015

Kondisi Jalan	Jalan Negara	Jalan Prov.	Jalan Kab.	Jumlah
Baik	-	-	426,412 km	426,412 km
Sedang	-	-	53,975 km	53,975 km
Rusak	-	-	49,478 km	49,478 km
Rusak Berat	-	-	198,81 km	198,81 km
Tidak dirinci	53,25 km	135 km	-	188,25 km
TOTAL	53,25 km	135 km	728,675 km	916,925 km

Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2016

Berdasarkan panjang jalan menurut kewenangan penanganan pemerintah, data panjang jalan di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2015 kondisi jalan yang baik untuk penanganan oleh Kabupaten mengalami penurunan dari 59,93% menjadi 46,50% sedangkan kondisi jalan rusak berat mengalami peningkatan dari 6,44% pada Tahun 2014 menjadi 21,68% pada tahun 2015 secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Selain infrastruktur jalan, permasalahan infrastruktur lain yang dihadapi oleh Kabupaten Rejang Lebong adalah permasalahan masih rendahnya akses Rumah Tangga terhadap sumber air minum layak. Pada tahun 2015, persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak di Kabupaten Rejang Lebong adalah sebesar 43,17%, sedikit di bawah rata-rata provinsi yang sebesar 44,75%. Selain itu, akses Rumah Tangga di Kabupaten Rejang Lebong terhadap sumber air minum bersih pada tahun 2015 juga berada dibawah capaian provinsi yaitu 28,05% sedangkan provinsi sebesar 33,77%. Secara terinci, kesenjangan akses Rumah Tangga terhadap air minum layak di Provinsi Bengkulu dapat dilihat di Gambar 4.1.

Tabel 4.2
Panjang Jalan Menurut Tingkat Pemerintahan Yang Berwenang
di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 dan 2015 (Km)

Uraian	Tingkat Pemerintahan Yang Berwenang						Jumlah	
	Negara		Provinsi		Kab		2014	2015
	2014	2015	2014	2015	2014	2015		
Jenis Permukaan								
Aspal	53.25	53.25	135	135	487.56	538	675.81	725.764
Penetrasi.Kerikil	0	0	0	0	111	86	111	85.553
Tanah	0	0	0	0	123.8	106	123.8	105.608
Tidak Dirinci	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	53.25	53.25	135	135	722.36	728.675	910.61	916.925
		5.81		14.72		79.47		
Kondisi Jalan								
Baik	-	-	-	-	509.34	426.412	509.34	426.412
Sedang	-	-	-	-	93.82	53.975	93.82	53.975
Rusak	-	-	-	-	60.58	49.478	60.58	49.478
Rusak Berat	-	-	-	-	58.63	198.81	58.63	198.81
Tidak Dirinci	53.25	53.25	135	135	-	-	188.25	188.25
Total	53.25	53.25	135	135	722.37	728.675	910.62	916.925
Kelas Jalan								
Kelas I	53,25	-	-	-	-	-	53,25	-
Kelas II	-	-	135,00	-	-	-	135,00	-
Kelas III	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Kelas IIIA	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Kelas IIIB	-	-	-	-	722,36	-	722,36	-
Kelas IIIC	-	-	-	-	-	-	-	-
Tidak Terinci	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	53,25	-	135,00	-	722,36	-	910,61	-

Sumber: BDA Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016

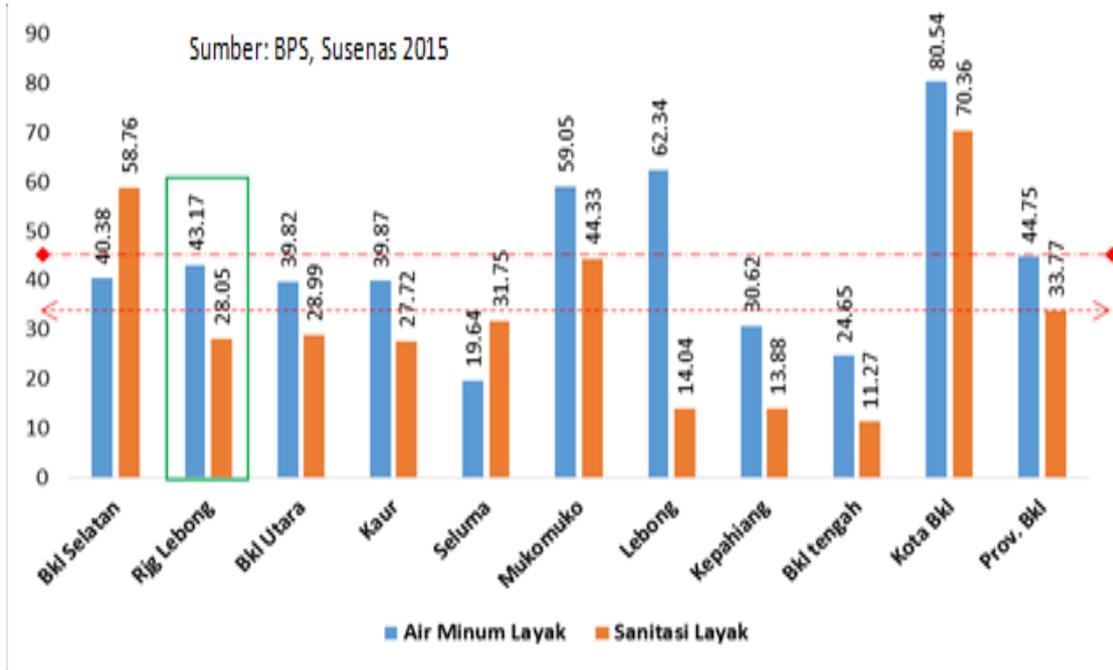
Selain infrastruktur jalan dan air bersih, permasalahan infrastruktur lain yang dihadapi oleh Kabupaten Rejang Lebong adalah permasalahan sektor perhubungan. Untuk sektor perhubungan di kabupaten Rejang Lebong data tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2014 tercatat sejumlah 41.096 unit, yang terdiri dari 34.990 unit atau 85,14 % merupakan kendaraan roda dua/tiga dan selebihnya yaitu 6.106 unit atau 14,86% persen adalah kendaraan roda empat. Gambaran perbandingan kendaraan terlihat pada Gambar 4.2

- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan seperti marka jalan, rambu lalu lintas, cakupan pelayanan angkutan umum, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) masih terbatas.
- 3) Sarana parkir masih terbatas, terutama pada ruas jalan pusat kota.
- 4) Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) belum merata.

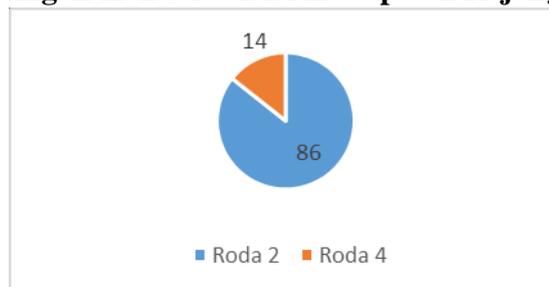
Gambar 4.1

Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2015



Gambar 4.2

Perbandingan Kendaraan Di Kabupaten Rejang Lebong



Sumber: BDA Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014

Selain infrastruktur jalan, air bersih dan perhubungan, permasalahan infrastruktur lain yang dihadapi oleh Kabupaten Rejang Lebong adalah permasalahan tenaga kelistrikan.

Di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 pelanggan listrik sebanyak 65.155 pelanggan yang didominasi oleh pelanggan Rumah tangga/umum sebanyak

61.954 pelanggan dan diikuti pelanggan bisnis sebanyak 1.664 pelanggan. Adapun produksi listrik yang terjual sebanyak 87.927.611 KWH sedangkan daya listrik yang tersambung sebesar 58.945.120 VA.

Tantangan pembangunan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Rejang Lebong selama 5 (lima) tahun ke depan juga berasal dari pembangunan desa. Pembangunan desa di Indonesia diukur dengan indikator IPD (Indeks Pembangunan Desa) yang merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan dan perkembangan desa. IPD Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2014 sudah menunjukkan agregat yang baik yaitu sebesar 58,03 dan sudah berada di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 55,29. Namun, capaian ini bukan berarti tanpa permasalahan. Berdasarkan hasil IPD Tahun 2014, masih ada 13,11% dari 122 desa di Kabupaten Rejang Lebong yang dikategorikan sebagai Desa Tertinggal. Hal ini harus menjadi perhatian bersama antar berbagai pihak agar desa tertinggal di Kabupaten Rejang Lebong dapat diantaskan selama 5 (lima) tahun ke depan. Secara rinci, disparitas klasifikasi desa berdasarkan IPD tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3.
Kesenjangan Klasifikasi Desa berdasarkan IPD Tahun 2014
di Provinsi Bengkulu

Nama Kabupaten/Kota	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Klasifikasi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Bengkulu Selatan	57,27	61,43	38,41	84,05	48,32	47,34	8,45	91,55	0,00	142
Rejang Lebong	58,03	62,35	40,87	77,29	51,67	53,20	13,11	86,89	0,00	122
Bengkulu Utara	55,40	58,04	39,75	68,37	51,96	62,91	25,58	73,95	0,47	215
Kaur	52,36	52,72	36,38	75,80	46,84	49,99	38,02	61,98	0,00	192
Seluma	52,37	54,15	35,24	72,09	52,09	50,12	36,26	63,19	0,55	182
Mukomuko	57,61	58,52	42,66	70,38	58,23	63,02	20,95	78,38	0,68	148
Lebong	55,84	58,08	40,08	75,78	48,37	55,75	21,51	78,49	0,00	93
Kepahiang	58,55	63,30	41,45	81,53	49,14	50,40	10,48	88,57	0,95	105
Bengkulu Tengah	53,31	57,06	34,39	70,87	49,61	56,71	42,25	57,04	0,70	142
Bengkulu	55,29	57,87	38,52	74,44	50,80	55,07	25,65	73,97	0,37	1.341

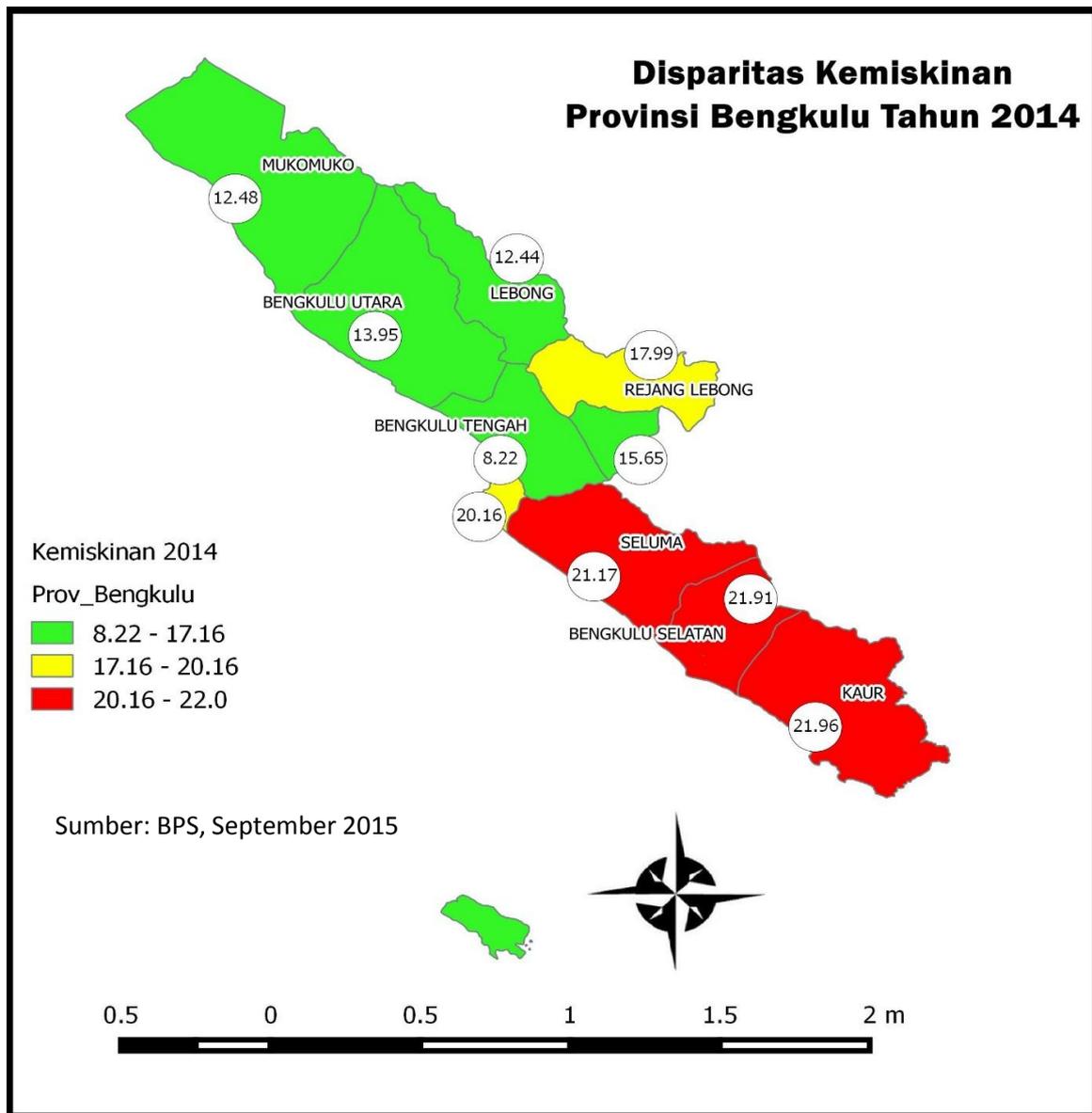
Sumber: BPS, 2015

4.1.2. Permasalahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

a) Tingginya Angka Kemiskinan

Persoalan kemiskinan masih akan menjadi tantangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong selama 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan data Survei BPS, persentase kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2016 adalah sebesar 17,81 %. Masih ada sekitar 45.790 jiwa penduduk di Kabupaten Rejang Lebong yang masih berada dibawah Garis Kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Rejang Lebong masih berada di atas persentase kemiskinan Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 16,45 %

Gambar 4.3.
Disparitas Kemiskinan di Provinsi Bengkulu Tahun 2014

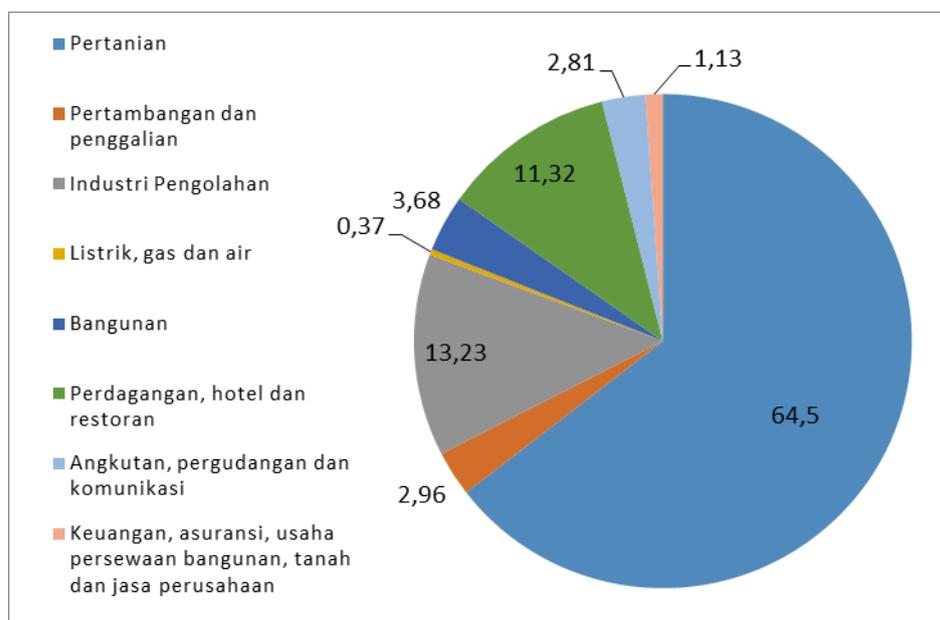


Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terus berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan melalui upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut adalah optimalisasi pemberdayaan masyarakat masyarakat yang difokuskan pada penduduk miskin.

b) Tingginya angka pengangguran

Kabupaten Rejang Lebong dengan jumlah penduduk yang tinggi berimplikasi adanya peningkatan angka pengangguran. Pembangunan ekonomi selain mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Tingkat pengangguran di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 lebih tinggi daripada tahun 2014, yaitu dari 1,32 persen menjadi 4,40 persen. Dari sejumlah 185.219 penduduk berumur 15 tahun ke atas, 141.348 orang di antaranya merupakan angkatan kerja, sedangkan 43.871 orang sisanya bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 71,48 menjadi 76,31. TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. Dari sejumlah 141.348 orang angkatan kerja, 135.127 orang di antaranya berstatus bekerja dengan lapangan usaha dominan adalah sektor pertanian.

Gambar 4.4.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 (%)

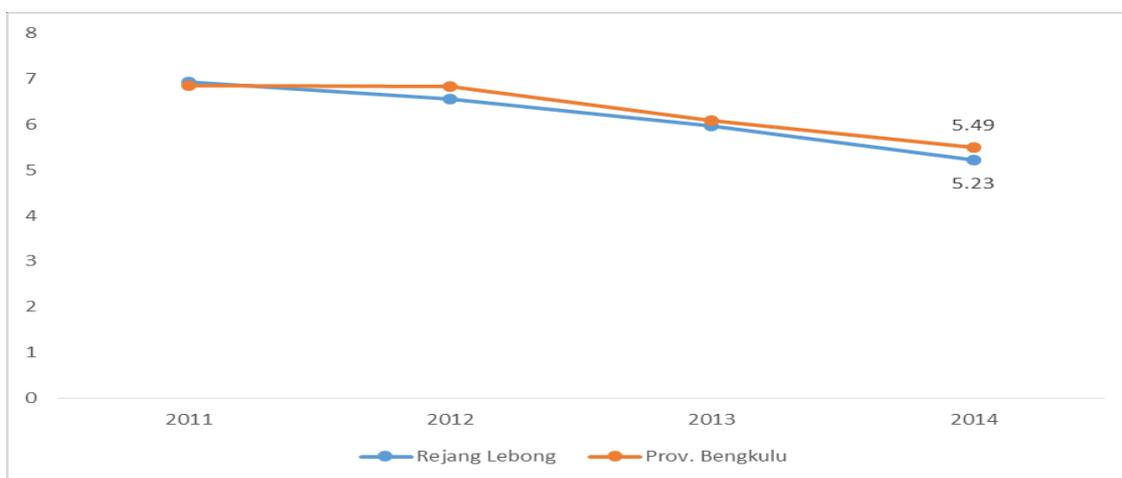


Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2017

Selain persentase kemiskinan, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat pula diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu penduduk, sebab semakin tinggi pendapatan per kapita-nya, maka semakin sejahtera penduduknya. Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 berada di angka 5,16 berada di atas capaian Provinsi Bengkulu yang sebesar 3,45. Untuk lebih jelas, perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB antara Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu



Sumber: BPS, 2015

Persoalan tingkat pengangguran masih akan menjadi tantangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong selama 5 (lima) tahun kedepan. Distribusi persentase pekerja menurut lapangan pekerjaan dimana tampak pada tahun 2014 proporsi pekerja terserap di sektor Pertanian mencapai 62,52% diatas proporsi Provinsi Bengkulu sebesar 50,62%, yang diikuti dengan sektor jasa-jasa lainnya sebesar 21,27%. Dilihat dari sisi tingkat pendidikan penduduk maka untuk tamatan Sarjana merupakan jumlah pencari kerja terbanyak yaitu 778 orang (44,08%) kemudian diikuti oleh pencari kerja berijazah akademi atau sarjana muda sebanyak 453 orang (25,67%) dan lulusan SLTA Umum sebanyak 277 orang (15,69%).

4.1.3. Permasalahan Bidang Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong, karena hal itu akan menentukan strategi membangun Kabupaten Rejang Lebong agar terciptanya masyarakat yang adil, damai dan sejahtera dan berdaya saing secara nasional, maupun global. Permasalahan pada sektor SDM, akan ditinjau dari derajat pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender yang pada intinya akan mengarahkan kepada peningkatan IPM masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong.

Pada sektor pendidikan, Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Rejang Lebong cenderung mengalami peningkatan dan mencapai 7,90 tahun pada tahun 2015. Namun angka ini masih berada dibawah angka provinsi yang mencapai 8,29 tahun. Ini mengartikan jika penduduk di Kabupaten Rejang Lebong rata-rata menamatkan pendidikan hanya sampai pada kelas 7 – 8 di jenjang SLTP dan belum memenuhi Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun. Untuk lebih jelas, perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6.
Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah
Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong



Selain Angka Rata-rata Lama Sekolah, kualitas pendidikan diukur juga berdasarkan akses penduduk usia sekolah untuk bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 pada kelompok umur 7-12 tahun mencapai 100%, sedangkan pada kelompok umur 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun belum mencapai 100%. Ini menunjukkan jika masih ada penduduk usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan atau putus sekolah. APS untuk kelompok umur 7-12 tahun adalah sebesar 100%, kelompok umur 13-15 tahun adalah sebesar 95,59% dan kelompok umur 16-18 tahun adalah sebesar 72,57%. Angka Partisipasi Sekolah

Kabupaten Rejang Lebong selain pada kelompok umur 7-12 tahun, menunjukkan tren menurun seiring semakin tingginya kelompok umur. Ini mengartikan jika akses bersekolah penduduk ke jenjang yang lebih tinggi (di atas SD) di Kabupaten Rejang Lebong semakin menurun. Secara lengkap, APS dan Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 dapat dilihat di Tabel 4.4

Tabel 4.4.
APS dan APtS Kabupaten Rejang Lebong

Kelompok Umur	Rejang Lebong	Prov. Bengkulu
	APS	APS
7-12 tahun	100,00	99,65
13-15 tahun	95,59	96,83
16-18 tahun	72,57	78,16

Sumber: BPS, 2015

Bila dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Rejang Lebong untuk tingkat jenjang pendidikan SD dan SLTA lebih tinggi dari pada APK Provinsi Bengkulu, sedangkan untuk tingkat jenjang pendidikan SLTP lebih rendah dari pada Provinsi Bengkulu. Bila dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Rejang Lebong untuk tingkat jenjang pendidikan SD lebih tinggi dari pada APM Provinsi Bengkulu, sedangkan untuk tingkat jenjang pendidikan SLTP dan SLTA di Kabupaten Rejang Lebong lebih rendah dari pada APM Provinsi Bengkulu. Secara lengkap perbandingan APM dan APK Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 seperti pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5.
APM dan APK Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016

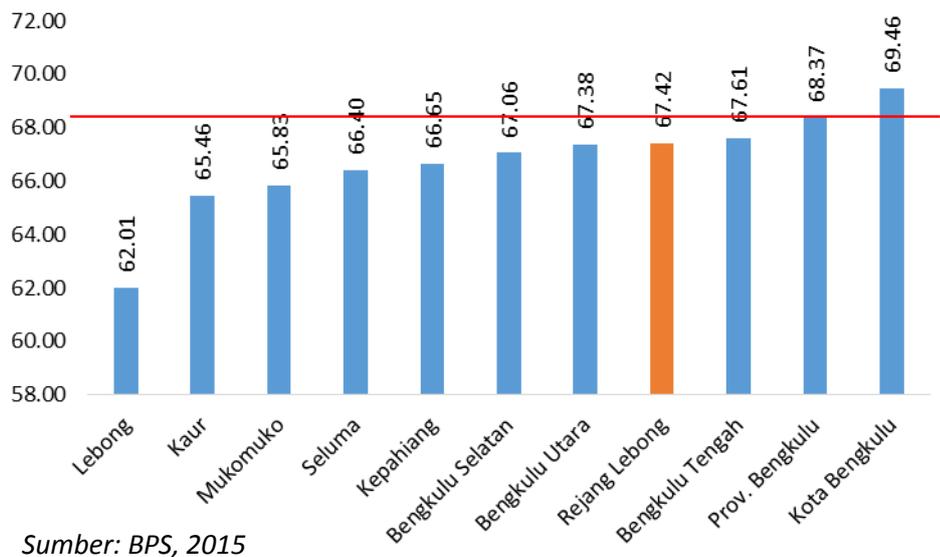
Jenjang	Prov. Bengkulu		Rejang Lebong	
	APK	APM	APK	APM
SD	113,13	98,22	116,21	98,78
SLTP	90,38	77,02	79,26	71,19
SLTA	83,56	65,29	84,67	62,93

Sumber: BPS, 2015

Selain pada sektor pendidikan, kualitas sumber daya manusia juga diukur dari aspek kesehatan. Indikator makro yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup. Pada tahun 2015, Angka Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Rejang Lebong mencapai 67,52 tahun, dan masih berada di

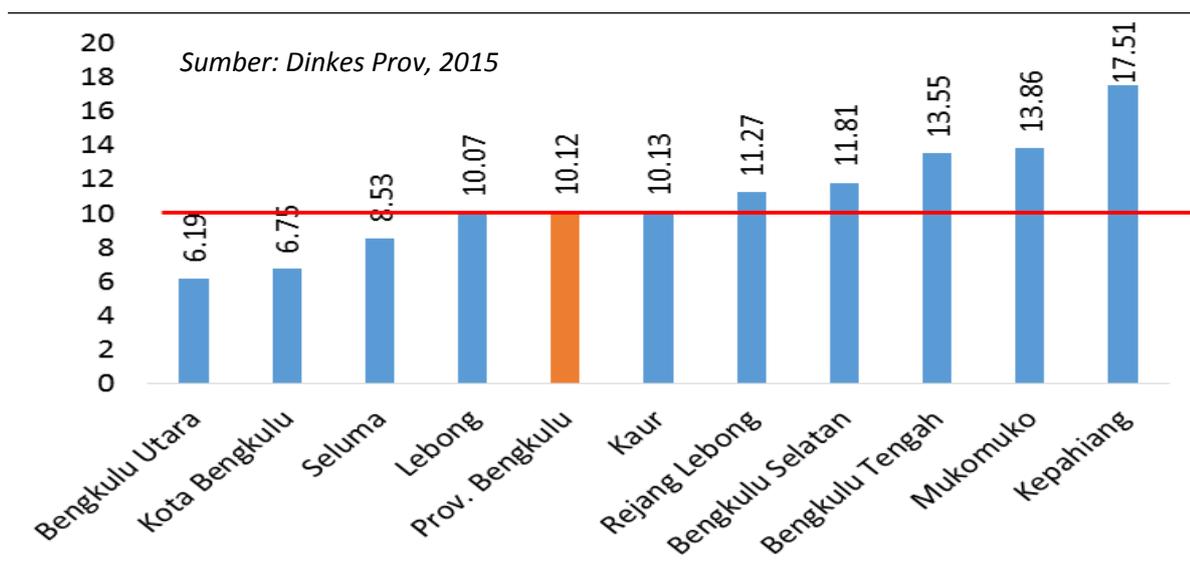
bawah rata-rata provinsi yang mencapai 68,50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa harapan hidup penduduk di Kabupaten Rejang Lebong hanya sampai usia 67 tahun dan berada dibawah provinsi. Pembangunan disektor kesehatan perlu lebih ditingkatkan baik berupa akses, jangkauan, sarana prasarana hingga SDM kesehatan agar dapat meningkatkan Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Rejang Lebong kedepan. Disparitas Usia Harapan Hidup penduduk di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7.
Usia Harapan Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2014



Permasalahan lain di bidang kesehatan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 5 (lima) tahun kedepan adalah masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB). AKB pada tahun 2015 di Kabupaten Rejang Lebong mencapai 11,27 yang berarti terdapat 11 kematian bayi pada setiap 1.000 kelahiran hidup. AKB Kabupaten Rejang Lebong menjadi salah satu penyumbang AKB Provinsi Bengkulu yang hanya sebesar 10,12. Secara lengkap perbandingan AKB di Provinsi Bengkulu seperti pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8.
AKB di Provinsi Bengkulu



Pada era sekarang ini. Isu gender equity dan gender equality merupakan isu internasional dan nasional yang menjadi indikator pembangunan di suatu wilayah. Terkait kesetaraan gender, permasalahan yang perlu mendapat perhatian kedepan adalah pemberdayaan gender yang diukur dengan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). IDG Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2014 adalah sebesar 57,76 dan berada dibawah capaian provinsi yang sebesar 68,76. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan belum seutuhnya memiliki peranan yang sama dengan laki-laki dalam aspek kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Sehingga, besarnya peranan perempuan di Kabupaten Rejang Lebong dalam pencapaian kapabilitas berdasarkan status dan kedudukan masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Capaian IDG Tahun 2014 di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6.
IDG di Provinsi Bengkulu Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen (%)	Perempuan sbg Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG 2014
BENGKULU	15.56	50.75	34.34	68.76
Bengkulu Selatan	4.00	57.57	41.61	58.63
Rejang Lebong	13.33	50.99	23.97	57.76
Bengkulu Utara	10.00	53.16	38.25	65.15
Kaur	8.00	46.11	36.68	61.69
Seluma	16.67	57.45	33.32	66.86

Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen (%)	Perempuan sbg Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG 2014
Mukomuko	8.00	57.80	32.54	59.74
Lebong	28.00	41.31	37.93	77.91
Kepahiang	28.00	51.89	35.56	77.61
Bengkulu Tengah	12.00	49.98	40.00	66.22
Kota Bengkulu	25.71	47.86	32.08	75.97

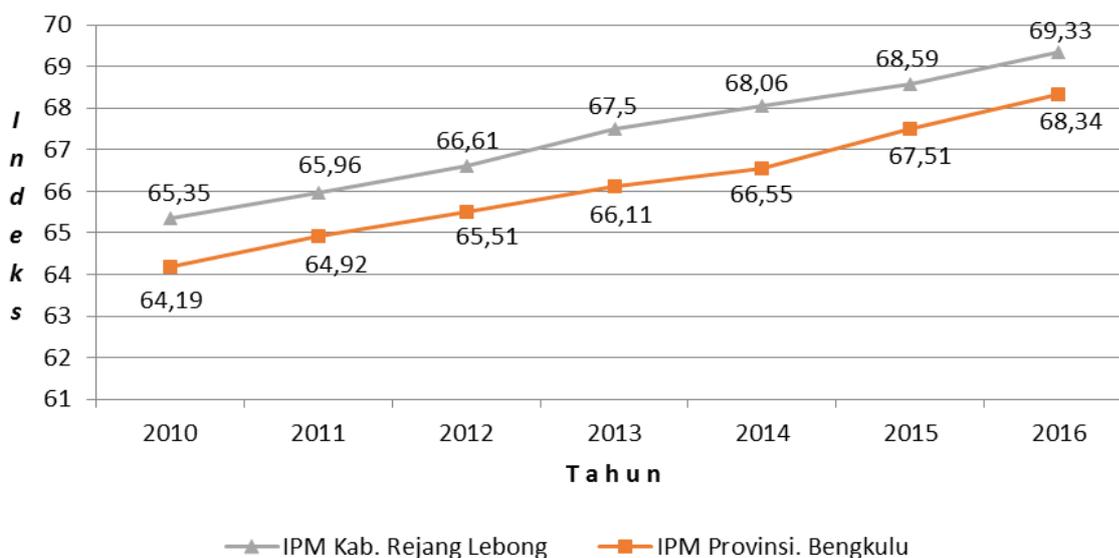
Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015

Berdasarkan data IDG diatas, persentase sumbangan pendapatan perempuan Kabupaten Rejang Lebong hanya sebesar 23,97% atau terendah se-Provinsi Bengkulu. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong harus dapat dapat mendorong perempuan untuk lebih partisipatif dalam kontribusi perekonomian dengan membuka akses perempuan terhadap layanan keuangan/permodalan dan pelatihan kerja/wirausaha. Selain itu, partisipasi perempuan dalam parlemen pun masih rendah. Hanya sebesar 13,33% perempuan yang duduk di kursi legislatif pada Pileg 2014 silam. Capaian ini masih jauh dari amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 yang mengamanatkan minimal 30% perempuan duduk di kursi parlemen.

Setelah membahas aspek pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender untuk permasalahan kualitas SDM, indikator yang secara holistik mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2016 adalah sebesar 68,34 dan masih berada dibawah IPM Provinsi Bengkulu yang mencapai 69,33. Walaupun cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2010 – 2016, IPM Kabupaten Rejang Lebong selalu berada di bawah IPM Provinsi Bengkulu. Hasil perhitungan IPM ini menempatkan Kabupaten Rejang Lebong sebagai daerah yang nilai IPM berada pada level menengah atas (skor ≥ 66). Secara jelas, perbandingan IPM antara Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi dapat dilihat pada Gambar 4.9.

Gambar 4.9.
IPM Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu



Sumber : BPS Kab. Rejang Lebong Tahun 2015 dan 2016

4.1.4. Permasalahan Bidang Pengelolaan Pemerintahan

Pengelolaan pemerintahan yang baik dapat dilihat dari hasil opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Rejang Lebong, pada tahun 2014 Kabupaten Rejang Lebong memperoleh Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kabupaten Rejang Lebong semenjak tahun 2010 hingga 2015 selalu memperoleh Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap pemeriksaan LKPD. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diharapkan mampu melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik agar dapat memperoleh Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berkenaan dengan isu Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Kepegawaian, penyempurnaan kebijakan di bidang aparatur akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, manajemen pemerintahan dan manajemen SDM

aparatur yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. Implementasi hal-hal tersebut pada masing-masing SKPD akan mendorong perubahan *mind set* dan *culture set* pada setiap birokrat ke arah budaya yang lebih profesional, produktif dan akuntabel. Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program pembangunan bagi masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktivitas aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat, dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan seluruh masyarakat. Secara bertahap, upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Isu reformasi keuangan daerah berkaitan dengan mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tanggung waktu serta target yang tepat. Selain itu Pemerintah juga perlu upaya meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas anggaran. Isu Reformasi keuangan daerah. Mekanisme penganggaran yang tepatsasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tanggung waktu serta target yang tepat.

Isu regulasi berkenaan dengan pemerintah daerah di masa depan harus mampu menyusun kerangka regulasi yang memperhatikan aspek budaya partisipasi baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Ketersediaan regulasi/kebijakan daerah yang tepat adalah berbasis akurasi data dan diimplementasikan berbasis sanksi yang jelas atas segala bentuk pelanggaran/pengabaian.

Isu kemitraan dan partisipasi masyarakat untuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah menjadi isu strategis mendorong upaya penurunan resiko korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Transparansi Informasi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi diharapkan meningkatkan akuntabilitas publik berbasis akurasi data. Transparansi informasi mencakup informasi penyelenggaraan layanan publik, kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Penguasaan terhadap sistem data *base* berbasis *web* oleh SDM dimasing-masing instansi dapat menunjang terpenuhinya kebutuhan dalam pemanfaatan sistem informasi.

4.1.5 Bidang Sumber Daya Alam

- 1) Pada tahun 2015, produksi padi Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan data dari Dinas Pertanian secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 0.84% dibandingkan dengan produksi tahun 2014 dari 105.302 ton gabah kering giling menjadi 106.194 ton gabah kering giling. luas panen padi di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015 masih didominasi oleh padi sawah. Luas panen padi sawah sebesar 20.861 hektar (96.40 persen) dan padi ladang seluas 779 hektar (3.60 persen).
- 2) Produksi palawija pada tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan produksi pada tahun 2014. Ada 6 jenis komoditi palawija yang dijadikan sebagai standar pengukuran dalam penentuan Angka Tetap baik yang dikeluarkan oleh BPS maupun dari Dinas Pertanian. Diantara komoditi yang dimaksud adalah: jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Selama tahun 2015, komoditi yang mengalami penurunan adalah jenis komoditi jagung yakni turun sebesar 20,03% (39.225 ton pada tahun 2014 menjadi 31.368 ton pada tahun 2015), ubi kayu turun sebesar 36,68% (28.353 ton pada tahun 2014 menjadi 17.953 ton pada tahun 2015), ubi jalar turun 29,35% (19.688 ton pada tahun 2014 menjadi 13.910 ton pada tahun 2015), kacang tanah turun sebesar 22,55% (2.239 ton pada tahun 2014 menjadi 1.734 ton pada tahun 2015), kacang hijau turun sebesar 19.09% (241 ton pada tahun 2014 menjadi 195 ton pada tahun 2015), dan kedelai turun sebesar 1.49% (1.342 ton pada tahun 2014 menjadi 1.322 ton pada tahun 2015)
- 3) Kabupaten Rejang Lebong dengan topografi yang berbukit-bukit dan kondisi tanah yang subur sangat potensial untuk dikembangkan jenis tanaman perkebunan baik untuk skala kecil maupun skala besar.
- 4) Luas area persawahan sangat menentukan jumlah produksi padi. Alih fungsi lahan mengakibatkan terus terjadi pengurangan luas lahan pertanian, tetapi dengan adanya cetak sawah baru, sehingga Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan luas lahan persawahan dari 9.878 ha pada tahun 2014 menjadi 9.951 ha pada tahun 2015. Dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Luas Lahan Persawahan Di Provinsi Bengkulu
Tahun 2010-2015

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Bengkulu Selatan	11.290	11.290	11.290	11.290	11.036
Rejang Lebong	9.383	9.704	10.004	9.878	9.951
Bengkulu Utara	15.429	15.300	16.309	14.521	11.757
Kaur	7.867	7.870	8.034	8.132	8.099
Seluma	20.150	20.150	19.862	18.130	18.118
Mukomuko	10.205	9.418	9.130	9.544	9.469
Lebong	11.593	10.270	9.629	9.605	9.605
Kepahiang	5.237	5.287	5.287	5.287	5.287
Bengkulu Tengah	7.197	7.624	7.716	7.765	6.615
Kota Bengkulu	2.819	2.789	2.793	2.095	1.714
JUMLAH	101.170	99.702	100.054	96.247	91.651

Sumber : Bengkulu Dalam Angka 2016

- 5) Jumlah konsumen PDAM Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2013 sebanyak 8.693 pelanggan, sedangkan pada tahun 2015 turun menjadi ada 6.914 pelanggan artinya terjadi penurunan jumlah pelanggan. Volume air minum yang terjual meningkat, pada tahun 2013 sebanyak 2.322.472 m³ menjadi 2.559.738 m³ pada tahun 2015.

4.1.6. Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Menurut perhitungan Tahun 2013, volume sampah yang dihasilkan per orang rata-rata sekitar 0,5 kg per hari. Jadi untuk Kabupaten Rejang Lebong yang berpenduduk 254.583 jiwa akan menghasilkan sampah sebanyak 89.429 m³/hari.
- 2) Rusaknya kawasan hutan sebagai akibat adanya perambahan hutan oleh masyarakat untuk dijadikan kebun atau ladang dan akibat *illegal logging* (pembalakan liar).

4.2. Isu – Isu Strategis Kabupaten Rejang Lebong

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Rejang Lebong dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kabupaten Rejang Lebong. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut:

4.2.1. Isu Strategis Bidang Infrastruktur.

1. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur wilayah masih belum memadai sehingga perlu perbaikan dan pembangunan Jalan, Jembatan, Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan.
2. Masih perlunya keberlanjutan pembangunan dalam membuka keterisolasian wilayah yang belum terselesaikan dan belum optimal.
3. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan, sarana parkir dan penerangan jalan umum.
4. Belum maksimalnya pemerataan pasokan energi listrik antar wilayah.
5. Masih banyaknya desa yang di katagorikan sebagai desa tertinggal.
6. Aset pemerintah daerah kurang terkelolah dan termanfaatkan dengan baik.

4.2.2. Isu Strategis Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

1. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Produktifitas dan daya saing produk pertanian masih belum mampu menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
3. Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir sehingga belum mampu memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4. Masih rendahnya tingkat kemandirian daerah Kabupaten Rejang Lebong karena sumber PAD belum dikelolah secara maksimal.
5. Masih perlu ditingkatkan komitmen kerjasama antar daerah atau antar wilayah.
6. Pembangunan perekonomian masyarakat yang berbasis agribisnis dan pariwisata belum dibangun secara komprehensif.
7. Produktifitas pertanian dan pengetahuan teknologi pertanian petani masih rendah.
8. Infrastruktur pertanian dalam mendukung usaha tani masih rendah.
9. Belum optimalnya pengelolaan pasca panen dan sitem pemasaran.

4.2.3. Isu Strategis Bidang Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia.
2. Belum terentasnya program wajib belajar 9 tahun.
3. Akses pendidikan lanjutan tingkat SLTP dan SLTA.
4. Belum semua masyarakat memiliki jaminan pelayanan sosial.
5. Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada tingkat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang paradigma sehat.
7. Penerapan nilai – nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat masih rendah, hal ini terlihat dari masih tingginya angka kriminal.
8. Semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba.
9. Penempatan PNS yang belum tepat sasaran dan tidak sesuai dengan potensi.

4.2.4. Isu Strategis Bidang Pengelolaan Pemerintahan.

1. Pengelola pemerintahan belum efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari posisi IPM Kabupaten Rejang Lebong (tabel 2.9) yang berada pada posisi ke tiga dalam provinsi Bengkulu.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum maksimal hal ini dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan wajar dengan pengecualian (WDP).

4.2.5. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

1. Belum optimalnya pengelolaan bidang pariwisata.
2. Masih tingginya Kerusakan Hutan, Lahan dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
3. Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih belum optimal.
4. Belum optimalnya konservasi hutan dan keanekaragaman hayati serta lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kabupaten Rejang Lebong termasuk wilayah dalam kategori rawan bencana.

TABEL 4.8 KESELARASAN ISU STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota : Rejang Lebong

Provinsi : Bengkulu

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
1	2	3	4
1	<p>Bidang Infrastruktur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur wilayah masih belum memadai sehingga perlu perbaikan dan pembangunan Jalan, Jembatan, Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan 2. Masih perlunya keberlanjutan pembangunan dalam membuka keterisolasian wilayah yang belum terselesaikan dan belum optimal 3. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan, sarana parkir dan penerangan jalan umum 4. Belum maksimalnya pemerataan pasokan energi listrik antar wilayah 5. Masih banyaknya desa yang di katagorikan sebagai desa tertinggal 6. Aset pemerintah daerah kurang terkelolah dan dimanfaatkan dengan baik 	<p>Rendahnya kapasitas infrastruktur dasar</p>	<p>7.5.2 Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai</p> <p>7.9.3 Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal</p> <p>7.9.5 Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal</p> <p>8.2.4 Kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman; serta</p> <p>8.2.5 Belum memadainya ketersediaan daya listrik serta masih banyaknya rakyat di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum memiliki akses terhadap daya listrik</p>

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
1	2	3	4
		Rendahnya kapasitas infrastruktur strategis dan berdaya saing	<p>8.3.12 Belum optimalnya konektivitas baik di dalam koridor ekonomi utama maupun aksesibilitas ke wilayah terpencil, perbatasan, dan perbatasan</p> <p>8.4.1 Diversifikasi, konservasi energi, dan sistem multimoda yang belum optimal</p> <p>8.4.2 Tingginya kerusakan jaringan jalan di daerah</p> <p>8.5.4 Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan</p> <p>8.5.5 Pembangunan transportasi massal perkotaan</p> <p>8.5.6 Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur</p>
		Minimnya infrastruktur dibidang Informasi dan Telematika	<p>2.17.1 Kebutuhan data dan informasi akibat pemekaran daerah dan desentralisasi</p> <p>2.17.4 Kurangnya jumlah SDM statistik yang profesional</p> <p>2.17.6 Keterbatasan pada ketersediaan dan penggunaan sistem TIK</p> <p>7.1.2 Produksi data dan informasi geospasial</p> <p>7.1.3 Jaringan distribusi data dan informasi geospasial</p> <p>7.1.4 Pemanfaatan data dan informasi geospasial</p>
2	<p>Bidang Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>1. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>2. Produktifitas dan daya saing produk pertanian</p>	Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketertinggalan	<p>2.13.2 Tingkat pertumbuhan ekonomi belum mampu mengatasi tantangan demografis pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah penganggur</p> <p>2.13.4 Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan</p>

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
1	2	3	4
	<p>masih belum mampu menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)</p> <p>3. Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir sehingga belum mampu memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat</p> <p>4. Masih rendahnya tingkat kemandirian daerah Kabupaten Rejang Lebong karena sumber PAD belum dikelola secara maksimal</p> <p>5. Masih perlu ditingkatkan komitmen kerjasama antar daerah atau antar wilayah</p> <p>6. Pembangunan perekonomian masyarakat yang berbasis agribisnis dan pariwisata belum dibangun secara komprehensif</p> <p>7. Produktifitas pertanian dan pengetahuan teknologi pertanian petani masih rendah</p> <p>8. Infrastruktur pertanian dalam mendukung usaha tani masih rendah</p> <p>9. Belum optimalnya pengelolaan pasca panen dan sistem pemasaran</p>		<p>produktivitas dan daya saing rendah</p> <p>2.13.6 Pasar tenaga kerja diwarnai banyak pekerja rentan yang produktivitasnya rendah</p> <p>7.9.1 Adanya regulasi yang tidak memihak/disharmonis terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal</p> <p>7.9.2 Masih lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal</p> <p>7.9.3 Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal</p> <p>7.9.4 Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal</p> <p>7.9.5 Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal</p> <p>7.9.6 Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal</p> <p>7.9.7 Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal</p> <p>7.9.8 Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah</p> <p>7.9.9 Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal</p>

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
1	2	3	4
		Belum Optimalnya Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK)	<p>2.7.1 Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal (98,8%), dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah</p> <p>2.7.2 Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah (kurang dari 19,0%) dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan</p> <p>2.7.3 Koperasi masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat</p>

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
1	2	3	4
		Rendahnya kualitas dan kuantitas layanan dasar (pendidikan, kesehatan dan Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal)	<p>Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal</p> <p>7.7.1 Nilai tambah potensi unggulan daerah. Minimnya permodalan dan pelatihan terkait upaya peningkatan mutu kualitas komoditas daerah maupun peningkatan kapasitas produksi unggulan di daerah</p> <p>7.7.2 Konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga. Keterbatasan infrastruktur kawasan menyebabkan minimnya investasi industri; sulitnya masyarakat petani, nelayan, peternak, pengrajin memasarkan produknya; serta rendahnya kuantitas produk yang dihasilkan</p> <p>7.7.3 Sumber daya manusia pelaku usaha pertanian, peternak, industri di kawasan strategis masih rendah kapasitasnya. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang masih belum optimal</p>
		Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan	<p>2.8.1 Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata</p> <p>2.9.1 Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif</p>

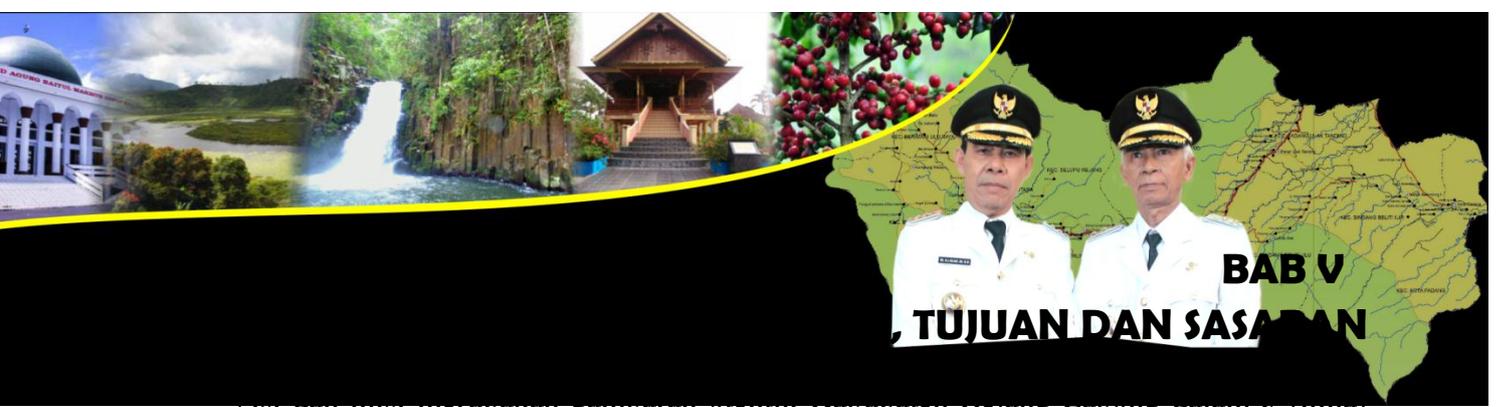
No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
1	2	3	4
3	<p>Bidang Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia 2. Belum terentasnya program wajib belajar 9 tahun 3. Akses pendidikan lanjutan tingkat SLTP dan SLTA 4. Belum semua masyarakat memiliki jaminan pelayanan sosial 5. Belum optimalnya pelayanan kesehatan padatingkat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang paradigma sehat 7. Penerapan nilai – nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat masih rendah, hal ini terlihat dari masih tingginya angka kriminal 8. Semakin meningkatnya penyalagunaan narkoba 9. Penempatan PNS yang belum tepat sasaran dan tidak sesuai dengan potensi 	<p>Rendahnya kualitas dan kuantitas layanan dasar (pendidikan, kesehatan dan Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal)</p>	<p>Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.3.1. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas 1.3.2. Peningkatan kualitas pembelajaran 1.3.3. Peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) 1.3.6. Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa 1.3.9. Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan <p>Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1. Peningkatan kesehatan ibu, anak remaja dan lansia 1.2.2. Percepatan perbaikan status gizi masyarakat 1.2.3. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 1.2.4. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas 1.2.6. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan 1.2.7. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 1.2.10. Pengembangan jaminan kesehatan nasional.

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
1	2	3	4
		Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.1. Pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga 1.9.1 Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan 1.10.1 Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal 1.10.2 Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya 1.10.3 Peningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak
		Rendahnya Peningkatan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan	1.5.1. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 1.5.2. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga
		Belum optimalnya kehidupan berdemokrasi, pengembangan budaya daerah dan penerapan nilai-nilai agama	1.7.2. Peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; 1.7.3. Pelestarian warisan budaya 1.7.1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; 1.7.2. Peningkatan kerukunan umat beragama 4.1.1 Penguatan peran lembaga demokrasi;

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
1	2	3	4
			4.1.2 Jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat; 4.1.3 Keterbukaan informasi, komunikasi publik, dan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik; 4.1.4 Pemantapan waswasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangkamemperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
4	Bidang Pengelolaan Pemerintahan 1. Pengelola pemerintahan belum efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari posisi IPM Kabupaten Rejang Lebong yang berada pada posisi ke tiga dalam Provinsi Bengkulu 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum maksimal hal ini dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan wajar dengan pengecualian (WDP)	Belum optimalnya penerapan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>)	6.2.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel 6.2.2 Birokrasi yang efektif dan efisien 6.2.3 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas 7.10.1 Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 7.10.7 Akuntabilitas dan tata pemerintahan 7.10.8 Peningkatan pelayanan publik 7.11.1 Manajemen sumber daya aparatur pemerintah daerah

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
1	2	3	4
		Rendahnya daya saing dan iklim investasi daerah	2.10.3 Proses perijinan masih belum efisien 2.10.4 Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal 2.10.5 Ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih terbatas 2.10.6 Proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi Hambatan 2.10.7 Masih banyaknya regulasi yang tidak harmonis dan peraturan daerah yang distortif
		Belum optimalnya sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik	17.12.1. Kemampuan fiskal daerah 17.12.2. Kualitas perencanaan dan penganggaran daerah 17.12.3. Kualitas belanja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah
		Belum terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa	6.2.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel 6.2.2 Birokrasi yang efektif dan efisien 6.2.3 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
5	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Belum optimalnya pengelolaan bidang pariwisata 2. Masih tingginya kerusakan Hutan, Lahan dan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Belum Optimalnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan	8.5.2 Pembangunan infrastruktur/prasarana dasar kawasan permukiman serta energi dan ketenagalistrikan 9.5 Peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan 9.6 Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan

No	Isu Strategis		
	RPJMD Kabupaten	RPJMD Provinsi	RPJMN 2015-2019
1	2	3	4
	<p>3. Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih belum optimal</p> <p>4. Belum optimalnya konservasi hutan dan keanekaragaman hayati serta lingkungan hidup yang berkelanjutan</p> <p>5. Kabupaten Rejang Lebong termasuk wilayah dalam kategori rawan bencana</p>		<p>serta pengelolaan DAS</p> <p>9.8 Peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan</p> <p>9.9 Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI</p> <p>9.10 Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana</p> <p>9.11 Penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan</p>
		Belum Optimalnya Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	<p>8.4.3 Polusi yang tinggi penyebab utama dari Gas Rumah Kaca (GRK)</p> <p>9.6 Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS</p> <p>9.9 Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI</p> <p>9.10 Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; dan</p> <p>9.11 Penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan</p>



tahun mendatang pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2016-2021. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 - 2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.

5.1. Visi

Visi Kabupaten Rejang Lebong merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2016 - 2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Rejang Lebong yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 - 2021 adalah : *“Terwujudnya Masyarakat Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera”*

Visi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, memperhatikan RPJMN, dan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 - 2025. Visi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera dengan dilandasi semangat dan nilai – nilai agama.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

A. Masyarakat Sehat

Menurut Undang - Undang N0.36 Tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan,

manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan mencakup 4 aspek, yakni: fisik (badan), mental (jiwa), sosial, dan ekonomi. Batasan kesehatan tersebut diilhami oleh batasan kesehatan menurut WHO yang paling baru. Pengertian kesehatan saat ini memang lebih luas dan dinamis, dibandingkan dengan batasan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga diukur dari produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan sesuatu secara ekonomi.

Bagi yang belum memasuki dunia kerja, anak dan remaja, atau bagi yang sudah tidak bekerja (pensiun) atau usia lanjut, berlaku arti produktif secara sosial. Misalnya produktif secara sosial-ekonomi bagi siswa sekolah atau mahasiswa adalah mencapai prestasi yang baik, sedang produktif secara sosial-ekonomi bagi usia lanjut atau para pensiunan adalah mempunyai kegiatan sosial dan keagamaan yang bermanfaat, bukan saja bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain atau masyarakat. Keempat dimensi kesehatan tersebut saling mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan seseorang, kelompok atau masyarakat. Itulah sebabnya, maka kesehatan bersifat menyeluruh mengandung keempat aspek. Perwujudan dari masing-masing aspek tersebut dalam kesehatan seseorang antara lain sebagai berikut :

1. Kesehatan fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Semua organ tubuh berfungsi normal atau tidak mengalami gangguan.
2. Kesehatan mental (jiwa) mencakup 3 komponen, yakni pikiran, emosional, dan spiritual.
 - Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran.
 - Emosional sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya, misalnya takut, gembira, kuatir, sedih dan sebagainya.
 - Spiritual sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan dan sebagainya terhadap sesuatu di luar alam fana ini, yakni Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalnya sehat spiritual dapat dilihat dari praktik

keagamaan seseorang. Dengan perkataan lain, sehat spiritual adalah keadaan dimana seseorang menjalankan ibadah dan semua aturan-aturan agama yang dianutnya.

3. Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara baik, tanpa membedakan ras, suku, agama atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling toleran dan menghargai
4. Kesehatan dari aspek ekonomi terlihat bila seseorang (dewasa) produktif, dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong terhadap hidupnya sendiri atau keluarganya secara finansial. Bagi mereka yang belum dewasa (siswa atau mahasiswa) dan usia lanjut (pensiunan), dengan sendirinya batasan ini tidak berlaku. Oleh sebab itu, bagi kelompok tersebut, yang berlaku adalah produktif secara sosial, yakni mempunyai kegiatan yang berguna bagi kehidupan mereka nanti, misalnya berprestasi bagi siswa atau mahasiswa, dan kegiatan sosial, keagamaan, atau pelayanan kemasyarakatan lainnya bagi usia lanjut.

B. Masyarakat Cerdas

Masyarakat cerdas adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap, dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan dan intelektual.

C. Masyarakat Taqwa

Masyarakat Taqwa yaitu suatu masyarakat yang beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa mengerjakan nilai – nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari secara konsisten sehingga terwujudnya keharmonisan dan ketentraman antar penganut agama dimasyarakat

Masyarakat yang beriman mengandung pengertian bahwa masyarakat yang religius dan berbudi pekerti luhur, yakni masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama, adat istiadat dan budaya serta taat kepada norma-norma hukum dan kemasyarakatan sehingga sanggup mengantarkan setiap warga masyarakat Kabupaten Rejang Lebong untuk menghadapi tantangan dunia modern di era informasi dan globalisasi.

Ada pendapat lain yang memberikan pengertian bahwa masyarakat yang beriman yaitu suatu kondisi masyarakat yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa mengerjakan nilai-nilai ajaran agama di dalam prikehidupan sehari-hari secara konsisten sehingga terwujud keharmonisan dan ketentraman antar penganut agama di masyarakat.

D. Masyarakat Sejahtera

Rejang Lebong Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar Rakyat Rejang Lebong yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan dengan mewujudkan kondisi lingkungan yang asri dan lestari.

5.2. Misi

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016- 2021, sebagai berikut

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata.
2. Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan.
3. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang berdaya saing
4. Mewujudkan pelestarian nilai – nilai agama dan budaya dalam melandasi pelaksanaan pembangunan
5. Mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel
6. Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Bersinergi yang berwawasan lingkungan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong selama kurun waktu 2016-2021.

Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata

Tujuan : Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan masyarakat.

Sasaran : Meningkatkan jangkauan dan mutu layanan kesehatan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat.

2. Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan

Tujuan : Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bidang pendidikan masyarakat.

Sasaran : Meningkatkan jangkauan dan mutu layanan pendidikan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat.

3. Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang berdaya saing

Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal.
2. Meningkatnya Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dan Mengembangkan sektor Perdagangan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat.
3. Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur pertanian dan perkebunan.
4. Meningkatnya investasi.
5. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan.
6. Meningkatnya kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.

4. Mewujudkan pelestarian nilai – nilai agama dan budaya dalam melandasi pelaksanaan pembangunan

Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang beriman dan berbudaya.

Sasaran :

1. Terwujudnya kehidupan beragama dan budaya yang harmonis dan berkembangnya seni budaya daerah.

5. Mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Tujuan : Melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*.

Sasaran :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Meningkatnya kinerja bidang kependudukan.
5. Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan.

6. Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Bersinergi yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan perhubungan yang terintegrasi serta informasi yang berkualitas guna peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar.

Sasaran:

1. Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar.
2. Meningkatnya pelayanan transportasi perhubungan darat.
3. Mengurangi resiko kerusakan lingkungan.
4. Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat serta perentasan desa tertinggal.
6. Meningkatnya pemberdayaan kualitas kehidupan serta perlindungan perempuan dan anak untuk menunjang ketahanan keluarga.
7. Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri.

Tabel 5.1.

Rumusan Sasaran Dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan pendidikan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat	Angka partisipasi murni (APM) (%) PAUD	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%
	Angka partisipasi murni (APM) (%) SD	98,75%	99,00%	99,20%	99,35%	99,55%	99,65%	100%
	Angka partisipasi murni (APM) (%) SLTP	95,04%	96,50%	96,80%	96,90%	97,05%	97,25%	100%
	Angka partisipasi murni (APM) (%) SMA/SMK/MA	83,28 %	84,56 %	85,56 %	86,56 %	87,56 %	88,56 %	89,56 %
	Jumlah Desa yang belum memiliki SD	1	0	0	1	0	0	0
	Jumlah Kecamatan yang belum memiliki minimal 2 SLTP	1	0	0	0	1	0	0
	Persentase Angka buta aksara (%)	4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5
	Persentase Guru SD yang berpendidikan Minimal S1 (%)	70%	73%	76%	79 %	82%	85%	88%

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase Guru SD bersertifikasi (%)	70%	72%	76%	79%	82%	86%	90%
	Persentase Guru SLTP yang berpendidikan Minimal S1 (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
	Persentase Guru SLTP bersertifikasi (%)	70%	75%	79%	83%	87%	92%	95%
	Persentase Guru SMA/SMK/MA bersertifikasi (%)	47%	65%	75%	82%	87%	91%	95%
	Persentase SD yang ter-akreditasi	91%	92%	93%	94%	95%	96%	97%
	Persentase SLTP yang ter-akreditasi	77%	81%	87%	91%	93%	96%	97%
	Persentase SMA/SMK/MA yang ter-akreditasi	90%	92%	93%	94%	95%	96%	97%
	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	10.855	13.026	15.197	17.368	19.539	21,710	21.710

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat	AKB/1.000	54	52	50	48	46	44	40
	AKI/100.000	147	126	105	84	63	42	21
	Jumlah desa yang belum memiliki bidan desa	44	0	10	10	12	12	0
	% Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	9,2%	9,2%	9,0%	8,8%	8,6%	8,4%	8,0%
	% Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)	34,2%	34,2%	33,6%	32,8%	32,0%	31,2%	30
	Angka Kejadian Malaria (API) per 1.000 penduduk	0,03%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%
	Persentase Prevalensi HIV	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
	Angka penemuan kasus TB (CDR)	46	>55	>60	>65	>70	>75	>85
	% Desa yang mencapai UCI (Universal Child Immunisation)	83	85	85	88	90	100	100

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap	7	0	2	2	2	2	15
	Jumlah kecamatan yang belum memiliki puskesmas	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Desa/kelurahan yang belum memiliki Sarana Kesehatan (pustu/poskesdes)	41	0	5	5	5	6	21
	Jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan gratis (JAMKESDA)	15.000	26.547	66.368	92.915	106.109	119.462	132.736
	Rumah sakit yang ditingkatkan tipenya dari C ke B	C	C	C	B	B	B	B
	Jumlah dokter spesialis	14	14	17	19	21	23	25

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal	Jumlah kecamatan yang dikembangkan sentra industrinya (sentra)	2	2	2	4	4	5	5
	Jumlah Kelompok Usaha Baru (KUB)/ Wirausaha Baru (WUB) yang dibangun	180	30	30	30	60	30	30
Meningkatnya Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dan Mengembangkan sektor Perdagangan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat	Jumlah peserta yang di libatkan untuk menciptakan iklim UKM yang Kondusif	400	582	855	1065	650	700	3822
	Jumlah KUMKM yang mendapat bantuan peralatan	2	0	5	5	10	5	25
	Jumlah Koperasi yang di revitalisasi (koperasi tidak aktif)	52	10	5	5	15	17	52
	Jumlah pasar tradisional yang di revitalisasi	4	1	7	2	1	2	13

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur pertanian dan perkebunan	Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m)	25.000	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
	Panjang jalan usaha Tani yang direhabilitasi (M)	62.50	6.500	6.750	6.875	7000	7.125	7.250
	Panjang jalan sentra produksi yang dibangun (m)	6.750	7.000	7.250	7.375	7500	7625	7750
	Panjang Jalan sentra Produksi yang ditingkatkan kualitasnya (M)	0	500	500	400	500	600	2500
	Luas Jaringan irigasi usaha tani yang dibangun (Ha)	2590	3213	3848	4486	5096	5706	5706
	Prosentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%)	31,40	38,96	46,66	54,4	61,8	69,2	69.20

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya investasi	Jumlah perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	32	5	5	5	5	5	5
	Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani	63	63	64	65	66	67	67
	Rata-rata lama penerbitan surat perizinan investasi (hari)	6	5	5	4	4	3	3
	Rata-rata lama penerbitan surat perizinan dan non perizinan	6	6	5	4	4	3	3
Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan	Cetak sawah baru (ha))	300	500	500	550	570	600	500
	Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura (ton) :							
	a. padi	5.449	6.445	6.465	6.485	6.505	6.525	7.000
	b. Jagung	39.325	39.546	39.566	39.686	39.606	39.626	40.000
	c. Kedelai	1.678	2.453	2.473	2.493	2.513	2.533	2.600
	d.Ubi Kayu	28.354	28.987	29.007	29.027	29.047	29.067	29.700

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	e. Ubi Jalar	22.588	22.998	23.018	23.038	23.058	23.078	23.100
	f. Kacang Tanah	2.879	3.000	3.020	3.040	3.060	3.080	3.100
	g. Kacang Hijau	457	541	561	581	601	621	650
	Sayuran							
	a. Cabe Merah	26.719	26.944	27.169	27.394	27.619	27.844	28.000
	b. Bawang Merah	56	281	506	731	956	1181	1.200
	c. Kentang	8.284	8.509	8.734	8.959	9.184	9.409	9.750
	d. Wortel	37.180	37.405	37.630	37.855	38.080	38.305	38.650
	e. Kubis	81.983	82.208	82.433	82.658	82.883	83.108	83.250
	f. Cabe Rawit	2.713	2.938	3.163	3.388	3.613	3.838	4.000
	Buah-buahan							
	a. Jambu Biji Merah	250	309	368	427	486	545	600
	b. Manggis	1.013	1.072	1.131	1.190	1.249	1.308	1.400
	c. Jeruk	467	526	585	644	703	762	800
	d. Alpukat	2.914	2.973	3.032	3.091	3.150	3.209	3.350
	Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun	6	3	2	2	3	1	7

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Benih Tanaman Pangan (Ha)							
	a. Padi	2.500	2.625	2.756	2.894	3.039	3.191	3.225
	b. Jagung	1.000	1.050	1.103	1.158	1.216	1.276	1.330
	c. Kedelai	1.500	1.575	1.654	1.736	1.823	1.914	2.000
	d. Ubi Kayu	100	105	110	116	122	128	135
	Jumlah Benih Hortikultura (Ha)							
	a. Cabe Merah	27	40	42	44	45	49	53
	b. Kentang	17	25	26	28	29	30	32
	c. Wortel	40	42	44	46	49	51	53
	Produksi Perkebunan unggulan (ton)							
	Karet	9.377	9.455	9.567	9.675	9.786	9.880	9.910
	Kopi	21.536	21.650	22.687	22.789	23.435	25.456	30.657
	Lada	5.100	5.800	5.900	6.150	62.250	63.100	63.100
	Pala	1.250	1.500	1.650	1.850	2.050	2.350	2.350
	Kakao	253,00	260,00	275,00	295,00	305,00	320,00	320,00
	Aren	1.487	1.600	1.750	1.900	2.150	2.350	2.350
	Kelapa Sawit	466,00	475,00	485,00	485,15	495,05	495,50	495,50

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah jenis komoditas industri hilir berbasis pertanian dan perkebunan yang dikembangkan	9	1	2	1	1	1	6
	Produksi daging ternak (ton)							
	a. Sapi	164,02	180,43	198,47	218,32	240,15	264,16	264,16
	b. Kambing/Domba	47,85	52,64	57,90	63,69	70,06	77,06	77,06
	c. Ungggas	352,81	388,09	426,90	469,59	516,55	568,20	568,20
	Susu (liter)	49.932	54.925	60.418	66.459	73.105	80.416	80.416
	Produksi telur (ton)	2002	2106	2216	2331	2452	2580	2580
	Jumlah Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kelompok	9	10	11	12	14	14	15
	Jumlah unit pengolahan hasil ternak yang direvitalisasi	6	0	2	2	2	2	2
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.278	3507	3753	4016	4297	4598	4598

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Prosentasi Tingkat hunian hotel							
	Rata-rata lama tinggal (hari)	12	14	17	20	24	28	28
	Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang)							
	Jumlah Wisatawan Nusantara	1360	1497	1646	1811	1992	2191	2250
	Jumlah lokasi wisata yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata nasional (DPN)	4	0	1	0	0	0	1
Meningkatnya kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	0	150	150	150	150	150	750
	Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha	0	150	150	150	150	150	750

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis	Jumlah tempat ibadah yang direvitaliasi							
	Jumlah penyuluh agama	2	2	2	2	2	2	10
	Jumlah penyuluhan kerukunan beragama di kecamatan	0	2	2	2	2	2	10
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi	Jumlah kasus dan temuan	790	740	694	632	566	477	417
	Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan	38	40	45	50	60	65	70
	Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Evaluasi SAKIP	0	C	C	B	B	A	A
	Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC	80	84	88	92	96	100	100
	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	C	C	B	B	A	A	A

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase Jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di perizinan pelayanan terpadu	98%	98%	98%	99%	99%	100%	100%
Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase penempatan ASN pemerintah Kabupaten berdasarkan kualifikasi pendidikan (%)	10	25	40	55	70	85	85
	Persentase SKPD Kabupaten yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%)	12	27	40	55	71	85	85

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase pejabat struktural Kabupaten Rejang Lebong yang telah mengikuti diklat kepemimpinan							
	- Eselon II	11,5	11,5	17,14	22,85	28,57	34,28	34,28
	- Eselon III	41,06	42,38	49,01	55,63	62,25	68,87	68,87
	Persentase ASN Kabupaten Rejang Lebong yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional	9,35	9,35	18,7	32,74	46,77	56,13	56,13
Meningkatnya penerapanyang konsistensi antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian jumlah program antara:							
	RPJMD dengan RKPD	93,75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	RKPD dengan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Jumlah desa yang belum teraliri listrik	9	0	3	3	3	0	0
	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/ sedang (%)	55,49	59,20	63,01	66,92	70,93	75,04	75,04
	Prosentase rumah tangga berakses air bersih (%)	32,67	37,67	42,67	47,67	52,67	57,67	57,67
	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	24,01	29,01	34,01	34,01	39,01	39,01	39,01
	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0,040	0,040	0,032	0,032	0,019	0,019	0,019
Meningkatnya pelayanan transportasi perhubungan darat	Jumlah perlengkapan Fasilitas Keselamatan jalan yang terpasang	144	80	100	120	140	160	180
Mengurangi resiko kerusakan lingkungan	Indeks pengendalian pencemaran Air	56	56	56	56	56,2	56,4	56,8
	Indeks pengendalian pencemaran Udara	85	85	85	85	85	85	85
	Persentase pengelolaan sampah	74	74-79	79-84	84-89	89-94	94-100	100
	Jumlah TPS	226	226-256	256-356	356-456	456-556	556-656	556-656

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi)	2	2,56	5	8	11	14	15,38
	Prosentase sekolah aman bencana (%)	0	12	12	12	12	12	12
Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat serta perentasan desa tertinggal	Jumlah Kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK)	50	0	150	250	250	350	400
	Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab dan dilayani (Orang)	145	250	350	450	500	550	2100
	Jumlah partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (Orang/lembaga)	295	0	50	75	85	85	85
	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	22	3	4	5	5	5	5

Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Indikator Sasaran				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya pemberdayaan kualitas kehidupan serta perlindungan perempuan dan anak untuk menunjang ketahanan keluarga	Indeks pembangunan gender (IPG)	91,22	91,23	91,73	92,23	92,73	93,23	93,73
			-	-	-	-	-	-
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	91,72	92,22	92,72	93,22	93,72	94,22	
		70,18	70,18	70,58	70,98	71,38	71,78	72,18-72,58
			-	-	-	-	-	
Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	84	84-80	80-76	76-72	72-68	68-64	64-60	
Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri	Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (kelompok)	0	0	2	2	2	2	8
	Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha tingkat Kabupaten	0	0	60	60	60	60	240

TABEL 5.2 KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Tahun 2016-2021

Kabupaten/Kota : Rejang Lebong

Provinsi : Bengkulu

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
	Terwujudnya Masyarakat Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan masyarakat	Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup • Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup • % Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita • % Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)% Desa yang mencapai UCI (<i>Universal Child Immunisation</i>) 	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • AKB/1.000(Jiwa) • AKI/100.000(Jiwa) • Persentase balita gizi buruk/gizi kurang(%) 	Kesehatan 2.3.2.Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 2.3.1.Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 2.3.3.Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen) 2.3.4.Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta(bawah dua tahun)

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah puskesmas yang akan ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap • Jumlah kecamatan yang belum memiliki puskesmas • Jumlah Desa/ kelurahan yang belum memiliki Sarana Kesehatan (Pustu/ Poskesdes) • Jumlah Desa /Kelurahan yang sarana kesehatannya perlu direvitalisasi • Jumlah masyarakat yang membutuhkan jaminan pelayanan kesehatan • Persentase Tahapan akreditasi RSUD Curup dari C ke B • Jumlah dokter spesialis 	<p>Meningkatnya akses, pemerataan dan standar layanan kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit) • Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi (unit) 	<p>2.3.Kesehatan 7.2. Kesehatan dan gizi masyarakat</p> <p>2.3.10. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan : Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas terakreditasi</p> <p>2.3.12. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan : Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan</p> <p>7.2.10. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan : Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional</p> <p>7.2.13. Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan : Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis</p>

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
					Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja a. Pertumbuhan penduduk(%) b. Rasio Akseptor KB (%)	7.1. Kependudukan dan Keluarga Berencana 7.1.2 Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 7.1.3 Menurunnya angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (<i>unmet need</i>) 7.1.4 Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (<i>age spesific fertility rate/ ASFR 15-19 years old</i>)
		Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bidang pendidikan masyarakat	Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan pendidikan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat • Angka partisipasi murni (APM) (%) PAUD • Angka partisipasi murni (APM) (%) SD • Angka partisipasi murni (APM) (%) SLTP	Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan serta meningkatnya minat baca di semua lapisan masyarakat a. APMSD(%) b. APM SLTP(%) c. APM SLTA(%) d. Angka buta aksara(%)	2.2. Pendidikan 2.2.1 Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 Tahun 2.2.2 Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 2.2.8 Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA 		2.2.9 Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya
				<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Desa yang belum memiliki SD • Jumlah Kecamatan yang belum memiliki minimal 2 SLTP 	<p>Meningkatnya standar layanan pendidikan dan relevansi pendidikan terhadap pengembangan potensi daerah</p> <p>a. Persentase SD yang terakreditasi (%)</p> <p>b. Persentase SLTP yang terakreditasi (%)</p> <p>c. Persentase SLTA yang terakreditasi (%)</p> <p>d. Persentase Kompetensi Kejurusan SMK yang terakreditasi (%)</p>	<p>2.2. Pendidikan</p> <p>2.2.4. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B</p> <p>2.2.5. Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B</p> <p>2.2.6. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B</p> <p>2.2.7. Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B</p>
		Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang berdaya saing	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam meningkatkan pendapatan daerah	<p>Meningkatnya Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal</p> <p>Meningkatnya Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dan Mengembangkan sektor</p>	<p>Meningkatnya layanan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial</p> <p>a. Angka Kemiskinan (%)</p>	<p>Ekonomi makro</p> <p>1.2.6 Tingkat Kemiskinan</p>

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Perdagangan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat</p> <p>Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur pertanian dan perkebunan</p> <p>Meningkatnya investasi</p> <p>Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan</p> <p>Meningkatnya kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK) 		
					<p>Meningkatnya kapasitas UMKM dan Koperasi serta berkembangnya sarana Perdagangan rakyat</p>	<p>8.5. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi</p> <p>8.9. Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>8.5.6 Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal</p>

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab dan dilayani (Orang) • Jumlah partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (Orang/lembaga) • Jumlah KUKM yang akan mendapatkan bimbingan dan pelatihan teknis • Jumlah KUKM yang akan mendapat bantuan peralatan • Jumlah Kelompok IKM yang akan mendapat bantuan peralatan • Jumlah Koperasi yang di revitalisasi (koperasi tidak aktif) • Jumlah pasar tradisional yang akan di revitalisasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah IKM/ UKM yang mendapatkan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan b. Jumlah IKM yang mendapat bantuan peralatan c. Jumlah UKM yang mendapat bantuan peralatan d. Jumlah pasar tradisional yang dibangun dan direvitalisasi (unit) 	<p>8.5.7 Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk</p> <p>8.5.8 Pertambahan jumlah wirausaha baru -melalui program pusat dan Daerah</p> <p>8.9.4 Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat</p>

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sentra industri yang dikembangkan dalam kecamatan (sentra) • Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) • Jumlah Wira Usaha Baru (WUB) yang dibangun 		
				<ul style="list-style-type: none"> • Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura (ton) : <ol style="list-style-type: none"> a. padi b. Jagung c. Kedelai d. Ubi Kayu e. Ubi Jalar f. Kacang Tanah g. Kacang Hijau h. Sayuran (Cabe Merah, Bawang Merah, Kentang, Wortel, Kubis, Labu Siam, Sawi, Tomat, Cabe Rawit) i. Buah-buahan (Jambu Biji Merah, Manggis, Jeruk, 	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Tukar Petani -NTP - Produksi TanamanPangan dan hortikultura (ton) : <ol style="list-style-type: none"> a. padi b. Jagung c. Kedelai - Jumlah KetersediaanPangan (Kkal/Kap/Hr) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP). b. Produksi Dalam Negeri : Padi (Juta Ton) <ol style="list-style-type: none"> a. Produksi Dalam Negeri : Jagung (Juta Ton) b. Produksi Dalam Negeri : Kedelai (Juta Ton) c. Peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri : Padi: meningkatkan jumlah surplus dari produksi dalam negeri; d. Peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri : Kedelai: meningkatkan produksi terutama untukmencukupi kebutuhan

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Alpukat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Desa/Kelurahan Mandiri Benih yang dibangun • Jumlah Benih Tanaman Pangan (Ha) (Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar) • Jumlah Benih Holtikultura (Ha) (Cabe Merah, Kentang, Wortel) 		<p>konsumsi tahu dan tempe;</p> <p>e. Peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri : Jagung: meningkatkan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dan industri kecil;</p> <p>f. Peningkatan cadangan pangan pemerintah, khususnya beras dan cadangan pangan daerah</p>
				<ul style="list-style-type: none"> • Produksi Perkebunan unggulan (ton) (Karet, Kopi, Lada, Pala, Kakao, Aren, Kelapa Sawit) 	<p>Produksi Perkebunan unggulan (ton)</p> <p>a. Kelapa Sawit b. Karet c. Kopi</p>	<p>a. Perkebunan : Kelapa Sawit (ribu ton)</p> <p>b. Perkebunan : Karet (ribu ton)</p> <p>c. Perkebunan : Kopi (ribu ton)</p>
				<ul style="list-style-type: none"> • Produksi daging ternak (ton) (Sapi, Kambing/Domba, Unggas, Susu (liter), Produksi telur (ton)) 	<p>Produksi daging ternak (ton)</p> <p>a. Sapi b. Kambing / Domba c. Unggas d. Produksi telur</p>	<p>Produksi Dalam Negeri : Daging Sapi (Ribu Ton)</p>

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi PerikananTangkap (Ton) - Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan produksi ikan (juta ton) b. Perikanan Tangkap (Juta Ton) g. Perikanan Budidaya (juta Ton)
		Mewujudkan pelestarian nilai – nilai agama dan budaya dalam melandasi pelaksanaan pembangunan	Mewujudkan masyarakat yang beriman dan berbudaya	<p>Terwujudnya kehidupan bergama dan budaya yang harmonis dan berkembangnya seni budaya daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tempat ibadah yang direvitaliasi • Jumlah penyuluhan kerukunan beragama di kecamatan 	<p>Meningkatnya kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan , Budaya dan Demokratis terintegrasikan dengan baik dalam kegiatan pemerintahan dan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rasio Stabilitas Kesatuan Bangsa b. Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Bengkulu 	<p>6.1 Politik dan Demokrasi</p> <p>10.1 Politik Dalam Negeri</p> <p>10.1.10 Terjaganya stabilitas sosial dan politik</p> <p>6.1.2 Indeks Demokrasi Indonesia</p>
		Mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan <i>clean goverment</i> dan <i>good governance</i>	<p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p> <p>Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nilai Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 	<p>Bidang aparatur</p> <p>12.2.25 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas : Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau) Provinsi</p>

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
				<p>propesionalisme dan tata kelolah pemerintahan yang baik. Meningkatnya kinerja bidang kependudukan. Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan</p>	<p>Pemerintah Provinsi Bengkulu pada perizinan pelayanan terpadu</p>	<p>12.2.23 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>
				<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kasus dan temuan • Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan • Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani • Rata-rata lama penerbitan surat perizinan investasi (hari) • Rata-rata lama penerbitan surat perizinan dan non perizinan (hari) • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di perizinan pelayanan terpadu 	<p>1.1.2 Meningkatkan kinerja Pengawasan internal</p> <p>a. Persentase kasus dan temuan yang diselesaikan (%)</p>	<p>6.2. Penegakan hukum 12.2. Bidang aparatur</p> <p>6.2.2 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)</p> <p>12.2.9 Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel : Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Skor 1-5)</p>

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah unit pelayanan publik yang patuh pada norma dan prosedur • Jumlah kecamatan yang telah menerapkan sistem informasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) • Persentase penduduk yang telah memiliki KTP • Persentase keluarga yang telah memiliki kartu keluarga • Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran • Persentase kesesuaian jumlah program antara: (RPJMD dengan RKPD, RKPD dengan APBD) 		
				<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 	1.1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan	6.3. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi 6.4. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah 12.2. Bidang aparatur

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah • Nilai Evaluasi SAKIP • Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC • Tingkat/level maturitas sistem pengendalian internal pemerintah • Tingkat kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah 	<p>a. Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi</p> <p>b. Opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi</p> <p>c. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi</p>	<p>6.3.8 Persentase Instansi Pemerintah Provinsi yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Skor B)</p> <p>12.2.11 Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel : Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor B atas SAKIP) Provinsi</p> <p>6.4.9 Kinerja Keuangan Daerah : Rata-rata nasional WTP Pemda Provinsi</p> <p>12.2.5 Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel : Opini WTP atas Laporan Keuangan Provinsi</p> <p>6.3.4 Persentase Instansi Pemerintah Provinsi dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)</p> <p>12.2.15 Birokrasi yang Efektif dan Efisien : Persentase Instansi Pemerintah yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori “B” ke atas) Provinsi (1-100)</p>

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
		Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Bersinergi yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan perhubungan yang terintegrasi serta informasi yang berkualitas guna peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar Meningkatnya pelayanan transportasi perhubungan darat Mengurangi resiko kerusakan lingkungan Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat serta perentasan desa tertinggal Meningkatnya pemberdayaan kualitas kehidupan serta perlindungan perempuan dan anak untuk menunjang ketahanan keluarga Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	3.5. Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas 14.1 Percepatan Pembangunan Perumahan : Meningkatkan akses terhadap perumahan 14.2 Pembangunan Prasarana Dasar Kawasan Permukiman serta Energi dan ketenagalistrikan : Meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan 14.3 Pembangunan Prasarana Dasar Kawasan Permukiman serta Energi dan ketenagalistrikan : Meningkatkan layanan akses ketenagalistrikan

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah desa yang belum teraliri listrik • Rasio Elektrifikasi • Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/ sedang (%) • Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m) • Panjang jalan usaha Tani yang direhabilitasi (M) • Panjang jalan sentra produksi yang di bangun (m) • Panjang Jalan sentra Produksi yang kualitasnya meningkat (m) • Luas Jaringan irigasi usaha tani yang dibangun (Ha) • Prosentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%) • Prosentase rumah tangga berakses air bersih (%) • Indeks pengendalian pencemaran Air (%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Elektrifikasi(%) - Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisisbaik(%) - Prosentasejalan provinsi dalam kondisi baik/sedang(%) - Prosentase rumah tangga berakses air bersih(%) - Persentaserumahtangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi(%) - Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan persampahan(%) - Jumlah rumah layak huni yang dibangun (unit) - Luas permukiman yang ditingkatkan kualitasnya (Ha) 	<p>14.3.1 Meningkatnya jangkauan layanan ketenagalistrikan (rasio elektrifikasi) 96,61 persen</p> <p>3.1.7 Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)</p> <p>3.1.8 Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)</p> <p>14.6.2. Meningkatnya kemantapan jalan nasional menjadi 98 persen, jalan provinsi menjadi 75 persen, dan jalan kabupaten/kota menjadi 65 persen.</p> <p>3.5.13 Infrastruktur Dasar dan Konektivitas : Akses Air Minum Layak</p> <p>14.2.2 Tercapainya 100 persen pelayanan air minum yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai prinsip 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (<i>basic needs</i>)</p>

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Persentase rumah tangga bersanitasi (%) • Persentase lingkungan permukiman kumuh (%) • Persentase luas tutupan lahan meningkat atau luas lahan kritis yang direhabilitasi (dalam kawasan dan diluar kawasan) 		<p>3.5.14 Infrastruktur Dasar dan Konektivitas : Akses Sanitasi Layak</p> <p>14.2.3 Tercapainya 100 persen pelayanan sanitasi (air limbah domestik,sampah dan drainase lingkungan) yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah perkotaan danpengelolaan sampah secara 3R dan pengurangan luas genangan sebesar 22.500Ha) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (<i>basic needs</i>)</p> <p>14.1.1 Terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga untuk menurunkankekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga : Penyediaan rumah umum untuk 900.000 rumah tangga yang didukung oleh sistem pembiayaan, Penyediaan rumah susun sewa untuk 550.000 rumah tangga, Penyediaan KPR swadaya</p>

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
						<p>untuk 450.000 rumah tangga, Bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya untuk 250.000 rumah tangga</p> <p>14.2.1 Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan</p>
				<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi) • Prosentase sekolah aman bencana (%) 	<p>Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>Persentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (%)</p>	<p>15.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana</p> <p>15.10.1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah</p> <p>15.10.4 Tersedianya sarana & prasarana mitigasi & kesiapsiagaan menghadapi bencana di kawasan rawan bencana tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan;</p>

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
						15.10.5 Meningkatnya pengetahuan masyarakat serta terbangunnya budaya kesadaran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
				<ul style="list-style-type: none"> • Prosentasi Tingkat hunian hotel • Rata-rata lama tinggal (hari) • Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang) • Jumlah Wisatawan Nusantara (per tahun) • Jumlah lokasi wisata yang akan dikembangkan menjadi destinasi pariwisata nasional (DPN) 	Berkembangnya sektor pariwisata <ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata lama tinggal (hari) - Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang) - Jumlah Wisatawan Nusantara (orang) 	8.6. Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> a. Pariwisata : Wisatawan Manca Negara (orang) b. Pariwisata : Wisatawan Nusantara (kunjungan) c. Meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi
				<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kelompok • Jumlah unit pengolahan hasil ternak yang direvitalisasi (Unit) • Jumlah Desa/kawasan mandiri pangan yang 	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan	3.1. Kedaulatan pangan 15.1 Pengamanan Produksi Untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan 15.2 Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> dibina/dikembangkan Jumlah penumbuhan desa mandiri pangan 		15.3 Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan Serta Kesejahteraan nelayan/Pembudidaya Ikan/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan/Petambak Garam
				<ul style="list-style-type: none"> Indeks pembangunan gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan 	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan Indeks pembangunan gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2.4 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2.4.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2.4.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
				<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Rasio APM perempuan terhadap laki – laki (SD, SLTP, SLTA) Persentase anak yang bermasalah dengan 	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak a. Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%)	2.5 Perlindungan Anak 7.8 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2.5.1 Prevalensi Kekerasan terhadap Anak 7.8.1 Meningkatnya kapasitas

No	RPJMD Kabupaten				RPJMD Provinsi	RPJMN
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran/Indikator/ Sasaran/Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/ Impact	Sasaran/Indikator /Sasaran/Impact
1	2	3	4	5	6	7
				hukum yang dilayani dan dilindungi		kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah
				<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (kelompok) 	Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri	7.4 Pemuda dan Olahraga
				<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha tingkat Kabupaten 	Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (kelompok)	Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama
					Peringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional a. PON b. POPNAS c. POPCANAS d. POSPENAS e. PORWIL	Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional



6.1. STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang memuat sejumlah program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam strategi terdapat rumusan strategi yang merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan diwujudkan.

Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang akan ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada tujuan, sesuai dengan kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang (RPJMD).

6.2 . ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (Lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen dari bagian yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk mewujudkan 6 (Enam) tujuan dan 21 (Dua Puluh Satu) sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 - 2021, maka disusunlah 24 (Dua Puluh Empat) Strategi dan 44 (Empat Puluh Empat) Arah Kebijakan dengan rincian :

- a) Misi I “*Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata* “
terdapat 1 strategi dan 3 arah kebijakan;
- b) Misi II “*Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan*“
Terdapat 3 Strategi dan 4 Arah Kebijakan;
- c) Misi III “*Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang berdaya saing*”
terdapat 7 strategi 15 arah kebijakan.
- d) Misi IV “*Mewujudkan nilai-nilai agama dan budaya dalam melandasi pelaksanaan pembangunan* “
terdapat 1 strategi 3 arah kebijakan.

- e) Misi V “ *Mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel* “
Terdapat 5 strategi 7 arah kebijakan.
- f) Misi VI “ *Mewujudkan pembangunan yang merata dan bersinergi yang berwawasan lingkungan* “
terdapat 7 strategi 12 arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Misi I ” *Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan merata* “

- 1. **Sasaran :** Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat.
- 2. **Strategi :**
 - 1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk daerah terpencil/terisolir.
 - a) **Arah kebijakan :**
 - Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
 - Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat.
 - Meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan.

B. Misi II “ *Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan* “

- 1. **Sasaran :** Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan pendidikan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat.
- 2. **Strategi :**
 - 1) Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil dan merata.
 - a) **Arah kebijakan :**
 - Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
 - 2) Meningkatkan kesejahteraan, kualifikasi dan kompetensi guru sebagai tenaga pendidik/kependidikan.
 - a) **Arah kebijakan :**
 - Meningkatkan kualitas pendidikan dan sertifikasi guru.

3) Meningkatkan mutu dan kualitas layanan pendidikan.

a) Arah kebijakan :

- Peningkatan standar pelayanan pendidikan sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional (SPN).
- Peningkatan minat baca masyarakat.

C. Misi III “*Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang berdaya saing*”

1. Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal.

1) **Strategi :** Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu.

a) **Arah kebijakan :** Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal.

2. Sasaran : Meningkatnya Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dan mengembangkan sektor Perdagangan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat.

1) **Strategi :** Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM serta mengembangkan sektor perdagangan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat.

a) Arah kebijakan :

- Peningkatan akses teknologi, permodalan, peralatan serta kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM.
- Meningkatkan perluasan pasar dan nilai produk perdagangan.

3. Sasaran : Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur pertanian dan perkebunan.

1) **Strategi :** membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur pertanian dan perkebunan.

a) Arah kebijakan :

- Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan sentra produksi.
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan irigasi.

4. Sasaran : Meningkatnya investasi.

1) **Strategi :** Optimalisasi pengelolaan investasi.

a) Arah kebijakan :

- Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi.
- Meningkatkan kualitas pelayanan proses perizinan investasi.

5. **Sasaran** : Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan.

1) **Strategi** : Optimalisasi kebijakan revitalisasi pertanian.

a) **Arah kebijakan** :

- Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan
- Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan
- Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu hasil peternakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peternakan
- Meningkatkan nilai tambah produk peternakan.

b) Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perikanan

- Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya.

2) **Strategi** : Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata daerah

a) **Arah kebijakan** :

- Meningkatkan pengembangan pemasaran seni budaya dan industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.
- Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah

6. **Sasaran** : Meningkatnya kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran dikalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.

1) **Strategi** : meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

a) **Arah kebijakan** :

- Peningkatan kesempatan, kualitas dan kompetensi Tenaga Kerja.

D. Misi IV “*Mewujudkan pelestarian nilai-nilai agama dan budaya dalam melandasi pelaksanaan pembangunan*”

1. **Sasaran** : Terwujudnya kehidupan beragama dan budaya yang harmonis serta berkembangnya seni budaya daerah.

1) **Strategi** : Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat dengan mengedepankan toleransi beragama serta mengembangkan seni budaya daerah

a. **Arah Kebijakan** :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana peribadatan
- Peningkatan kualitas beribadah dan pendidikan agama masyarakat
- Mengembangkan seni budaya daerah

E. Misi V “*Mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel*”

1. **Sasaran** : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi.
 - 1) **Strategi** : terwujudnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - a) **Arah kebijakan** :
 - Peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah
 - Mewujudkan sistem perencanaan penganggaran dan manajemen aset yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis kinerja.
2. **Sasaran** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
 - 1) **Strategi** : Peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi
 - a) **Arah kebijakan** :
 - Peningkatan standar kualitas pelayanan publik.
3. **Sasaran** :Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik.
 - 1) **Strategi** : Meningkatkan kinerja pemerintahan oleh aparatur profesional yang berkarakter melayani dalam upaya memberikan pelayanan prima.
 - a) **Arah kebijakan** :
 - Penempatan dan distribusi aparatur sesuai kebutuhan
 - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi.
4. **Sasaran** : Meningkatnya kinerja bidang kependudukan.
 - 1) **Strategi** : Peningkatan dan perluasan pelayanan bidang administrasi kependudukan.
 - a) **Arah kebijakan** :
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung administrasi kependudukan
5. **Sasaran** : Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan.
 - 1) **Strategi** : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif
 - a) **Arah kebijakan** :
 - Meningkatkan perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

F. Misi VI “*Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Bersinergi yang berwawasan lingkungan*”

1. **Sasaran** : Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar.

1) **Strategi** : Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar.

a) **Arah kebijakan** :

- Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan
- Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan.
- Mengembangkan prasarana lingkungan, air baku dan air limbah.

2. **Sasaran** : Meningkatnya pelayanan transportasi perhubungan darat

1) **Strategi** : Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur perhubungan

a) **Arah kebijakan** :

- Meningkatkan pelayanan transportasi perhubungan

3. **Sasaran** : Mengurangi resiko kerusakan lingkungan

1) **Strategi** : Menurunkan beban pencemaran lingkungan

a) **Arah Kebijakan** :

- Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan air dan udara dengan meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan
- Optimalisasi pengelolaan persampahan

4. **Sasaran** : Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1) **Strategi** : Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana

a) **Arah kebijakan** :

- Meningkatkan peranserta dunia usaha, swasta dan masyarakat dalam Pra, Saat dan Pasca Bencana.

5. **Sasaran** : Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat serta pengentasan desa tertinggal.

1) **Strategi** : Penguatan kelembagaan, pengembangan partisipasi dan peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat termasuk di desa tertinggal.

a) **Arah kebijakan** :

- Peningkatan kualitas pemberdayaan dan pelayanan sosial masyarakat
- Pengentasan desa tertinggal

6. Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan kualitas kehidupan serta perlindungan perempuan dan anak untuk menunjang ketahanan keluarga

1) Strategi : Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan serta melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

a) Arah kebijakan :

- Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pengarus utamaan gender
- Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.

7. Sasaran : Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri.

1) Strategi : Mewujudkan pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan wirausaha.

a) Arah Kebijakan :

- Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan melalui kewirausahaan mandiri.

TABEL 6.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Rejang Lebong, Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera"

Misi I: Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas adil dan merata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan masyarakat.	Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat	1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk di daerah terpencil/terisolir	1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas 2. Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan
Misi II: Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar bidang pendidikan masyarakat.	Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan pendidikan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat	1. Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil dan merata 2. Meningkatkan kesejahteraan, kualifikasi dan kompetensi guru sebagai tenaga pendidik/kependidikan 3. Meningkatkan mutu dan kualitas layanan pendidikan	1. Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas 2. Peningkatan kualitas pendidikan dan serifikasi guru 3. Peningkatan standar pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional (SPN) 4. Peningkatkan minat baca masyarakat

Misi III: Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam meningkatkan pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal 2. Meningkatnya Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dan Mengembangkan sektor Perdagangan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat 3. Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur pertanian dan perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu 1. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM serta Mengembangkan Sektor Perdagangan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat 1. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur pertanian dan perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal 1. Peningkatan akses teknologi, permodalan, peralatan serta kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM. 2. Meningkatkan perluasan pasar dan nilai produk perdagangan. 1. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan sentra produksi 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan irigasi

	<p>4. Meningkatnya investasi</p> <p>5. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan</p>	<p>1. Optimalisasi pengelolaan investasi</p> <p>1. Optimalisasi kebijakan revitalisasi pertanian</p> <p>1. Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perikanan</p> <p>2. Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata daerah</p>	<p>1. Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pelayanan proses perizinan investasi</p> <p>1. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan</p> <p>2. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan</p> <p>3. Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu hasil peternakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peternakan</p> <p>4. Meningkatkan nilai tambah produk peternakan</p> <p>1. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya</p> <p>1. Meningkatkan pengembangan pemasaran seni budaya dan industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan</p>
--	---	---	--

	6. Meningkatnya kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.	1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	2. Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah 1. Peningkatan kesempatan, Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja
--	---	---	---

Misi IV: Mewujudkan pelestarian nilai – nilai agama dan budaya dalam melandasi pelaksanaan pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan masyarakat yang beriman dan berbudaya	1. Terwujudnya kehidupan bergama dan budaya yang harmonis serta berkembangnya seni budaya daerah.	1. Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat dengan mengedepankan toleransi beragama dan mengembangkan budaya daerah	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana peribadatan 2. Peningkatan kualitas ibadah dan pendidikan agama masyarakat 3. Mengembangkan seni budaya daerah

Misi V: Mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan clean goverment dan good governance.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 3. Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik 4. Meningkatnya kinerja bidang kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 1. Peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi 1. Meningkatkan kinerja pemerintahan oleh aparatur profesional yang berkarakter melayani dalam upaya memberikan pelayanan prima 1. Peningkatan dan perluasan pelayanan bidang administrasi kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah 2. Mewujudkan sistem perencanaan penganggaran dan manajemen aset yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis kinerja 1. Peningkatan standar kualitas pelayanan publik 1. Penempatan dan distribusi aparatur sesuai kebutuhan. 2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi 1. Penempatan aparatut dan distribusi sesuai kebutuhan 2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung administrasi kependudukan

	5. Meningkatnya penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan	1. Meningkatnya tata kelola Pemerintah yang Efektif.	1. Meningkatnya perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Misi VI: Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Bersinergi yang Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan perhubungan yang terintegrasi serta informasi yang berkualitas guna peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar 2. Meningkatnya pelayanan transportasi perhubungan darat 3. Mengurangi resiko kerusakan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar 1. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur perhubungan 1. Menurunkan beban pencemaran lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan 2. Pembangunan, peningkatan ,rehabilitasi dan pemeliharaan jalan 3. Mengembangkan prasarana lingkungan, air baku dan air limbah 1. Peningkatan pelayanan transportasi perhubungan 1. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan, tanah, air dan udara dengan meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan 2. Optimalisasi pengelolaan persampahan

	<p>4. Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>5. Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat serta perentasan desa tertinggal</p> <p>6. Meningkatnya pemberdayaan kualitas kehidupan serta perlindungan perempuan dan anak untuk menunjang ketahanan keluarga</p>	<p>1. Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan Pemulihan akibat bencana</p> <p>1. Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi dan Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat termasuk di desa tertinggal</p> <p>1. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan serta melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan</p>	<p>1. Meningkatkan peran serta dunia Usaha, Swasta dan Masyarakat dalam Pra, Saat dan Pasca Bencana</p> <p>1. Peningkatan kualitas pemberdayaan dan pelayanan sosial masyarakat</p> <p>2. Pengentasan desa tertinggal</p> <p>1. Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender</p> <p>2. peningkatan Perlindungan perempuan dan anak</p>
--	---	---	---

	<p>7. Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri.</p>	<p>1. Mewujudkan pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan wirausaha</p>	<p>1. Peningkatkan peran pemuda dalam pembangunan melalui kewirausahaan mandiri</p>
--	---	---	---

Tabel 6.2
KESELARASAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD TAHUN 2016 -2021
Kabupaten Rejang Lebong

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk di daerah terpencil/terisolir	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses dan mutu <i>continuum of care</i> pelayanan ibu dan anak - Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita - Peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV, dan malaria dan penyakit tidak menular - Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit - Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas 2. Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak - Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 	<ul style="list-style-type: none"> - Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas - Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pembangunan sarana dan prasarana layanan kesehatan di wilayah dengan jumlah fasilitas kesehatan terbatas, serta membentuk sistem kendalimutu layanan kesehatan - Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar - Peningkatan kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu - Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta - Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, 		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat - Meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas - Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas - Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				rumah sakit rujukan regional, rumah sakit di setiap kabupaten/kota, termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan			
			Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun Non-MKJP - Pengembangan operasional pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan - Peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian nasional program KB 		Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan - Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga - Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB - Pendayagunaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk KB dan KR - Peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan pemberian alokon bagi pasangan usia muda - Peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dalam pendidikan - Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja 			

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan pendidikan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil dan merata 2. Meningkatkan kesejahteraan, kualifikasi dan kompetensi guru sebagai tenaga pendidik/kependidikan 3. Meningkatkan mutu dan kualitas layanan pendidikan 	Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, di daerah pascakonflik dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal - Perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pdd 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas 2. Peningkatan kualitas pendidikan dan serifikasi guru 3. Peningkatan standar pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional (SPN) 4. Peningkatkan minat baca masyarakat 	- Pembangunan dan perbaikan sarana & prasarana pendidikan dan peningkatan pusat - pusat Pembelajaran dan Pelatihan serta meningkatkan minat baca masyarakat	- Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jaminan kualitas pendidikan menengah sehingga lulusannya benar-benar memperoleh manfaat hasil belajar sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk menciptakan/mendapatkan pekerjaan yang lebih baik - Penyediaan pendidik berkualitas yang memenuhi kualifikasi akademik untuk mengajar, terutama mata pelajaran umum - Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta 		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Mutu pendidikan dan Kompetensi Tenaga Pendidik - Meningkatkan standar akreditasi pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas - Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja - Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas - Memperkuat jaminan kualitas (<i>quality assurance</i>) pelayanan pendidikan

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	1. Meningkatkan Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal 2. Meningkatkan Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) dan Mengembangkan sektor Perdagangan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat 3. Meningkatkan pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur pertanian dan perkebunan	1. Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu 2. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM serta Mengembangkan Sektor Perdagangan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat 3. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur pertanian dan perkebunan 4. Optimalisasi pengelolaan investasi 5. Optimalisasi kebijakan revitalisasi pertanian	Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu	- Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus - Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kawasan - Pengembangan jalur distribusi dan logistik pemasaran	1. Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal 2. Peningkatan akses teknologi, permodalan, peralatan serta kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM. 3. Meningkatkan perluasan pasar dan nilai produk perdagangan. 4. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan sentra produksi 5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan irigasi	Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus : Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air bersih penunjang kegiatan industri

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<p>4. Meningkatnya investasi</p> <p>5. Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan</p> <p>6. Meningkatnya kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.</p>	<p>6. Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perikanan</p>			<p>6. Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi</p> <p>7. Meningkatkan kualitas pelayanan proses perizinan investasi</p> <p>8. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan</p> <p>9. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan</p>		

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					<p>10. Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu hasil peternakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peternakan</p> <p>11. Meningkatkan nilai tambah produk peternakan</p> <p>12. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya</p> <p>13. Meningkatkan pengembangan pemasaran seni budaya dan industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan</p>		

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					14. Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah 15. Peningkatan kesempatan, Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja		
			Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM serta Mengembangkan sarana Perdagangan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran - Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah - Penguatan kelembagaan usaha - Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan - Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat) 		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas teknis, permodalan dan peralatan UMKM serta kapasitas kelembagaan Koperasi - Mengembangkan sarana perdagangan rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional - Meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta pengembangan sarana prasarana pelatihan kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pelatihan untuk memasuki pasar tenaga kerja dan penerapan model wirausaha sesuai kaidah yang telah ditetapkan, serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri - Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja - Peningkatan peranan pemerintah daerah dalam pengembangan mekanisme penempatan tenaga kerja - Mengintegrasikan sistem informasi pasar tenaga kerja untuk merespon kebutuhan informasi dari perusahaan, penyedia pelatihan dan pencari kerja dengan membangun kemitraan antara pembuat kebijakan dengan bursa kerja swasta 		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesempatan dan Kompetensi Tenaga Kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Memfungsikan pasar tenaga kerja - Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja - Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global - Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif - Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK)

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa dan pemberdayaan ekonomi di desa tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> - Menguatkan konektivitas lokasi perdesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di perdesaan yang dapat menghubungkan lokasilokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat - Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan 		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemberdayaan ekonomi di desa tertinggal - Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produktivitas sektor/ subsektor ekonomi - Penguatan Pemerintahan Desa, melalui Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan
			Optimalisasi pengelolaan investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha - Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah - Pengembangan layanan investasi - Pemberian insentif dan fasilitasi investasi 		Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha - Peningkatan Investasi yang inklusif - Penganggaran : Dari sisi pelaksanaan anggaran - Penumbuhan Populasi Industri

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi) - Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan sejak industri hulu hingga industri hilir dengan mengembangkan keterpaduan industri berbasis hasil hutan (forest based cluster industry) - Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu - Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat, terutama melalui peremajaan tanaman perkebunan dan hortikultura rakyat komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor 		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan eksplorasi sumber daya alam - Optimalisasi pengelolaan sumberdaya hutan untuk menciptakan nilai tambah berbasis masyarakat - Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan - Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh 	<ul style="list-style-type: none"> - Penumbuhan Populasi Industri - Pengembangan KPH Produksi dan Produk Kayu - Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian - Peningkatan produktivitas, standar mutu dan standar ramah lingkungan hasil pertanian komoditi andalan ekspor dan untuk penggunaan industri dalam negeri - Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, penyuluh pertanian, pendamping desa di daerah tertinggal - Revitalisasi sistem perbenihan padi dan perbibitan sapi dan kerbau - Mengembangkan beberapa metode perlindungan/ skema pembiayaan bagi para petani, peternak dan nelayan

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi hasil pertanian, peningkatan - Peningkatan efektivitas penyuluhan - Peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap, melalui alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, kemampuan sumber daya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan - Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan, terutama di 100 sentra perikanan terpadu dan terintegrasi (hulu-hilir) - Revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold storage dan rantai dingin di lokasilokasi yang tepat, terutama di 100 sentra perikanan 		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu hasil peternakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peternakan - Meningkatkan nilai tambah produk peternakan - Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan tangkap - Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan beberapa metode perlindungan/ skema pembiayaan bagi para petani, peternak dan nelayan - Peningkatan Produktivitas, Optimalisasi Kapasitas dan Kontinuitas Produksi Perikanan - Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Perikanan - Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan - Peningkatan Produktivitas, Optimalisasi Kapasitas dan Kontinuitas Produksi Perikanan - Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan - Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Perikanan

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan - Pengembangan kapasitas, modernisasi, dan daya saing UKMK pengolahan hasil perikanan - Intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya dan percontohan teknologi budidaya yang benar melalui model pengembangan techno park dan science park - Pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perikanan tangkap dan budidaya 			
			Mengembangkan destinasi wisata unggulan dan meningkatkan promosi wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara - Mendorong peningkatan wisatawan nusantara, dengan strategi fokus pada 16 pasar wisatawan manca negara dan 16 pasar utama wisatawan domestik 		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengembangan pemasaran seni budaya dan pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasaran Pariwisata Nasional

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemasaran pariwisata nasional - Dibentuk Pusat Promosi Pariwisata Indonesia di negara-negara terpilih - Meningkatkan citra kepariwisataan 			
			Pengembangan objek wisata dan produk unggulan daerah yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan dalam penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RRTR, site plan destinasi wisata beserta rancangan detail (detail design) kawasan destinasi wisata - Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal - Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata 		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Destinasi Pariwisata - Pembangunan Industri Pariwisata

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Terwujudnya kehidupan beragama dan budaya yang harmonis serta berkembangnya seni budaya daerah	Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat dengan mengedepankan toleransi beragama dan mengembangkan budaya daerah	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, budaya dan demokrasi dalam masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan lembaga pendidikan keagamaan untuk memperluas akses ke lembaga pemerintah dan nonpemerintah guna mendukung penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan - Pengembangan pendidikan kewargaan di kalangan masyarakat, untuk meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan sosial - Penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warga negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana peribadatan 2. Peningkatan kualitas ibadah dan pendidikan agama masyarakat 3. Mengembangkan seni budaya daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan kondisi yang kondusif dalam kehidupan di masyarakat - Meningkatkan penerapan Demokrasi dalam kehidupan bernegara 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas - Mengembangkan pendidikan kewargaan disekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (<i>good citizen</i>)

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik 4. Meningkatkan kinerja bidang kependudukan 5. Meningkatkan penerapan yang konsisten antar dokumen perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi 3. Meningkatkan kinerja pemerintahan oleh aparatur profesional yang berkarakter melayani dalam upaya memberikan pelayanan prima 4. Peningkatan dan perluasan pelayanan bidang administrasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Daerah - Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur - Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik - Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penerapan <i>e-government</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan prioritas pembangunan - Peningkatan kualitas kapasitas SDM aparatur pemerintah - Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik - Peningkatan kinerja akuntabilitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah - Tersedianya sistem aplikasi <i>e-budgeting</i> bagi pemerintah daerah - Perluasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pusat dan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah 2. Mewujudkan sistem perencanaan penganggaran dan manajemen aset yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis kinerja 3. Peningkatan standar kualitas pelayanan publik 4. Penempatan dan distribusi aparatur sesuai kebutuhan 5. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan sistem pengendalian internal - Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan - Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur berbasis kompetensi - Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik - Optimalisasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja - Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis - Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat - Peningkatan kualitas pelayanan publik - Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah - Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan <i>e-budgeting</i> - Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Meningkatnya tata kelola Pemerintah yang Efektif		- Optimalisasi penerapan <i>e-Government</i> yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan <i>on-line</i> , sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat	6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung administrasi kependudukan 7. Meningkatnya perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	- Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi - Penerapan <i>e-government</i> dalam pengelolaan pemerintahan	- Optimalisasi penerapan <i>e-Government</i> yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan <i>on-line</i> , sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat yang efektif
6.	1. Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar 2. Meningkatnya pelayanan transportasi perhubungan darat	1. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar 2. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur perhubungan	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah	- Perluasan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan : Percepatan pembangunan pembangkit listrik guna meningkatkan kapasitas daya listrik nasional, terutama untuk wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan listrik disertai dengan percepatan pembangunan	1. Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan 2. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan	- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur listrik - Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	- Meningkatkan Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan : Peningkatan pasokan energi dan ketenagalistrikan (sisi penyediaan) dengan memperhatikan jaminan pasokan energi primer dan bauran energi (diversifikasi energi) dan pengendalian pemanfaatan (sisi permintaan) yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi - Peningkatan produksi dan

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<p>3. Mengurangi resiko kerusakan lingkungan</p> <p>4. Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>5. Meningkatkan perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat serta perentasan desa tertinggal</p> <p>6. Meningkatkan pemberdayaan kualitas kehidupan serta perlindungan perempuan dan anak untuk menunjang ketahanan keluarga</p>	<p>3. Menurunkan beban pencemaran lingkungan</p> <p>4. Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan Pemulihan akibat bencana</p> <p>5. Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi dan Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat termasuk di desa tertinggal</p> <p>6. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan serta melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan</p>		<p>jaringan transmisi, distribusi, gardu induk dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (panas bumi, air, surya dan biomassa) termasuk skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi wilayah</p> <p>- Perluasan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan : Penyediaan energi listrik semakin luas dan merata ke seluruh wilayah tanah air, termasuk untuk daerah spesifik seperti wilayah perbatasan, terpencil, dan kepulauan, serta jaminan pasokan listrik untuk transportasi</p>	<p>3. Mengembangkan prasarana lingkungan, air baku dan air limbah</p> <p>4. Meningkatkan pelayanan transportasi perhubungan</p> <p>5. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan air dan udara dengan meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan</p> <p>6. Optimalisasi pengelolaan persampahan</p>	<p>- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan</p> <p>- Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih</p> <p>- Peningkatan cakupan sarana informasi dan komunikasi masyarakat</p>	<p>produktivitas hasil pertanian</p> <p>- Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan</p> <p>- Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota</p> <p>- Peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai serta diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen</p>

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	7. Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri	7. Mewujudkan pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan wirausaha		<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu - Penyediaan DAK bidang Transportasi yang lebih terintegrasi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi, seperti pembangunan jalan Provinsi, Kabupaten/Kota dan jalan non status yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, berikut fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, serta sarana transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 7. Meningkatkan peranserta dunia usaha, swasta dan masyarakat dalam Pra, Saat dan Pasca Bencana 8. Peningkatan kualitas pemberdayaan dan pelayanan sosial masyarakat 9. Pengentasan desa tertinggal 10. Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pengarus utamaan gender 11. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak 		<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman : Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat - Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, penerbangan, pelayaran dan penyediaan moda transportasi perintis - Pengembangan kapasitas dan kualitas jalan yang mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik - Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan - Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku <i>hygiene</i> 	12.Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan melalui kewirausahaan mandiri		

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi untuk memperluas cakupan layanan - Mengembangkan kota cerdas (<i>smart city</i>) yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 			
			Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur strategis	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan : Percepatan pembangunan pembangkit listrik guna meningkatkan kapasitas daya listrik nasional, terutama untuk wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan listrik disertai dengan percepatan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, gardu induk dengan meningkatkan 		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan - Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Keselamatan transportasi darat 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan : Peningkatan pasokan energi dan ketenagalistrikan (sisi penyediaan) dengan memperhatikan jaminan pasokan energi primer dan bauran energi (diversifikasi energi) dan pengendalian pemanfaatan (sisi permintaan) yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energy

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>pemanfaatan energi baru terbarukan (panas bumi, air, surya dan biomassa) termasuk skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi wilayah</p> <p>- Membangun dan memperluas jaringan infrastruktur dan sistem pelayanan transportasi nasional untuk memperkecil defisit dan mempersempit kesenjangan transportasi antar wilayah yang meliputi jalan, bandara, kereta api, pelabuhan laut dan penyeberangan, dermaga sungai dan danau, kapal perintis, bus, bus air dan kereta ekonomi di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan - Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan - Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>- Membangun jaringan prasarana yang terdiri dari dari simpul dan ruang lalu lintas. Simpul berfungsi sebagai ruang yang dipergunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, serta perpindahan intra dan antar moda. Ruang lalu lintas berfungsi sebagai ruang gerak untuk sarana transportasi, namun khusus untuk ruang lalu lintas transportasi jalan, disamping untuk lalu-lintas sarana transportasi juga memiliki fungsi lain yaitu untuk lalu lintas orang dan hewan</p>			
			Menurunkan beban pencemaran lingkungan	- Pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau		Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan air dan udara dengan	- Meningkatkan upaya Keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi pencemaran sungai melalui upaya struktural dan non struktural seperti percepatan pembangunan sanitasi dan pengolahan limbah di wilayah bantaran sungai - Pengendalian pencemaran air ke sumber-sumber air, dan mendorong penerapan insentif kebijakan tarif air terkait pengelolaan limbah cair rumah tangga - Menerapkan standar/aturan mengenai limbah dan bahan B3 		meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya - Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat - Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup : mengelola limbah dan bahan B3
			Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan Pemulihan akibat bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana melalui perkuatan Flood Proofing sebagai kapasitas adaptasi bencana banjir dan kapasitas mitigasi institusi serta masyarakat, serta peningkatan kemampuan prediksi terhadap peningkatan aliran sungai dan dampak yang ditimbulkannya 		- Meningkatkan peran serta dunia Usaha, Swasta dan Masyarakat dalam Pra, saat dan Pasca Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim - Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan : Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten/Kota sasaran - Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan : Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan sektoral dan wilayah - Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan : Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan 			

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Mempertahankan fungsi hutan	Secara terkoordinasi melakukan pemulihan kawasan bekas tambang, hutan/tutupan lahan, pesisir dan laut serta badan air yang kritis		Pemulihan lahan sangat kritis dan kritis	Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup : Melakukan upaya pemulihan pada kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/ tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi
			Pencegahan, Pengurangan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan pekerja informal - Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek kehidupan - Penguatan peran kelembagaan sosial 		- Meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan penyandang kesejahteraan sosial.	- Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif
			Meningkatkan peran dan akses perempuan dalam pembangunan	- Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai		- Peningkatan Pengarusutaman Gender dalam pembangunan	- Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah - Peningkatan kesetaraan gender untuk akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi			
			Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan	- Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak		- Meningkatkan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan	- Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM
			Meningkatkan peran, potensi, prestasi pemuda dan olahraga	- Penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya - Penyebarluasan informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media		- Peningkatan peran, kompetensi pemuda melalui pola pengkaderan secara terencana sistematis dan berkelanjutan	- Meningkatnya pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba - Penegakan hukum kejahatan narkoba 		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengetahuan pemuda/pelajar terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat- obat terlarang lainnya sejak dini 	<ul style="list-style-type: none"> dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan - Menguatkan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba
			Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga - Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan 		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi dan prestasi di bidang olah raga melalui pola pengkaderan secara terencana sistematis dan berkelanjutan - Peningkatan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi - Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga

NO	RPJMD Kabupaten		RPJMD PROVINSI	RPJMN	RPJMD Kabupaten	RPJMD PROVINSI	RPJMN
	Sasaran	Strategi	Strategi	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan - Peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha/ swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga, termasuk media massa 			



Kebijakan umum bertujuan menggambarkan keterkaitan antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran, dan berfungsi sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan daerah jangka menengah. Program yang disusun untuk mewujudkan sasaran strategis, dengan memakai sumber daya, sesuai pula dengan ketentuan serta berdasar strategi maupun arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan 23 (dua puluh tiga) strategi dan 42 (empat puluh dua) arah kebijakan, disusunlah sebanyak 80 (delapan puluh) program pembangunan daerah dengan rincian yang terbagi menjadi 3 (tiga) bidang yaitu bidang ekonomi 32 (tiga puluh dua) program, bidang sosial sebanyak 27 (dua puluh tujuh) program dan bidang infrastruktur sebanyak 15 (lima belas) program. Ke 74 (tujuh puluh empat) program pembangunan daerah tersebut mendukung 6 (enam) misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dengan rincian sebagai berikut : a) Misi I sebanyak 3 arah kebijakan dan 11 program; b) Misi II sebanyak 4 arah kebijakan dan 11 program; c) Misi III sebanyak 14 arah kebijakan dan 30 program; d) Misi IV sebanyak 2 arah kebijakan dan 2 program; e) Misi V sebanyak 6 arah kebijakan dan 9 program; f) Misi VI sebanyak 10 arah kebijakan dan 17 program. Arah kebijakan dan program pembangunan daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Misi I : Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas adil dan merata

1) Arah Kebijakan :

Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

Program :

- Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
- Program perbaikan gizi.
- Program pengembangan SDM kesehatan.
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

2) Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat.

Program :

- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya.
- Program pengembangan SDM kesehatan.
- Program pengembangan infrastruktur pedesaan.
- Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan.
- Program upaya kesehatan masyarakat.
- Program pangadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata.

3) Arah Kebijakan : Meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan.

Program :

- Pengembangan SDM kesehatan.

B. Misi II : Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan

1) Arah Kebijakan :

Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.

Program :

- Pendidikan anak usia dini.
- Pembangunan infrastruktur pedesaan.
- Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
- Program wajar Dikdas /bantuan keuangan kepada Kab/Kota.
- Program pendidikan menengah.
- Program pendidikan non formal.

2) Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas pendidikan dan sertifikasi guru.

Program :

- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

3) Arah Kebijakan

Peningkatan standar pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional (SPN).

Program :

- Program wajar dikdas /bantuan keuangan kepada Kab/Kota.

4) Peningkatan minat baca masyarakat

Program :

- Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

C. Misi III : Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang berdaya saing

1) Arah kebijakan

Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal.

Program :

- Pengembangan sentra-sentra industri potensial.
- Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.

2) Arah Kebijakan

Peningkatan akses teknologi, permodalan, peralatan serta kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM.

Program :

- Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM .
- Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
- Peningkatan efisiensi perdagangan luar negeri.

3) Arah Kebijakan

Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan usaha tani.

Program :

- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

4) Arah Kebijakan

Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas jaringan Irigasi.

Program :

- Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan.
- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

5) Arah Kebijakan

Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi

Program :

- Peningkatan iklim Investasi dan realisasi investasi.

- Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana Daerah.
- Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

6) Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas pelayanan dan proses perizinan investasi

Program :

- Peningkatan pelayanan publik.
- Penataan peraturan Perundang-undangan.

7) Arah Kebijakan

Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan.

Program :

- Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan.

8) Arah Kebijakan

Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan.

Program :

- Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan.
- Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan).
- Peningkatan kesejahteraan petani.
- Penungkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.

9) Arah Kebijakan

Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu hasil peternakan melalui *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* peternakan.

Program :

- Peningkatan produksi hasil peternakan.
- Pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan Rakyat.

10) Arah Kebijakan

Meningkatkan nilai tambah produk peternakan.

Program :

- Peningkatan produksi hasil peternakan.
- Pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan Rakyat.

11) Arah Kebijakan

Meningkatkan produksi dan hasil perikanan budidaya.

Program :

- Program budidaya perikanan.

12) Arah Kebijakan

Meningkatkan Pengembangan pemasaran seni budaya dan industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.

Program :

- Program pengembangan pemasaran pariwisata.
- Pemasaran pariwisata melalui pagelaran seni budaya dan pengembangan event pariwisata Daerah.
- Pengembangan nilai budaya.
- Pengelolaan kekayaan budaya.

13) Arah kebijakan

Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya Daerah.

Program :

- Pengembangan destinasi pariwisata.

14) Arah kebijakan

Kebijakan, peningkatan, kesempatan, kualitas, dan kompetensi tenaga kerja.

Program :

- Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

D. Misi IV : Mewujudkan pelestarian nilai-nilai Agama dalam melandasi pelaksanaan pembangunan

1) Arah Kebijakan :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana peribadatan.

Program :

- Program pengembangan infrastruktur pedesaan.

2) Arah Kebijakan :

Peningkatan kualitas ibadah dan pendidikan agama Masyarakat.

Program :

- Program peningkatan kualitas kehidupan beragama.

E. Misi V : mewujudkan sistem Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

1) Arah Kebijakan :

Peningkatan kualitas pengawasan Internal Pemerintah.

Program :

- Peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan KDH

2) Arah Kebijakan :

Mewujudkan sistem perencanaan penganggaran dan manajemen aset yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis kinerja

Program :

- Peningkatan akuntabilitas kinerja.
- Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH.
- Program perencanaan pembangunan daerah.

3) Arah Kebijakan :

Peningkatan standar kualitas pelayanan publik.

Program :

- Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.
- Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH.

4) Arah Kebijakan

Penempatan dan distribusi aparatur sesuai kebutuhan.

Program :

- Pembinaan dan pengembangan aparatur.

5) Arah Kebijakan

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi.

Program :

- Pembinaan dan pengembangan aparatur.

6) Arah Kebijakan

Meningkatnya perencanaan dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Program :

- Program perencanaan pemerintah daerah.

7) Arah Kebijakan

Penempatan dan distribusi aparatur sesuai kebutuhan.

Program :

- Program penataan administrasi kependudukan.

8) Arah Kebijakan

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi.

Program :

- Program penataan administrasi kependudukan.

9) Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung administrasi kependudukan.

Program :

- Program penataan administrasi kependudukan.

F. Misi VI : Mewujudkan Pembangunan yang merata dan bersinergi yang berwawasan lingkungan

1) Arah Kebijakan :

Peningkatan cakupan dan akses Masyarakat terhadap ketenagalistrikan

Program :

- Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan

2) Arah Kebijakan :

Pembangunan peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan

Program :

- Rehabilitasi jalan dan jembatan
- Pembangunan jalan dan jembatan

3) Arah Kebijakan :

Mengembangkan prasarana lingkungan air baku dan air limbah

Program :

- Pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman

4) Arah Kebijakan :

Peningkatan pelayanan transportasi perhubungan

Program :

- Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

5) Arah Kebijakan :

Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan air dan udara dengan meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan

Program :

- Pengembangan pengelolaan lingkungan

6) Arah Kebijakan :

Optimalisasi pengelolaan persampahan

Program :

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

7) Arah Kebijakan :

Meningkatkan peran serta dunia Usaha, Swasta dan Masyarakat dalam Pra, saat dan Pasca Bencana

Program :

- Program pengurangan risiko bencana
- Program peningkatan kualitas SDM dan kesiapsiagaan tanggap darurat
- Program sarana dan prasarana logistik dan peralatan penanggulangan bencana
- Program pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana
- Program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana
- Program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana

Arah Kebijakan :

8) Arah Kebijakan :

Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender

Program :

- Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- Arah kebijakan

9) Arah kebijakan

peningkatan Perlindungan perempuan dan anak

Program :

- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

10) Arah kebijakan

Peningkatkan peran pemuda dalam pembangunan melalui kewirausahaan mandiri

Program :

- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- Program peningkatan peran serta kepemudaan

TABEL 7.1 SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016 - 2021

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Rejang Lebong, Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera"

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat	Strategi: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk di daerah terpencil/terisolir														
		Arah Kebijakan: Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	147	126	105	84	63	42	21	21	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Kegiatan : Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Dinkes	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
			Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	54	52	50	48	46	44	40	40	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinkes	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
			% Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	9,2%	9,2%	9,0%	8,8%	8,6%	8,4%	8,0%	8,0%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinkes	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
			% Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)	34,2%	34,2%	33,6%	32,8%	32,0%	31,2%	30	30					
			Jumlah Desa yang belum memiliki Bidan Desa	44	44	34	24	12	0	0	0	Program Pengembangan SDM Kesehatan	Dinkes , BKD	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
			Angka Kejadian Malaria (API) per 1.000 penduduk	0,03%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinkes	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
			Prevalensi HIV	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%	< 0,5%					
			Angka Penemuan Kasus TB (CDR)	46	>55	>60	>65	>70	>75	>85	>85					
	% Desa yang mencapai UCI (Universal Child Immunisation)	83	85	85	88	90	100	100	100							

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI			
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021								
		Arah kebijakan: Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang akan ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap	8	8	6	4	2	0	0	0	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Dinkes	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan			
												Program Pengembangan SDM Kesehatan	Dinkes/ BKD	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan			
			Jumlah kecamatan yang belum memiliki puskesmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Dinkes	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan		
													Program Pengembangan SDM Kesehatan	Dinkes/ BKD	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan		
			Jumlah Desa/ kelurahan yang belum memiliki Sarana Kesehatan (Pustu/ Poskesdes)	21	21	16	11	6	0	0	0	0	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Dinkes	APBD Prov/kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan		
			Jumlah Desa /Kelurahan yang sarana kesehatannya perlu direvitalisasi	20	20	15	10	5	0	0	0	0	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	DPUPRPKP	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan		
													Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	DPMPSTSP/PLN	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan		
			Jumlah masyarakat yang membutuhkan jaminan pelayanan kesehatan	15.000	26.547	66.368	92.915	106.189	119.462	132.736	132.736	132.736	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	APBD Prov, APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan		
			Persentase Tahapan akreditasi RSUD Curup dari C ke B	60	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSUD	APBD Prov, APBD Kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
			Arah kebijakan: Meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokter spesialis	14	14	17	19	21	23	25	25	25	Program Pengembangan SDM Kesehatan		APBD Prov, APBD Kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI		
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan	Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan pendidikan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat	Strategi: Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil dan merata															
		Arah kebijakan : Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) (%) PAUD	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Diknas	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan		
												Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	DPUPRKP	APBD Prov/kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan		
												Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	DPMPTSP/PLN	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 3) Pengembangan Infrastruktur Strategis & Industrialisasi		
												Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD	APBD kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan		
												Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD	APBD kab	(Prioritas 4) Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT		
					Angka partisipasi murni (APM) (%) SD	98,75%	99,00%	99,20%	99,35%	99,55%	99,65%	100,00%	100,00%	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota	DIKBUD	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan
														Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	DPUPRKP	APBD Prov/kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan
														Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	DPMPTSP/PLN	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 3) Pengembangan Infrastruktur Strategis & Industrialisasi
														Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD	APBD kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan
														Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD	APBD kab	(Prioritas 4) Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			Angka partisipasi murni (APM) (%) SLTP	95,04%	96,50%	96,80%	96,90%	97,05%	97,25%	100,00%	100,00%	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota	DIKBUD	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan
												Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	DPUPRPKP	APBD Prov/kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan
												Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	DPMPTSP/PLN	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 3) Pengembangan Infrastruktur Strategis &
												Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD	APBD kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan
												Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD	APBD kab	(Prioritas 4) Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	83,28%	84,56%	85,56%	86,56%	87,56%	88,56%	89,56%	89,56%	Program Pendidikan Menengah	DIKBUD	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan
			Jumlah Desa yang belum memiliki SD	1	1	1	1	0	0	0	0	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota	DIKBUD	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 4) Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
												Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	DPUPRPKP	APBD Prov/kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan
												Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	DPMPTSP/PLN	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 3) Pengembangan Infrastruktur Strategis & Industrialisasi
												Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD	APBD kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan
												Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD	APBD kab	(Prioritas 4) Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
			Jumlah Kecamatan yang belum memiliki minimal 2 SLTP	1	1	1	1	1	0	0	0	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota	DIKBUD	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 4) Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
												Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	DPUPRPKP	APBD Prov/kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan
												Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	DPMPTSP/PLN	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 3) Pengembangan Infrastruktur Strategis &

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
												Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD	APBD kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
												Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD	APBD kab	(Prioritas 4) Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
			Angka buta aksara (%)	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1,5	1,5	Program pendidikan non formal	DIKBUD	APBD kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
		Strategi: Meningkatkan kesejahteraan, kualifikasi dan kompetensi guru sebagai tenaga pendidik/kependidikan													
		Arah kebijakan: Peningkatan kualitas pendidikan dan serifikasi guru	Persentase Guru SD yang berpendidikan Minimal S1 (%)	70%	73%	76%	79%	82%	85%	88%	88%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD	APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
			Persentase Guru SD bersertifikasi (%)	70%	72%	76%	79%	82%	86%	90%	90%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD	APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
			Persentase Guru SLTP yang berpendidikan Minimal S1 (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD	APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
			Persentase Guru SLTP bersertifikasi (%)	70%	75%	79%	83%	87%	92%	95%	95%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD	APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
			Persentase Guru SMA/SMK/MA bersertifikasi (%)	47%	65%	75%	82%	87%	91%	95%	95%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD	APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
		Strategi: Meningkatkan mutu dan kualitas layanan pendidikan													
		Arah kebijakan: Peningkatan standar pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional (SPN)	Persentase SD yang ter-akreditasi	91%	92%	93%	94%	95%	96%	97%	97%	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota	DIKBUD	APBD Prov/kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
			Persentase SLTP yang ter-akreditasi	77%	81%	87%	91%	93%	96%	97%	97%	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota	DIKBUD	APBD Prov/kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			Persentase SMA/SMK/MA yang terakreditasi	90%	92%	93%	94%	95%	96%	97%	97%	Program Pendidikan Menengah/Bantuan Keuangan kepada kab/kota	DIKBUD	APBD Prov/kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan
		Arah kebijakan: Peningkatkan minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	10.855	13.026	15.197	17.368	19.539	21.710	21.710	21.710	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Bag ARDA	APBD Prov/kab dan APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan
Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal	Meningkatnya Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal	Strategi: Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu													
		Arah Kebijakan: Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal	Jumlah sentra industri yang dikembangkan dalam kecamatan (sentra)	15	15	12	9	6	3	0	0	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	APBD Prov, APBD Kab dan APBN	(Prioritas 5) Visit 2020 Wonderful Bengkulu
			Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)	20	20	15	10	5	0	0	0	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian		(Prioritas 5) Visit 2020 Wonderful Bengkulu
			Jumlah Wira Usaha Baru (WUB) yang dibangun	180	180	150	120	60	30	30	30	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	APBD Prov, APBD Kab dan APBN	(Prioritas 5) Visit 2020 Wonderful Bengkulu
	Meningkatnya Kapasitas UMKM dan Koperasi serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat	Strategi: Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM serta Mengembangkan Sektor Perdagangan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat													
	Arah Kebijakan: Peningkatan akses teknologi, permodalan, peralatan serta kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM dan IKM	Jumlah KUKM yang akan mendapatkan bimbingan dan pelatihan teknis	4552	3970	3115	2050	1400	700	0	0	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	APBD KAB	(Prioritas 5) Visit 2020 Wonderful Bengkulu	

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			Jumlah KUKM yang akan mendapat bantuan peralatan	28	28	26	18	10	5	0	0	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	APBD KAB	(Prioritas 5) Visit 2020 Wonderful Bengkulu
			Jumlah Kelompok IKM yang akan mendapat bantuan peralatan	29	29	26	21	16	8	0	0	Program Penataan Struktur industri	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian		(Prioritas 5) Visit 2020 Wonderful Bengkulu
			Jumlah Koperasi yang di revitalisasi (koperasi tidak aktif)	52	42	37	32	17	0	0	0	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	APBD Prov, APBD Kab dan APBN	(Prioritas 5) Visit 2020 Wonderful Bengkulu
		Arah kebijakan: Meningkatkan perluasan pasar dan nilai produk perdagangan	Jumlah pasar tradisional yang akan di revitalisasi	13	12	5	3	2	0	0	0	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	APBD Prov, APBD KAB, APBN	(Prioritas 5) Visit 2020 Wonderful Bengkulu
	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur pertanian dan perkebunan	Strategi: Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur pertanian dan perkebunan													
		Arah Kebijakan: Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan	Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m)	67.650	61.000	51.000	41.000	31.000	21.000	11.000	11.000	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Perikanan	APBD Prov, APBD KAB, APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
												Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Kementan	APBN Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				Panjang jalan usaha Tani yang direhabilitasi (M)	48.000	48.000	46.000	44.000	41.500	39.000	37.000	37.000	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Perikanan	APBD Prov, APBD KAB, APBN

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
			Panjang jalan sentra produksi yang di bangun (m)	15.000	14.280	13.280	12.280	11.280	10.280	9.280	9.280	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Perikanan	APBD Prov, APBD KAB, APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
												Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Kementan	APBN kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
			Panjang Jalan sentra Produksi yang kualitasnya meningkat (m)	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000	0	0	0	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Perikanan	APBD KAB	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
		Arah Kebijakan: Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan irigasi	Luas Jaringan irigasi usaha tani yang dibangun (Ha)	6.133	2.150	3.500	3.000	3.700	2.600	3.200	3.200	3.200	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perikanan	APBD PROV, APBD KAB	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
			Prosentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%)	31,40	38,96	46,66	54,40	61,80	69,20	69,20	69,20	69,20	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	DPUPRPKP	APBD KAB	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
	Meningkatnya investasi	Strategi:Optimalisasi pengelolaan investasi														
		Arah Kebijakan: Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi	Jumlah Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	32	37	42	47	52	57	62	62	62	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Setda (Bagian Administrasi Perekonomianl)	APBD PROV, APBD KAB	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
													Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Setda (Bagian Administrasi Perekonomianl)	APBD PROV, APBD KAB	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
			Jumlah jenis promosi yang dilakukan	3	3	5	5	5	5	5	5	5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi	Setda (Bagian Administrasi Perekonomianl)	APBD KAB	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
		Arah Kebijakan:Meningkatkan kualitas pelayanan proses perizinan investasi	Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani	63	63	64	65	66	67	67	67	67	Program Peningkatan Pelayanan Publik	DPMPTSP	APBD KAB	(Prioritas 4) Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
												Program Penataan Peraturan Per-Undang-Undangan	DPMPTSP	APBD KAB	(Prioritas 4) Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			- Jambu Biji Merah	2.021	2.122	2.228	2.339	2.455	2.577	2.705	2.705				
			- Manggis	14.980	15.729	16.515	17.340	18.207	19.117	20.072	20.072				
			- Jeruk	4.807	5.047	5.299	5.563	5.841	6.133	6.439	6.439				
			- Alpukat	35.218	36.978	38.236	40.767	42.805	44.945	47.192	47.192				
			Jumlah Desa/Kelurahan Mandiri Benih yang dibangun	6	9	11	13	16	17	24	24	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	DPP, Kementan	APBD PROV, APBD KAB, APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan
			Jumlah Benih Tanaman Pangan (Ha)									Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan
			- Padi	20.307	21.322	22.388	23.507	24.682	25.916	27.212	27.212				
			-Jagung	5.733	6.019	6.319	6.634	6.965	7.313	7.678	7.678				
			-Kedelai	1.174	1.233	1.295	1.360	1.428	1.499	1.574	1.574				
			-Kacang Tanah	885	929	975	1.023	1.074	1.127	1.183	1.183				
			-Kacang Hijau	141	148	155	162	170	178	186	186				
			-Ubi Kayu	597	626	657	689	723	759	796	796				
			-Ubi Jalar	1.768	1.856	1.948	2.045	2.147	2.254	2.366	2.366				
			Jumlah Benih Holtikulturasi (Ha)												
			- Cabe Merah	4.825	5.066	5.319	5.584	5.863	6.156	6.463	6.463				
			- Kentang	1.231	1.292	1.356	1.423	1.494	1.568	1.646	1.646				
			- Wortel	1.574	1.652	1.734	1.820	1.911	2.006	2.106	2.106				
			Produksi Perkebunan unggulan (ton)												
			Karet	7.500	7.875	8.268	8.681	9.115	9.570	10.048	10.048				
			Kopi	10.250	10.762	11.300	11.865	12.458	13.080	13.734	13.734				
			Lada	5.450	6.722	7.008	7.358	7.725	8.111	8.516	8.516				
			Pala	275	315	365	385	410	450	475	475				
			Kakao	10.900,00	11.445,00	12.017,00	12.617,00	13.247,00	13.909,00	14.604,00	14.604,00				
			Aren	1.318	1.600	1.750	1.900	2.150	2.350	2.350	2.350				
			Kelapa Sawit	528,00	554,00	581,00	610,00	640,00	672,00	705,00	705,00				

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		Arah kebijakan: Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan	Jumlah jenis komoditas industri hilir berbasis pertanian dan perkebunan yang dikembangkan	9	1	2	1	1	1	6	11	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	DPP, Kementan	APBD PROV, APBD KAB, APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
			Standar Mutu dan Jumlah Diversifikasi Produk Pertanian/Perkebunan, Jumlah benih/bibit unggul tanaman perkebunan, peningkatan optimasi pengelolaan lahan dengan meingkatkan produksi perkebunan unggulan dan peningkatan sarana/prasarana pertanian/perkebunan	40 KT	40 KT	34 KT	28 KT	19 KT	10 KT	0	0	Program peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan)	DPP, Kementan	APBD PROV, APBD KAB, APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				9 Paket	9 Paket	8 paket	7 paket	5 paket	3 paket	0	0				
				2000 persil	2000 persil	1650 persil	1300 persil	900 persil	500 persil	0	0				
				10 paket	10 paket	9 paket	8 paket	7 paket	5 paket	0	0				
				6 paket	6 paket	5 paket	4 paket	2 paket	0	0	0				
			Kemampuan Adminstrasi Umum dan keuangan Petani dan pelaku Agribisnis	24 Angkatan	24 Angkatan	21 Angkatan	18 Angkatan	15 Angkatan	12 Angkatan	0	0	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	DPP	APBD PROV, APBD KAB, APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
			Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan jumlah bimbingan teknolofi perkebunan teknologi	49 Unit	49 Unit	42 Unit	32 Unit	22 Unit	12 Unit	0	0	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Program Pengembangan Agribisnis	DPP, Kementan	APBD PROV, APBD KAB, APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				17 Paket	14 Paket	12 paket	9 paket	5 paket	0	0	0				
			Jumlah Desa/kawasan mandiri pangan	6	6	6	6	6	6	6	6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
			Jumlah penumbuhan desa mandiri pangan	36	30	24	18	12	6	0	0	Program Pengembangan Agribisnis				
			Jumlah gapoktan untuk pengembangan Packaging beras	17	16	14	11	8	4	0	0					
			Luas hutan kemasyarakatan yang dikelola	1823	1823-2123	2123-2423	2423-2723	2723-3023	3023-3323	3323-3623	3323-3623					
			Jumlah jenis industri hasil hutan yang dikembangkan	1	0	1	1	1	1	5	5					
		Arah kebijakan : Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu hasil peternakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peternakan	Produksi daging ternak (ton)									Program peningkatan produksi hasil peternakan	DPP	APBD PROV, APBD KAB, APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
			a. Sapi	164,02	180,43	198,47	218,32	240,15	264,16	264,16	264,16					
			b. Kambing/Domba	47,85	52,64	57,90	63,69	70,06	77,06	77,06	77,06					
			c. Ungggas	352,81	388,09	426,90	469,59	516,55	568,20	568,20	568,20					
												Program pemenuhan Pangan Asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat	Kementan	APBN Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
				Susu (liter)	49.932	54.925	60.418	66.459	73.105	80.416	80.416	80.416	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	DPP, Kementan	APBD PROV, APBD KAB, APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				Produksi telur (ton)	2002	2106	2216	2331	2452	2580	2580	2580	Program peningkatan produksi hasil peternakan	DPP, Kementan	APBD PROV, APBD KAB, APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
		Arah Kebijakan: Meningkatkan nilai tambah produk peternakan	Jumlah Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kelompok	9	10	11	12	14	14	15	15	Program peningkatan produksi hasil peternakan	DPP, Kementan	APBD PROV, APBD KAB, APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
			Jumlah unit pengolahan hasil ternak yang direvitalisasi (Unit)	6	0	2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	DPP, Kementan	APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
												Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	DPP, Kementan	APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
	terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.	Arah kebijakan:Peningkatan kesempatan, Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	0	150	300	450	600	750	750	750	Program Peningkatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD PROV, APBD KAB, APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
			Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha	0	150	300	450	600	750	750	750	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD PROV, APBD KAB, APBN	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
Mewujudkan pelestarian nilai – nilai agama dalam melandasi pelaksanaan pembangunan	Terwujudnya kehidupan bergama yang harmonis	Strategi: Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat dengan mengedepankan toleransi beragama														
			Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana peribadatan	Jumlah tempat ibadah yang direvitaliasi	1	1	2	3	4	5	1	15	Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan	DPUPRKP/Desa	APBD Kab/ Dana Desa	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				Persentase tahapan pembangunan BLK	0	0	10	35	60	85	100	100	Peningkatan Sarana dan Prasarana			(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
			Arah Kebijakan: Peningkatan kualitas ibadah dan pendidikan agama masyarakat	Jumlah penyuluhan agama	2	4	6	8	10	12	14	14	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan beragama	Kemenag/Bag. Kesra	APBD Kab dan APBN	
				Jumlah penyuluhan kerukunan beragama di kecamatan	2	2	2	2	2	2	3	15				
Arah Kebijakan : Mengembangkan seni budaya daerah											Program mengembangkan seni budaya daerah			(Prioritas 5) Visit 2020 Wonderful Bengkulu		
Mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi	Strategi: Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah														
			Arah kebijakan: Peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah	Jumlah kasus dan temuan	790	740	694	632	566	477	417	417	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	Inspektorat, BPKD, Bagian Keuangan	APBD Kab	(Prioritas 4) Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		arah kebijakan: Peningkatkan standar kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di perizinan pelayanan terpadu	98	98	98	99	99	100	100	100	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Setda	APBD Kab	(Prioritas 4) Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
			Jumlah unit pelayanan publik yang patuh pada norma dan prosedur												
			1. Merah	65	40	30	20	15	10	0	0	Program Peningkatan Pelayanan Publik			(Prioritas 4) Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
			2. Kuning	38	53	53	43	33	28	23	23				
			3. Hijau	20	30	40	65	75	85	100	100				
		Jumlah kecamatan yang telah menerapkan sistem informasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)													
Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik		Strategi: Meningkatkan kinerja pemerintahan oleh aparatur profesional yang berkarakter melayani dalam upaya memberikan pelayanan prima													
		arah kebijakan: Penempatan dan distribusi aparatur sesuai kebutuhan	Persentase penempatan ASN pemerintah Kabupaten berdasarkan kualifikasi pendidikan (%)	10	25	40	55	70	85	85	85	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	APBD Kab	(Prioritas 4) Transformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
			Persentase SKPD Kabupaten yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%)	12	27	40	55	71	85	85	85	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	APBD Kab	

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
	Mengurangi resiko kerusakan lingkungan	Arah Kebijakan: Peningkatan pelayanan transportasi perhubungan	Jumlah perlengkapan Fasilitas Keselamatan jalan yang terpasang	144	80	100	120	140	160	180	180	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dishub, Dinas Lingkungan Hidup	APBD Provinsi/ APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
		Strategi : Menurunkan beban pencemaran lingkungan													
		Arah kebijakan : Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan air dan udara dengan meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan	Indeks pengendalian pencemaran Air (%)	56	56	56	56	56,2	56,4	56,8	56,8				
			Indeks pengendalian pencemaran Udara	85	85	85	85	85	85	85	85				
	Arah kebijakan : Optimalisasi pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	74	74-79	79-84	84-89	89-94	94-100	100	100	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	APBD Provinsi/ APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
		Jumlah TPS3R	2	2	4	6	8	10	12	8					
		Jumlah Bank Sampah	0	0	0	2	2	5	5	5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan				
		Jumlah TPS	226	226-256	256-356	356-456	456-556	556-656	556-656	556-656	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup		(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
			Persentase luas tutupan lahan meningkat atau luas lahan kritis yang direhabilitasi (dalam kawasan dan diluar kawasan)	Penutupan Lahan 20% Diluar Kawasan (HR) 150 Ha	Penutupan Lahan 20%-23% Diluar Kawasan (HR) 100 Ha	Penutupan Lahan 23%-26% Diluar Kawasan (HR) 200 Ha	Penutupan Lahan 26%-29% Diluar Kawasan (HR) 250 Ha	Penutupan Lahan 29%-32% Diluar Kawasan (HR) 300 Ha	Penutupan Lahan 32%-35% Diluar Kawasan (HR) 400 Ha	Penutupan Lahan 32%-35% Diluar Kawasan (HR) 400Ha		Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Dinas Lingkungan Hidup	APBD PROV, APBD KAB	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Keteringgalan
	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	Strategi : Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan Pemulihan akibat bencana													
		Arah Kebijakan: Meningkatkan peran serta dunia Usaha, Swasta dan Masyarakat dalam Pra, saat dan Pasca Bencana	Prosentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi)									1) Program pengurangan risiko bencana; 2) Program peningkatan kualitas SDM dan kesiapsiagaan tanggap darurat; 3) Program sarana dan prasarana logistik dan peralatan penanggulangan bencana; 4) Program pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; 5) Program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana; 6) Program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran & Pemadam Kebakaran	APBD Provinsi/ APBD Kab	(Prioritas 5) Visit 2020 Wonderful Bengkulu
			Prosentase sekolah aman bencana (%)									1) Program pengurangan risiko bencana; 2) Program peningkatan kualitas SDM dan kesiapsiagaan tanggap darurat;	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dians Pemadam Kebakaran	APBD Provinsi/ APBD Kab	(Prioritas 5) Visit 2020 Wonderful Bengkulu

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
	Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat serta perentasan desa tertinggal	Strategi: Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi dan Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat termasuk di desa tertinggal														
		arah kebijakan: Peningkatan kualitas pemberdayaan dan pelayanan sosial masyarakat	Jumlah Kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK)	50	50	200	450	700	1050	1200	1200	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial	APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
			Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab dan dilayani (Orang)	145	250	350	450	500	550	2100	3950	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Dinas Sosial	APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
			Jumlah partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (Orang/lembaga)	295	295	245	170	85	0	0	0	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
		arah kebijakan: Pengentasan desa tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal	22	19	15	10	5	0	0	0	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	DPMD, DPUPRPK P, Dikbud, Dinkes	APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
												Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	DPMD	APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
												Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	DPMD	APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
												Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	DPMD	APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	
												Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	DPMD	APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan	

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI		
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
			Jumlah BUMDES yang difasilitasi dalam pembentukan dan pengembangannya (unit)	122	101	41	0	0	0	0	0	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan		
			Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	122	122	244	244	244	244	244	244						
Meningkatnya pemberdayaan kualitas kehidupan serta perlindungan perempuan dan anak untuk menunjang ketahanan keluarga	Strategi: Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan serta melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan	arah kebijakan: Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender	Indeks pembangunan gender (IPG)	91,22	91,23-91,72	91,73-92,22	92,23-92,72	92,73-93,22	93,23-93,72	93,73-94,22	93,73-94,22	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	DPPPKB	APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan		
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,18	70,18-70,58	70,58-70,98	70,98-71,38	71,38-71,78	71,78-72,18	72,18-72,58	72,18-72,58						
			Arah kebijakan: peningkatan Perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	DPPPKB	APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
				Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	84	84-80	80-76	76-72	72-68	68-64	64-60	64-60	64-60	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	DPPPKB	APBD Kab	(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
					Rasio APM perempuan terhadap laki - laki									Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan
					- SD	98,65	98,69	98,73	98,77	98,81	98,85	98,89	98,89				
- SLTP	74,43	75,26			76,05	76,82	77,57	78,29	78,99	78,99							
- SLTA	62,58	63,78			64,95	66,08	67,17	68,23	69,25	69,25							
			Persentase anak yang bermasalah dengan hukum yang dilayani dan	50	60	70	80	90	100	100	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			(Prioritas 1) Pengentasan Kemiskinan & Peretasan Ketertinggalan			

MISI	SASARAN	Strategi	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	
		Arah Kebijakan		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
	Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri;	Strategi: Mewujudkan pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan wirausaha														
		arah kebijakan: Peningkatkan peran pemuda dalam pembangunan melalui kewirausahaan mandiri	Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (kelompok)	0	0	2 Klp	4 Klp	6 Klp	8 Klp	8 Klp	8 Klp	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	DISPORA	APBD PROV, APBD KAB, APBN	(Prioritas 5) Visit 2020 Wonderful Bengkulu	
			Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha tingkat Kabupaten	0	0	60 Orang	120 Orang	180 Orang	240 Orang	240 orang	240 orang	Program peningkatan peran serta kepemudaan	DISPORA	APBD Prov/ APBN	(Prioritas 5) Visit 2020 Wonderful Bengkulu	

TABEL 7.2 KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Tahun 2016-2021
 Kabupaten : Rejang Lebong
 Provinsi : Bengkulu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Kegiatan : Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dari keluarga kurang mampu		Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	Pendidikan
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	ProgramWajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	Pendidikan
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	- % Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita		Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	Pendidikan
				- % Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota	Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	Pendidikan
	Program Pengembangan SDM Kesehatan		Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	Jumlah Desa yang belum memiliki Bidan Desa		Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	Pendidikan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	Angka Kejadian Malaria (API) per 1.000 penduduk	Program pendidikan non formal	Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	Pendidikan
			Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	Prevalensi HIV	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah	Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan	Pendidikan
			Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	Angka Penemuan Kasus TB (CDR)		Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah	Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan	Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	% Desa yang mencapai UCI (Universal Child Immunisation)	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	Pendidikan
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang akan ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap	Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	Pendidikan
	Program Pengembangan SDM Kesehatan		Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang akan ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap	Program pendidikan menengah	Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	Pendidikan
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kecamatan yang belum memiliki puskesmas		Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	Pendidikan
	Program Pengembangan SDM Kesehatan		Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kecamatan yang belum memiliki puskesmas		Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	Pendidikan
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah Desa/ kelurahan yang belum memiliki Sarana Kesehatan (Pustu/ Poskesdes)	Kesehatan			
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan		Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah Desa /Kelurahan yang sarana kesehatannya perlu direvitalisasi	Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi	Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah Desa /Kelurahan yang sarana kesehatannya perlu direvitalisasi		Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat yang membutuhkan jaminan pelayanan kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Tahapan akreditasi RSUD Curup dari C ke B	Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	Manajemen dan pencegahan penyakit	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan
	Program Pengembangan SDM Kesehatan		Meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokter spesialis		Manajemen dan pencegahan penyakit	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Pendidikan Anak Usia Dini		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) (%) PAUD	Program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular	Manajemen dan pencegahan penyakit	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) (%) PAUD		Manajemen dan pencegahan penyakit	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) (%) PAUD	Progrm Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Kesehatan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) (%) PAUD	Program Pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Kesehatan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) (%) PAUD		Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Kesehatan
	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota		Arah kebijakan : Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) (%) SD	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Kesehatan
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) (%) SD	Program Jaminan Kesehatan Nasional	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Pembiayaan Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Kesehatan
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) (%) SD	Program Pembangunan sarana kesehatan/Bantuan keuangan kepada kab/kota	Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Kesehatan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) (%) SD	Program kemitraan pelayanan kesehatan	Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Kesehatan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) (%) SD	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah	Lingkungan Sehat	Penguatan promotif dan preventif "Gerakan Masyarakat Sehat"	Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) (%) SLTP		Lingkungan Sehat	Penguatan promotif dan preventif "Gerakan Masyarakat Sehat"	Kesehatan
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) (%) SLTP		Lingkungan Sehat	Penguatan promotif dan preventif "Gerakan Masyarakat Sehat"	Kesehatan
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) (%) SLTP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) (%) SLTP	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya	Rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi, rehabilitasi DAS hulu, pembangunan waduk dan embung/Dam parit	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan pangan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka partisipasi murni (APM) (%) SLTP	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan aksesibilitas	Daerah tertinggal
	Program Pendidikan Menengah		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA		Pembangunan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan aksesibilitas	Daerah tertinggal
	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Jumlah Desa yang belum memiliki SD		Pembangunan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan aksesibilitas	Daerah tertinggal
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Jumlah Desa yang belum memiliki SD	Program rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pembangunan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan aksesibilitas	Daerah tertinggal
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Jumlah Desa yang belum memiliki SD		Pembangunan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan aksesibilitas	Daerah tertinggal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Jumlah Desa yang belum memiliki SD	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik	Daerah tertinggal
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Jumlah Desa yang belum memiliki SD		Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik	Daerah tertinggal
	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Jumlah Kecamatan yang belum memiliki minimal 2 SLTP		Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik	Daerah tertinggal
	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Jumlah Kecamatan yang belum memiliki minimal 2 SLTP	Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Jumlah Kecamatan yang belum memiliki minimal 2 SLTP	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Perumahan Baru MBR	Fasilitas Penyediaan Hunian Layak Baru	Perumahan dan Permukiman
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Jumlah Kecamatan yang belum memiliki minimal 2 SLTP	Program pengembangan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Pengembangan Permukiman (termasuk yang berbasis komunikasi)	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Penataan Kawasan Permukiman (termasuk kawasan kumuh)	Perumahan dan Permukiman
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Jumlah Kecamatan yang belum memiliki minimal 2 SLTP	Sosial			
	Program pendidikan non formal		Membuka akses yang luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Angka buta aksara (%)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jaminan Sosial	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan	Antar Kelompok Pendapatan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Peningkatkan kualitas pendidikan dan serifikasi guru	Persentase Guru SD yang berpendidikan Minimal S1 (%)	Program Penanganan Fakir Miskin	Jaminan Sosial	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan	Antar Kelompok Pendapatan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Peningkatkan kualitas pendidikan dan serifikasi guru	Persentase Guru SD bersertifikasi (%)	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jaminan Sosial	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan	Antar Kelompok Pendapatan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Peningkatkan kualitas pendidikan dan serifikasi guru	Persentase Guru SLTP yang berpendidikan Minimal S1 (%)	Program Rehabilitasi Sosial	Jaminan Sosial	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan	Antar Kelompok Pendapatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Peningkatkan kualitas pendidikan dan serifikasi guru	Persentase Guru SLTP bersertifikasi (%)	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan	Pengembangan kewirausahaan	Antar Kelompok Pendapatan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Peningkatkan kualitas pendidikan dan serifikasi guru	Persentase Guru SMA/SMK/MA bersertifikasi (%)	Program Pemberdayaan Sosial	Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan	Pengembangan kewirausahaan	Antar Kelompok Pendapatan
	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota		Peningkatan standar pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional (SPN)	Persentase SD yang ter-akreditasi	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan	Antar Kelompok Pendapatan
	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota		Peningkatan standar pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional (SPN)	Persentase SLTP yang ter-akreditasi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)	Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan	Antar Kelompok Pendapatan
	Program Pendidikan Menengah/Bantuan Keuangan kepada kab/kota		Peningkatan standar pelayanan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional (SPN)	Persentase SMA/ SMK/MA yang ter-akreditasi	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Peningkatkan minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	Tenaga Kerja			
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial		Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal	Jumlah sentra industri yang dikembangkan dalam kecamatan (sentra)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan	Pengembangan kewirausahaan	Antar Kelompok Pendapatan
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM		Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)		Pengembangan keahlian tenaga kerja	Penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja	Antar Kelompok Pendapatan
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM		Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal	Jumlah Wira Usaha Baru (WUB) yang dibangun	Program peningkatan kesempatan kerja	Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan	Pengembangan kewirausahaan	Antar Kelompok Pendapatan
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM		Peningkatan akses teknologi, permodalan, peralatan serta kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM.dan IKM	Jumlah KUKM yang akan mendapatkan bimbingan dan pelatihan teknis	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Layanan informasi pasar kerja	Penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja	Antar Kelompok Pendapatan
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM		Peningkatan akses teknologi, permodalan, peralatan serta kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM.dan IKM	Jumlah KUKM yang akan mendapat bantuan peralatan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Penyediaan Sarana Prasarana dan Sistem Pendukung Kegiatan Ekonomi	Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan	Antar Kelompok Pendapatan
	Program Penataan Struktur industri		Peningkatan akses teknologi, permodalan, peralatan serta kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM.dan IKM	Jumlah Kelompok IKM yang akan mendapat bantuan peralatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM		Peningkatan akses teknologi, permodalan, peralatan serta kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM.dan IKM	Jumlah Koperasi yang di revitalisasi (koperasi tidak aktif)	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta anak usia dini	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		Arah kebijakan: Meningkatkan perluasan pasar dan nilai produk perdagangan	Jumlah pasar tradisional yang akan di revitalisasi	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Sistem Informasi Manajemen dan Litbang Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan		Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan sentra produksi	Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta anak usia dini	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan
	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan		Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan sentra produksi	Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m)	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta anak usia dini	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan		Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan sentra produksi	Panjang jalan usaha Tani yang direhabilitasi (M)	Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta anak usia dini	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan		Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan sentra produksi	Panjang jalan sentra produksi yang di bangun (m)	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan	Kepastian dan penegakan hukum
	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian		Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan sentra produksi	Panjang jalan sentra produksi yang di bangun (m)	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan	Kepastian dan penegakan hukum
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan		Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan sentra produksi	Panjang Jalan sentra Produksi yang kualitasnya meningkat (m)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan	Kepastian dan penegakan hukum
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan irigasi	Luas Jaringan irigasi usaha tani yang dibangun (Ha)	Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan	Kepastian dan penegakan hukum
	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya		Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan irigasi	Prosentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%)	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan	Kepastian dan penegakan hukum
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi	Jumlah Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	Pangan			
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah		Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi	Jumlah Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	Kemandirian Pangan	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi		Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi	Jumlah jenis promosi yang dilakukan		Pencetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Peningkatan Pelayanan Publik		Meningkatkan kualitas pelayanan proses perizinan investasi	Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani		Pencetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
	Program Penataan Peraturan Per-Undang-Undangan		Meningkatkan kualitas pelayanan proses perizinan investasi	Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani	Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman dan bergizi	Peningkatan, mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Kedaulatan Pangan
	Program Peningkatan Pelayanan Publik		Meningkatkan kualitas pelayanan proses perizinan investasi	Rata-rata lama penerbitan surat perizinan investasi (hari)	Lingkungan Hidup			
			Meningkatkan kualitas pelayanan proses perizinan investasi	Rata-rata lama penerbitan surat perizinan dan non perizinan (hari)	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim	Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan	Desa dan Kawasan Perdesaan
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan		Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan	Cetak sawah baru (ha)	Program Pengembangan Kinerja pengolahan persampahan	Penataan, pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan	Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan	Desa dan Kawasan Perdesaan
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan		Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan	Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura (ton) :	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Penataan, pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan	Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana	Perkotaan
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan	Jumlah Desa/Kelurahan Mandiri Benih yang dibangun	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan		Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dan perkebunan	Jumlah Benih Tanaman Pangan (Ha)	Program keluarga Berencana	Pelayanan KB	Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Kesehatan
	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan		Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan	Jumlah jenis komoditas industri hilir berbasis pertanian dan perkebunan yang dikembangkan	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Penguatan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB	Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan)		Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan	Standar Mutu dan Jumlah Diversifikasi Produk Pertanian/Perkebunan, Jumlah benih/bibit unggul tanaman perkebunan, peningkatan optimasi pengelolaan lahan dengan meningkatkan produksi perkebunan unggulan dan peningkatan sarana/prasarana pertanian/perkebunan	Program Keluarga Berencana	Pelayanan KB	Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Kesehatan
					Program Pelayanan Kontrasepsi	Pelayanan KB	Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Kesehatan
					Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Penguatan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB	Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Kesehatan
					Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Penguatan regulasi, kelembagaan serta data dan informasi	Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Kesehatan
					Komunikasi dan Informatika			
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa	Pembangunan SDM, pemberdayaan dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi	Desa dan kawasan perdesaan	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan	Kemampuan Administrasi Umum dan keuangan Petani dan pelaku Agribisnis	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa	Pembangunan SDM, pemberdayaan dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi	Desa dan kawasan perdesaan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Program Pengembangan Agribisnis		Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan	Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan jumlah bimbingan teknologi perkebunan teknologi	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa	Pembangunan SDM, pemberdayaan dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi	Desa dan kawasan perdesaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan		Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan	Jumlah Desa/kawasan mandiri pangan yang dibina/dikembangkan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
			Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan	Jumlah penumbuhan desa mandiri pangan	Penanaman Modal			
	Program Pengembangan Agribisnis		Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan	Jumlah gapoktan untuk pengembangan Packaging beras	Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat	Pemantauan PTSP di Daerah	Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu	Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
			Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan	Luas hutan kemasyarakatan yang dikelola	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Pengembangan Sistem Perizinan Nasional	Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu	Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
			Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan	Jumlah jenis industri hasil hutan yang dikembangkan	Program Penataan Peraturan Per-Undang-Undangan	Pengembangan Sistem Perizinan Nasional	Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu	Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
	Program peningkatan produksi hasil peternakan		Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu hasil peternakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peternakan	Produksi daging ternak (ton)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi	Promosi Investasi	Penumbuhan Populasi Industri	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	Program pemenuhan Pangan Asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat		Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu hasil peternakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peternakan	Produksi daging ternak (ton)	Kebudayaan			
	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat		Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu hasil peternakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peternakan	Susu (liter)	Program pengembangan nilai budaya	Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal	Pembangunan SDM, pemberdayaan dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi	Desa dan Kawasan Perdesaan
	Program peningkatan produksi hasil peternakan		Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu hasil peternakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peternakan	Produksi telur (ton)	Urusan Pilihan			
	Program peningkatan produksi hasil peternakan		Meningkatkan nilai tambah produk peternakan	Jumlah Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kelompok	Kelautan dan Perikanan			
	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat		Meningkatkan nilai tambah produk peternakan	Jumlah unit pengolahan hasil ternak yang direvitalisasi (Unit)	Program Pengembangan Perikanan tangkap	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Kelautan dan Perikanan	Industri Perikanan dan Hasil Laut	Maritim dan Kelautan
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		Meningkatkan nilai tambah produk peternakan	Jumlah unit pengolahan hasil ternak yang direvitalisasi (Unit)	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Kelautan dan Perikanan	Industri Perikanan dan Hasil Laut	Maritim dan Kelautan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Budidaya Perikanan		Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Kelautan dan Perikanan	Industri Perikanan dan Hasil Laut	Maritim dan Kelautan
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Meningkatkan pengembangan pemasaran seni budaya dan industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan	Prosentasi Tingkat hunian hotel	Pariwisata			
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Meningkatkan pengembangan pemasaran seni budaya dan industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan	Rata-rata lama tinggal (hari)	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Promosi Produk Wisata	Promosi Wisata Indonesia	Pembangunan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata 1. Pengembangan <i>Event</i> Pariwisata Daerah) Program Pengembangan Nilai Budaya (Pagelaran Seni Budaya dalam dan luar daerah)		Meningkatkan pengembangan pemasaran seni budaya dan industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan	Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang)		Promosi Produk Wisata	Promosi Wisata Indonesia	Pembangunan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata 1. Pengembangan <i>Event</i> Pariwisata)		Meningkatkan pengembangan pemasaran seni budaya dan industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan	Jumlah Wisatawan Nusantara (per tahun)		Promosi Produk Wisata	Promosi Wisata Indonesia	Pembangunan Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya		Meningkatkan pengembangan pemasaran seni budaya dan industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan	Jumlah Wisatawan Nusantara (per tahun)		Promosi Produk Wisata	Promosi Wisata Indonesia	Pembangunan Pariwisata
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Meningkatkan pengembangan pemasaran seni budaya dan industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan	Jumlah Wisatawan Nusantara (per tahun)		Promosi Produk Wisata	Promosi Wisata Indonesia	Pembangunan Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya daerah	Jumlah lokasi wisata yang akan dikembangkan menjadi destinasi pariwisata nasional (DPN)	Pertanian			
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		Peningkatan kesempatan, Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pembangunan sarana dan prasarana serta perbaikan regulasi perdagangan, retail dan logistik pangan	Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat	Kedaulatan Pangan
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		Peningkatan kesempatan, Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha		Pembangunan sarana dan prasarana serta perbaikan regulasi perdagangan, retail dan logistik pangan	Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat	Kedaulatan Pangan
	Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana peribadatan	Jumlah tempat ibadah yang direvitaliasi		Pembangunan sarana dan prasarana serta perbaikan regulasi perdagangan, retail dan logistik pangan	Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat	Kedaulatan Pangan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana peribadatan	Persentase tahapan pembangunan BLK		Pembangunan sarana dan prasarana serta perbaikan regulasi perdagangan, retail dan logistik pangan	Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat	Kedaulatan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan beragama		Peningkatan kualitas ibadah dan pendidikan agama masyarakat	Jumlah penyuluhan agama		Rehabilitasi dan perluasan jaringan irigasi, rehabilitasi DAS hulu, pembangunan waduk dan embung/Dam parit	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
			Peningkatan kualitas ibadah dan pendidikan agama masyarakat	Jumlah penyuluhan kerukunan beragama di kecamatan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
	Program mengembangkan seni budaya daerah		Arah Kebijakan : Mengembangkan seni budaya daerah	Jumlah penyuluhan kerukunan beragama di kecamatan	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH		Arah kebijakan: Peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah	Jumlah kasus dan temuan	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Percetakan sawah baru dan perluasan areal	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
			Arah kebijakan: Peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan				
			Arah kebijakan: Mewujudkan sistem perencanaan penganggaran dan manajemen aset yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis kinerja	Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi	Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja		Arah kebijakan: Mewujudkan sistem perencanaan penganggaran dan manajemen aset yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP	Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian	Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH		Arah kebijakan: Mewujudkan sistem perencanaan penganggaran dan manajemen aset yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis kinerja		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja		Arah kebijakan: Mewujudkan sistem perencanaan penganggaran dan manajemen aset yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis kinerja	Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH		Arah kebijakan: Mewujudkan sistem perencanaan penganggaran dan manajemen aset yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis kinerja	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Arah kebijakan: Mewujudkan sistem perencanaan penganggaran dan manajemen aset yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis kinerja	Persentase Jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi	Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH		Arah kebijakan: Mewujudkan sistem perencanaan penganggaran dan manajemen aset yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis kinerja	Jumlah aplikasi elektronik yang dikembangkan	Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian	Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
			Arah kebijakan: Mewujudkan sistem perencanaan penganggaran dan manajemen aset yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis kinerja	Tingkat/level maturitas sistem pengendalian internal pemerintah	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
			Arah kebijakan: Mewujudkan sistem perencanaan penganggaran dan manajemen aset yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis kinerja	Tingkat kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura	Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		arah kebijakan: Peningkatkan standar kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di perizinan pelayanan terpadu	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
	Program Peningkatan Pelayanan Publik		arah kebijakan: Peningkatkan standar kualitas pelayanan publik	Jumlah unit pelayanan publik yang patuh pada norma dan prosedur	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi	Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Arah kebijakan: Penempatan dan distribusi aparatur sesuai kebutuhan	Persentase penempatan ASN pemerintah Kabupaten berdasarkan kualifikasi pendidikan (%)	Program Peningkatan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pertanian	Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Arah kebijakan: Penempatan dan distribusi aparatur sesuai kebutuhan	Persentase SKPD Kabupaten yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%)	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Arah kebijakan: Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi	Persentase pejabat struktural Kabupaten Rejang Lebong yang telah mengikuti diklat kepemimpinan	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Percetakan sawah baru dan perluasan areal pangan lain	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Arah kebijakan: Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi	Persentase ASN Kabupaten Rejang Lebong yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional	Program Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Arah kebijakan: Peningkatan dan distribusi aparatur sesuai kebutuhan	Persentase penduduk yang telah memiliki KTP	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian	Peningkatan produksi padi dan pangan lain	Kedaulatan Pangan
			Arah kebijakan: Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur berbasis kompetensi	Persentase keluarga yang telah memiliki kartu keluarga	Perindustrian			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Arah kebijakan: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Pertumbuhan IKM	Penumbuhan Populasi Industri	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Arah kebijakan : Meningkatnya perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase kesesuaian jumlah program antara: RPJMD dengan RKPD	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan IKM	Penumbuhan Populasi Industri	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan		Arah Kebijakan : Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan	Jumlah desa yang belum teraliri listrik	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pertumbuhan IKM	Penumbuhan Populasi Industri	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	1. Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, 3. Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan		Arah Kebijakan : Pembangunan, peningkatan ,rehabilitasi dan pemeliharaan jalan	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang (%)	Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM	Pertumbuhan IKM	Penumbuhan Populasi Industri	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		Arah Kebijakan : Mengembangkan prasarana lingkungan, air baku dan air limbah	Prosentase rumah tangga berakses air bersih (%)	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Pertumbuhan IKM	Penumbuhan Populasi Industri	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		Arah Kebijakan : Mengembangkan prasarana lingkungan, air baku dan air limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pertumbuhan IKM	Penumbuhan Populasi Industri	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	1. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh; 2. Program Pengembangan Perumahan;		Arah Kebijakan : Mengembangkan prasarana lingkungan, air baku dan air limbah	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan IKM	Penumbuhan Populasi Industri	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan		Arah Kebijakan : Mengembangkan prasarana lingkungan, air baku dan air limbah	Rasio Elektrifikasi	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Pertumbuhan IKM	Penumbuhan Populasi Industri	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
			Arah Kebijakan: Peningkatan pelayanan transportasi perhubungan	Jumlah perlengkapan Fasilitas Keselamatan jalan yang terpasang	Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM	Pertumbuhan IKM	Penumbuhan Populasi Industri	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	Program Rehabilitasi dan Pemerliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Arah kebijakan : Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan air dan udara dengan meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan	Indeks pengendalian pencemaran Air (%)	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pertumbuhan IKM	Penumbuhan Populasi Industri	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Arah kebijakan : Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan air dan udara dengan meningkatkan daya dukung penahanan laju kerusakan lingkungan	Indeks pengendalian pencemaran Udara	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Akses ke Pasar	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Arah kebijakan : Optimalisasi pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Akses ke Pasar	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Arah kebijakan : Optimalisasi pengelolaan persampahan	Jumlah TPS	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Akses ke Pasar	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan			Persentase luas tutupan lahan meningkat atau luas lahan kritis yang direhabilitasi (dalam kawasan dan diluar kawasan)	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Akses ke Pasar	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	1) Program pengurangan risiko bencana; 2) Program peningkatan kualitas SDM dan kesiapsiagaan tanggap darurat; 3) Program sarana dan prasarana logistik dan peralatan penanggulangan bencana; 4) Program pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; 5) Program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana; 6) Program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana		Arah Kebijakan: Meningkatkan peran serta dunia Usaha, Swasta dan Masyarakat dalam Pra, saat dan Pasca Bencana	Prosentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi)	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Akses ke Pasar	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	1) Program pengurangan risiko bencana; 2) Program peningkatan kualitas SDM dan kesiapsiagaan tanggap darurat;		Arah Kebijakan: Meningkatkan peran serta dunia Usaha, Swasta dan Masyarakat dalam Pra, saat dan Pasca Bencana	Prosentase sekolah aman bencana (%)	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Akses ke Pasar	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		arah kebijakan: Peningkatan kualitas pemberdayaan dan pelayanan sosial masyarakat	Jumlah Kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK)	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Pengembangan Kawasan Industri / KEK	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		arah kebijakan: Peningkatan kualitas pemberdayaan dan pelayanan sosial masyarakat	Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab dan dilayani (Orang)	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Pengembangan Kawasan Industri / KEK	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		arah kebijakan: Peningkatan kualitas pemberdayaan dan pelayanan sosial masyarakat		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Promosi Investasi	Penumbuhan Populasi Industri	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		arah kebijakan: Peningkatan kualitas pemberdayaan dan pelayanan sosial masyarakat	Jumlah partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (Orang/lembaga)	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pertumbuhan IKM	Penumbuhan Populasi Industri	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		Arah kebijakan: Pengentasan desa tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal	Program Penataan struktur Industri	Penyediaan Lahan Kawasan Industri	Pengembangan Kawasan Industri /KEK	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Arah kebijakan: Pengentasan desa tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal	Prgram Pengembangan Produksi Agro	Pertumbuhan IKM	Penumbuhan Populasi Industri	Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		Arah kebijakan: Pengentasan desa tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal	Urusan Dasar Penunjang			
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		Arah kebijakan: Pengentasan desa tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal	Administrasi Pemerintahan			
	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan		Arah kebijakan: Pengentasan desa tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja	Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan	Repormasi Birokrasi
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Arah kebijakan: Pengentasan desa tertinggal	Jumlah BUMDES yang difasilitasi dalam pembentukan dan pengembangannya (unit)	Pengawasan			
			Arah kebijakan: Pengentasan desa tertinggal	Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengawasan yang independen dan profesional	Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan	Repormasi Birokrasi
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		arah kebijakan: Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender	Indeks pembangunan gender (IPG)		Pengawasan yang independen dan profesional	Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan	Repormasi Birokrasi
			arah kebijakan: Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja	Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan	Repormasi Birokrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten / Kota	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Indikator Kinerja Daerah (Outcome)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi	RPJM Nasional		
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
						Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Arah kebijakan: peningkatan Perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja	Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan	Repormasi Birokrasi
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Arah kebijakan: peningkatan Perlindungan perempuan dan anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja	Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan	Repormasi Birokrasi
	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Arah kebijakan: peningkatan Perlindungan perempuan dan anak	Rasio APM perempuan terhadap laki - laki	Keuangan			
				- SD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja	Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan	Repormasi Birokrasi
					- SLTP - SLTA	Kepegawaian		
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penerapan Manajemen ASN	Pelaksanaan Road Map Repormasi Birokrasi 2015-2019
	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Arah kebijakan: peningkatan Perlindungan perempuan dan anak	Persentase anak yang bermasalah dengan hukum yang dilayani dan dilindungi	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penerapan Manajemen ASN	Pelaksanaan Road Map Repormasi Birokrasi 2015-2019	Repormasi Birokrasi
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		arah kebijakan: Peningkatkan peran pemuda dalam pembangunan melalui kewirausahaan mandiri	Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (kelompok)	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penerapan Manajemen ASN	Pelaksanaan Road Map Repormasi Birokrasi 2015-2019	Repormasi Birokrasi
	Program peningkatan peran serta kepemudaan		arah kebijakan: Peningkatkan peran pemuda dalam pembangunan melalui kewirausahaan mandiri	Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha tingkat Kabupaten	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penerapan Manajemen ASN	Pelaksanaan Road Map Repormasi Birokrasi 2015-2019	Repormasi Birokrasi



berserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek setrategi, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau dilerlantarkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program

merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi

**TABEL 8.1 REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RPJMD 2016 - 2021
KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO	SKPD	CAPAIAN PENDANAAN						REKAP TOTAL
		TAHUN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	7	8
I.	Belanja Tidak Langsung (BTL)	682.464.445.308,98	654.135.917.698,30	704.907.039.100,56	738.430.013.901,26	774.489.066.558,82	809.283.164.190,89	4.363.709.646.758,81
	Belanja Pegawai	528.517.924.475,20	452.089.530.357,65	480.270.321.427,63	499.815.713.157,86	520.176.378.444,61	536.253.983.640,51	3.017.123.851.503,46
	Belanja Bunga	-	262.884.735,17	-	-	-	-	262.884.735,17
	Belanja Hibah	2.964.000.000,00	11.388.197.000,00	11.957.606.850,00	13.751.247.877,50	16.501.497.453,00	21.451.946.688,90	78.014.495.869,40
	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	300.000.000,00	330.000.000,00	363.000.000,00	399.300.000,00	439.230.000,00	2.031.530.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan	117.413.356.811,77	162.213.732.845,00	181.679.380.786,40	190.763.349.825,72	200.301.517.317,01	210.316.593.182,86	1.062.687.930.768,76
	Belanja Tidak Terduga	33.369.164.022,01	27.881.572.760,48	30.669.730.036,53	33.736.703.040,18	37.110.373.344,20	40.821.410.678,62	203.588.953.882,02
II.	Belanja Langsung (BL)	470.954.235.310,00	558.625.037.741,00	971.354.784.715,00	1.000.440.048.900,40	1.074.302.646.242,23	1.102.930.047.559,44	5.178.606.800.468,07
III.	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar							
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.340.425.800	75.371.397.500	116.271.291.400	127.818.036.040	138.264.907.209	148.749.897.930	636.815.955.879
2	Dinas Kesehatan	48.055.620.286	50.514.124.266	85.896.480.949	62.944.034.380	65.032.734.380	64.943.394.380	377.386.388.641
3	Rumah Sakit Umum Daerah Curup	68.391.417.211	75.315.566.000	87.064.500.000	96.567.150.000	100.473.865.000	106.679.741.800	534.492.240.011
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	169.976.350.700	133.456.007.000	278.712.831.610	336.707.376.000	353.939.106.000	339.867.536.000	1.612.659.207.310
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.650.000.000	4.352.850.000	2.464.697.000	3.988.025.700	4.473.528.270	5.476.381.097	24.405.482.067
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.895.863.000	14.737.133.000	6.590.000.000	5.666.330.000	7.150.000.000	7.292.800.000	45.332.126.000
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.683.397.500	4.439.316.200	5.877.800.736	7.685.344.887	6.163.091.876	6.508.613.563	34.357.564.762
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	2.065.431.000	4.313.233.100	5.094.345.120	5.837.814.144	6.750.376.973	24.061.200.337
IV.	Urusan Pemerintahan Wajin Non Pelayanan Dasar							
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.970.000.000	1.991.274.000	10.727.500.000	8.840.700.000	6.146.000.000	5.484.000.000	35.159.474.000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.334.820.360	4.384.586.165	7.718.457.500	8.735.115.150	10.001.609.885	10.950.663.124	45.125.252.184
11	Dinas Ketahanan Pangan	-	1.146.604.000	6.911.490.000	10.333.845.706	10.481.985.648	13.150.143.782	42.024.069.135
12	Dinas Lingkungan Hidup	7.907.909.918	6.045.208.850	6.590.826.900	20.263.104.150	25.492.143.620	27.195.605.302	93.494.798.740
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.028.950.000	2.172.726.050	10.000.417.000	8.393.852.000	9.513.052.000	9.548.552.000	40.657.549.050
14	Dinas Perhubungan	2.757.752.700	1.252.562.000	4.663.522.820	6.185.671.900	5.261.968.110	5.775.999.921	25.897.477.451
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	3.076.226.400	2.988.725.700	6.430.979.520	6.427.087.072	7.052.295.779	25.975.314.471
16	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4.350.974.800	10.005.464.860	51.298.009.500	46.135.334.375	75.418.884.094	92.562.660.799	279.771.328.428
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.855.146.385	7.038.473.000	8.799.199.380	12.407.890.118	13.622.249.930	14.275.695.723	64.998.654.536
18	Bagian Administrasi Perpustakaan dan arsip Daerah	410.124.350	657.337.000	1.861.860.000	2.102.771.800	2.263.750.634	2.726.603.122	10.022.446.906
V.	Urusan Pemerintahan Pilihan							
19	Dinas Pariwisata	5.301.054.100	12.033.667.000	74.864.141.350	41.570.218.935	32.795.786.239	28.008.538.128	194.573.405.752
20	Dinas Pertanian dan Perikanan	17.118.314.550	11.672.542.100	40.220.328.330	44.444.447.587	49.074.927.715	54.154.881.537	216.685.441.818
VI.	Fungsi Lain Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan							
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20.218.635.500	26.090.514.000	49.324.000.000	26.200.500.000	31.733.500.000	29.628.000.000	183.195.149.500
22	Inspektorat	1.617.123.500	2.068.070.000	2.993.085.000	3.190.593.500	3.380.352.850	4.239.422.135	17.488.646.985
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.670.892.250	16.706.040.250	13.716.295.800	13.881.631.800	14.049.493.800	14.299.155.800	79.323.509.700
24	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	4.042.939.500	7.086.622.600	9.832.558.000	10.283.567.000	11.109.197.428	11.765.347.507	54.120.232.035
25	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	3.860.000.000	5.357.072.000	15.784.293.800	12.903.600.000	11.529.600.000	10.824.600.000	60.259.165.800

NO	SKPD	CAPAIAN PENDANAAN						REKAP TOTAL
		TAHUN						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	7	8
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.895.863.000	14.737.133.000	6.590.000.000	5.666.330.000	7.150.000.000	7.292.800.000	45.332.126.000
27	Dinas Pemadam Kebakaran	-	1.802.944.000	7.565.250.000	8.638.074.500	6.933.725.000	3.755.825.000	28.695.818.500
28	Bagian Administrasi Hukum	1.400.000.000	1.490.000.000	1.645.000.000	1.810.000.000	1.960.000.000	2.155.000.000	10.460.000.000
29	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	6.755.100.000	14.008.000.000	15.866.145.000	16.355.000.000	16.864.000.000	17.440.000.000	87.288.245.000
30	Bagian Administrasi Pemerintahan	4.800.000.000	20.550.000.000	952.337.000	3.500.000.000	3.610.000.000	3.730.000.000	37.142.337.000
31	Bagian Administrasi Pembangunan	1.650.000.000	1.478.886.000	1.032.484.000	1.150.000.000	1.250.000.000	1.365.000.000	7.926.370.000
32	Bagian Administrasi Perekonomian	284.700.000	510.364.000	980.000.000	1.080.000.000	1.180.000.000	1.260.000.000	5.295.064.000
33	Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	765.000.000	617.400.000	1.000.000.000	1.150.000.000	1.200.000.000	4.732.400.000
34	Bagian Administrasi Hubungan Masyarakat dan Protokol	2.189.000.000	954.536.000	1.027.939.500	1.088.934.000	1.154.928.500	1.235.923.000	7.651.261.000
35	Bagian Administrasi Umum	27.947.634.900	17.580.950.500	21.361.239.190	22.784.385.400	24.216.987.300	25.431.308.900	139.322.506.190
36	Bagian Administrasi Organisasi	824.225.000	675.000.000	345.688.000	638.000.000	553.000.000	693.000.000	3.728.913.000
37	Bagian Administrasi Keuangan	-	525.000.000	1.428.998.500	1.573.000.000	1.738.000.000	1.895.000.000	7.159.998.500
38	Kecamatan Curup	200.000.000	249.180.000	325.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	1.974.180.000
39	Kecamatan Selupu Rejang	275.000.000	338.116.000	416.360.000	431.677.500	470.249.400	512.579.100	2.443.982.000
40	Kecamatan Sindang Kelingi	275.000.000	344.778.000	424.700.000	440.020.000	464.800.000	489.500.000	2.438.798.000
41	Kecamatan PUT	270.000.000	347.070.000	427.953.600	412.745.000	414.850.000	417.100.000	2.289.718.600
42	Kecamatan Kota Padang	300.000.000	351.986.000	428.800.000	459.400.000	440.400.000	480.800.000	2.461.386.000
43	Kecamatan Bermani Ulu	250.000.000	309.236.000	384.925.000	401.406.100	441.545.900	485.699.100	2.272.812.100
44	Kecamatan Curup Utara	250.000.000	325.352.000	881.617.500	548.795.500	599.334.000	657.783.000	3.262.882.000
45	Kecamatan Curup Timur	225.000.000	239.389.000	322.550.000	340.260.000	389.230.000	452.880.000	1.969.309.000
46	Kecamatan Curup Selatan	250.000.000	264.111.000	370.000.000	400.000.000	445.330.000	495.400.000	2.224.841.000
47	Kecamatan Curup Tengah	200.000.000	239.369.000	330.000.000	360.000.000	410.000.000	460.000.000	1.999.369.000
48	Kecamatan Binduriang	225.000.000	226.000.000	458.606.550	520.631.533	617.790.239	764.025.059	2.812.053.380
49	Kecamatan Sindang Beliti Ulu	275.000.000	334.173.000	405.776.000	392.776.000	418.000.000	426.700.000	2.252.425.000
50	Kecamatan Sindang Dataran	250.000.000	294.850.000	375.607.000	384.052.700	394.400.000	409.600.000	2.108.509.700
51	Kecamatan Sindang Beliti Ilir	275.000.000	341.560.000	422.802.000	443.035.000	487.380.000	536.158.000	2.505.935.000
52	Kecamatan Bermani Ulu Raya	250.000.000	305.239.000	482.060.000	497.060.000	512.060.000	527.060.000	2.573.479.000
TOTAL		470.954.235.310	558.625.037.741	971.354.784.715	1.000.440.048.900	1.074.302.646.242	1.102.930.047.559	5.178.606.800.468

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : 1.01.Pendidikan
SKPD : 1.01.01.01 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Wajib																
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			30.340.425.800		75.371.397.500		116.271.291.400		127.818.036.040		138.264.907.209		148.749.897.930		636.815.955.879	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.817.872.000	100%	2.947.352.000	100%	10.269.982.000	100%	10.462.456.200	100%	11.508.701.820	100%	12.659.572.002	100%	50.665.936.022	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang di tingkatkan		1.225.888.000		582.082.000		6.250.000.000		1.595.500.000		1.194.050.000		1.313.455.000		12.160.975.000	
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Disiplin Aparatur yang di tingkatkan		-		-		-		35.000.000		40.000.000		50.000.000		125.000.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			284.000.000		-		150.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000		884.765.000	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen yang hasilkan		-		-		-		-		-		-		-	
Program Pembangunan			150.000.000		50.000.000		97.000.000		106.700.000		117.370.000		129.107.000		650.177.000	
Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD			-		-		-		-		-		-		-	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Murni (APM) (%) PAUD	55%	621.000.000	60%	960.000.000	65%	1.218.669.500	70%	1.342.675.950	75%	1.476.943.545	75%	1.624.637.900	80%	7.243.926.895	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka partisipasi murni (APM) (%) SD	99,00%	9.931.365.800	99,20%	60.921.793.500	99,30%	82.830.068.400	99,55%	97.013.075.240	99,65%	104.463.950.329	99,65%	111.610.345.362	99,75%	466.770.598.631	
	Angka partisipasi murni (APM) (%) SMP	96,5%		96,8%		89,5%		97,05%		97,25%		97,25%		97,50%		
	Persentase SD yang terakreditasi	92%		93%		94%		95%		96%		96%		97%		
	Persentase SD yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)														-	
	Persentase SMP yang terakreditasi	81,0%		87%		91%		93%		96%		96%		97%		
	Persentase SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)														-	
Program Pendidikan Menengah	Angka partisipasi murni (APM) (%) SMA,SMK,MA	84,56%	12.285.300.000	75,50%	1.965.000.000	86,56%	2.161.500.000	87,56%	2.377.650.000	88,56%	2.615.415.000	88,56%	2.876.956.500	89,56%	24.281.821.500	
	Persentase SMA, SMK yang terakreditasi	90%		97%		97%		97%		100%		100%		100%		
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			-		-		150.000.000		165.000.000		181.500.000	1	199.650.000	4	696.150.000	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya					3.480.170.000		4.995.237.500		5.494.761.250		6.044.237.375		6.648.661.113		23.182.897.238	
Program Pendidikan Non Formal	Angka buta aksara (%)	0,5%	250.000.000	0,5%	250.000.000	0,5%	405.942.000	0,5%	446.536.200	0,5%	491.189.820	0,5%	540.308.802	2,5%	2.383.976.822	
															-	
Program Pendidikan Luar Biasa					-		-		-		475.000.000		475.000.000		950.000.000	

URUSAN : 1.01.Pendidikan
 SKPD : 1.01.01.01 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1.075.000.000		740.000.000		2.892.500.000		3.261.750.000		3.587.925.000		3.946.717.500		15.503.892.500	
	Persentase Guru SD yang berpendidikan Minimal S1 (%)	73%		76%		79%	-	82%	-	85%		85%		88%	-	
	Persentase Guru SD bersertifikasi (%)	72%		76%		79%	-	82%	-	86%		86%		90%	-	
	Persentase Guru SLTP yang berpendidikan Minimal S1 (%)	92%		94%		96%	-	98%	-	100%		100%		100%	-	
	Persentase Guru SLTP bersertifikasi (%)	75%		79%		83%	-	87%	-	92%		92%		95%	-	
	Persentase Guru SMA/SMK bersertifikasi (%)	65%		75%		82%	-	87%	-	91%		91%		95%	-	
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				1	2.500.000.000		3.193.321.000		3.512.653.100		3.863.918.410		4.250.310.251		17.320.202.761	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							142.071.000		156.278.100		171.905.910		189.096.501		659.351.511	DISDIKBUD
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			1.700.000.000		975.000.000		1.515.000.000		1.666.500.000		1.833.150.000		2.016.465.000		9.706.115.000	
	JUMLAH		30.340.425.800		75.371.397.500		116.271.291.400		127.818.036.040		138.264.907.209		148.749.897.930		636.815.955.879	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
SKPD : Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	100%	1.518.753.000	100%	1.929.716.000	100%	2.824.575.800	100%	1.866.869.000	100%	1.866.869.000	100%	1.866.869.000	100%	11.873.651.800	DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan sarana dan pemeliharaan kantor dan puskesmas	0		2.070.411.500		1.335.000.000	1 keg	1.500.000.000	3 keg	1.500.000.000	3 keg	1.500.000.000	3 keg	1.500.000.000	10 keg	9.405.411.500	
Program Pembangunan	Jumlah kegiatan hari besar nasional dan daerah			0	3	65.000.000	3	62.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	18 keg	427.000.000	
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbelkes	98%	100%	5.360.929.000	100%	3.829.000.000	100%	4.845.000.000	100%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	100%	5.500.000.000	100%	30.534.929.000	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya upaya kesehatan	11,30%	20%	20.518.321.906	22%	30.782.392.446	70%	32.394.670.304	80%	31.951.770.000	90%	32.576.770.000	100%	33.276.770.000	100%	181.500.694.656	
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Adanya jaminan kesehatan masyarakat miskin			0	870 jiwa	83.350.000	870 jiwa	275.000.000	870 jiwa	1.183.350.000							
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah Parameter yang dilakukan Labkesmas	7 parameter	7	144.000.000	13	177.000.000	18	424.082.000	25	440.000.000	25	245.000.000	25	250.000.000	25	1.680.082.000	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	100%	100	290.000.000	100	221.400.000	100	123.122.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.634.522.000	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase perbaikan gizi masyarakat	9.2%	9.2%	218.000.000	9%	265.500.000	8.8%	657.747.000	8.6%	600.000.000	8.4%	650.000.000	8%	650.000.000	8%	3.041.247.000	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah pengembangan lingkungan sehat		13 desa	112.590.000	15 desa	221.250.000	13 desa	628.135.000	12 desa	605.000.000	12 desa	680.000.000	12 desa	695.000.000	34	2.941.975.000	

URUSAN : Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
SKPD : Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase pencegahan dan penanggulangan penyakit			615.000.000		1.197.890.300		1.743.049.000		2.273.500.000		2.837.200.000		5.362.860.000		14.029.499.300	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya standarisasi pada layanan kesehatan							123.122.000		150.000.000		170.000.000		190.000.000		633.122.000	
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase prevalensi HIV			0		165.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000		660.000.000		1.320.000.000	
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas dan jaringan yang di bangun/ rehab			13.818.129.500		5.825.062.000		34.864.600.000		11.500.000.000		12.150.000.000		8.150.000.000		86.307.791.500	
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			210.000.000		104.278.520		57.137.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000		971.415.520	
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	persentase peningkatan pelayanan kesehatan lansia		100	107.000.000	100	132.750.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000		1.289.750.000	
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & anak	Menurunnya angka kematian ibu			2.239.895.380		2.383.679.000		2.918.195.000		2.716.895.380		2.816.895.380		2.916.895.380		15.992.455.520	
Program Perencanaan, Pendataan dan Monitoring Evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi			117.000.000		131.675.000		591.045.845		575.000.000		600.000.000		625.000.000		2.639.720.845	
Program Diklat SDM dan Akreditasi	Jumlah puskesmas terakreditasi			581.590.000		1.547.341.000		1.500.000.000		2.000.000.000		2.050.000.000		2.050.000.000		9.728.931.000	
Program Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan.			134.000.000		116.840.000		0		0		0		0		250.840.000	
				48.055.620.286		50.514.124.266		85.896.480.949		62.944.034.380		65.032.734.380		64.943.394.380		377.386.388.641	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
SKPD : RSUD Curup

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan perkantoran	100%	100%	1.877.203.280	100%	3.092.605.000	100%	4.492.000.000	100%	4.840.400.000	100%	5.198.940.000	100%	5.643.582.800	100%	25.144.731.080	RSUD Curup	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarna aparatur							2.289.000.000		2.451.000.000		2.613.000.000		2.775.000.000		10.128.000.000		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur							155.000.000		180.000.000		205.000.000		230.000.000		770.000.000		
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	12 bulan	12 bulan	42.742.343.581	12 bulan	40.000.000.000	12 bulan	42.000.000.000	12 bulan	44.100.000.000	12 bulan	46.305.000.000	12 bulan	48.620.250.000	12 bulan	263.767.593.581		
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai untuk pengembangan tipe dan akreditasi			23.271.870.350		31.719.041.000	1 kegiatan	36.071.500.000	1 kegiatan	42.793.050.000	1 kegiatan	43.788.955.000	1 kegiatan	47.471.642.000	1 kegiatan	225.116.058.350		
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit						1 kegiatan	550.000.000	1 kegiatan	605.000.000	1 kegiatan	665.500.000	1 kegiatan	732.050.000	1 kegiatan	2.552.550.000		
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya kemitraan dalam peningkatan pelayanan kesehatan						1 kegiatan	657.000.000	1 kegiatan	722.700.000	1 kegiatan	794.970.000	1 kegiatan	874.467.000	1 kegiatan	3.049.137.000		
Program Diklat SDM dan Akreditasi Tenaga Kesehatan	Meningkatnya kapasitas SDM dan mewujudkan sertifikasi Tenaga Kesehatan						1 kegiatan	250.000.000	1 kegiatan	275.000.000	1 kegiatan	302.500.000	1 kegiatan	332.750.000	1 kegiatan	1.160.250.000		
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan rumah sakit		1 paket	500.000.000	1 paket	503.920.000	1 paket	600.000.000	1 paket	600.000.000	1 paket	600.000.000			1 paket	2.803.920.000		
				68.391.417.211		75.315.566.000		87.064.500.000		96.567.150.000		100.473.865.000		106.679.741.800		534.492.240.011		

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : 1.03 PEKERJAAN UMUM
SKPD : 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Tahun 2015 Target	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.(000)	
			Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Luas Jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Ha)	3.706,00	3.213,00	11.771.152,00	3.848,00	10.241.094,50	4.486,00	13.252.679,00	5.096,00	16.000.000,00	5.696,00	17.000.000,00	6.296,00	18.000.000,00	6.296,00	86.264.925,50	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	Jumlah sarana air baku terbangun (unit)	-	-	-	-	-	2,00	4.000.000,00	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	4,00	10.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	Jumlah kawasan yang tertata pengelolaan SDAny (Kawasan)	-	1,00	-	-	-	1,00	500.000,00	1,00	500.000,00	2,00	1.400.000,00	-	700.000,00	5,00	3.100.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Panjang Peningkatan Keandalan Infrastruktur Pengendali Banjir (Km)	-	-	-	7,00	-	8,00	2.150.000,00	8,00	2.300.000,00	7,00	2.500.000,00	7,00	2.600.000,00	37,00	9.550.000,00	
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang (%)	55,49	59,20	85.648.361,89	63,01	49.548.096,39	66,92	80.122.029,38	70,93	106.850.000,00	75,04	120.250.000,00	79,25	134.000.000,00	414,35	576.418.487,66	
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Kondisi Jalan dan Jembatan Yang Tetap Berfungsi Dengan Baik	55,49	59,20	4.524.100,00	63,01	3.750.640,00	66,92	7.230.000,00	70,93	5.501.000,00	75,04	5.601.000,00	79,25	5.735.000,00	414,35	32.341.740,00	
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah Peningkatan sistem informasi dan data Jalan dan Jembatan (Dokumen)	-	-	-	-	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Jumlah Sarana dan Prasarana kebinamargaan yang tersedia (Unit)	4,00	4,00	3.363.058,00	10,00	-	17,00	17.402.400,00	4,00	2.500.000,00	6,00	5.150.000,00	-	5.200.000,00	41,00	33.615.458,00	
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang (%)	55,49	59,20	17.175.006,29	63,01	7.351.849,00	66,92	16.869.215,00	70,93	15.040.000,00	75,04	16.920.000,00	79,25	18.800.000,00	414,35	92.156.070,29	
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Prosentase rumah tangga berakses air bersih (%)	62,30	64,11	7.861.719,40	66,00	4.339.808,00	67,92	14.174.776,23	69,75	18.597.256,00	71,55	15.909.756,00	73,25	13.549.756,00	73,25	74.433.071,63	

URUSAN
SKPD

: 1.03 PEKERJAAN UMUM
: 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada		SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Tahun 2015 Target	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Akhir Periode RPJMD (2021)		
			Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah rumah tangga terfasilitasi pembangunan perumahan (Rumah Tangga)	-	-	-	992,00	8.286.615,30	1.662,00	27.645.470,00	3.030,00	37.181.770,00	2.893,00	37.006.770,00	2.904,00	39.181.770,00	11.481,00	149.302.395,30	
PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Jumlah Desa terfasilitasi pembangunan berbasis masyarakat (Desa/Kel)	-	-	-	-	-	-	670.000,00	-	-	-	-	-	-	-	670.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN PSU PERUMAHAN	Jumlah rumah tangga terfasilitasi pembangunan perumahan (Rumah Tangga)	-	-	-	-	-	400,00	250.000,00	400,00	500.000,00	400,00	500.000,00	567,00	600.000,00	1.767,00	1.850.000,00	
PROGRAM PENGENTASAN KAWASAN KUMUH	Luas Kawasan Kumuh yang tertangani	-	-	-	-	-	100,00	450.000,00	100,00	500.000,00	100,00	500.000,00	89,92	600.000,00	389,92	2.050.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	Jumlah Desa terfasilitasi pembangunan berbasis masyarakat (Desa/Kel)	-	-	-	-	-	53,00	225.000,00	53,00	3.250.000,00	53,00	3.250.000,00	53,00	3.250.000,00	212,00	9.975.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN NASIONAL MASYARAKAT	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Laporan)	-	-	-	1,00	261.083,50	1,00	546.657,00	1,00	600.000,00	1,00	650.000,00	1,00	700.000,00	5,00	2.757.740,50	
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Jumlah Dokumen Perencanaan yang konsistensi dan akuntabel	-	95,00	4.718.989,02	125,00	3.798.290,508	6,00	3.935.000,00	97,00	7.235.000,00	100,00	9.710.000,00	98,00	10.660.000,00	521,00	40.057.279,53	
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang (NSPK)	-	1,00	750.000,00	1,00	635.570,00	2,00	1.100.000,00	5,00	1.150.000,00	1,00	300.000,00	-	-	10,00	3.935.570,00	
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Jumlah dokumen perencanaan pemanfaatan ruang (Dokumen)	-	-	-	1,00	-	-	220.000,00	2,00	500.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00	3,00	1.020.000,00	
PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Tercapainya Pelaksanaan Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	27,00	27.000.000,00	50,00	50.000.000,00	46,00	46.820.000,00	-	-	123,00	123.820.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	250.000,00	-	300.000,00	-	750.000,00	

URUSAN : 1.03 PEKERJAAN UMUM
 SKPD : 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Tahun 2015 Target	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.(000)		
			Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Laporan)	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	300.000,00	1,00	300.000,00	-	400.000,00	4,00	1.000.000,00		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Ketersediaan pelayanan administrasi teknis Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu (jenis)	658,00	2.163,00	1.032.073,50	2.209,00	1.807.125,00	2.249,00	1.912.290,00	2.299,00	1.931.350,00	2.330,00	1.950.580,00	2.380,00	1.970.010,00	13.630,00	10.603.428,50		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah penambahan sarana dan prasarana aparatur	-	24,00	32.287.819,90	10,00	37.803.120,30	15,00	46.664.905,00	23,00	49.385.000,00	11,00	50.375.000,00	31,00	62.905.000,00	114,00	279.420.845,20		
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Jumlah ASN terfasilitasi peningkatan disiplin (Orang)	130,00	100,00	-	200,00	-	231,00	1.300.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.250.000,00	100,00	1.250.000,00	831,00	5.000.000,00		
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah dokumen penilaian kinerja (Dokumen)	-	9,00	36.570,70	8,00	87.556,00	8,00	43.000,00	8,00	43.000,00	8,00	43.000,00	8,00	43.000,00	49,00	296.126,70		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah ASN terfasilitasi Peningkatan Kompetensi (Orang)	-	17,00	150.000,00	48,00	125.000,00	53,00	378.000,00	53,00	653.000,00	53,00	653.000,00	53,00	653.000,00	277,00	2.612.000,00		
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	Peningkatan Drainase Yang Terintegrasi dan Berfungsi Dengan Baik (%)	55,00	55,00	-	60,00	5.350.158,50	66,00	9.951.410,00	73,00	12.150.000,00	80,00	13.000.000,00	86,00	15.700.000,00	420,00	56.151.568,50		
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG	Panjang Peningkatan Keandalan Infrastruktur (M)	-	-	-	150,00	-	200,00	280.000,00	400,00	560.000,00	300,00	420.000,00	-	840.000,00	1.050,00	2.100.000,00		
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Jumlah kegiatan Sistem pengendalian internal (Laporan)	-	1,00	657.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	657.500,00		
PROGRAM PEMBANGUNAN	Jumlah Kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah (Hari Besar)	-	-	-	3,00	70.000,00	3,00	90.000,00	3,00	90.000,00	3,00	80.000,00	3,00	80.000,00	15,00	410.000,00		
TOTAL				169.976.350,70		133.456.007,00		278.712.831,61		336.707.376,00		353.939.106,00		339.867.536,00		1.612.659.207,31		

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : 1.05 - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

SKPD : 1.05 . 1.05.02 - Satuan Polisi Pamong Praja

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
		Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu (%)	100	100	1.246.125.000	100	1.295.317.000	100	1.739.942.000	100	1.913.936.200	100	2.105.329.820	100	2.315.862.802	100	10.616.512.822	Satpol PP	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik (%)	75	77	336.455.000	78	277.220.000	79	218.500.000	80	278.373.000	81	308.210.300	82	1.004.531.330	82	2.423.289.630		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	75	75	75.250.000	75	123.150.000	0	0	75	120.000.000	75	181.500.000	75	199.650.000	300	699.550.000		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM Yang Menguasai PPNS, Dasar Satpol PP, Pendidikan Dasar Linmas dan Pendidikan Dasar Dalam	0	0	0	103	119.750.000	0	0	120	220.000.000	125	245.200.000	125	259.720.000	473	844.670.000		
Program Peningkatan Pengembangan Sestim Pelaporan pencapaian kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	0	0	0	0	0	0	85	50.000.000	90	181.500.000	95	199.650.000	95	431.150.000		
Program Pembangunan	Dukungan Partisipasi dalam Pelaksanaan Agenda Festival dan Kegiatan Nasional, Provinsi dan Daerah	0	0	0	0	0	-	0	3	55.000.000	3	60.500.000	3	66.550.000	9	182.050.000		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Tenaga Pengendalian Keamanan di Kelurahan Desa dan Kecamatan	1556	1556	493.021.000	1560	1.211.293.000	1560	369.240.000	1560	1.000.000.000	1560	1.000.000.000	1560	1.000.000.000	7800	5.073.554.000		
Program Pemeliharaan Kantrantimbas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparat Siskam Swakarsa Daerah	70	72	1.499.149.000	73	1.326.120.000	74	137.015.000	75	200.716.500	76	220.788.150	77	242.866.965	77	3.626.655.615		
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	0	0	0	0	0	0	-	20	25.000.000	30	33.000.000	40	36.300.000	40	94.300.000		
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penataan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	100	-	110	125.000.000	120	137.500.000	130	151.250.000	130	413.750.000			
TOTAL				3.650.000.000		4.352.850.000		2.464.697.000		3.988.025.700		4.473.528.270		5.476.381.097		24.405.482.067		

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
SKPD : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD SKPD			
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	12 bln	337.925.000	12 bln	593.169.700	12 bln	632.653.170	12 bln	666.262.487	12 bln	693.888.736	12 bln	723.777.609	60 bulan	3.647.676.702		
Program Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	12 bln	29.675.000	12 bln	129.668.600		917.494.000		116.352.500		127.987.750		140.786.525		1.461.964.375		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	12 bln	22.800.000	12 bln											22.800.000		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya bimbingan teknis implementasi Perundang-undangan	12 bln	-	12 bln	-		75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		348.075.000		
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen dalam Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bln	20.000.000	12 bln	25.000.000		40.000.000		44.000.000		48.400.000		53.240.000		230.640.000		
Program Pembangunan	Jumlah Kegiatan hari Besar Nasional dan Daerah		-	12 bln	29.925.000		50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		261.975.000		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	12 bln	1.548.427.500	12 bln	1.574.687.700		2.007.875.000		2.186.229.900		2.263.065.390		2.347.584.429		11.927.869.919		
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	Jumlah Kepala Keluarga Miskin yang diberdayakan (KK)	12 bln	-	12 bln	812.490.000		214.950.966	-	675.000.000	-	700.000.000	-	740.000.000	-	3.142.440.966		
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	12 bln	515.120.000	12 bln	298.246.000		443.635.600		575.000.000		595.000.000		641.000.000		3.068.001.600		
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	12 bln	-	12 bln	164.475.000		221.760.000		245.000.000		265.000.000		280.000.000		1.176.235.000		
Program Pembinaan Eks Peyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosail Lainnya)	Terlaksananya Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	12 bln	-	12 bln	75.360.000	-	-	-	95.000.000	-	100.000.000	-	110.000.000	-	380.360.000		
Penguatan Kelembagaan Pengembangan Kawasan Desa Tertinggal	Jumlah Kawasan Desa tertinggal	12 bln	-	-	-	-	100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		464.100.000		

URUSAN : Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
 SKPD : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD SKPD		
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Pengembangan Ekonomi Pengembangan Sarana Prasarana dan Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan		12 bln	-	-	-	-	243.810.000		250.000.000		275.000.000		280.000.000		1.048.810.000	
Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Serta Pengembangan Ekonomi Kawasan Desa Tertinggal	adanya akses air bersih dan sanitasi serta pengembangan ekonomi kawasan desa tertinggal	12 bln	-	-	-	-	250.000.000		275.000.000		302.500.000		332.750.000		1.160.250.000	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemeriharaan Desa		12 bln	1.150.450.000	12 bln	368.000.000		400.000.000		1.960.000.000		520.000.000		560.000.000		4.958.450.000	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	12 bln	-	-	-		280.622.000		-		-		-		280.622.000	
Program Pengembangan SDA dan TTG	Jumlah Pengembangan SDA dan TTG	12 bln	59.000.000	-	-										59.000.000	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		12 bln	-	12 bln	368.294.200	-	-	-	350.000.000	-	-	-	-	-	718.294.200	
TOTAL			3.683.397.500		4.439.316.200		5.877.800.736		7.685.344.887		6.163.091.876		6.508.613.563		34.357.564.762	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : 1.05 - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
SKPD : 1.05 . 1.05.01 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	14	1279	601.410.900	2059	854.592.200	2323	1.013.510.640	2544	1.204.812.768	2849	1.435.775.322	11.054	5.110.101.830	KESBANGPOL RL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	42	17	222.500.000	26	405.233.100	14	575.414.720	6	620.497.664	6	744.597.197	69	2.568.242.681	KESBANGPOL RL
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Pengetahuan Aparatur dan Masyarakat tentang Peraturan dan Perundang Undangan	-	-	-	80	150.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	320	450.000.000	KESBANGPOL RL
Program Pembangunan	Peningkatan Dukungan Pembangunan Pada Kegiatan Hari Hari Besar Nasional dan Daerah	-	-	-	3	108.058.000	3	125.000.000	3	125.000.000	3	150.000.000	12	508.058.000	KESBANGPOL RL
Program Penyusunan Program Kegiatan SKPD	Peningkatan Penyusunan Program Kegiatan SKPD	-	-	-	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	95.000.000	4	315.000.000	KESBANGPOL RL
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Peningkatan Pencegahan Tindak Kriminal Di Kabupaten Rejang Lebong yang Berkurang	342	342	364.484.750	342	347.711.700	342	417.254.040	342	500.704.848	342	600.845.818	1.710	2.231.001.156	KESBANGPOL RL
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong Akan Wawasan Kebangsaan	224	224	418.991.550	344	444.309.900	425	537.171.880	455	617.606.256	525	723.127.507	1.973	2.741.207.093	KESBANGPOL RL
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Koordinasi Antara Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong	100	100	141.982.800	350	799.169.000	490	939.002.800	640	1.076.803.360	670	1.144.164.032	2.250	4.101.121.992	KESBANGPOL RL
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Peningkatan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong	-	30	38.386.000	180	401.799.200	350	482.159.040	400	578.590.848	450	694.309.018	1.410	2.195.244.106	KESBANGPOL RL
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan Penataan Kelembagaan Politik, Ormas, LSM, dan Lembaga non formal lainnya dan Meningkatkan kemitraan dalam Mewujudkan Kondisi IPOLEKSOSBUD yang Kondusif	60	50	277.675.000	186	737.360.000	196	829.832.000	196	933.798.400	216	1.062.558.080	844	3.841.223.480	KESBANGPOL RL
TOTAL				2.065.431.000		4.313.233.100		5.094.345.120		5.837.814.144		6.750.376.973		24.061.200.337	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya semua urusan dan tersedianya sarana prasarana penunjang kinerja administrasi perkantoran	100%	100%	255.367.000	100%	606.201.000	100%	619.500.000	100%	672.000.000	100%	692.000.000	100%	702.000.000	100%	3.547.068.000	NAKERTRANS	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	333.633.000	100%	130.000.000	100%	395.000.000	100%	151.000.000	100%	228.000.000	100%	245.000.000	100%	1.482.633.000	NAKERTRANS	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur yang memadai								100%	65.000.000		15.000.000		15.000.000	100%	95.000.000		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	100%	97.293.000	100%	156.000.000	100%	170.000.000	100%	180.000.000	100%	197.000.000	100%	800.293.000	NAKERTRANS	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat	100%	100%	80.000.000	100%	74.400.000	100%	205.000.000	100%	208.000.000	100%	211.000.000	100%	215.000.000	100%	993.400.000		
Program Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD	Tersusunnya rencana kerja dan kegiatan SKPD							60.000.000		66.000.000		70.000.000		77.000.000		273.000.000	NAKERTRANS	
Program Pembangunan	Terlaksananya kegiatan pembangunan							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000	NAKERTRANS	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	Terlaksananya Pemberdayaan Fakir miskin dan komunitas adat terpencil	100%	100%	150.000.000														
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	100%	65.000.000														
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Terlaksananya pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100%	100%	86.000.000														
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	100%	100%	128.000.000														
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Tersedianya tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan berkompentensi				-	100%	366.500.000	100%	7.480.000.000	100%	5.595.000.000	100%	2.605.000.000	100%	1.715.000.000	100%	17.761.500.000	NAKERTRANS
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Sesuaiinya penempatan tenaga kerja dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh pengguna tenaga kerja	100%	100%	70.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	240.000.000	100%	260.000.000	100%	1.090.000.000	NAKERTRANS	

URUSAN

: Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

SKPD

: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terlindungi dan berkembangnya lembaga ketenagakerjaan	100%	100%	70.000.000	100%	200.000.000	100%	517.000.000	100%	544.700.000	100%	683.000.000	100%	728.000.000	100%	2.742.700.000	NAKERTRANS
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Diperolehnya tata batas yang akurat, SK pencadangan, RTSP dan RTJ dan terjadi perpindahan penduduk untuk pembukaan permukiman baru	100%	100%	732.000.000	100%	416.880.000	100%	805.000.000	100%	859.000.000	100%	912.000.000	100%	980.000.000	100%	4.704.880.000	NAKERTRANS
Program Transmigrasi Lokal	Terbentuknya Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang menambah pembangunan daerah						100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	150.000.000	100%	520.000.000	NAKERTRANS
Program Transmigrasi Regional	Terlaksananya pembinaan bagi trasnigran regional						100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	150.000.000	100%	520.000.000	NAKERTRANS
	TOTAL			1.970.000.000		1.991.274.000		10.727.500.000		8.840.700.000		6.146.000.000		5.484.000.000		35.159.474.000	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi teknis Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	337.710.550	100%	319.295.000	100%	469.224.500	100%	516.146.950	100%	567.761.645	100%	624.537.810	100%	2.834.676.455	DP3A-PPKB
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik	75%	78%	281.905.850	81%	297.293.165	84%	1.093.530.000	87%	472.383.000	90%	470.921.300	90%	502.313.430	90%	3.118.346.745	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2	5	26.500.000	5	19.400.000	5	26.580.000	5	29.238.000	5	32.161.800	5	35.377.980	25	169.257.780	
Program Pembangunan	Terlaksananya kegiatan hari besar nasional dan Daerah					0	6 kali	120.000.000	6 kali	132.000.000	6 kali	145.200.000	6 kali	159.720.000	6 kali	556.920.000	
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Sosialisasi, evaluasi dan pelaporan dan seleksi duta HAN		2	25.000.000	19	61.250.000	19	167.375.000	0	865.112.500	0	1.129.523.750	0	1.192.776.125	0	3.441.037.375	0
Program Keluarga Berencana	Persentase Jumlah Program Keluarga Berencana yang telah dilaksanakan	78%	81%	1.743.103.960	84%	2.129.940.000	86%	3.681.932.000	89%	4.071.537.100	90%	4.479.690.810	92%	4.936.659.891	92%	21.042.863.761	DP3A-PPKB
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah advokasi dan KIE kesehatan Reproduksi Remaja dan pelaksanaan lomba kelompok PIK dab Duta R/M	1500	1500	45.000.000	1500	35.000.000	1500	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	80.000.000	DP3A-PPKB
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	0	0	0				0	15 Kelompok	80.000.000	15 Kelompok	88.000.000	15 Kelompok	96.800.000	15 Kelompok	264.800.000	

URUSAN : Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													OPD Penanggung Jawab
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah SDM pelayanan dan Pendampingan KDRT, Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Sosialisasi Kapasitas Building Pelatihan PPRG	850 org, 20 SKPD	850	225.200.000	910 Org, 20 SKPD	370.000.000	910 Org, 20 SKPD	419.500.000	910 Org, 20 SKPD	732.625.000	910 Org, 20 SKPD	840.218.750	910 Org, 20 SKPD	927.251.563	910 Org, 20 SKPD	3.514.795.313	
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Persentase perempuan di lembaga legislatif	91,23-91,72	91,23-91,72	40.000.000	91,73-92,22	322.000.000	92,23-92,72	354.200.000	92,73-93,22	389.620.000	93,23-93,72	428.582.000	93,23-93,72	471.440.200	93,73-94,22	2.005.842.200	
	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	70,18-70,58	70,18-70,58		70,58-70,98		70,98-71,38		71,38-71,78		71,78-72,18				72,18-72,58		
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan	100	100	85.200.000	100	337.648.000	100	1.002.116.000	100	1.104.052.600	100	1.442.909.830	100	1.589.482.126	100	5.561.408.556	
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	5200 PUS,44 BKB,1004 Kader	5200 PUS,44 BKB,1004 Kader	390.000.000	5000 PUS,44 BKB,1004 Kader	461.045.000	5000 PUS,44 BKB,1004 Kader	504.000.000	5000 PUS,44 BKB,1004 Kader	554.400.000	5000 PUS,44 BKB,1004 Kader	609.840.000	25000 PUS,44 BKB,1004 Kader	670.824.000	25000 PUS,44 BKB,1004 Kader	3.190.109.000	DP3A-PPKB
Program Kependudukan	Jumlah Program kependudukan	15	15	135.200.000	15	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.200.000	
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok bina Keluarga di Kecamatan			0	1	31.715.000	1	0	1	0	1	0	1	0	1	31.715.000	
TOTAL				3.334.820.360	4.384.586.165	7.718.457.500	8.735.115.150	10.001.609.885	10.950.663.124	45.125.252.184							

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
SKPD: Dinas Ketahanan Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
		Target														
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS KETAHANAN PANGAN					1.146.604.000		6.911.490.000		10.333.845.706		10.481.985.648		13.150.143.782		42.024.069.135	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas			14 Jenis	505.896.000	14 Jenis	739.271.000	14 Jenis	835.376.230	14 Jenis	943.975.140	14 Jenis	1.066.691.908	80 Jenis	4.091.210.278	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Untuk Meningkatkan Sarana Prasarana Aparatur			6 Jenis	30.750.000	6 Jenis	161.164.000	6 Jenis	212.115.320	6 Jenis	239.690.312	6 Jenis	270.850.052	30 Jenis	914.569.684	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah jenis Kegiatan Untuk Peningkatan Disiplin Aparatur			-	-	1 keg	15.000.000	1 keg	16.950.000	1 keg	19.153.500	1 keg	21.643.455	4 keg	72.746.955	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah orang yang dilakukan peningkatan sumberdayanya			0	-	8 orang	150.000.000	8 orang	169.500.000	8 orang	191.535.000	8 orang	216.434.550	32 Orang	727.469.550	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			4 Dok	9.812.000	4 Dok	25.000.000	4 Dok	28.250.000	4 Dok	31.922.500	4 Dok	36.072.425	16 Dok	131.056.925	
Program Pembangunan	Jumlah kegiatan yang diikuti untuk mendukung peningkatan Pembangunan pada Hari Besar Nasional dan Daerah			3 kali	50.000.000	3 kali	50.000.000	3 kali	50.000.000	3 kali	50.000.000	3 kali	50.000.000	15kali	250.000.000	
Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen yang Tersusun Untuk Program dan Kegiatan SKPD				-	20 buku	50.000.000	20 buku	56.500.000	20 buku	63.845.000	20 buku	72.144.850	80 buku	242.489.850	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Pemanfaatan Teknologi Informasi					12 bulan	49.800.000	12 bulan	56.274.000	12 bulan	63.589.620	12 bulan	71.856.271	48 bulan	241.519.891	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah jenis kegiatan untuk meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan					2 Jenis	923.450.000	3 Jenis	1.193.498.500	3 Jenis	1.348.653.305	3 Jenis	1.523.978.235	11 Jenis	4.989.580.040	
Program Peningkatan ketahanan pangan Pertanian /Perkebunan	JumlahPeningkatan ketahanan pangan Pertanian /Perkebunan				550.146.000		4.747.805.000		7.365.381.656		7.134.121.271		9.373.557.036		29.171.010.963	
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan						-		350.000.000		395.500.000		446.915.000		1.192.415.000	
TOTAL					1.146.604.000		6.911.490.000		10.333.845.706		10.481.985.648		13.150.143.782		42.024.069.135	

Dinas Ketahanan Pangan Kab. Rejang Lebong

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : 2.01. LINGKUNGAN HIDUP
SKPD : 2.05 . 2.05.01 - Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
		Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu (%)	100	100	344.411.500	100	424.520.500	100	462.339.900	100	521.904.000	100	582.996.300	100	684.296.000	100	3.020.468.200	DLH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik (%)	0	60	61.279.000	70	109.080.000	80	40.000.000	90	802.600.000	100	912.690.000	100	2.542.920.000	100	4.468.569.000	DLH
Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlahpakaian dinas aparatur yang tersedia dalam rangka peningkatan disiplin	100	0	0	240	108.680.000	0	0	310	216.000.000	370	259.200.000	310	270.000.000	1230	853.880.000	DLH
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat bagi aparatur di bidang lingkungan hidup, administrasi dan keuangan	100	0	0	0	0	6	30.000.000	8	320.010.500	10	360.000.000	13	370.000.000	37	1.080.010.500	DLH
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Jumlah Laporan capaian kinerja yang sesuai dengan peraturan dan dokumen penyelenggaraan yang disusun tepat waktu	0	10	14.500.010	28	19.200.000	28	0	28	23.000.000	28	26.450.000	10	30.417.500	118	113.567.510	DLH
Program Pembangunan	Jumlah Kegiatan Hari Besar Nasional dan Daerah	0	2	20.500.000	3	36.400.000	3	37.140.000	2	69.000.000	2	79.350.000	2	80.000.000	14	322.390.000	DLH
Program Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen program dan kegiatan SKPD	0	0	0	0	0	0	0	7 dokumen	38.000.000	7 dokumen	50.000.000	0	0	14 dokumen	88.000.000	DLH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan/air limbah, pengurangan timbulan sampah pada sumbernya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan/tersedianya sistem penanganan sampah dan pemanfaatan sampah serta kesesialtaraan pengelolaan sampah	0	74	5.546.323.000	74-79	3.860.377.350	79-84	5.608.019.000	84-94	12.960.253.600	94-100	14.982.322.320	100	15.937.604.552	100	58.894.899.822	DLH
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya indeks kualitas air, kualitas udara ambien dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	0	- 60 - 85 - 50	371.463.000	- 63 - 85 - 60	133.910.000	- 65 - 85 - 70	200.696.000	- 67 - 85 - 80	1.261.174.000	- 70 - 85 - 90	1.689.935.000	- 56,8 - 85 - 100	1.463.753.500	- 56,8 - 85 - 100	5.120.931.500	DLH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan gas rumah kaca pada sektor air limbah dan sampah, ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim	1	15	1.145.814.408	15	410.810.000	10	105.000.000	7	2.014.082.850	5	3.202.587.500	6	3.617.740.000	58	10.496.034.758	DLH
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Meningkatnya jumlah dan luas area kawasan ruang terbuka hijau untuk ruang terbuka hijau publik serta terpeliharanya ruang terbuka hijau	0%	0%	0	0	0	0	0	12	189.750.000	12	218.212.500	12	240.033.750	12	647.996.250	DLH

URUSAN : 2.01. LINGKUNGAN HIDUP
 SKPD : 2.05 . 2.05.01 - Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.		
		Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sda dan perlindungan fungsi LH	0%		0	100%	416.613.000			0	100%	175.579.200	100%	460.000.000	100%	231.000.000	100	1.283.192.200	DLH
PROGRAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN DI KAWASAN-KAWASAN KONSERVASI LAUT DAN HUTAN	Terlaksananya Pengembangan Ekowisata di kawasan Hutan	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	1	500.000.000	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN	Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan dan lahan serta	0%		0		0	0	0	7	189.750.000	7	691.900.000	7	167.090.000	21	1.048.740.000	DLH	
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau	0%	39.486	403.619.000	45.409	319.816.000	52.220	107.632.000	60.053	625.250.000	69.061	560.500.000	69061	644.750.000	335.291	2.661.567.000	DLH	
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	tersedianya lokasi percontohan pembibitan	0%		0	11500 batang	205.802.000	0	0	25300 batang	460.000.000	25300 batang	460.000.000	25300 batang	460.000.000	87400 batang	1.585.802.000	DLH	
PROGRAM DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	Terbangunnya hutan tanaman dan terserapnya tenaga kerja	0%		0		0		0	11	396.750.000	11	456.000.000	11	456.000.000	33	1.308.750.000	DLH	
																		DLH
TOTAL				7.907.909.918		6.045.208.850		6.590.826.900		20.263.104.150		25.492.143.620		27.195.605.302		93.494.798.740		

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	INDIKATOR KINERJA Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	16 jenis	16 jenis	371.800.000	16 jenis	776.834.050	16 jenis	1.401.865.000	16 jenis	1.597.300.000	16 jenis	1.831.500.000	16 jenis	2.009.000.000	16 Jenis	7.988.299.050	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Jumlah Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang memadai	6 jenis	6 jenis	267.150.000	6 jenis	29.340.000	6 jenis	2.954.000.000	6 jenis	977.000.000	6 jenis	1.085.000.000	6 jenis	865.000.000		6.177.490.000	
Program Pembangunan	Jumlah program pembangunan yang mendukung	1 jenis	1 Jenis	-	1 Jenis	20.000.000	1 Jenis	50.000.000	1 Jenis	55.000.000	1 Jenis	60.000.000	1 Jenis	65.000.000		250.000.000	
Program Peningkatan disiplin aparatur	jumlah pakaian dinas	50 jenis	-	-	-	-	50 jenis	50.000.000	-	-	-	-	50 jenis	50.000.000	100%	100.000.000	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah ketersediaan program penataan administrasi kependudukan	11 jenis	11 Jenis	390.000.000	11 Jenis	1.346.552.000	11 Jenis	5.544.552.000	11 Jenis	5.764.552.000	11 Jenis	6.536.552.000	11 Jenis	6.559.552.000		26.141.760.000	
JUMLAH				1.028.950.000		2.172.726.050		10.000.417.000		8.393.852.000		9.513.052.000		9.548.552.000		40.657.549.050	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : 2.09 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

SKPD : 2.09.2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
		Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	1.272.582.700	100	692.240.000	100	1.312.668.420	100	1.507.287.650	100	1.361.190.795	100	1.490.144.875	100	7.636.114.440	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	75	0	-	100	3.372.000	-	-	-	-	-	-	-	0	100	3.372.000	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pakaian Dinas Dishub dalam rangka peningkatan disiplin aparatur	132 Stel	132	40.635.000	40	39.000.000	70	86.000.000	70	94.600.000	70	104.060.000	70	114.466.000	452	478.761.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM Aparatur Yang Berkualitas	15 Orang	31	262.300.000	0	-	39	176.000.000	43	193.600.000	47	212.960.000	47	234.256.000	207	1.079.116.000	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD yang akuntabel dan tepat waktu	80 Buku	80	24.000.000	80	6.000.000	50	26.000.000	50	28.600.000	50	31.460.000	50	34.606.000	360	150.666.000	
Program Pembangunan	Jumlah Kegiatan Hari Besar Nasional, Provinsi dan Daerah	0	0	-	3	35.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	15	240.000.000	
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan pengelolaan pelayanan prasarana dan fasilitas perhubungan	0	150	210.369.000	150	100.000.000	150	27.206.900	150	506.000.000	150	556.600.000	150	612.260.000	900	2.012.435.900	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah SDM para supir / juru mudi Tentang Pengetahuan Pelayanan Angkutan yang berkualitas	0	120	460.126.000	144	200.000.000	204	759.857.500	264	1.220.843.250	264	1.342.927.575	264	1.477.220.333	1260	5.460.974.658	
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas sebagai peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pengguna jalan	4 Unit	3	306.315.000	4	1.950.000	9	1.583.590.000	8	1.741.949.000	3	681.198.540	3	749.318.394	30	5.064.320.934	
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dalam kondisi baik	6	30936	181.425.000	1 unit, 9000 Kp, 12500 Bh, 9400 Lbr, 36 Blok	175.000.000	1 unit, 9000 Kp, 12500 Bh, 9400 Lbr, 36 Blok	642.200.000	1 unit, 9000 Kp, 12500 Bh, 9400 Lbr, 36 Blok	837.792.000	1 unit, 9000 Kp, 12500 Bh, 9400 Lbr, 36 Blok	921.571.200	1 unit, 9000 Kp, 12500 Bh, 9400 Lbr, 36 Blok	1.013.728.320	5 unit, 9000 Kp, 12500 Bh, 9400 Lbr, 36 Blok	3.771.716.520	
TOTAL				2.757.752.700		1.252.562.000		4.663.522.820		6.185.671.900		5.261.968.110		5.775.999.921		25.897.477.451	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : 2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SKPD : 2.10 . 2.10.01 -DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
		Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	0	0	0	100	738.042.500	100	1.309.785.700	100	1.440.764.270	100	1.584.840.697	100	1.743.324.767	100	6.816.757.934	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	0	0	0	100	300.000.000	100	137.743.000	100	601.517.300	100	160.619.030	100	176.680.933	100	1.376.560.263	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur yang meningkat disiplinnya	0	0	0	0	0	0	-	200	413.000.000	200	454.300.000	200	499.730.000	600	1.367.030.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM Aparatur Yang Berkualitas	0	0	0	0	0	20	50.000.000	22	55.000.000	25	60.500.000	28	66.550.000	95	232.050.000	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD yang akuntabel dan tepat waktu	0	0	0	0	0	80	2.225.000	110	131.367.500	80	139.254.250	80	150.679.675	350	423.526.425	
Program Pembangunan	Jumlah Kegiatan Hari Besar Nasional, Provinsi dan Daerah	0	0	0	0	0	3	143.750.000	3	367.275.000	3	372.502.500	3	394.752.750	12	1.278.280.250	
Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa	Jumlah Alat, Jaringan dan aplikasi Komunikasi Informatika dengan kondisi baik	0	0	0	60 unit, 1 menara, 3 aplikasi	762.534.000	66 unit, 1 menara, 3 aplikasi	279.890.000	73 unit, 1 menara, 3 aplikasi, 1 jaringan	1.764.334.000	80 unit, 1 menara, 4 aplikasi, 1 jaringan	1.940.767.400	88 unit, 1 menara, 4 aplikasi, 1 jaringan	2.134.844.140	366 unit, 5 menara, 17 aplikasi, 3 jaringan	6.882.369.540	
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase peningkatan fasilitasi SDM bidang Komunikasi dan informasi	0	0	0	0	-	0	-	100	485.856.250	100	425.251.475	100	467.776.623	300	1.378.884.348	
Program Kerja Sama Informasi dengan Media Massa	Jumlah media centre, media cetak dan elektronik serta informasi dan dokumentasi daerah untuk penyebarluasan informasi massa	0	0	0	24	1.275.649.900	36	1.065.332.000	36	1.171.865.200	36	1.289.051.720	36	1.417.956.892	168	6.219.855.712	
TOTAL				-		3.076.226.400		2.988.725.700		6.430.979.520		6.427.087.072		7.052.295.779		25.975.314.471	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DI SERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

SKPPD : Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
		Target														
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
1	2	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	14 jenis	587.959.000	15 jenis	805.001.000	15 jenis	851.300.000	15 jenis	854.200.000	15 jenis	928.700.000	15 jenis	1.021.570.000	89 jenis	5.048.730.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis sarana dan prasarana aparatur yang Ditingkatkan	7 jenis	273.920.000	7 jenis	304.443.000	7 jenis	492.500.000	7 jenis	320.500.000	7 jenis	297.500.000	7 jenis	327.250.000	42 jenis	2.016.113.000	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Jenis kegiatan dalam rangka peningkatan disiplin aparatur	1	39.000.000	-	-	1 keg	50.000.000	1 keg	40.000.000	1 keg	45.000.000	-	-	3 keg	174.000.000	-
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian yang diadakan	45 stel	39.000.000	45 stel	-	47 stel	50.000.000	43 stel	40.000.000	45 stel	45.000.000	-	-	225 stel	174.000.000	-
Program Pembangunan	Jumlah Hari besar Nasional dan Daerah yang diikuti	-	-	3 kali	45.400.000	3 kali	50.000.000	3 kali	50.000.000	3 kali	50.000.000	3 kali	55.000.000	15 kali	250.400.000	-
Program Penciptaan Iklim UKM Yang kondusif	Jumlah Peserta Yang Dilibatkan Untuk meningkatkan usahanya melalui pelatihan dan kegiatan teknis	582 Org/UK	200.000.000	855 Org/UK	174.192.000	1065 org/UK	250.000.000	650 Org/UK	210.000.000	700 org/UK	200.000.000	730 orang/UK	210.000.000	32 orang	1.244.192.000	-
Program Pengembangan Kewirausahaan da Keunggulan Kompetitif UKM	Jumlah Kecamatan yang KUMKM nya mendapat bantuan permodalan	15 kec	-	15 kec	139.000.000	15 kec	2.000.000.000	15 kec	2.125.000.000	15 kec	2.281.250.000	15 kec	2.476.562.500	15 kec	9.021.812.500	-
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Kelompok Usaha Baru (KUB) / Wirausaha Baru (WUB) yang memanfaatkan sistem pendukung usaha	30 KUB	50.000.000	30 KUB	136.289.000	30 KUB	13.350.000.000	60 KUB	16.687.500.000	30 KUB	19.984.375.000	30 KUB	24.980.468.750	210 KUB	75.188.632.750	-
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah kecamatan yang dilakukan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	15 kec	263.500.000	15 kec	191.800.000	15 kec	450.000.000	15 kec	512.500.000	15 kec	984.375.000	15 kec	1.117.968.750	15 kec	3.520.143.750	-
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Tempat Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Akan ditata	-	-	-	-	1 Unit	250.000.000	1 Unit	312.500.000	1 Unit	390.625.000	2 Unit	488.281.250	5 Unit	1.441.406.250	-

URUSAN : Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar
SKPPD : Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Target															
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pasar yang akan dikembangkan	1 Unit	2.076.595.800	8 Unit	6.620.278.000	4 Unit	24.235.422.000	2 Unit	14.181.777.500	4 Unit	37.439.721.875	4 Unit	46.664.652.344	23 Unit	131.218.447.519		
																	-
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Kecamatan Yang IKM nya Dibina	3 Kec	270.000.000	15 Kec	767.530.860	10 Kec	848.137.500	15 Kec	890.544.375	15 Kec	935.071.594	15 Kec	981.825.174	73 Kec	4.693.109.503		
																	-
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Wadah, sarana, dan peralatan promosi produk UKM sebagai salah satu tempat pengembangan industri	1 Paket	200.000.000	1 Paket	438.437.000	1 Paket	2.500.000.000	1 Paket	2.625.000.000	1 Paket	2.756.250.000	1 Paket	2.894.062.500	5 Paket	11.413.749.500		
																	-
Program Penataan Struktur Industri	Jumlah sarana dan prasarana industri	2 Kali	175.000.000	50 Unit	243.401.000	50 Unit	5.520.650.000	50 Unit	6.900.812.500	50 Unit	8.626.015.625	50 Unit	10.782.519.531	250 Unit	32.248.398.656		
		-	-														-
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah Kecamatan yang dikembangkan sentra industrinya	-	-	2 Kec	-	4 Kec	200.000.000	4 Kec	200.000.000	5 Kec	250.000.000	5 Kec	300.000.000	20 Kec	950.000.000		
																	-
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Ketersediaan Data Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2 Dok	215.000.000	2 Dok	139.693.000	2 Dok	250.000.000	2 Dok	225.000.000	2 Dok	250.000.000	2 Dok	262.500.000	12 Dok	1.342.193.000		
																	-
Total			4.350.974.800		10.005.464.860		51.298.009.500		46.135.334.375		75.418.884.094		92.562.660.799		279.771.328.428		

TABEL VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Target												
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	14 Jenis	4.518.438.000	14 Jenis	4.097.546.200	14 Jenis	4.711.375.304	14 Jenis	5.191.012.834	14 Jenis	5.710.114.118	14 Jenis	6.281.125.530	14 jenis	30.509.611.986	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	4 jenis	796.534.500	2 jenis	717.095.800	2 jenis	813.608.426	9 jenis	2.007.469.269	10 jenis	2.378.066.195	10 jenis	2.120.872.815	37 Jenis	8.833.647.005	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur	1 jenis	20.800.000	-	-	-	-	-	-	1 jenis	27.000.000	2 jenis	24.000.000	4 jenis	71.800.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur	-	-	2 jenis	102.888.000	2 jenis	350.000.000	1 jenis	385.000.000	1 jenis	423.500.000	1 jenis	465.850.000	7 jenis	1.727.238.000	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah buku untuk Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	290 buku	102.864.000	80 buku	33.200.000	70 buku	55.272.000	70 buku	60.799.200	70 buku	66.879.120	70 buku	88.767.032	650 buku	407.781.352	
Program Pembangunan	Jumlah kegiatan hari besar yang diikuti	2 kali	11.450.000	2 kali	50.000.000	2 kali	53.500.000	2 kali	58.850.000	2 kali	64.735.000	2 kali	71.208.500	12 kali	309.743.500	
Program Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD	Jumlah penyusunan program dan kegiatan	-	-	-	-	3 kali	15.000.000	3 kali	16.500.000	3 kali	18.150.000	3 kali	19.965.000	12 kali	69.615.000	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kegiatan untuk meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi	2 jenis kegiatan	464.000.000	1 jenis	318.200.000	4 jenis	790.474.000	4 jenis	484.521.400	3 jenis	532.973.540	3 jenis	586.270.894	15 jenis	3.176.439.834	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah kegiatan untuk peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	1 jenis	100.000.000	2 jenis	474.980.000	3 jenis	583.228.600	3 jenis	641.551.460	3 jenis	705.706.606	3 jenis	776.277.267	12 jenis	3.281.743.933	
Program Mengintensifikasikan penanganan pengaduan Masyarakat	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat	98 %	56.297.000	98 %	76.010.000	99 %	81.330.700	99 %	89.463.770	100%	98.410.147	100%	108.251.162	100%	509.762.779	
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	6 Kecamatan	200.000.000	6 Kecamatan	50.000.000	6 Kecamatan	53.500.000	6 Kecamatan	65.000.000	6 Kecamatan	71.500.000	6 Kecamatan	78.650.000	6 Kecamatan	518.650.000	

Urusan : Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
 SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
		Target														
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Jumlah kegiatan untuk Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	36.833.000	2 kegiatan	89.411.310	2 kegiatan	98.352.441	2 kegiatan	108.187.685	2 kegiatan	119.006.454	10 kegiatan	651.790.890	
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan	15 kecamatan	2.384.762.885	15 kecamatan	759.051.000	15 kecamatan	872.908.650	15 kecamatan	2.969.199.515	15 kecamatan	3.065.219.467	15 kecamatan	3.170.841.413	15 kecamatan	13.221.982.930	
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah kegiatan untuk dilakukan Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			1 kegiatan	98.877.000	1 kegiatan	105.798.390	1 kegiatan	116.378.229	1 kegiatan	128.016.052	1 kegiatan	140.817.657	5 kegiatan	589.887.328	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah kegiatan untuk Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi			1 kegiatan	223.792.000	1 kegiatan	223.792.000	1 kegiatan	223.792.000	1 kegiatan	223.792.000	1 kegiatan	223.792.000	5 kegiatan	1.118.960.000	
TOTAL			8.855.146.385		7.038.473.000		8.799.199.380		12.407.890.118		13.622.249.930		14.275.695.723		64.998.654.536	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : 1.20 **PEMRINTAHAN UMUM**
SKPD : 1.20.03 **DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

Bidang Urusan Pemerintahan dan program priotas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi teknis Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	132.969.000	100%	-	100%	346.560.100	100%	561.112.913	100%	461.676.092	100%	716.485.079	100%	2.218.803.184	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik (%)	73%	102.090.150	75%	-	75%	421.000.000	75%	593.250.000	75%	730.372.500	75%	757.520.925	75%	2.604.233.575	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	- Terlaksananya Kegiatan Lomba Bercerita Anak Tingkat SD dan terlaksananya sosialisasi dan bimtek Perpustakaan Desa/kel	100%	-	100%	-	100%	200.000.000	100%	248.600.000	100%	280.918.000	100%	317.437.340	100%	1.046.955.340	
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN	Pembinaan Perpustakaan Desa/Kel yang Baik	10904	115.065.200	10904	383.415.000	10904	415.000.000	10904	158.200.000	10904	178.766.000	10904	202.005.580	65.424	1.452.451.780	
PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Terselenggaranya Pengolahan dan pemeliharaan Arsip di Kab.Rejang Lebong yang Baik	1	60.000.000	2	273.922.000	2	479.299.900	2	541.608.887	2	612.018.042	2	733.154.198	2	2.700.003.027	
TOTAL			410.124.350		657.337.000		1.861.860.000		2.102.771.800		2.263.750.634		2.726.603.122		10.022.446.906	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : Pemerintahan Umum
SKPD : Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		SKPD Penanggung jawab
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.	
		Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Pilihan Pariwisata						12.033.667.000		74.864.141.350		41.570.218.935		32.795.786.239		28.008.538.128		194.573.405.752	Dinas Pariwisata
Dinas Pariwisata																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan pelayanan administrasi teknis Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu (%)	100%	100%	1.439.700.000	100%	1.768.646.500	100%	1.649.611.150	100%	1.814.572.265	100%	1.996.029.492	100%	2.195.632.441	100%	10.864.191.847	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik (%)	-	-	-	74%	388.217.000	74%	260.220.000	74%	310.220.000	74%	534.390.000	74%	450.200.000	74%	1.943.247.000	
Program Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Tepat waktu dan Berkualitas	-	-	-	75%	1.131.059.000	75%	1.131.059.000	75%	350.000.000	75%	350.000.000	75%	300.000.000	75%	3.262.118.000	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan mancanegara (Pertahun)	75%	75%	730.754.000	80%	1.904.970.000	80%	5.554.970.000	80%	5.479.970.000	80%	6.474.970.000	80%	6.037.000.000	80%	26.182.634.000	
Program Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah pengembangan destinasi pariwisata	3 Keg	3 Keg	586.400.000	3 Keg	2.301.840.500		55.726.457.800		22.287.024.330		13.361.028.513		9.919.423.864		104.182.175.007	
Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kelompok sadar wisata (PokDarWis) dan Pemandu Wisata	15 kec	15 kec	550.000.000	15 kec	1.918.234.000	15 kec	4.191.823.400	15 kec	5.019.182.340	15 kec	5.826.918.234	15 kec	4.513.781.823	15 kec	22.019.939.797	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN				1.048.674.000		1.200.000.000		2.025.000.000		1.984.250.000		2.167.450.000		2.582.500.000		9.959.200.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA				342.000.000		582000000		1.600.000.000		1.275.000.000		1.685.000.000		1.560.000.000		6.702.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA		-	-	158.346.100	3 Keg	776.200.000	4 Keg	2.650.000.000	4 Keg	2.950.000.000	2 Keg	250.000.000	2 Keg	450.000.000	15 Keg	7.084.546.100	
				5.301.054.100		12.033.667.000		74.864.141.350		41.570.218.935		32.795.786.239		28.008.538.128		194.573.405.752	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : Pemerintahan Pilihan

SKPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
		Target														
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PILIHAN																
PERTANIAN DAN PERIKANAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.686.404.250		14 Jenis	1.295.177.700	14 Jenis	1.429.592.490	14 Jenis	1.617.038.163	14 Jenis	1.785.793.688	14 Jenis	1.972.835.107	14 Jenis	10.786.841.399	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.217.779.800		4 Jenis	186.139.800	4 Jenis	204.753.780	4 Jenis	225.229.158	4 Jenis	247.752.074	4 Jenis	272.527.281	4 Jenis	2.354.181.893	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	141.500.000		6 orang	10.000.000	6 orang	11.000.000	6 orang	12.100.000	6 orang	13.310.000	6 orang	14.641.000	6 orang	202.551.000	
Program Meningkatkan Disiplin Aparatur	Jumlah Kegiatan Meningkatkan Disiplin Aparatur	22.000.000													22.000.000	
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja	241.578.000		12 Buku	9.093.500	12 Buku	10.002.850	12 Buku	11.003.135	12 Buku	12.103.449	12 Buku	13.313.793	60 Buku	297.094.727	
Program Pembangunan	Jumlah Kegiatan Pembangunan	50.700.000		1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	300.700.000	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Jenis Peningkatan Ketahanan Pangan	5.974.048.500		8 Jenis	4.204.261.500	11 Jenis	5.298.951.650	10 Jenis	5.828.846.815	10 Jenis	6.435.807.557	10 Jenis	7.133.697.312	10 Jenis	34.875.613.334	
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Jumlah Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan			3 Paket	180.550.000	3 Jenis	1.020.336.000	3 Jenis	1.122.369.600	3 Jenis	1.234.606.560	3 Jenis	1.358.067.216	3 Jenis	4.915.929.376	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	185.000.000		3 Jenis	224.750.000	3 Jenis	247.225.000	3 Jenis	271.947.500	3 Jenis	299.142.250	3 Jenis	329.056.475	3 Jenis	1.557.121.225	
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Jumlah Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	365.000.000		1 Jenis	515.150.000	5 Jenis	1.836.693.000	5 Jenis	2.020.362.300	5 Jenis	2.222.398.530	5 Jenis	2.444.638.383	5 Jenis	9.404.242.213	
Program Pemberdayaa Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Jumlah Pemberdayaa Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	2.133.456.000		4 Jenis	1.603.680.000	7 Jenis	3.993.177.000	7 Jenis	4.392.494.700	7 Jenis	4.919.651.770	7 Jenis	5.514.706.947	7 Jenis	22.557.166.417	
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Pengembangan Budidaya Perikanan	1.946.906.000		3 Jenis	1.860.435.000	3 Jenis	2.046.478.500	3 Jenis	2.251.126.350	3 Jenis	2.476.238.985	3 Jenis	2.723.862.884	3 Jenis	13.305.047.719	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	138.654.000		2 Jenis	240.745.000	3 Jenis	384.819.500	3 Jenis	423.301.450	3 Jenis	465.631.595	3 Jenis	512.194.755	3 Jenis	2.165.346.300	

Urusan : Pemerintahan Pilihan

SKPD : Dinas Pertanian dan Perikanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
		Target														
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		395.875.000	2 Jenis	468.644.600	2 Jenis	515.509.060	2 Jenis	567.059.966	2 Jenis	623.765.963	2 Jenis	686.142.559	2 Jenis	3.256.997.147	
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		68.000.000	1 Bulan	122.060.000	1 Bulan	134.266.000	1 Bulan	147.692.600	1 Bulan	162.461.860	1 Bulan	178.708.046	1 Bulan	813.188.506	
Program Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah Peningkatan Produksi Peternakan		1.435.328.000	2 Jenis	701.855.000	2 Jenis	772.040.500	2 Jenis	849.244.550	2 Jenis	934.169.005	2 Jenis	1.027.585.906	2 Jenis	5.720.222.961	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan		-	-	-	11 Jenis	3.758.920.000	11 Jenis	4.134.812.000	11 Jenis	4.548.293.200	11 Jenis	5.003.122.520	11 Jenis	17.445.147.720	
Program Penjaminan Produk Hewan Yang Asuh	Jumlah Penjaminan Produk Hewan Yang Asuh					3 Jenis	2.500.000.000	3 Jenis	2.750.000.000	3 Jenis	3.025.000.000	3 Jenis	3.327.500.000	3 Jenis	11.602.500.000	
Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan					1 Unit	300.000.000	1 Unit	330.000.000	1 Unit	363.000.000	1 Unit	399.300.000	4 Unit	1.392.300.000	
Program Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Jumlah Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak					12 Klp	2.400.000.000	12 Klp	2.640.000.000	12 Klp	2.904.000.000	12 Klp	3.194.400.000	48 Klp	11.138.400.000	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Peningkatan Kesejahteraan Petani		116.085.000			6 Jenis	12.072.563.000	6 Jenis	13.279.819.300	6 Jenis	14.607.801.230	6 Jenis	16.068.581.353	6 Jenis	56.144.849.883	
Program Peningkatan Produktifitas usaha Bagi Kesejahteraan Masyarakat Perikanan	Jumlah Peningkatan Produktifitas usaha Bagi Kesejahteraan Masyarakat Perikanan					3 Jenis	1.234.000.000	3 Jenis	1.520.000.000	3 Jenis	1.744.000.000	3 Jenis	1.930.000.000	3 Jenis	6.428.000.000	
			17.118.314.550	-	11.672.542.100	-	40.220.328.330	-	44.444.447.587	-	49.074.927.715	-	54.154.881.537	-	216.685.441.818	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : Fungsi Lain Sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan

SKPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
		Target														
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelayanan Adm. Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	13 jenis	10.299.990.000	13 jenis	15.439.614.900	13 jenis	12.191.000.000	13 jenis	12.560.000.000	13 jenis	12.975.000.000	13 jenis	13.350.000.000	13 jenis	76.815.604.900	Setwan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas	6 Jenis	3.142.049.000	7 Jenis	1.880.844.600	7 Jenis	27.518.000.000	7 Jenis	2.405.000.000	7 Jenis	7.925.000.000	7 Jenis	4.315.000.000	7 Jenis	47.185.893.600	Setwan
Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		397.450.000	395 stel	356.550.000	400 stel	450.000.000	800 stel	1.000.000.000	350 stel	400.000.000	350 stel	440.000.000	2335 stel	3.044.000.000	Setwan
Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Manusia	22 org	226.450.000	32 org	464.600.000	32 org	300.000.000	32 org	320.000.000	34 .org	340.000.000	35 org	350.000.000	152 org	2.001.050.000	Setwan
Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	70 buku	63.843.500	77 buku	70.820.000	72 buku	80.000.000	72 buku	85.000.000	76 buku	92.000.000	80 buku	100.000.000	447 buku	491.663.500	Setwan
Program Pembangunan	Jumlah Hari Besar Nasional dan Daerah yang diikuti		-	3 kali	50.000.000	3 kali	55.000.000	3 kali	60.500.000	3 kali	66.500.000	3 kali	73.000.000	15 kali	305.000.000	Setwan
Prog. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	10 jenis	6.088.853.000	9 jenis	7.828.084.500	9 jenis	8.730.000.000	9 jenis	9.770.000.000	9 jenis	9.935.000.000	9 jenis	11.000.000.000	9 jenis	53.351.937.500	Setwan
Total			20.218.635.500		26.090.514.000		49.324.000.000		26.200.500.000		31.733.500.000		29.628.000.000		183.195.149.500	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : Penunjang Urusan Pemerintahan
SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab		
		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021						
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
BELANJA LANGSUNG																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	11 jenis	1.197.072.450	11 jenis	2.811.194.450	11 jenis	2.976.519.800	11 jenis	3.029.131.800	11 jenis	3.082.193.800	11 jenis	3.169.755.800	11 jenis	16.265.868.100	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis kegiatan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5 jenis	997.936.500	4 jenis	6.934.767.000	4 jenis	2.069.200.000	4 jenis	2.082.600.000	4 jenis	2.091.000.000	4 jenis	2.105.500.000	24 jenis	16.281.003.500	-		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Paket	25.500.000												25.500.000	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Orang yang Ditingkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparaturnya	2 Jenis	465.856.300	20 orang	120.000.000	27 orang	175.000.000	30 orang	180.000.000	32 orang	190.000.000	35 orang	205.000.000	164 orang	1.335.856.300	-		
Program Dukungan Partisipasi Agenda Nasional Dan Daerah	Jumlah agenda Nasional, Provinsi dan daerah yang diikuti	2 keg	47.600.000	2 keg	50.000.000	2 keg	63.300.000	2 keg	67.000.000	2 keg	69.000.000	2 keg	72.000.000	12 keg	368.900.000	-		
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari WDP menjadi WTP	WDP	3.936.927.000	WDP	6.790.078.800	WTP	8.432.276.000	WTP	8.522.900.000	WTP	8.617.300.000	WTP	8.746.900.000	WTP	45.046.381.800	-		
Total			6.670.892.250	16.706.040.250	-	13.716.295.800	-	13.881.631.800	-	14.049.493.800	-	14.299.155.800	-	79.323.509.700				

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : Fungsi Lain Sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab					
		Target																			
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD							
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	13 jenis	395.057.500	13 jenis	1.039.731.000	13 jenis	885.028.000	13 jenis	929.277.000	13 jenis	975.738.000	13 jenis	1.024.519.000	13 jenis	5.249.350.500						Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Untuk Meningkatkan Sarana Prasarana Aparatur	2 jenis	179.700.000	6 jenis	612.119.200	5 jenis	869.850.000		132.990.000		146.289.000		160.917.000	6 jenis	2.101.865.200						
Program Peningkatan Sapras Aparatur	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di pelihara	7 unit	53.182.000		-		-		-		-		-	7 unit	53.182.000						
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Untuk Peningkatan Disiplin Aparatur	2 jenis	44.100.000	2 jenis	-	2 jenis	30.230.000	2 jenis	25.300.000		-		-	2 jenis	99.630.000						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah anggaran yang disiapkan untuk peningkatan sumber daya aparatur	12 bulan	-	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000		30.000.000		30.000.000	12 bulan	150.000.000						
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30 dok	90.000.000	24 dok	157.167.400	18 dok	150.000.000	12 dok	150.000.000	6 dok	150.000.000	6 dok	150.000.000	0	847.167.400						
Program Pembangunan	Jumlah kegiatan yang diikuti untuk mendukung peningkatan Pembangunan pada Hari Besar Nasional dan Daerah	15 kali	-	12 kali	37.220.000	9 kali	50.000.000	6 kali	50.000.000	3 Kali	50.000.000	3 Kali	50.000.000	0	237.220.000						
Program Pengembangan Data Informasi	Jumlah Jenis Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan		406.000.000	1 jenis	785.093.269	1 jenis	850.000.000	1 jenis	850.000.000	1 jenis	850.000.000	1 jenis	900.000.000	2 jenis	4.641.093.269						
Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Jenis Kerjasama Pembangunan yang dilaksanakan	1 jenis	194.000.000	2 jenis	401.310.000	1 jenis	500.000.000	1 jenis	532.500.000	1 jenis	570.000.000	1 jenis	620.000.000	2 jenis	2.817.810.000						
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	15 dok	-	0	-	10 dok	550.000.000	10 dok	605.000.000	10 dok	670.000.000	10 dok	725.000.000	40 dok	2.550.000.000						

Urusan : Fungsi Lain Sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
		Target																
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20	21		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1 jenis	200.000.000	1 jenis	427.100.000	1 jenis	474.240.000	1 jenis	414.240.000	1 jenis	434.950.000	1 jenis	456.700.000	1 jenis	2.407.230.000			
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang difasilitasi program pemberdayaan masyarakatnya	5 kec	160.500.000	5 kec	154.320.000	5 kec	250.000.000	5 kec	300.000.000	5 kec	350.000.000	5 kec	375.000.000	5 kec	1.589.820.000			
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	100%	985.000.000	100%	937.231.731	100%	1.158.810.000	100%	1.088.920.000	100%	1.175.971.428	100%	1.920.668.157	100%	7.266.601.316			
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah jenis kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan	2 jenis	630.000.000	2 jenis	1.062.015.000	2 jenis	1.650.000.000	2 jenis	1.897.500.000	2 jenis	2.182.125.000	2 jenis	1.749.006.250	2 jenis	9.170.646.250			
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah jenis Perencanaan Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	3 jenis	705.400.000	3 jenis	806.315.000	3 jenis	2.350.000.000	3 jenis	2.765.000.000	3 jenis	3.181.500.000	3 jenis	3.199.650.000	3 jenis	13.007.865.000			
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	15 dok	-	10 dok	-	10 dok	-	5 dok	100.000.000	5 dok	-	0	200.000.000	0	300.000.000			
Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	-	-	1 dok	637.000.000	1 dok	400.000.000	1 dok	500.000.000	1 dok	600.000.000	1 dok	700.000.000	5 dok	2.837.000.000			
Total			4.042.939.500		7.086.622.600		9.648.158.000		9.765.727.000		10.696.573.428		11.536.460.407		52.776.480.935			

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
SKPD : 4.05.06 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2021		SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi teknis Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	833.200.000	100%	1.645.766.000	100%	1.121.193.800	100%	1.126.100.000	100%	1.152.100.000	100%	1.157.100.000	100%	7.035.459.800	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Paket gedung kantor yang dibangun/direhab	Paket		-		-		8.100.000.000		5.000.000.000		4.110.000.000		3.000.000.000		20.210.000.000	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	50	50	39.000.000	50	-	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	239.000.000	
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Terlaksananya Pemulangan Pegawai Yang Pensiun					-		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		800.000.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Penjenjangan Struktural Diklat Pim II,III dan IV	10	10	340.000.000	44	788.482.000	44	1.000.000.000	44	1.265.000.000	44	1.265.000.000	44	1.265.000.000	44	5.923.482.000	
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah buku LAKIP, RENJA, LPPD, ILPPD dan LKPJ yang dibuat	20	20	20.000.000	20	27.500.000	20	27.500.000	20	27.500.000	20	27.500.000	100	27.500.000	100	157.500.000	
Program Pembangunan	Jumlah Hari Hari Besar Nasional dan Daerah	0	0	-	2	35.300.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	8	50.000.000	8	235.300.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah PNS Yang Diambil Sumpah	0	0	400.000.000		50.000.000		1.033.000.000		455.000.000		345.000.000		345.000.000		2.628.000.000	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penempatan ASN pemerintah Kabupaten berdasarkan kualifikasi pendidikan (%)	10	25	2.227.800.000	40	2.810.024.000	55	4.202.600.000	70	4.730.000.000	85	4.330.000.000	85	4.730.000.000	85	23.030.424.000	
TOTAL				3.860.000.000		5.357.072.000		15.784.293.800		12.903.600.000		11.529.600.000		10.824.600.000		60.259.165.800	

BAB VIII
INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 1. 19. Kesatuan

SKPD : 1. 19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Kegiatan Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
		Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
URUSAN WAJIB																		BPBD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan Pelayanan Administrasi teknis Perkantoran yang akurat dan tepat waktu	5	100	910.764.000	100	511.585.000	100	600.000.000	100	890.330.000	100	923.000.000	100	880.800.000	100	4.716.479.000		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik (%)	50	50	1.385.200.000	60	1.513.628.000	70	678.000.000	80	286.000.000	90	262.000.000	100	272.000.000	100	4.396.828.000		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pakaian seragam BPBD	-	-	-	-	-	35	62.000.000	35	70.000.000	-	-	-	-	70	132.000.000		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peningkatan SDM Pegawai BPBD	-	-	-	-	-	34	176.000.000	64	105.000.000	36	150.000.000	30	25.000.000	164	456.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel dan tepat waktu	100	148 Buku	60.000.000	151	108.922.000	151	135.000.000	151	450.000.000	151	420.000.000	151	430.000.000	903	1.603.922.000		
Program Pembangunan	Dukungan Partisipasi dalam Pelaksanaan Agenda Festival dan Kegiatan Nasional, Provinsi dan Daerah	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	15	300.000.000		
Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD	Adanya program dan kegiatan BPBD	-	4	179.899.000	4	141.121.000	4	210.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	20	1.131.020.000		
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Bencana dalam Pencegahan dini dalam penanggulangan Bencana	-	2.110	265.000.000	220	722.734.000	20.110	1.109.000.000	20.110	750.000.000	20.015	2.050.000.000	20.015	2.250.000.000	80.470	7.146.734.000		
Peningkatan Kualitas SDM Kesiagaan Tanggap Darurat	Jumlah SDM Bidang Kesiapsiagaan tanggap darurat yang Berkualitas	320 Orang	320 Orang	350.000.000	320 Orang	234.056.250	341 Orang	110.000.000	590 Orang	170.000.000	500 Orang	220.000.000	590 Orang	410.000.000	2431 orang	1.494.056.250		
Program Perbaikan dan Pemulihan Semua Aspek Pelayanan Masyarakat Sampai Tingkat Memadai	Terselenggaranya Perbaikan Infrastruktur Irigasi, dan Drainase	50%	50%	695.000.000	30	11.171.232.000	30	1.650.000.000	30	1.870.000.000	30	1.950.000.000	30	2.000.000.000	150	19.336.232.000		
Program penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Jumlah SDM serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang berkualitas	0	0	-	1	138.187.500	1	100.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	988.187.500		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Logistik Bencana	Adanya Perawatan kendaraan dan logistik kebencanaan	-	-	-	-	-	6	187.500.000	11	525.000.000	11	675.000.000	11	475.000.000	39	1.862.500.000		

Urusan : 1. 19. Kesatuan

SKPD : 1. 19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Kegiatan Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
		Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinaamargaan	Jumlah ketersediaan alat berat		-	-	0	-	1	1.522.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1	1.522.500.000	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah aparatur yang diselenggarakan pembinaan dan pengembangan		-	-	31	145.667.250	-	-	35	50.000.000	-	-	40	50.000.000	106	245.667.250		
TOTAL				3.895.863.000		14.737.133.000		6.590.000.000		5.666.330.000		7.150.000.000		7.292.800.000		45.332.126.000		

BAB VIII
INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 1.04 - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

SKPD : 1.04 . 1.05.04 - Dinas Pemadam Kebakaran

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Kegiatan Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
		Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
		Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	0	0	0	100	1.147.454.000	100	2.090.445.000	100	2.402.096.750	100	2.045.800.000	100	2.057.900.000	100	9.743.695.750	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	0	0	0	0	-	70	4.040.210.000	75	4.644.183.500	80	3.835.000.000	85	585.000.000	85	13.104.393.500	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Pakaian Dinas Anggota Damkar dalam rangka peningkatan disiplin aparaturnya	0	0	0	0	-	125	242.370.000	125	278.725.500	125	93.750.000	125	93.750.000	500	708.595.500	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kinerja anggota damkar melalui Pendidikan Dasar Damkar	0	0	0	0	-	30	149.200.000	30	171.580.000	30	150.000.000	30	150.000.000	120	620.780.000	
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan persemester, RKA, DPA, LAKIP SKPD, Laporan RFK per bulan dan Renja SKPD	0	0	0	0	-	2	150.000.000	2	172.500.000	2	75.000.000	2	75.000.000	8	472.500.000	
Program Pembangunan	Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	0	0	0	80	-	81	77.925.000	82	89.613.750	83	77.925.000	84	77.925.000	330	323.388.750	
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Prosentase Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dapat ditangani	0	0	0	80	655.490.000	81	815.100.000	82	879.375.000	83	656.250.000	84	716.250.000	85	3.722.465.000	
TOTAL				-		1.802.944.000		7.565.250.000		8.638.074.500		6.933.725.000		3.755.825.000		28.695.818.500	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : Fungsi Lain Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
SKPD : Bagian Administrasi Hukum

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD			
		Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Urusan Wajib																		
Bidang Pemerintahan Umum																		Bag.Adm. Hukum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		-
Program penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			1.400.000.000	5 kali	1.490.000.000	5 kali	1.645.000.000	6 kali	1.810.000.000	7 kali	1.960.000.000		2.155.000.000		10.460.000.000		
TOTAL	TOTAL			1.400.000.000		1.490.000.000		1.645.000.000		1.810.000.000		1.960.000.000		2.155.000.000		10.460.000.000		

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN
OPD

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung jawab
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
		Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Terlaksananya upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba	1 keg		400.000.000	1 keg	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	800.000.000,00	
Program Dukungan Partisipasi Agenda Nasional Daerah	Terlaksananya dukungan partisipasi agenda nasional daerah	1 keg		548.000.000	1 keg	858.535.000	0	-	1 keg	-	0	-	1 keg	-	0	1.406.535.000,00	
Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya kualitas pembaca Al-quran	1 keg		86.100.000												86.100.000,00	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah	Terselenggaranya festival budaya daerah dalam rangka hari jadi kota curup	1 Keg		1.200.000.000												1.200.000.000,00	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1 keg		4.521.000.000	-	12.749.465.000	-	15.866.145.000	-	16.355.000.000	-	16.864.000.000	-	17.440.000.000	1 keg	83.795.610.000,00	Bag. Adm. Kesra
TOTAL				6.755.100.000		14.008.000.000		15.866.145.000		16.355.000.000		16.864.000.000		17.440.000.000		87.288.245.000	

Lokasi
(21)
Bag. Adm. Kesra

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : 4.01 - Administrasi Pemerintahan

SKPD : 4.01 . 4.01.03 - Bagian Administrasi Pemerintahan

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan	30 Ha	5 Ha	3.180.000.000	63 Ha	18.800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21.980.000.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya Kinerja Aparatur yang Handal	100	100	350.000.000	100%	200.000.000	100%	165.140.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.315.140.000	
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Buku LKPJ, LPPD, & IPPD Tahunan & Akhir Masa Jabatan	420 Buku	245 Buku	300.000.000	245 Buku	200.000.000	245 Buku	74.060.000	245 Buku	80.000.000	450 Buku	90.000.000	450 Buku	100.000.000	2330 Buku	844.060.000	
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	0	100%	650.000.000	100%	500.000.000	100%	170.380.000	100%	2.000.000.000	100%	2.050.000.000	100%	2.100.000.000	100%	7.470.380.000	
Program Asosiasi Kota dan Pemda Seluruh Indonesia	Terlaksananya Kerja Sama antar Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	48.137.000	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	5 Kegiatan	768.137.000	
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tersedianya Buku dan Data nama-nama Unsur Rupa Bumi Dalam Kabupaten Rejang Lebong	50 Buku	0	0	30 Buku	100.000.000	50 Buku	0	50 Buku	150.000.000	50 Buku	200.000.000	50 Buku	250.000.000	180	700.000.000	
Program Diseminasi Pelaksanaan Pemilihan Umum	Terlaksananya Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu dan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilikada dan Pilpres	0	1 Kegiatan	70.000.000	0	0	0	0	3 Kegiatan	500.000.000	3 Kegiatan	500.000.000	3 Kegiatan	500.000.000	9 Kegiatan	1.570.000.000	
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Terlaksananya Penyelesaian Konflik Pertanahan	0	0	0	1 Kegiatan	500.000.000	1 Kegiatan	494.620.000	1 Kegiatan	500.000.000	1 Kegiatan	500.000.000	1 Kegiatan	500.000.000	4 Kegiatan	2.494.620.000	
JUMLAH				4.800.000.000		20.550.000.000		952.337.000		3.500.000.000		3.610.000.000		3.730.000.000		37.142.337.000	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : 4.01 - Pemerintahan
SKPD : 4.01 . 4.01.03 - Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
		Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Laporan Realisasi fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong	48	48	1.650.000.000	48	1.478.886.000	41	1.032.484.000	41	1.150.000.000	41	1.250.000.000	41	1.365.000.000	212	7.926.370.000	Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.RL	
	Tersedianya Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik	48	48		48		41		41		41		41		212			
	Laporan evaluasi pengawasan realisasi Anggaran SKPD Kabupaten Rejang Lebong	48	48		48		41		41		41		41		212			
	Persentase Terkendalinya Pemanfaatan SDA dlm Kab. RL	15	15		0		0		0		0		0		0			
TOTAL				1.650.000.000	1.478.886.000		1.032.484.000		1.150.000.000		1.250.000.000		1.365.000.000		7.926.370.000			

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : Fungsi Lain Sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan
SKPD : Bagian Administrasi Perekonomian SETDA

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	
		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA KAB. RL			569.400.000		1.020.728.000		1.960.000.000		2.160.000.000		2.360.000.000		2.520.000.000				Bagian Administrasi Perekonomian dan PM Setda Kabupaten Rejang Lebong
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	3 Kali per Kecamatan per Tahun Anggaran	194.700.000	4 Kali per Kecamatan per Tahun Anggaran	200.877.000	5 kali per Kecamatan per Tahun Anggaran	235.000.000	5 kali per Kecamatan per Tahun Anggaran	250.000.000	6 kali per Kecamatan per Tahun	285.000.000	24 kali per Kecamatan per Tahun	300.000.000		1.465.577.000		
Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Kelembagaan Administrasi Ekonomi	Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Kelembagaan Administrasi Ekonomi	1 Jenis	90.000.000	2 jenis	206.200.000	2 jenis	570.000.000	2 jenis	615.000.000	2 jenis	645.000.000	2 jenis	675.000.000	2 jenis	2.801.200.000		
Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Jumlah Perlindungan dan Konservasi SDA	0		1 jenis	103.287.000	1 jenis	175.000.000	1 jenis	215.000.000	1 jenis	250.000.000	1 jenis	285.000.000	1 jenis	1.028.287.000		
Total			284.700.000		510.364.000		980.000.000		1.080.000.000		1.180.000.000		1.260.000.000		5.295.064.000		

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : 4.01 - Pemerintahan
SKPD : 4.01 . 4.01.03 - Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa)

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	0	0	0	0	0	80	0	85	200.000.000	90	300.000.000	95	350.000.000	100	850.000.000		
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Rejang Lebong	0	0	0	1	765.000.000	1	617.400.000	1	800.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	5	3.882.400.000		
TOTAL				0		765.000.000		617.400.000		1.000.000.000		1.150.000.000		1.200.000.000		4.732.400.000		

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : Fungsi Lain Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
SKPD : Bagian Administrasi Hubungan Masyarakat dan Protokol

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Propritas Pembagunan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD			
		Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Urusan Wajib																		
Bidang Pemerintahan																		
Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Persentase Ketersediaan pelayanan administrasi teknis Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu (%)		100%	1.969.000.000	100%	389.945.000	100%	428.939.500	100%	467.934.000	100%	506.928.500	100%	545.923.000	100%	4.308.670.000		Bag Humas Protokol
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Keprotokolan	Tertaksananya Fasilitasi Peningkatan SDM Keprotokolan		100%	Rp 220.000.000	100%	564.591.000	100%	599.000.000	100%	621.000.000	100%	648.000.000	100%	690.000.000	100%	3.342.591.000		
TOTAL				2.189.000.000	2	954.536.000	2	1.027.939.500	2	1.088.934.000	2	1.154.928.500	2	1.235.923.000	2	7.651.261.000		

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : 4.01 - Administrasi Pemerintahan

SKPD : 4.01 . 4.01.03 - Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Umum)

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan pelayanan administrasi teknis perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	6.076.249.900	100	7.079.327.000	100	10.525.692.800	100	11.190.540.400	100	11.856.839.300	100	12.323.679.900	100	59.052.329.300	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik (%)	75	80	17.538.271.100	90	5.216.274.500	90	5.160.646.400	90	5.401.170.000	90	5.706.910.000	90	5.912.749.000	90	44.936.021.000	
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur (%)	15	25	100.000.000	100	133.400.000	100	147.000.000	100	147.000.000	100	147.000.000	100	147.000.000	100	821.400.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penambahan Pengetahuan dan Ilmu tentang Peraturan Baru untuk Pemberdayaan Kualitas dan Kinerja bagi PNS di Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	15	10	115.000.000	0	0	12	424.575.000	12	467.000.000	12	500.000.000	12	550.000.000	12	2.056.575.000	
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	Persentase pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan penunjang kerja lainnya	76	100	3.818.235.900	100	4.938.880.000	100	5.005.349.990	100	5.478.675.000	100	5.896.238.000	100	6.377.880.000	100	31.515.258.890	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase data aset barang milik Daerah pada setda Kabupaten Rejang Lebong yang akurat	0	100	299.878.000	100	213.069.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	512.947.000	
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan	0	0	-	-	-	85	97.975.000	90	100.000.000	95	110.000.000	100	120.000.000	275	427.975.000	
JUMLAH				27.947.634.900		17.580.950.500		21.361.239.190		22.784.385.400		24.216.987.300		25.431.308.900		139.322.506.190	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

URUSAN : 4.01 - Administrasi Pemerintahan

SKPD : 4.01 . 4.01.03 - Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Organisasi)

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Pengetahuan PNS dalam Tata Naskah Dinas	60 Buku	60 Buku	160.000.000	-	150.000.000	65 Buku 1 Kali	101.536.000	70 Buku 1 Kali	70.000.000	75 Buku 1	75.000.000	80 Buku 1 Kali	80.000.000	350 Buku 5 Kali	636.536.000		
	Meningkatnya Pengetahuan TIM Evaluasi Jabatan dalam Menyusun hasil Evaluasi Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong	0	10 Buku		25 Orang 1 Kali		30 Orang 2 Kali		35 Orang 2 kali		45 Orang 2 Kali		50 Orang 2 Kali		175 Orang 10 Kali			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Tergambarnya Kinerja Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Buku)	210	80	125.000.000	80	220.000.000	109	95.903.000	129	280.000.000	149	165.000.000	169	165.000.000	636	1.050.903.000		
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Pengetahuan dan Minat Baca PNS di Lingkungan SETDAKAB. RL	100	-	-	-	-	-	-	300	55.000.000	300	60.000.000	300	65.000.000	900	180.000.000		
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat	Menyediakan data evaluasi mutu dan kinerja unit pelayanan berdasarkan indeks kepuasan masyarakat sehingga dapat dirumuskan kebijakan & rencana aksi lanjutan dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik berkualitas di Kab. RL	220 Buku	229 Buku	125.000.000	40 Orang, 40 SKPD, 80 Buku	105.000.000	40 Orang, 45 SKPD, 80 Buku	62.850.000	40 Orang, 45 SKPD, 80 Buku	68.000.000	40 Orang, 45 SKPD, 90 Buku	73.000.000	45 Orang, 45 SKPD, 90 Buku	78.000.000	205 Orang, 220 SKPD, 420 Buku	511.850.000		
Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	Terlaksananya Sosialisasi UU yang memiliki relevansi dengan kelembagaan organisasi perangkat daerah, Data Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, Jumlah Peraturan Bupati tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	130 Buku	149 Buku	142.750.000	40 orang, 120 buku	100.000.000	40 orang, 120 buku	38.979.000	45 orang, 135 buku	45.000.000	50 orang, 150 buku	50.000.000	55 orang, 165 buku	60.000.000	230 orang, 690 buku	436.729.000		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong	9 Unit	17 Unit	161.475.000	16 unit	100.000.000	16 unit	46.420.000	16 unit	120.000.000	16 unit	130.000.000	16 unit	140.000.000	85 unit	697.895.000		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Terciptanya Lingkungan Kerja yang bersih, indah, sehat, aman, rapi dan kekeluargaan	44 Skpd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 SKPD	105.000.000	150 SKPD	105.000.000	
Program Perencanaan Pembangunan daerah	Jumlah Renstra dan Renja Kabupaten Rejang Lebong (Buku)	40	40	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000.000	Bagian Adm Organisasi SetdaKab.RL	
JUMLAH				824.225.000		675.000.000		345.688.000		638.000.000		553.000.000		693.000.000		3.728.913.000		

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : Fungsi Lain Sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan
SKPD : Bagian Administrasi Keuangan SETDA KAB. Rejang Lebong

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab		
		Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp.			
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	-	20 Org	250.000.000	20 Org	275.000.000	20 Org	300.000.000	20 Org	325.000.000	80 Org	1.150.000.000	SETDA KAB. RL		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	-	60 PNS	420.634.000	60 PNS	430.000.000	60 PNS	450.000.000	60 PNS	470.000.000	240 PNS	1.770.634.000	SETDA KAB. RL		
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	1 jenis	525.000.000	3 Jenis	758.364.500	3 Jenis	868.000.000	3 Jenis	988.000.000	3 Jenis	1.100.000.000	3 Jenis	4.239.364.500	SETDA KAB. RL		
Total					525.000.000		1.428.998.500		1.573.000.000		1.738.000.000		1.895.000.000		7.159.998.500			

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 4.01 -Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

SKPD : 4.01 . 4.01.08 - Kecamatan Curup

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
	Target		Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	67.749.000	100	116.340.000	100	122.000.000	100	129.800.000	100	136.000.000	100	142.300.000	100	714.189.000	Kecamatan Curup
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	70	85	47.340.000	85	78.235.000	85	103.000.000	85	100.200.000	85	124.000.000	85	147.700.000	90	600.475.000	
Program Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dukungan peningkatan Pembangunan di Kecamatan	70	85	84.911.000	85	54.605.000	85	100.000.000	85	120.000.000	85	140.000.000	85	160.000.000	90	659.516.000	
TOTAL				200.000.000		249.180.000		325.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		1.974.180.000	

BAB. VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 4.01 -Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

SKPD : 4.01 . 4.01.15 - Kecamatan Selupu Rejang

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	111.670.000	100	112.941.900	100	129.960.000	100	143.191.500	100	157.508.400	100	173.261.100	100	828.532.900	Kecamatan Selupu Rejang
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	70	85	47.106.000	85	80.323.000	85	108.600.000	85	97.402.000	85	107.151.000	85	117.866.000	90	558.448.000	
Program Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dukungan peningkatan Pembangunan di Kecamatan	70	85	116.224.000	85	144.851.100	85	177.800.000	85	191.084.000	85	205.590.000	85	221.452.000	90	1.057.001.100	
TOTAL				275.000.000		338.116.000		416.360.000		431.677.500		470.249.400		512.579.100		2.443.982.000	

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 4.01 -Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

SKPD : 4.01 . 4.01.16 - Kecamatan Sindang Kelingi

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	98.160.000	100	142.140.000	100	165.700.000	100	185.520.000	100	199.800.000	100	213.500.000	100	1.004.820.000	Kecamatan Sindang Kelingi
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	70	85	79.550.000	85	97.000.000	85	124.000.000	85	114.500.000	85	115.000.000	85	116.000.000	90	646.050.000	
Program Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dukungan peningkatan Pembangunan di Kecamatan	70	85	97.290.000	85	105.638.000	85	135.000.000	85	140.000.000	85	150.000.000	85	160.000.000	90	787.928.000	
TOTAL				275.000.000		344.778.000		424.700.000		440.020.000		464.800.000		489.500.000		2.438.798.000	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 4.01 -Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

SKPD : 4.01 . 4.01.21 - Kecamatan Padang Ulak Tanding

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
	Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	99.317.200	100	137.135.000	100	170.945.000	100	173.545.000	100	175.100.000	100	176.900.000	100	932.942.200	Kecamatan Padang Ulak Tanding
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	70	85	50.356.000	85	64.182.000	85	84.800.000	85	65.200.000	85	65.550.000	85	65.700.000	90	395.788.000	
Program Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dukungan peningkatan Pembangunan di Kecamatan	70	85	120.326.800	85	145.753.000	85	172.208.600	85	174.000.000	85	174.200.000	85	174.500.000	90	960.988.400	
TOTAL				270.000.000		347.070.000		427.953.600		412.745.000		414.850.000		417.100.000		2.289.718.600	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 4.01 -Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

SKPD : 4.01 . 4.01.22 - Kecamatan Kota Padang

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD			
	Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	169.588.000	100	177.883.000	100	191.800.000	100	192.400.000	100	206.400.000	100	216.800.000	100	1.154.871.000	Kecamatan Kotapadang
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	70	85	83.832.000	85	131.363.000	85	177.000.000	85	187.000.000	85	114.000.000	85	114.000.000	90	807.195.000	
Program Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dukungn peningkatan Pembangunan di Kecamatan	70	85	46.580.000	85	42.740.000	85	60.000.000	85	80.000.000	85	120.000.000	85	150.000.000	90	499.320.000	
TOTAL				300.000.000		351.986.000		428.800.000		459.400.000		440.400.000		480.800.000		2.461.386.000	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 4.01 -Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

SKPD : 4.01 . 4.01.13 - Kecamatan Bermani Ulu

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
	Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	95.063.000	100	109.859.000	100	145.610.300	100	160.170.600	100	176.187.100	100	193.804.450	100	880.694.450	Kecamatan Bermani Ulu
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	70	85	36.480.000	85	40.250.000	85	64.275.000	85	48.702.500	85	53.572.500	85	58.929.750	90	302.209.750	
Program Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dukungan peningkatan Pembangunan di Kecamatan	70	85	118.457.000	85	159.127.000	85	175.039.700	85	192.533.000	85	211.786.300	85	232.964.900	90	1.089.907.900	
TOTAL				250.000.000		309.236.000		384.925.000		401.406.100		441.545.900		485.699.100		2.272.812.100	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 4.01 -Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

SKPD : 4.01 . 4.01.09 - Kecamatan Curup Utara

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD			
	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	95.620.000	100	154.957.000	100	185.355.000	100	200.830.000	100	238.286.000	100	257.783.000	100	1.132.831.000	Kecamatan Curup Utara	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	70	85	48.486.000	85	71.180.000	85	551.297.500	85	172.454.500	85	134.000.000	85	150.000.000	90	1.127.418.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	70	85	-	85	4.200.000	85	19.200.000	85	34.472.000	85	82.048.000	85	100.000.000	90	239.920.000		
Program Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dukungan peningkatan Pembangunan di Kecamatan	70	85	105.894.000	85	95.015.000	85	125.765.000	85	141.039.000	85	145.000.000	85	150.000.000	90	762.713.000		
TOTAL				250.000.000		325.352.000		881.617.500		548.795.500		599.334.000		657.783.000		3.262.882.000		

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 4.01 -Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
SKPD : 4.01 . 4.01.10 - Kecamatan Curup Timur

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	99.530.000	100	105.570.000	100	121.570.000	100	137.720.000	100	156.510.000	100	186.210.000	100	807.110.000	Kecamatan Curup Timur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	70	85	53.100.000	85	40.675.000	85	72.575.000	85	54.870.000	85	63.050.000	85	72.000.000	90	356.270.000	
Program Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dukungan peningkatan Pembangunan di Kecamatan	70	85	72.370.000	85	93.144.000	85	128.405.000	85	147.670.000	85	169.670.000	85	194.670.000	90	805.929.000	
TOTAL				225.000.000		239.389.000		322.550.000		340.260.000		389.230.000		452.880.000		1.969.309.000	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 4.01 -Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
SKPD : 4.01 . 4.01.11 - Kecamatan Curup Selatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	100.211.000	100	147.551.000	100	187.200.000	100	207.800.000	100	222.830.000	100	237.400.000	100	1.102.992.000	Kecamatan Curup Selatan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	70	85	71.228.000	85	47.000.000	85	75.000.000	85	66.000.000	85	72.500.000	85	78.000.000	90	409.728.000	
Program Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dukungan peningkatan Pembangunan di Kecamatan	70	85	78.561.000	85	69.560.000	85	107.800.000	85	126.200.000	85	150.000.000	85	180.000.000	90	712.121.000	
TOTAL				250.000.000	264.111.000	370.000.000	400.000.000	445.330.000	495.400.000	2.224.841.000							

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 4.01 -Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

SKPD : 4.01 . 4.01.12 - Kecamatan Curup Tengah

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	122.742.000	100	147.603.000	100	206.280.000	100	243.000.000	100	279.720.000	100	316.440.000	100	1.315.785.000	Kecamatan Curup Tengah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	70	85	51.200.000	85	45.579.000	85	71.500.000	85	57.000.000	85	62.500.000	85	68.000.000	90	355.779.000	
Program Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dukungan peningkatan Pembangunan di Kecamatan	70	85	26.058.000	85	46.187.000	85	52.220.000	85	60.000.000	85	67.780.000	85	75.560.000	90	327.805.000	
TOTAL				200.000.000		239.369.000		330.000.000		360.000.000		410.000.000		460.000.000		1.999.369.000	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 4.01 -Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

SKPD : 4.01 . 4.01.18 - Kecamatan Binduriang

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD			
	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	128.870.000	100	136.400.500	100	238.286.550	100	273.279.533	100	327.935.439	100	409.919.299	100	1.514.691.320	Kecamatan Binduriang
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	70	85	31.680.000	85	38.157.000	85	140.320.000	85	155.352.000	85	179.454.800	85	216.105.760	90	761.069.560	
Program Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dukungan peningkatan Pembangunan di Kecamatan	70	85	64.450.000	85	51.442.500	85	80.000.000	85	92.000.000	85	110.400.000	85	138.000.000	90	536.292.500	
TOTAL				225.000.000		226.000.000		458.606.550		520.631.533		617.790.239		764.025.059		2.812.053.380	

BAB. VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 4.01 -Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

SKPD : 4.01 . 4.01.19 - Kecamatan Sindang Beliti Ulu

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
		Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	100.518.000	100	173.976.000	100	186.776.000	100	188.776.000	100	197.000.000	100	204.700.000	100	1.051.746.000	Kecamatan Sindang Beliti Ulu
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	70	85	64.150.000	85	109.030.000	85	166.000.000	85	149.000.000	85	161.000.000	85	162.000.000	90	811.180.000	
Program Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dukungan peningkatan Pembangunan di Kecamatan	70	85	110.332.000	85	51.167.000	85	53.000.000	85	55.000.000	85	60.000.000	85	60.000.000	90	389.499.000	
TOTAL				275.000.000		334.173.000		405.776.000		392.776.000		418.000.000		426.700.000		2.252.425.000	

BAB. VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 4.01 -Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

SKPD : 4.01 . 4.01.17 - Kecamatan Sindang Dataran

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
	Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	87.871.000	100	101.051.650	100	109.607.000	100	112.352.700	100	115.400.000	100	118.100.000	100	644.382.350	Kecamatan Sindang Dataran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	70	85	67.003.200	85	114.403.680	85	185.000.000	85	188.700.000	85	194.000.000	85	201.500.000	90	950.606.880	
Program Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dukungan peningkatan Pembangunan di Kecamatan	70	85	95.125.800	85	79.394.670	85	81.000.000	85	83.000.000	85	85.000.000	85	90.000.000	90	513.520.470	
TOTAL				250.000.000		294.850.000		375.607.000		384.052.700		394.400.000		409.600.000		2.108.509.700	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 4.01 -Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
SKPD : 4.01 . 4.01.20 - Kecamatan Sindang Beliti Ilir

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	104.770.000	100	125.512.100	100	138.062.000	100	151.855.000	100	167.050.000	100	183.750.000	100	870.999.100	Kecamatan Sindang Beliti Ilir
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	70	85	62.503.200	85	121.328.000	85	153.390.000	85	146.700.000	85	161.400.000	85	177.580.000	90	822.901.200	
Program Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dukungan peningkatan Pembangunan di Kecamatan	70	85	107.726.800	85	94.719.900	85	131.350.000	85	144.480.000	85	158.930.000	85	174.828.000	90	812.034.700	
TOTAL				275.000.000		341.560.000		422.802.000		443.035.000		487.380.000		536.158.000		2.505.935.000	

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Urusan : 4.01 -Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

SKPD : 4.01 . 4.01.14 - Kecamatan Bermani Ulu Raya

Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
		Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
	Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	90.740.000	100	119.974.000	100	184.800.000	100	185.800.000	100	186.800.000	100	187.800.000	100	955.914.000	Kecamatan Bermani Ulu Raya
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi baik	70	85	66.016.000	85	90.876.000	85	166.260.000	85	168.260.000	85	170.260.000	85	172.260.000	85	833.932.000	
Program Pembangunan	Persentase Ketersediaan Dukungan peningkatan Pembangunan di Kecamatan	70	85	93.244.000	85	94.389.000	85	131.000.000	85	143.000.000	85	155.000.000	85	167.000.000	85	783.633.000	
TOTAL				250.000.000		305.239.000		482.060.000		497.060.000		512.060.000		527.060.000		2.573.479.000	

Tabel 8.4
KESELARASAN INDIKASI LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL DI DAERAH

RPJMD Tahun 2016-2021
Kabupaten : Rejang Lebong
Provinsi : Bengkulu

No	Pusat Kegiatan Strategis	Kontribusi Provinsi				Keterkaitan dalam RTRW dan/atau RWP3K Provinsi	Kontribusi Kabupaten/Kota				Keterkaitan dalam RTRW dan/atau RWP3K Kabupaten/Kota
		Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung			Kegiatan Prioritas		Kegiatan Pendukung		
		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi		Nama Kegiatan	Lokasi	Nama Kegiatan	Lokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengembangan KA Bengkulu-Lubuk Linggau	Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Bengkulu		Dukungan Peningkatan Kualitas UPTD Perkeretaapian		Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu., Pasal 13 Suhubungan dengan (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi perkeretaapian dan Pasal 15 tentang pengembangan jalur kereta api baru	Peningkatan Sarana dan Prasarana				Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu,
		Study Kelayakan Pembangunan Perkeretaapian Provinsi Bengkulu		Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Perkeretaapian Provinsi Bengkulu			Program Pendidikan Menengah				
		Penyusunan DED Pembangunan Perkeretaapian Provinsi Bengkulu		-			Peningkatan Sarana dan Prasarana				
2	Pembangunan KA Pulau Baai – Muara Enim	-		-			Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				
3	Pembangunan Jalan Bengkulu-Kepahyang-Curup-Lubuk Linggau	-		-			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Tanaman Perkebunan)				
4	Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota										
5				- Pengawasan Rehabilitasi / Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi		Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu, Pasal 27 Strategi pengembangan prasarana irigasi mengenai pengembangan jaringan irigasi diutamakan untuk mengairi areal pertanian potensial yang antara lain wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Selatan;	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya				

6		Pembangunan Unit Sekolah Unggulan	10 kab/kota			Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu, Pasal 27 Strategi pengembangan prasarana irigasi mengenai pengembangan jaringan irigasi diutamakan untuk mengairi areal pertanian potensial yang antara lain wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Selatan;	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH				
7	Kesiapsiagaan pendidikan dalam kebencanaan	Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana bagi siswa/I SD s/d SMA di Daerah rawan Bencana		Workshop dan TTX Penanggulangan Bencana (Banjir, lonsor, gempa, tsunami dan kebakaran hutan)		Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu, Pasal 56 ayat 10 point e peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai kebencanaan, pembentukan forum kebencanaan, simulasi kebencanaan, pembentukan desa siaga bencana, serta sekolah siaga bencana yang terorganisir dengan baik	1) Program pengurangan risiko bencana;2) Program peningkatan kualitas SDM dan kesiapsiagaan tanggap darurat;				
8		Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengurangan risiko bencana		Pengelolaan Manajemen Oprasional PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasional)							
9	Distribusi guru	Pokja Pemetaan dan Pemerataan Guru SMA/SMK	10 Kab/Kota	-		-	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan				
10	Renovasi taman budaya untuk pengembangan sarpras	Ravitalisasi Taman Budaya Bengkulu		-		Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu, Pasal 3 ayat 2 point a.4 yakni melestarikan situs warisan budaya bangsa	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu,



Tahun 2016-2021 mempunyai tujuan memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD yang diinginkan dilihat pencapaian indikator *outcome* prioritas pembangunan daerah setiap tahun.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, penentuan capaian indikator tiap tahunnya meliputi; pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. Atau dengan kata lain dapat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti : Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten.

Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator yang diukur antara lain: laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dapat di lihat pada Tabel 9.1

TABEL 9.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT								
1	Pertumbuhan PDRB (%)	5,48	5,58-5,88	5,83-6,13	6,08-6,38	6,33-6,63	6,58-6,88	6,83-7,13	6,83-7,13
2	Laju inflasi provinsi (%)	3,25	5,93-4,93	5,79-4,79	5,60-4,60	5,36-4,36	5,07-4,07	4,75-3,75	4,75-3,75
3	IPM	67,51	66,78-69,62	67,53-70,37	68,34-71,28	69,20-72,04	70,12-72,96	71,10-73,94	71,10-73,94
4	Angka Harapan Hidup	67,52	67,15-68,15	67,31-68,31	67,50-68,50	67,71-68,71	67,96-68,96	68,23-69,23	68,23-69,23
5	Laju Investasi	11,05	9,64-12,64	9,73-12,73	9,82-12,82	9,91-12,91	10,00-13,00	10,09-13,09	10,09-13,09
6	Nilai Tukar Petani - NTP Provinsi	93,90	92,80-97,80	100,20-96,66	96,66-101,66	97,11-102,11	98,59-103,59	101,14-106,14	101,14-106,14
7	Persentase Kemiskinan (%) *)	18,03	17,81	17,81-17,41	17,35-16,95	16,80-16,40	16,40-16,00	16,00-15,60	16,00-15,60
8	Tingkat Pengangguran (%)	4,40	4,51-4,31	4,43-4,23	4,20-4,00	3,89-3,69	3,75-3,55	3,57-3,37	3,57-3,37
9	Nilai PDRB atas dasar harga konstan (Rp T)	5.011.892	4.299.163- 6.299.163	4.616.104- 6.616.104	4.965.997- 6.965.997	5.352.555- 7.352.555	5.779.990- 7.779.990	6.253.081-8.253.081	6.253.081-8.253.081
10	Nilai PDRB atas dasar harga Berlaku (Rp T)	6.599.940	6.349.606- 8.349.606	7.195.980- 9.195.980	8.152.708- 10.152.708	9.235.508- 11.235.508	10.462.500- 12.462.500	11.854.603-13.854.603	11.854.603-13.854.603
11	Angka partisipasi murni (APM) (%) PAUD	50	55	60	65	70	75	80	80
12	Angka partisipasi murni (APM) (%) SD	98,75	99	99,20	99,35	99,55	99,65	100,00	100,00
13	Angka partisipasi murni (APM) (%) SLTP	95,04	96,5	96,80	96,90	97,05	97,25	100	100
14	Angka partisipasi murni (APM) (%) SMA/SMK/MA	83,28	84,56	85,56	86,56	87,56	88,56	89,56	89,56
15	Persentase Guru SD yang berpendidikan Minimal S1 (%)	70	73	76	79	82	85	88	88
16	Persentase Guru SD bersertifikasi (%)	70	72	76	79	82	86	90	90
17	Persentase Guru SLTP yang berpendidikan Minimal S1 (%)	90	92	94	96	98	100	100	100
18	Persentase Guru SLTP bersertifikasi (%)	70	75	79	83	87	92	95	95
19	Persentase Guru SMA/SMK/MA bersertifikasi (%)	47	65	75	82	87	91	95	95
20	Persentase SD yang ter-akreditasi	91%	92%	93%	94%	95%	96%	97%	97%
21	Persentase SLTP yang ter-akreditasi	77%	81%	87%	91%	93%	96%	97%	97%
22	Persentase SMA/SMK/MA yang ter-akreditasi	90	92	93	94	95	96	97	97
23	Persentase Kompetensi Kejurusan SMK yang ter-akreditasi	91	91 - 93	93 - 95	95 - 97	97 - 99	99 - 100	99 - 100	99 - 100
24	Jumlah SMK berbasis potensi unggulan daerah yang dibangun	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	54	52	50	48	46	44	40	40
26	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	147	126	105	84	63	42	21	21

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	% Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	9,2	9,2	9,0	8,8	8,6	8,4	8,0	8,0
28	% Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak Baduta (Bawah dua tahun)	34,2	34,2	33,6	32,8	32,0	31,2	30	30
29	Angka Kejadian Malaria (API) per 1.000 penduduk	0,03%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%
30	Prevalensi HIV	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%
30	Angka penemuan kasus TB (CDR)	46	>55	>60	>65	>70	>75	>85	>85
	% Desa mencapai UCI (Universal Child Immunisation)	83	85	85	88	90	100	100	100
31	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap	7	0	2	2	2	2	15	15
32	Jumlah kecamatan yang belum memiliki puskesmas	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Jumlah desa/kelurahan yang sarana kesehatannya perlu direvitalisasi	20	20	15	10	5	0	0	0
34	Jumlah desa/kelurahan yang belum memiliki sarana kesehatan (Pustu/Poskesdes)	21	21	16	11	6	0	0	0
35	Jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan gratis (Jamkesda)	15.000	26.547	66.368	92.915	106.189	119.462	132.736	132.736
36	Angka buta aksara (%)	4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5
37	Usia Harapan Hidup Perempuan	69,23	69,25	69,50	69,75	70,00	70,25	70,25	70,25
38	Indeks pembangunan gender (IPG)	91,22	91,23-91,72	91,73-92,22	92,23-92,72	92,73-93,22	93,23-93,72	93,73-94,22	93,73-94,22
39	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,18	70,18-70,58	70,58-70,98	70,98-71,38	71,38-71,78	71,78-72,18	72,18-72,58	72,18-72,58
40	Prosentase perempuan yang duduk di Legislatif (%)	16,67	21,67	26,67	31,67	36,67	36,67	36,67	36,67
41	Prosentase perempuan yang duduk di jabatan Publik (%)	52,08	52,08	52,38	52,58	52,78	53,08	53,08	53,08
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Nilai Evaluasi SAKIP	0	C	C	B	B	A	A	A
2	Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC	80	84	88	92	96	100	100	100
3	Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	C	C	Cc	Cc	B	B	B
5	Persentase SKPD Kabupaten yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%)	12	27	40	55	71	85	85	85

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
6	Jumlah ASN yang mengikuti :								
	a. Spesialis kedokteran	17	15	12	9	6	3	0	0
	b. S2	40	40	32	24	16	8	0	0
	c. S3	46	45	36	27	18	9	0	0
7	Persentase kesesuaian jumlah program antara:								
	Persentase jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	93,75	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	93,75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase keselarasan RKPD dengan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Desa yang belum memiliki SD	1	0	0	1	0	0	0	0
9	Jumlah Kecamatan yang belum memiliki minimal 2 SLTP	1	0	0	0	1	0	0	0
10	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	10.855	13.026	15.197	17.368	19.539	21.710	21.710	21.710
11	Jumlah Desa yang belum memiliki Sarana Kesehatan	41	0	5	5	5	6	21	21
12	Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan tipenya dari B ke A	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jumlah rumah sakit di yang ditingkatkan tipenya dari C ke B	C	C	C	B	B	B	B	B
14	Jumlah rumah sakit di yang ditingkatkan tipenya dari D ke C	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jumlah dokter spesialis	14	14	17	19	21	23	25	25
16	Jumlah desa yang belum memliki bidan desa	44	0	10	10	12	12	0	0
17	Penurunan <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,13	2,13-2,12	2,12-2,10	2,10-2,09	2,09-2,07	2,07-2,06	2,07-2,06	2,07-2,06
18	Persentase kesertaan ber-KB Cara Modern								
19	Persentase penurunan remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan								
20	Persentase pemahaman remaja tentang kesehatan Reproduksi Remaja (GENRE)								
21	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0,040	0,040	0,032	0,032	0,019	0,019	0,019	0,019
22	Jumlah perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	32	5	5	5	5	5	5	5
23	Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani	63	63	64	65	66	67	67	67
24	Rata-rata lama penerbitan surat perizinan investasi (hari)	6	5	5	4	4	3	3	3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
25	Rata-rata lama penerbitan surat perizinan dan non perizinan (hari)	6	6	5	4	4	3	3	3
26	Persentase pejabat struktural Kabupaten Rejang Lebong yang telah mengikuti diklat kepemimpinan								
	Eselon II	11,50	11,50	17,14	22,85	28,57	34,28	34,28	34,28
	Eselon III	41,06	42,38	49,01	55,63	62,25	68,87	68,87	68,87
	Eselon IV	38,35	40,00	44,12	48,25	52,37	56,49	56,49	56,49
27	Persentase ASN Kabupaten yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional	9,35	9,35	18,7	32,74	46,77	56,13	56,13	56,13
28	Persentase penempatan ASN pemerintah kabupaten berdasarkan kualifikasi pendidikan (%)	10	25	40	55	70	85	85	85
29	Jumlah kasus dan temuan	790	740	694	632	566	477	417	417
30	Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan	38%	40%	45%	50%	60%	65%	70%	70%
31	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan (Rp M)	110,6	110,6-120	120-130	130-140	140-150	150-160	150-160	150-160
32	Luas hutan kemasyarakatan yang dikelola (Ha)	1823	1823-2123	2123-2423	2423-2723	2723-3023	3023-3323	3323-3623	3323-3623
33	Jumlah jenis industri hasil hutan yang dikembangkan	1	0	1	1	1	1	5	5
34	Cetak sawah baru (ha)	300	500	500	550	570	600	500	500
35	Persentase desa yang belum teraliri listrik	90	93	96	99	100	100	100	100
36	Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m)	25.000	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000	29.000
37	Panjang jalan usaha Tani yang direhabilitasi (M)	6.250	6.500	6.750	6.875	7.000	7.125	7.250	7.250
38	Panjang jalan sentra produksi yang di bangun (m)	6.750	7.000	7.250	7.375	7.500	7.625	7.750	7.750
39	Panjang Jalan sentra Produksi yang ditingkatkan kualitasnya (M)	0	500	500	400	500	600	2.500	5.000
40	Luas Jaringan irigasi usaha tani yang dibangun (Ha)	2.590	3.213	3.848	4.486	5.096	5.706	5.706	5.706
41	Persentase jaringan irigasi wwenang kabupaten dalam kondisi baik (%)	31,40	38,96	46,66	54,40	61,80	69,20	69,20	69,20
42	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang (%)	55,49	59,20	63,01	66,92	70,93	75,04	75,04	75,04
43	Persentase rumah tangga berakses air bersih (%)	32,67	37,67	42,67	47,67	52,67	57,67	57,67	57,67
44	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	24,01	29,01	34,01	34,01	39,01	39,01	39,01	39,01

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
45	Jumlah Desa/Kelurahan Mandiri Benih yang dibangun	6	3	2	2	3	1	7	7
46	Jumlah Desa/Kawasan Mandiri Pangan yang dibina/dikembangkan	6	6	6	6	6	6	6	6
47	Jumlah penumbuhan desa mandiri pangan	36	30	24	18	12	6	0	0
48	Jumlah gapoktan untuk pengembangan packaging beras	17	16	14	11	8	4	0	0
49	Produksi telur (ton)	2.002	2.106	2.216	2.331	2.452	2.580	2.580	2.580
50	Jumlah Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kelompok	9	10	11	12	14	14	15	15
51	Jumlah unit pengolahan hasil ternak yang direvitalisasi (Unit)	6	0	2	2	2	2	2	2
52	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.278	3.507	3.753	4.016	4.297	4.598	4.598	4.598
53	Persentasi Tingkat hunian hotel	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Rata-rata lama tinggal (hari)	12	14	17	20	24	28	28	28
55	Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang)								
56	Jumlah Wisatawan Nusantara (per tahun)	1.360	1.497	1.646	1.811	1.992	2.191	2.250	2.250
57	Jumlah lokasi wisata yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata nasional (DPN)	4	0	1	0	0	0	1	1
58	Jumlah Unit Pengolahan hasil perikanan	442	442-500	500-550	550-600	600-650	650-700	650-700	650-700
59	Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki								
	SD	98,65	98,69	98,73	98,77	98,81	98,85	98,89	98,89
	SLTP	74,43	75,26	76,05	76,82	77,57	78,29	78,99	78,99
	SLTA	62,58	63,78	64,95	66,08	67,17	68,23	69,25	69,25
60	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
61	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	84	84-80	80-76	76-72	72-68	68-64	64-60	64-60
62	Jumlah anak bermasalah yang dilayani dan dilindungi (orang)	50	60	70	80	90	100	100	100
63	Indeks pengendalian pencemaran Air (%)	56	56	56	56	56,2	56,4	56,8	56,8
64	Indeks pengendalian pencemaran Udara	85	85	85	85	85	85	85	85
65	Persentase pengelolaan sampah	74	74-79	79-84	84-89	89-94	94-100	100	100
66	Jumlah TPS	226	226-256	256-356	356-456	456-556	556-656	556-656	556-656
67	Persentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi)	2	2,56	5	8	11	14	15,38	15,38
68	Persentase sekolah aman bencana (%)	0	12	12	12	12	12	60	60
69	Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (kelompok)	0	0	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
70	Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha tingkat Kabupaten	0	0	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	240 Orang	240 Orang
71	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan pengetahuan terhadap penyalahgunaan narkoba	0	300	1300	1300	1300	1300	5500	10700
72	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	0	150	150	150	150	150	750	1500
73	Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha	0	150	150	150	150	150	750	1500
74	Jumlah BLK Baru yang dibangun	0	1	1	1	1	1	5	5
75	Jumlah BUMDES yang difasilitasi dalam pembentukan dan pengembangannya	122	101	41	0	0	0	0	0
76	Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	122	122	244	244	244	244	244	244
77	Jumlah Kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK)	50	0	150	250	250	350	1.000	1.000
78	Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab dan dilayani (Orang)	145	250	350	450	500	550	2.100	2.100
79	Jumlah Korban bencana alam, sosial dan keluarga miskin yang dilindungi	37787	34624	35153	35203	35253	35303	51536	51536
80	Jumlah KUKM yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan teknis	4552	3970	3115	2050	1400	700	0	0
81	Jumlah Koperasi yang di revitalisasi	52	10	5	5	15	17	52	52
82	Jumlah Pasar Tradisional yang di revitalisasi	4	1	7	2	1	2	13	13
83	Jumlah KUMKM yang mendapat bantuan peralatan	2	0	5	5	10	5	25	25
84	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani secara elektronik	0	0	60	80	100	100	100	100
85	Jumlah aplikasi elektronik yang dikembangkan	5	5	7	7	7	7	7	7
86	Persentase Jangkauan daerah terakses infrastruktur telematika	0-9	10-19	20-39	40-64	65-89	90-100	100	100
87	Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten yang bermasalah terhadap hukum dan pelanggaran kasus disiplin	10	8	5	3	2	0	0	0
88	Persentase penduduk yang telah memiliki KTP	78,86	83,42	87,66	92,27	95,22	97,18	99	99

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
89	Persentase keluarga yang memiliki kartu keluarga	75,81	82,8	88,52	91,63	95,49	97,51	99	99
90	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	0	62	70	78	86	90,50	95,50	95,50
C	ASPEK DAYA SAING								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di perizinan pelayanan terpadu	98	98	98	99	99	100	100	100
2	Jumlah Unit Pelayanan Kerja penyelenggara pelayanan publik yang nilai IKM nya Baik (Unit)	10	12	14	16	18	20	20	20
3	Rasio Elektrifikasi	85,85%	85%-89.8%	89,8%-91.1%	91.1%-94,5%	94,5%-97,5%	97,5%-100%	97,5%-100%	97,5%-100%
4	Jumlah unit pelayanan publik yang patuh pada norma dan prosedur								
	1. Merah	65	40	30	20	15	10	0	0
	2. Kuning	38	53	53	43	33	28	23	23
	3. Hijau	20	30	40	65	75	85	100	100
5	Jumlah Kecamatan yang dikembangkan sentra industrinya (sentra)	2	2	2	4	4	5	5	5
6	Jumlah Kelompok Usaha Baru (KUB)/ Wirausaha Baru (WUB) yang dibangun	180	30	30	30	60	30	30	30
7	Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura (ton) :								
	a. padi	5.449	6.445	6.465	6.485	6.505	6.525	7.000	7.000
	b. Jagung	39.325	39.546	39.566	39.686	39.606	39.626	40.000	40.000
	c. Kedelai	1.678	2.453	2.473	2.493	2.513	2.533	2.600	2.600
	d. Ubi kayu	28.354	28.987	29.007	29.027	29.047	29.067	29.700	29.700
	e. Ubi jalar	22.588	22.998	23.018	23.038	23.058	23.078	23.100	23.100
	f. Kacang tanah	2.879	3.000	3.020	3.040	3.060	3.080	3.100	3.100
	g. Kacang hijau	457	541	561	581	601	621	650	650
	h. Sayuran								
	- Cabe Merah	26.719	26.944	27.169	27.394	27.619	27.844	28.000	28.000
	- Bawang Merah	56	281	506	731	956	1181	1200	1200
	- Kentang	8.284	8.509	8.734	8.959	9.184	9.409	9.750	9.750
	- Wortel	37.180	37.405	37.630	37.855	38.080	38.035	38.650	38.650
	- Kubis	81.983	82.208	82.433	82.658	82.883	83.108	83.250	83.250
	- Cabe rawit	2.713	2.938	3.163	3.388	3.613	3.838	4.000	4.000

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	j. Buah-buahan								
	- Jambu biji merah	250	309	368	427	486	545	600	600
	- Manggis	1.013	1.072	1.131	1.190	1.249	1.308	1.400	1.400
	- Jeruk	467	526	585	644	703	762	800	800
	- Alpukat	2.914	2.973	3.032	3.091	3.150	3.209	3.350	3.350
8	Jumlah Benih Tanaman Pangan (Ha)								
	- Padi	2.500	2.625	2.756	2.894	3.039	3.191	3.225	3.225
	-Jagung	1.000	1.050	1.103	1.158	1.216	1.276	1.330	1.330
	-Kedelai	1.500	1.575	1.654	1.736	1.823	1.914	2.000	2.000
	-Ubi Kayu	100	105	110	116	122	128	135	135
9	Jumlah Benih Holtikulturasi (Ha)								
	- Cabe Merah	27	40	42	44	45	49	53	53
	- Kentang	17	25	26	28	29	30	32	32
	- Wortel	40	42	44	46	49	51	53	53
10	Jumlah sentra produksi beras unggulan lokal	0	0	1	1	0	0	2	2
11	Produksi Perkebunan unggulan (ton)								
	a. Kelapa Sawit	466,00	475,00	485,00	485,15	495,05	495,50	495,50	495,50
	b.Karet	9.377	9.455	9.567	9.675	9.786	9.880	9.910	9.910
	c. Kopi	21.536	21.650	22.687	22.789	23.435	25.456	30.657	30.657
	d. Kakao	253.000	260.000	275.000	295.000		320.000	320.000	320.000
	e. Aren	1.487	1.600	1.750	1.900	2.150	2.350	2.350	2.350
	f. Lada	5.100	5.800	5.900	6.150	62.250	63.100	63.100	63.100
	g. Pala	1.250	1.500	1.650	1.850	2.050	2.350	2.350	2.350
12	Jumlah jenis komoditas industri hilir berbasis pertanian yang dikembangkan	9	1	2	1	1	1	6	11
13	Persentase luas tutupan lahan meningkat atau luas lahan kritis yang direhabilitasi (dalam kawasan dan diluar kawasan)	Penutupan Luas Lahan 20% Dalam Kawasan (HL) 400 Ha Diluar Kawasan (HR) 150 Ha	Penutupan Lahan Lahan 20%-23% Dalam Kawasan (HL) 400 Ha Diluar Kawasan (HR) 100 Ha	Penutupan Lahan Lahan 23%-26% Dalam Kawasan (HL)200 Ha Diluar Kawasan (HR) 200 Ha	Penutupan Lahan Lahan 26%-29% Dalam Kawasan (HL)100 Ha Diluar Kawasan (HR) 250 Ha	Penutupan Lahan Lahan 29%-32% Dalam Kawasan (HL)100 Ha Diluar Kawasan (HR) 250 Ha	Penutupan Lahan Lahan 32%-35% Dalam Kawasan (HL)100 Ha Diluar Kawasan (HR) 300 Ha	Penutupan Lahan Lahan 35%-38% Dalam Kawasan (HL) 150 Ha Diluar Kawasan (HR) 400Ha	Penutupan Lahan Lahan 35%-38% Dalam Kawasan (HL) 150 Ha Diluar Kawasan (HR) 400Ha
14	Produksi daging ternak (ton) :								
	a. Sapi	164,02	180,43	198,47	218,32	240,15	264,16	264,16	264,16
	b. Kambing/Domba	47,85	52,64	57,90	63,69	70,06	77,06	77,06	77,06
	c. Ungggas	352,81	388,09	426,90	469,59	516,55	568,20	568,20	568,20
	Susu (liter)	49.932	54.925	60.418	66.459	73.105	80.416	80.416	80.416



10.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat kebijakan umum, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program kerja SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021 bukan hanya merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mendapat legitimasi Peraturan Daerah dan menjadi instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan program pembangunan Kabupaten Rejang Lebong, tetapi juga merupakan pedoman bagi semua pemangku amanah yang terlibat dalam proses pembangunan daerah, artinya RPJMD merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat sekaligus dalam upaya pembangunan lima tahun ke depan. Komitmen yang terbangun dalam perencanaan berupa RPJMD ini sepatutnya dijadikan pegangan, patokan, ukuran dalam mengimplementasikan program pembangunan Kabupaten Rejang Lebong hingga tahun 2021.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021, maka seluruh pemangku amanah diharapkan mampu memahami substansi dokumen perencanaan ini dan menterjemahkannya secara kreatif dan inovatif tanpa keluar dari aturan yang ada. Bagi SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021 menjadi acuan utama untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) SKPD selama periode 2016-2021 serta dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD dan Renja SKPD digunakan sebagai bahan penyusunan APBD selama periode 2016-2021. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bahan dalam evaluasi dan pelaporan kinerja kepemimpinan daerah Kabupaten Rejang Lebong selama kurun waktu 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021 merupakan acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Implementasi RPJMD ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas program dan kegiatan, lintas instansi serta lintas pemerintahan dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong.

Terwujudnya masyarakat Rejang Lebong yang Cerdas, Sehat, Taqwa dan Sejahtera perlu didukung oleh : (1). komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih dan amanah; (2). konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3). kebijakan yang berpihak pada masyarakat; (4). partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku amanah secara aktif, kreatif dan positif. Selain itu penerapan tiga pilar prinsip *Good Governance* yaitu Tranparasi, Akuntabilitas dan Partisipasi dalam pelaksanaan berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi pembangunan tersebut harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pemangku amanah.

Selain itu untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2021 sebelum tersusunnya RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, maka RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 dapat digunakan dalam menyusun Rancangan RKPD Tahun 2022 dan Perubahan APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dengan mempedomani RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021 yang meliputi :

1. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 merupakan RPJMD ketiga yang disusun dalam kurun waktu pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025. Dengan demikian penyusunan RPJMD ini tetap berpedoman pada RPJPD, sehingga adanya keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran,

kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

2. Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha serta para pemangku amanah lainnya berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
3. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021 menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD 2016-2021 yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong
4. Unit satuan kerja vertikal setingkat, maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong serta berbagai komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewajiban berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyerasikan dan menjamin konsistensi terhadap RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong, seluruh jajaran pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kabupaten Rejang Lebong 2006-2025, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Rejang Lebong selama kurun waktu 2016-2021.

10.3. Penutup

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 adalah panduan bagi pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan mewujudkan program dan kegiatan pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari peran dan partisipasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pemangku kepentingan lainnya di daerah, dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program daerah.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 merupakan komitmen dan kehendak bersama dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka mewujudkan visi daerah yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Rejang Lebong Sehat, Cerdas, Taqwa dan Sejahtera”* yang selaras dengan visi RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 yaitu *“Terwujudnya Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Damai Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong”*.

